KUMPULAN ARTIKEL KORAN

Penulis

Dr. Muhammad Amir Arham, M.E.

Tahun 2009

Dampak Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

M. Amier Arham*

IIIII I IAMAMI UNG dan Mahasiswa Program S3

which was the substantif memiliki empat sasaran utama; manufacturi duri 20 persen menjadi 30 persen. Kebijakan III III III III III III III 10 persen. Penerapan pajak progresif juga In the High than untuk mendorong peningkatan PAD. Di dalam Pertama, menaikkan tarif pajak kendaraan In June balan bakar Kechan, tarif Bea Balik Nama Kendaraan mir adalah allat juat kendaraan bermotor, kepemilikan, usia mirihan pengendalian lalu lintas. Dari lima paket kebijakan tandarana bermotor, Selain untuk dari a parson menjadi maksimum 10 persen. Pajak jenis ini minhir kemacetan lalu lintas, sasaran ketiga yaitu manyarakat dengan adanya penurunan kemacetan, Kabijakan krompat adalah pemberlakuan pajak parkir manan kedua memperbaiki moda transportasi darat menginginkan daerah berperan optimal dalam Uhummya adalah nilai jual kendaraan bermotor, Immania DPR RI. Reformulasi UU PDRD sebagai mimi BBM. Ketiga, menaikkan tarif Pajak Bahan distributed untuk membeli kendaraan bermotor person, serta menerapkan pajak progresif. Dasar dibedakan untuk kendaraan pribadi, kendaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) illiakukan untuk meningkatkan PAD dengan meningkatkan PAD,

Jalam PAD, dalam UU PDRD juga dilakukan reformulasi bulam panal 29 ditentukan tarif pajak rokok ditetapkan 10 plam panal 29 ditentukan ketentuan dalam UU PDRD akan panal panal panduduk, semakin besar jumlah penduduk

dangkan hasil penerimaan pajak ini provinsi dan manalokanikan 50 persen untuk mendanai pelayanan hakam oleh aparat yang berwenang. Sementara yang terkait dan dangkan paling tinggi 35 persen, khasus untuk hiburan berupa dibanah albanah klub malam, karaoke, mandi uap, panti pijat dan dangkan paling tinggi 35 persen, khasus untuk hiburan berupa dibanah klub malam, karaoke, mandi uap, panti pijat dan dangat ditetapkan paling

tinggi 75 persen. Sedangkan hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan maksimal 10 persen. Ketentuan lain di dalam UU PDRD dan penerapannya molor tahun 2014 dibandingkan dengan tarif pajak daerah lainnya yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan kedua jenis pajak itu tercatat dalam APBN hanya sebagian kembali ke daerah, mulai tahun 2014 secara langsung akan dipungut oleh daerah.

energi fosil dapat ditekan sehingga bisa mengurangi impor BBM, sebab Indonesia optimis dengan target jangka panjang seperti disampaikan oleh Dirjen Migas sebesar 1,5 juta bph. Tapi usaha ini tidak gampang. Meskipun pemerintah tetap dapat dipungkiri pemerintah telah mengupayakan untuk menurunkan konsumsi BBM, sehingga tahun 2008 sedikit turun menjadi 1,6 juta bph, dan diharapkan tahun ini turun bawah I juta bph, konsumsi BBM Indonesia mencapai 1,84 juta bph. Meskipun tidak sebagai contoh pada tahun 2006 saat konsumsi BBM di negara-negara lain berada di terus dilakukan karena Indonesia termasuk negara yang boros mengkonsumsi BBM PDRD daerah turut memikul beban untuk menurunkan konsumsi BBM. Hanya saja sudah termasuk negara net imported BBM. Dengan adanya kebijakan reformulasi UU Jepang dan Jerman di 2006. Dengan adanya gerakan hemat BBM, maka penggunaan bawah 1 juta bph. Di tahun 2025 di bawah 1 juta barel atau setidaknya sama dengan Melihat sasaran pertama kebijakan di atas, menurunkan konsumsi BBM memang perlu ini nampaknya sudah tidak menggema lagi sehingga dikuatirkan konsumsi BBM tetap untuk mendorong penggunaan energi alternatif seperti penggunaan biodiesel. Program kebijakan penurunan konsumsi ini sejatinya dibarengi dengan kebijakan yang simultan Departemen ESDM, bahwa tahun 2025 pemerintah menargetkan konsumsi BBM di

Sedangkan berkaitan dengan kemacetan lalu lintas terutama di ibukota bukan merupakan problem yang tidak berdiri sendiri, tapi banyak hal yang terkait di dalarnnya terutama masalah kebijakan transportasi di tanah air. Bila menengok kebelakang pertumbuhan kendaraan bermotor merupakan dampak langsung dari kemajuan ekonomi masyarakat, selaras dengan itu kepemilikan kendaraan pribadi terus naik. Pada kondisi ini, kemudian jumlah kendaraan

yang beredar di jalan makin bertambah, sementara volume jalan tidak tumbuh secara signifikan. Misalkan perbandingan pertumbuhan kendaraan di Jakarta sebesar 12,2 persen sementara pertambahan volume jalan hanya tumbuh sekitar 0,01 persen. Jadi berapapun pertambahan pembangunan arus jalan di Jakarta tidak akan mampu mengikuti laju pertumbuhan kendaraan.

Selain itu, kemacetan lalu lintas di ibukota tidak dapat dipisahkan dari dampak kebijakan transportasi yang bersifat kolutif, banyak ahli transportasi merekomendasikan serta melihat pengalaman di negara-negara yang sukses mengatasi kemacetan lalu lintas alternatif yang paling baik, yakni mengembangkan mass transportation, seperti monorel, kereta api komuter dan kereta api dalam kota. Namun yang terjadi jenis moda transportasi ini diabaikan, bahkan beberapa jatur kereta api di ibukota telah dihapus, justru memberikan ruang yang tebih lebar pada pengadaan busbus AKAP milik beberapa konglomerat. Pada akhirnya kemacetan sudah menjadi pemaandangan keseharian, Kompas pernah merilis kerugian lebih dari Rp 12,8 triliun

per tahun (nilai waktu, pemborosan bahan bakar, dan biaya kesehat kemacetan di Jakarta.

Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membatasi ke kendaraan pribadi yang dianggap sebagai penyumbang tertinggi kemacet penerapan three in one tapi program ini tidak berjalan efektif karens perjokian; program waterway di Jakarta dengan memanfaatkan Kali Cili mandek, sungai ini makin dangkal dan dipenuhi sampah; pembangunan mon macet karena tidak didukung oleh pendanaan yang memadai.

Kini pemerintah mencoba mengatasi kemacetan dan kepemilikan kendara dengan menerapkan pajak progresif dengan mengubah UU Pajak Daerah da Daerah. Hanya saja pelaku industri otomotif tidak setuju dengan didu Departemen Perindustrian, juga pihak kepolisian sendiri. Menurut pel industri otomotif, pengenaan pajak progresif kendaraan akan memperlamt otomotif (mobil), padahal industri otomotif penopang utama pertumbuhan selain sektor pertanian dan komunikasi.

Khusus berkaitan dengan peningkatan PAD, pemerintah sendiri memp reformulasi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) mampu me penerimaan asli daerah (PAD) sekitar 41 persen – 83 persen untuk provi persen untuk kabupaten/kota. Dapat dibayangkan dari hitung-hitung pemerintah, jika bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar bermotor sebesar 50 persen, potensi peningkatan PAD sebesar 42 persen att triliun. Jika tarif rata-rata sejumlah pajak tersebut dinaikkan 100 persen, mu PAD mencapai 83 persen atau mencapai Rp 90,96 triliun.

Asumsi saya dari empat sasaran reformulasi UU PDRD, paling mungbasaran peningkatan PAD, sementaran sasaran lain sulit diwujudkan. Sec keinginan mendorong daerah ikut serta menghemat BBM mengurangi kendaraan pribadi, tapi jumlah kendaraan pribadi yang paling banyak justr pusat-pusat kota yang membutuhkan mobilitas tinggi. Sementara da transportasi massa yang nyaman, aman, bersih dan tepat waktu tidak tercipi sasaran itu sulit tercapai. Konsumsi BBM dipastikan penurunannya tidak karena pemilikan kendaraan pribadi tidak berubah.

UU PDRD ini secara substansi kelihatan ideal, terutama untuk mendonong I kapasitas fiskal daerah. Target jangka panjangnya daerah makin i ketergantungannya terhadap transfer dari pusat (seperti DAU). Namun kala UU PDRD yang akan diterapkan setelah masing-masing daerah kabupaten/kota) membuat Perda sebagai penjabaran UU, saya mendu berjalan optimal. Apalagi masing-masing daerah memiliki kapasitas (revenue) perekonomian yang berbeda. UU PDRD ini hanya menguntungk dan daerah perkotaan, sebab pajak kendaraan ditangani oleh provinsi, seme hiburan dan turunannya lebih menguntungkan kota-kota yang sudah mapan asumsinya daerah tetap akan bergantung banyak terhadap DAU. Dalam Yustika (Investor Daily, 18/8/2009) UU PDRD kemungkinan akan memasalah alokasi, tapi problem keterbatasan anggaran tetap muncul.

Implikasi Penerapan ASEAN-China FTA 2010

haliwa perdagangan bebas meningkatkan komparatif dan ekonomi skala besar, bebas memungkinkan negara bebas memungkinkan negara bebas merusak industri lokal, dan merusak industri lokal, dan mengebabkan perdagangan muju kurena ia menyebabkan pekerjaan bah dan juga menimbulkan perlombaan wandar hidup dan keamanan yang lebih

mulu kut di dalamnya akan tetapi negara mulu kut di dalamnya akan tetapi negara mulu kut di dalamnya akan tetapi negara mulu kut. Dalam konsep ekonomi internasional, untuk tingkat regional dikenal Free Trade the multilateral (didalamnya untuk tingkat regional dikenal Free Trade (berufat bilateral). Sementara dilihat dari untuk dan konetary Union.

dikemukakan ini, Indonesia sebagai negara ulut, menjadi anggota WTO, APEC, FTA yang belawa leban. Dengan penuh keyakinan, pemerintah AHC, dulam konsep awalnya akan diberlakukan AHCAN sudah berlaku dan ASEAN-China—

A Free Area Trade adalah suatu bentuk kerjasama produk-produk orisinahyan negara-negara masuk. Dengan kata lain musuk atau bebas bea masuk. Dengan kata lain musuk menjadi 0 %, sedangkan masing-masing undiri-sendiri. Contohnya AFTA (ASEAN Free dari sekarang pemberlakukan FTA ASEAN-China

hullementani AC- FTA bagi Indonesia? Secara teoritis udah dikemukakan di atas, tapi dampaknya yang nugatif sangat banyak Karena itu banyak pihak lemetuluh terlalu nekat menyetujui AC-FTA. Dalam andiri, kita tidak terlalu kuatir implementasi FTA muluh produk negara ASEAN lain seperti Vietnam untuk negara ASEAN lain seperti Vietnam untuk hungat kompetitif, akan tetapi dengan China akan yang aterlus. Dalam kenyataannya implementasi tutuan China Jauh sebelumnya, produk-produk China sudah

Moh. Amier Arham* * Peneliti LP2EB FEB UNG, Mahasiswa Program S3 Ilmu Ekonomi Unpad Bandung

Apalagi jika sudah diberlakukan, maka produk China akan memukul produk lokal Indonesia. Lalu, apa salahnya dengan produk China? Di sinilah persoalannya. Sudah bukan rahasia lagi, selama ini mutu produk China yang membanjiri pasar kita tidak jauh berbeda dengan produk dalam negeri, bahkan lebih buruk. Produk China juga masih diragukan keamanamya bagi kesehatan. Selain itu, barang dari 'Negeri Tirai Bambu' itu kelewat murah sehingga produk dalam negeri kalah bersaing dan akhirnya mati. Saat ini hampir semua jenis produk China melenggang bebas masuk ke negeri ini. Padahal, pada era 1970-an produk China yang dimpor hanya produk yang tidak bisa dibuat di Indonesia (Media Indonesia, 22/12/2009).

Ada beberapa dampak yang akan timbul dengan AC-FTA, jika dilihat dari transaksi perdagangan, defisit perdagangan China selama lima tahun dengan Indonesia membengkak, dan Indonesia merugi puluhan triliun dengan China. Indonesia hanya mengalami surplus perdagangan dengan China pada 2003. Tahun-tahun berikutnya, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia-China menjadi jomplang dan Indonesia mengalami defisit US\$3,61 milyar pada tahun 2008. Perdagangan di sektor manufaktur mencapai defisit terbesar yakni US\$7,61 miliar pada tahun 2008 (inilah.com).

Dengan demikian, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China amat jelas bakal lebih menguntungkan China daripada negara-negara ASEAN, dan sangat jelas terutama sangat merugikan Indonesia. Data resmi dari Badan Pusat Statistik menunjukkan saat ini saja ekspor kita ke China hanya 5,91%, sedangkan impornya mencapai 8,55%. Kelak, ketika perdagangan bebas sudah dijalankan, diprediksi ekspor kita hanya naik 2,29% menjadi 8,20%. Tapi, sebaliknya impor kita dari China bakal naik 2,81% menjadi 11,37%.

Menghadapi pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas (FTA) ASEAN-China pada 2010, Indonesia sepertinya harus siap-siap kehilangan uang senilai Rp15 triliun. Uang ini adalah jumlah pemasukan yang biasanya diterima Kantor Bea dan Cukai tiap tahunnya menurut Dirjen Bea dan Cukai Depkeu. Kemudian, terjadi ketimpangan besar jika FTA diimplementasikan, karena terhitung 1 Januari 2010, bea masuk (BM) 8,097 pos tarif dari 17 sektor industri akan dibebaskan menjadi 0 %. Kesepakatan pembebasan bea masuk impor justru akan memperlemah posisi UMKM sebagai tulang punggung industri di Indonesi, selain tu akan mengancam sebelas sektor industri. Sebelas sektor industri tersebut diantaranya industri tekstil, makanan dan minuman, alat dan hasil

pertanian, petrokimia, sintetik fiber, besi dan baja dan manufakti Jika kelompok industri ini kolaps maka akan menciptakan ledaki (Ragillia, 2009) mengemukakan Industri plastik, misalnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 88.000 orang. Hasil risekonomi Indonesia bahkan menyebutkan tujuh sektor industri bekonomi Indonesia bahkan menyebutkan tujuh sektor industri behingga Rp35 triliun per tahun. Mereka terdiri dari petrokimia, tetekstil (TPT), alas kaki dan barang kulit, elektronik, kerami minuman, serta besi baja. Ketujuh industri itu akan kehilangan pecukup besar.

Kemudian industri baja nasional juga mengalami hal yang sama, kalang kabut karena diserbu baja buatan China. Betapa tidak? Di bea masuk pun, China dicurigai mampu menjual dengan harga di lain yang paling gampang adalah tekstil dan produk tekstil (Ti industri TPT di Tanah Air termehek-mehak gara-gara serbuan bu murahnya minta ampun.

Kekuatiran yang sama dikemukan ekonom dan Ketua Focus G Fiskal dan Moneter, Sri Adiningsih, kalau Indonesia tidak s keresahan sosial. Jangan sampai terjadi pengalaman seperti di dimana produk tekstil tiarap dan tidak bisa bersaing dengan dapat menimbulkan keresahan sosial. Efeknya semakin besar, jil korban adalah usaha padat karya yang menyerap banyak kesempa Kekuatiran penerapan AC-FTA bukan hanya dikemukakan pa society, dan ekonom akan tetapi pelaku usaha juga amat pesimis, sangat yakin produk nasional akan dilibas produk-produk asal Cl kompetitif, bila kesepakatan perdagangan bebas AC-FTA tetap obeberapa pandangan yang mengemuka bahwa pelaku usaha siap opaling cepat 2014, itupun ada beberapa persyaratan unt kelansungan dan daya saing usaha mereka.

Merespon keberatan dan keinginan pelaku usaha, pemerintah akar penundaan penerapan kebijakan Free Trade Agreement (FTA) te sektor usaha. Dari sisi pengambilan kebijakan, pemerintah s mempedulikan keberatan yang disampaikan berbagai pihak jauh h Idealnya kebijakan itu ditempuh berdasarkan assesement stakeholders. Keberatan yang disampaikan berbagai pihak bukat tapi dampaknya sudah terasa seperti yang sudah digambarkan e perdagangan Indonesia – China). Kalangan internal pemerintah awal berjalan sendiri-sendiri, keinginan Departemen Perinu menunda penerapan AC-FTA sudah disuarakan, tetap Departemen juga memiliki agenda sendiri terkait dengan AC-FTA. Saat melalui Departemen Perindustrian mengidentifikasi beberapa jeni diajukan revisi penundaan implementasi AC-FTA, diantaranya industri alas kaki dan kimia. Ini menandakan bahwa pemerinta konsisten dengan kebijakannya, kasamya menjilat ludah sendiri.

Malo, Rabu 26 Desember 2009

Regulasi Kebijakan Kelistrikan, Menghapus Monopolistik PLN (1)

M. Amier Arham* 14B dan Mh. Program Doktor Ilmu 1Konomi Unpad Bandung

hall bahgai barang mewah (luxurius goods) dalam mahallah, akan tetapi sudah menjadi barang normal (normal menjadi barang normal (normal menjadi) barang hallah menjadi barang seperti ini jika income kelompok menjadi kenaikan, permintaan terhadap barang tersebut hallah terus menjah, sementara supply daya, melambat. Hal ini berdampak terhadap terjadinya melambat, ladanya disparitas mengakibatkan hallah perusahaan barang (supply) jika telangkaan banyak perusahaan menjadi kelangkaan banyak perusahaan menjadi kelangka menjadi kelangka

m kondlul modern seperti ini apa kita akan kembali pada zaman mul penerangan paling menggunakan lilin atau lampu teplok with yang dihasilkan oleh PLN tidak ada subtitusinya. Beda hith patter monopoli sudah barang tentu menimbulkan biaya mwalinya tidak perlu terlalu canggih untuk menjelaskan, diamini public utility) karena itu perlu diurus sendiri oleh negara ili manyarakat dapat beralih menggunakan kayu bakar, atau min pada pembangkitan, sementara distribusi tetap dimonopoli Man Hak monopoli diberikan pada PLN karena salah satu alla hambatan (barrier to entry), hak monopoli PLN didasari in hahan bakar minyak, ada beberapa subtitusinya, jika harga Hairlk menyangkut hajat hidup orang banyak (dalam teori lalıı penyedin jasa kelistrikan tidak dapat masuk ke industri nun karena adanya struktur pasar monopoli dari PLN herbataa sementara pasar (konsumsi) potensinya sangat manyawakat (konsumen) mengalami beberapa kerugian, hamallual negara. Jika pun ada perusahaan jasa kelistrikan, Nementara listrik, apalagi sudah menjadi barang normal yang palut kita ajukan, apa hambatannya sehingga listrik Illia harganya tinggi, tidak ada pilihan konsumen, kalaupun

alanya atruktur monopoli, biaya sosial pasti muncul, kondisi ini alah pemerintah karena itu listrik diberikan subsidi, subsidinya

berupa TDL yang dinikmati konsumen berada di kisaran Rp630 per murah atau disebut dengan tarif dasar listrik (TDL). Selisih subsidi ke kepada produsen (PLN) agar mereka menjual listrik ke konsumen lebih PLN setidaknya dilihat dari biaya pokok produksi (BPP), selama ini BPP PLN bukan lagi perusahaan listrik negara tapi sudah menjadi perusahaan Gorontalo. Bahkan pemadaman listik sudah berskala massif dan tidak maksimal dimana-mana terjadi pemadaman listik, termasuk dimana-mana executive class, apalagi kantor pusatnya, apa yang salah? Fasilitas dan gaji karyawan PLN termasuk yang "gemuk", kantor PLN merugi. Muncul pertanyaan berikut, kok monopoli tapi merugi terus? PLN selalu menempati urutan pertama BUMN yang dikategorikan selalu Rp 60,43 triliun dari APBN. Dilihat dari prognosa keuangan setiap tahun, kWh. Sedangkan nilai total subsidi listrik tahun anggaran 2009 sebesar listrik berada di kisaran Rp1.300 per kWh, sementara itu harga jual lilin negara, karena kinerja PLN yang tidak optimal, lilin akhirnya jadi intensitas pemadaman makin sering. Muncul joke-joke dimasyarakat, Dampak lanjutan dari PLN yang terus merugi, pelayanannya menjadi

yang ditanggung konsumen (baca masyarakat), sekalipun kerap terjadi dibayar konsumen itu nyalanya, atau matinya listrik? Biaya sosial lain obat tiga kali sehari, pagi, siang dan malam terjadi pemadaman. Lalu ada dasar listrik sampai akhir tahun 2009 ini, dan subsidi yang diberikan melainkan karena kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif bergilir hampir seluruh wilayah bukan semata-mata kesalahan PT PLN, biaya pemeliharaan sebesar 30-40 persen. Terjadinya pemadaman direktur keuangan yang memotong anggaran biaya operasi, termasuk permasalahan PLN dan kelistrikan muncul karena adanya kebijakan sama dikemukakan oleh serikat pekerja PLN, menurut mereka bergilir, salah satunya karena biaya operasional yang minim, hal yang banyaknya, sementara infsrastruktur listrik sangat minim. Dari kalangan Percuma saja pemerintah ambisius ingin menarik investasi sebanyakdaya tarik investasi, yaitu ketersediaan pasokan listrik yang memadai. kegiatan perekonomian, sebab salah satu variabel penting untuk menjadi pemadaman listrik juga akan mengganggu kinerja industri nasional. alat-alat elektronik rumah tangga yang rusak. Dalam konteks lebih luas, pemadaman listrik, tapi biaya tagihan justru melonjak, belum lagi banyak juga joke yang menyegarkan, kalau mau bayar listrik di PLN, tanya yang internal PLN sendiri berulang kali menyampaikan alasan pemadaman Infrastruktur listrik yang minim tentu menjadi hambatan serius dalam laku. Dengan sering terjadi pemadaman disamakan dengan orang minum

pemerintah sangat terbatas. Jadi tidak mencukupi untuk bi dan investasi yang diperlukan PLN sesuai pertumbuhan listrik (Kompas Online, 11-12.2009). Jika itu alasannya, apa fakta di lapangan menunjukkan minat untuk berinvestasi perakta di lapangan menunjukkan minat untuk berinvestasi kelistrikan cukup tinggi, justru kendalanya lebih banyak da sendiri, karena mereka berfungsi sebagai regulator da sekaligus. Dalam aktifitas ekonomi, suatu lembaga selain mo merangkap peran, kecenderungannya yang muncul yaitu inefis

Pro Kontra Amandemen UU Ketenagalistrikan

Masalah kelangkaan listrik sudah dicoba diatasai oleh dengan diterbitkannya Undang-undang (UU) No. 22 Tahun tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU tersebut 2004. Alasan pemohon (serikat pekerja PLN) dikabulkan karena UU ini sarat dengan muatan alat kampanye ekonom menarik investor disektor ketenagalistrikan. MK berpendapat ini cenderung kurang melindungi kepentingan konsumen (r karena lebih kuat alasan ekonominya, suatu UU harus met UUD 1945. Masalah ekonomi acuannya pada pasal 33 diterjemahkan bahwa setiap komoditas yang menguasai lorang banyak harus dikuasai oleh negara. Alasan pemohon, 22 Tahun 2002 akan menjadikan produk listrik sebagai kom dapat dikompetisikan. Dampak yang timbul adalah akan tungkat kesejahteraan rakyat karena harga listrik menjadi lagi.

Karena itu kemudian pemerintah melakukan amand Karena itu kemudian pemerintah melakukan amand Ketenagalistrikan dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal lalu. UU Ketenagalistrikan yang baru memang masih "liberal", PLN bukan lagi sebagai Pemegang Kua Ketenagalistrikan (PKUK). Dalam UU tersebut pemer pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi regulasi ketenagalistrikan. Meskipun bukan lagi pemegang PKU BUMN, PLN tetap akan mendapatkan prioritas sebagai pe penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, namur tidak sanggup maka swasta akan mensuk dan PLN boleh me proses bisnis B to B untuk menyediakan listrik bagi day tertentu. Pemerintah berkeyakinan bahwa UU Kelistrikan tidak akan membebani masyarakat, justru akan membantu me elektrifikasi daerah-daerah yang kekurangan daya listrik. Bers

Regulasi Kebijakan Kelistrikan, Menghapus Monopolistik PLN (2)

ma danar regionalisasi tarif, asumsinya tarif regionalisasi akan manuh untuk mengurangi subsidi dan menyalurkan subsidi dan menyalurkan subsidi dan menyalurkan subsidi.

III ini mijimpun mereka UU yang sekarang secara substansi tidak ilih sedisi pekerja PLN, masalah kelistrikan harus ditangani satu mannya orang luar sebagai calon dirut cukup resistensi dari minimum opini termasuk menolak pergantian direksi PLN m hanilik dan permasalahan baru. Selain itu, ada kecenderungan Internal PLN Itu sendiri dengan disahkannya UU baru, maka illimitilim sumput distribusi), jika dipecah-pecah justru akan iiii Pimilii diberikan kewenangan lebih besar terutama dalam ilimin ilimintralisasi pengaturan penyediaan ketenagalistrikan. IIII lipi iubitansi penolaknnya juga kurang tegas, seperti mil dibingun oleh serikat pekerja PLN, dan tentu saja Hill yang sama dilakukan oleh serikat pekerja PLN mereka dud UU sebelumnya yang dibatalkan MK. Persepsi yang Harris akun mengalami kenaikan (mahal) karena akan pengamat masalah kelistrikan cenderung menolak UU

luulinya masih merupakan asumsi yang kemungkinan dualuulin benar. Tapi tergantung dari pelaksanaan dan juga
teorlitanya. Umumnya perusahaan yang terbiasa disusui
luulin dak itu pula disubsidi, hingga hari ini belum pernah
luuli (baca; profile) tentang PLN, yang ada kerugian terus
meroka monopolistik. Secara teoritik, sebagaimana
luulinan ini, praktek monopoli pasti akan selalu
luulinan ini, praktek monopoli pasti akan selalu
luulinya. Sekarang yang perlu kita tanyakan kepada yang
luulinya. Sekarang yang perlu kita tanyakan kepada yang
luuli yang tinggi, kurangnya daya saing (kompetisi),
menulinya. Sekarang yang perlu kita tanyakan tetap bertahan
luulinya buru, mau mereka apa? Apakah akan tetap bertahan
luuli bulu terbuku memberikan peran kepada pihak swasta dan
memakai kata cenderung sebab UU

terutama di daerah pedesaan jika PLN masih mampu. Itupun swasta masih melakukan mediasi antara PLN dan PTLU tetap mengalami jalan buntu murah (Rp. 505 kWh) harga /kWh yang ditawarkan oleh perusahaan minimal tahun, PLTU ini tidak optimal, sebab harga pembelian PLN dianggap terlalu cukup lelah menunggu izin operasional dari PLN. Setelah berjalan beberapa membangun PLTU, perusahaan ini telah berjalan beberapa tahun. Pada awal kendali PLN. Demikian halnya keterlibatan Pemda dan pemberlakukan tarif dititikberatkan pada pembangkitan, sementara distribusionalnya tetap dalam PLN dalam kegiatan bisnis listrik. Swasta "belum" dimungkinkan masuk ketenagalistrikan yang baru masih memberikan peran yang luas terhadap kerajaan sendiri, yang tidak mau patuh terhadap saran-saran pemerintah. bahkan sudah dibawa ke pemerintah pusat, tapi sepertinya PLN memiliki pembeliannya. Pemkot Palu dan Pemrov Sulteng sudah beberapa kali Rp. 550 kWh untuk tetap bisa survive, tapi PLN tetap keukeuh pada harga pengoperasiannya, para stakeholders (Pemkot Palu dan pemilik perusahaan) oleh Pemkot Palu dengan berupaya mendatangkan investor dari China untuk hingga saat ini terus mendapakan profite. Hal yang sama dicoba dilakukan Status PLN cabang kemudian dirombak menjadi anak perusahaan PLN yang pemadaman di kota itu, kemudian Pemkotnya berusaha menaikkan TDL. aturan pemerintah pusat (Kepres) tentang TDL, sebagai antisipasi seringnya regional ada yang menolak, sementara praktek ini sebetulnya sudah berjalan lama. Pemerintah Kota Tarakan sejak tahun 2001 sudah menerabas rigiditas

makin sedikit, sebaliknya jika menggunakan genset, maka subsidi akan terus saya beranggapan, jika daya dibeli dari swasta maka peluang manipulasi memakai genset ketimbang membeli daya dari PLTU. Tidak salah kemudian dibentuk membawa misi sosial bukan hanya orientasi profite, kenapa PLN berpikir tentang kesejahteraan masyarakat, karena memang BUMN sekitarnya ada usulan untuk membeli genset baru. Saya patut menduga, jika mengantisipasi pemadaman bergilir yang terus terjadi di Kota Palu dan terpenuhi secara minimal, akan tetapi yang saya tangkap justru memang PLN jalan, artinya biaya subsidi itu bisa "diatur" pengunaannya untuk kepentingan keberadaan PLTU di Palu tidak dioptimalkan, malahan cenderung "dirusak" mereka mengusulkan kepada Pemrov Sulteng agar membeli PLTU itu, kurang memberikan apresiasi terhadap keberadaan PLTU tersebut, justru Dari kapasitas terpasang PLTU Palu sebetulnya kebutuhan listrik dapat keberadaannya oleh PLN itu sendiri, atau justru kenapa PLN lebih suka kemudian PLN yang akan mengoperasikannya. Jika tidak, untuk

Pemadaman listrik cukup memprihatinkan, pelaku industri pun kerap mengeluh dengan kondisi ini. Program 10.000 mw yang sudah dibangun oleh pemerintah yang dulu dikomando oleh JK untuk sementara belum dapat

diharapkan mengatasi kelangkaan pasokan listrik, awalnya ditarg beroperasi tahun 2009 bergeser ke tahun 2010. Sementara p pasokan listrik dan energi jangka panjang belum ada blue print terutama pemanfaatan sumber energi (gas dan batu bara). Kec energi ini pasokan untuk pasar internasional lebih diprioritaskan pasar domestik. Hal yang sama program biofuel yang pernah oleh pemerintah yang bersumber dari tanaman pohon jarak, justra Anti klimaksnya muncul skandal "blue energy" yang diprakarsi khusus presiden, ternyata pepesan kosong.

Pemadaman listrik juga mencerminkan ironi, sebab pada umum lumbung energi juga mengalami pemadaman yang intens, ini mbahwa PLN tidak bisa diharapkan sendirian menyediakan listrik. JUU ketenagalistrikan yang baru harus disambut dengan bai masyarakat terus mengawasi pelaksanaannya. Peran swasta atau dalam penyediaan energi listrik harus terus didorong, disa diharapkan PLN membenahi diri karena peluang kompetisi m dalam UU yang baru. Bagi kita, dengan terbukanya pemain ba monopoli yang memang terbukti tidak menguntungkan semua terhapus. Kekuatiran munculnya biaya tarif listrik akan semakin reralasan, justru disitulah pentingnya peran pemerintah baik pus daerah membuat regulasi penetapan tarif melalui kebijakan floor celling price. Jika serikat pekerja PLN menolak UU ketenagalist baru, pertanyaannya mereka membela siapa, masyarakat atau k monopoli yang mereka nikmati puluhan tahun?

siapa? Wallahua'lam!!. Pertanyaan saya makin bertambah, serikat pekerja PLN menjalank penolakan calon direksi PLN dari luar oleh serikat pekerja PLN cu bukankah selama ini PLN dipimpin orang internal PLN sendiri, t tetap buruk? Intinya, penolakan UU Ketenagalistrikan yang orang dalam, tapi dari kaum profesional yang terkadang tidak sesi bisnis PLN orang internal PLN yang paling tahu, lagi-lagi kita pati bidang yang digeluti. Anehnya lagi, serikat pekerja PLN berangga orang internal yang memimpin PLN kinerjanya tidak lebih baik. sukses atau gagal, tapi hal itu perlu dilakukan sebab telah berti Orang luar yang memimpin PLN memang bersifat hipotetik, ker sebagian besar BUMN yang berkinerja baik, justru jarang dipi Selain itu, tidak ada UU yang melarang orang luar PLN menja (pemegang saham), pemerintah memiliki kewenangan untuk mela serikat pekerja PLN ini tidak sadar jika PLN adalah BUMN milik PLN menolak rencana ini, termasuk menolak direksi dari lua BUMN akan melakukan perombakan direksi PLN. Lagi-lagi seri Kaitannya dengan pembenahan PLN, pemerintah melalui K

Hari Gini Bayar Pajak, Apa Kata Dunia?

M. Amier Arham*

lah Panjar FEB UNG dan Mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi

mpakan sumber penerimaan utama untuk membiayai anggaran m penerimaan pajak sebesar Rp 733,238 triliun atau mayar pajak dan awasi penggunaannya" seolah menjadi menu ilikironika maupun cetak "hari gini gak bayar pajak, apa kata mument fiskal negara, yang berkaitan dengan penerimaan. mini terhadap APBN sekitar 78 %. Pajak sekaligus sebagai www. novernment spending maka sumber penerimaan negara humaninya, pemerintah akan terus menambah basis pajak manunjukkan government spending juga naik. Makin nın pada kenyataannya setiap tahun APBN kita meningkat illi diperlukan tidak saja untuk pembiayaan rutin akan tetapi mink) terus didorong dan target penerimaannyapun terus injuluaran pemerintah (government spending). Government mimam dari pajak sebagai gambaran langsung terhadap ilan belanja negara. Dalam APBN-P 2010, pemerintah midla, Iklan yang sangat akrab dipendengaran setiap hari jura wajib pajak. Upaya untuk menambah basis pajak dan alanja publik untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan wallb pajak, pemerintah (Depkeu) terus melakukan

link nda, atau masih menunggak, iliiii mendapatkan pelayanan. Pertanyaannya mengapa umbayaran PBB pada tahun berjalan. Bila bukti pemebayaran llimya yang dipungut oleh pemerintah sifatnya "memaksa"; langang diberikan kepada wajib pajak. Dengan status memakan karena pungutan pajak itu tidak ada timbal balik IIIIIIII NPWP. Selain pajak penghasilan, juga ada banyak jenis muluun untuk mendorong masyarakat dan para wajib pajak nin nopanjung tahun 2008 sampai awal tahun 2009 direktorat urunan-urusan publik, masyarakat harus memperlihatkan will yang akan dibebaskan pembayaran fiskal, selama ini wallb pajak. Turunan dari kebijakan sunset policy juga Ilm/likukan penghapusan biaya (sunset policy) pengurusan unbanur Rp. 2.000.000,/keberangkatan, Kebijakan sunset tidak jarang pemerintah pusat maupun daerah untuk kelonggaran bagi masyarakat yang hendak bepergian umumnya si wajib

pemerintah bersifat "memaksa" untuk memungut pajak? Karena niscaya hampir semua individu maupun badan tidak ada yang mau bayar pajak secara sukarela. Sedangkan sifatnya wajib dan "memaksa" masih banyak yang mangkir dari pembayaran pajak.

Awalnya, kewajiban untuk memiliki NPWP ini tidak ditaati oleh dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah dengan mewajibkan Pajak, 2009). Akan tetapi, orang bersedia mendaftarkan diri untuk sekitar lima juta orang. Jumlah ini meningkat pesat pada awal tahun dengan tahun 2007 jumlah orang pribadi yang memiliki NPWP baru sebagian besar orang yang seharusnya menaati aturan ini. Sampai sebagai sarana dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya orang pribadi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lalu kenapa harus ada NPWP? Salah satu ketentuan yang berlaku pembayaran pajak tiap tahun semakin meningkat. Tapi dengan sistem serta masyarakat dalam pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan sistem ini diharapkan peran untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan (pemerintah) memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat self assessment system. Dalam self assessment system, negara badan menggunakan jasa konsultan pajak. SPT merupakan penerapan menjadi keluhan wajib pajak, karena itu tidak sedikit individu atau Tahunan Pajak Penghasilan. Kerumitan pengisian SPT juga kerap saatnya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT kalangan masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Terlebih-lebih tiba keterpaksaan. Di samping itu, banyak juga keluhan dan kebingungan di memiliki NPWP tidak atas dasar suka rela, tetapi didasarkan pada 2009 yang sudah mencapai lebih dari dua belas juta orang (Portal korporasi-korporasi. ini memungkin wajib pajak tidak berlaku jujur, terutama pada

Pajak akan tetap menjadi andalan penerimaan pemerintah, dalam konteks itu, pemerintah selain terus melakukan penyisiran wajib pajak, peningkatan penerimaan bakal didukung dengan realisasi sejumlah kebijakan, seperti perbaikan basis perpajakan, baik melalui reformasi maupun modernisasi pajak dan kepabeanan dalam negeri. Sedangkan untuk meminimumkan resiko kebocoran pajak, Depkeu berupaya terus melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan remunerasi (perbaikan penggajian) bagi petugas pajak dan bea cukai. Standar gaji pegawai di direktorat pajak untuk golongan III A gaji pokok dan tunjangan totalnya sekitar Rp. 2,5 juta, kemudian renumerasi Rp. 8,2 juta/ bulan dan imbalan prestasi kerja. Pada kenyataannya memang

Kendati demikian, masyarakat yang bersusah payah memba dirjen pajak sebesar Rp. 36 miliar yang menurutnya ada seperti itu, apalagi pegawai yang lebih tinggi, harta manta oleh seorang Gayus pegawai golongan III A. Pegawai "rends masyarakat makin yakin bahwa kasus korupsi tidak mungkii pihak direktorat jenderal pajak melakukan defence bahw wajar muncul gerakan sosial untuk memboikot bayar paji berdiri sendiri, Gayus bukan single actor boleh jadi komplot mewah harga miliaran plus kendaraan mewah. Kasus ini diya disebutkan di atas mustahil orang ini punya rekening sebesar mencurigakan sebesar Rp. 25 miliar, Dengan jumlah s penggelapan pajak sekitar Rp. 395 juta serta memiliki reker Tambunan seorang petugas pajak golongan III A n kembali membuncahkan apriori dengan munculnya kasi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terus tumbuh. penerimaan negara dari pajak terus meningkat dari tahun mungkin termasuk cerminan itu. logika masyarakat tidak serta merta menerima argumentasi Gayus bukan cermin dari pegawai pajak secara keselurul

perlu diawasi karena disinilah titik rawan dikorupsi. disimpulkan halal oleh polisi dan jaksa. Nyanyian sendu Sus dan korupsi "tidak terbukti" dipersidangan sehingga uang RP. empat kali dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi kasus ini b apa kata dunia?" kalau hanya untuk dikorupsi. Juga seharus sandiwara penegakan hukum, kalau itu terjadi tagline "hari sebab tanpa nyanyian Susno, kasus ini tidak akan diketahui ol bermasalah. Dalam konteks ini Susno layak dapat tambahan pembuka kotak pandora, bahwa rekening Rp. 25 miliar itu yang dianggap sebagai nista terhadap lembaga polri justri penggelapan, money laundry dan korupsi. Belakangan mone panggung Mabes Polri. Pasal yang dikenakan kepada Gayur mencuat tatkala Susno Duadji menyanyikan lagu sendi Rp. 25 miliar sudah lama diendus oleh PPATK dan bahl lapangan, sekaligus anjungan tunai mandiri dari aparat. Kasus Dalam perspektif lain, Gayus ini patut kita curiga sebaga hanya penggunaan pajak yang diawasi tapi proses pemungut bayar pajak, apa kata dunia?, diganti menjadi "hari gini ba Kita menunggu kelanjutan kasus ini jangan sampai h Agung. Pada awalnya mereka bersikukuh bahwa rekening penuh keanehan sebagaimana halnya diakui oleh Kapolri

Negeri Makelar, Dampaknya Terhadap Perekonomian

hallmat "makelar" beberapa bulan terakhir ini menjadi alaha dalam pandangan ekonomi dapat diartikan agen dalam siatem jual beli keberadaannya sesuatu yang lazim. Makelar diperlukan, sebab seorang makelar biasanya yang lebih lengkap dibandingkan dengan calon tentunya berperan bukan sebagai voluntary, pasti ia appetularion untuk setiap transaksi, seperti makelar property dan lain-lain. Biasanya makelar dalam kasus mendapatkan fee dari kedua belah pihak, baik dari dari pembeli. Dalam jual beli barang dan jasa dengan (makelar) tidak ada yang salah, bahkan baik. Kendati biananya bukan pekerjaan pokok, tapi sebagai side job mangan pokok, tapi sebagai side job manga pangan pakelar biasanya relatif sejahtera.

hiim masih dianggap buruk. pandangan kita pasti tertuju ke lembaga kepolisian, mana lambaga penegakan hukum. Karena itu munculnya isu mbaan publik yang memiliki diskresi berpotensi melahirkan mila dialiu, dan imbalan hasil kerja makelar pun makin besar. akal olah slapapun keberadaan makelar di lembaga publik mahelar ini sudah diadopsi diberbagai lembaga publik, jika mhana publik, mulai lahir sampai mati akan berhadapan um dengan lembaga-lembaga publik pasti akan selalu un tramparansi internasional indeks pelayanan di lembaga Makin besar diskresi lembaga publik, makin banyak pula mengganggu pelayanan publik. Hal ini diperkuat dari hasil lilih nda makelar, yang sebetulnya mereka sangat paham Impun mereka, bahkan keberadaannya hadir disetiap sudut IIII ada, baik yang ada di dalam maupun dari luar mukan, apalagi jika seseorang bermasalah. Setidaknya man diskresi yang dimiliki sekaligus dapat dijadikan awalnya ketiga lembaga ini melakukan difence bahwa di hanus Cayus Tambunan salah satu cermin yang tidak magadilan. Trio lembaga penegak hukum ini berada

mahalar di lembaga publik tentu sangat merugikan banyak mahala berahian dengan korupsi dan penyuapan, tetapi

M. Amier Arham* * Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

menghilangkan mereka bukan perkara gampang. Makelar yang berasal dari luar, tentu dapat diminimalisasi, tapi orang dalam yang bertugas memberikan pelayanan yang merangkap makelar sulit untuk dimusnahkan. Pada beberapa kasus, petugas yang merangkap makelar juga dibutuhkan oleh masyarakat, ada simbiosa mutualisme. Tapi perilaku masyarakat seperti itu muncul karena proses pelayanan di lembaga publik cukup rumit dan berliku. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi belum melembaga, publik pun mencari jalan pintas dengan menggunakan jasa makelar. Bagi yang memiliki jaringan dan uang tentu bukan hambatan, bagaimana dengan golongan the have not, pasti akan dirugikan.

Dalam konteks lebih luas, red tape birokrasi yang panjang di lembaga publik menimbulkan ketidakpercayaan di lain sisi, pada sisi lain akan menciptakan ekonomi biaya tinggi. Ketidakpercayaan terhadap lembaga publik, akan menimbulkan apriori sehingga perilaku moral hazard akan selalu timbul. Penyelundupan, pengemplangan pajak, maupun kegiatan illegal lainnya salah satu cara untuk menghindari keruwetan sistem pelayanan yang tidak efisien.

Bahkan hal ini sudah menjadi masalah klasik di Indonesia sistem pelayanan birokrasi menciptakan ekonomi biaya tinggi dan ketidakpastian, sehingga dapat mengganggu actractiviness of investment. Kendati aliran modal masuk ke Indonesia untuk triwulan pertama tahun 2010 cukup tinggi, tapi lebih banyak di sektor keuangan. Sementara untuk sektor riil masih tetap minim, alih-alih untuk menarik investasi mempertahankan investasi yang ada cukup berat. Derasnya aliran modal di sektor keuangan masuk ke Indonesia terutama diakibatkan tingkat suku bunga di luar negeri cukup rendah, di bandingkan dengan Indonesia. Namun sektor keuangan cukup rendah, di bandingkan cepat mengalir variabel non ekonomi, sewaktu-waktu modal itu dengan cepat mengalir keluar, disisi lain bersifat nontradeable dampaknya terhadap penyerapan

tenaga kerja sangat rendah.

Tidak dipungkiri pemerintah sudah melakukan berbagi pembenahan birokrasi, memberlakukan sistem remunerasi pada penerima dan pengelola uang, tapi hasilnya belum memberika secara signifikan. Makelar di direktorat pajak masih banyah kasus-kasus *abuse of power* di bidang perpajakan satu pers muncul kepermukaan. Penerapan sistem remunerasi di Direkto dan Mahkamah Agung pada akhirnya diragukan banyak pihah mereka sudah diberikan gaji yang lebih dari cukup tapi sifat tamak tetap saja. Belum lagi jika dihitung, reformasi birok dilakukan di Depkeu menggunakan dana pinjaman, artinya ra harus membayar utang itu. Pada saat yang bersamaan premunerasi menciptakan sistem kasta kepegawaian, seolah departemen lain kastanya lebih rendah.

membiarkan makelar tetap hadir di lembaga publik? dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu ap ada beban anggaran tambahan, atau setidaknya kualitas pro acces burden, artinya produk yang dihasilkan tidak sepenuhn mereka ini menjalankan fungsinya sebagai makelar, tentu di memberikan pekerjaan maupun lembaga politik yang mengaw selalu memaksimalkan utilitasnya. Bagian yang distorkan ke pa daerah budaya setoran pernah dilakoni, hal ini dilakukan pernah berhubungan dengan lembaga pemerintah, baik pusa lembaga publik yang banyak makelarnya, produk barang dan tidak mengenakkan ketimbang membantu. Dalam pada itu, sesungguhya juga makelar, bagi kita kehadiran calo kerap leb menggunakan jasa angkutan pasti akan berhadapan dengan ruang publik pun makelar juga hadir, jika anda ke termini Banyaknya makelar bercokol di lembaga publik juga me pada anggaran pembelian barang dan jasa, dalam teori ekonor (tepatnya) kontraktor sudah barang tentu berorientasi profit kompensasi mendapatkan pekerjaan. Namun demikian, pela dihasilkan pasti tidak optimal. Mungkin hampir semua pelaku u Kondisi seperti ini sangat tidak disukai bagi pelaku usaha. ketidakpastian pemberian layanan, baik dari segi waktu maup

Sesat Pikir, Permintaan Dana Aspirasi Konstituen

M. Amier Arham* Pengajar Peminat Kajian Keuangan Publik

DPR RI yang terpilih lebih 60 % muka baru yang masih bundidikannya makin membaik. Ekspektasi masyarakat bundidikannya makin membaik. Ekspektasi masyarakat bundi dikannya makin membaik. Ekspektasi masyarakat bunda mereka yang dipilih belum banyak "terkontaminasi" lihu korup, mesum dan pemalas. Saya mencatat, puluhan perlode lalu "berhubungan" dengan KPK karena man, ada suap di perhubungan, kehutanan, pemilihan dan masuk kantor, dan malas mengikuti sidang-sidang masuk kantor, dan malas mengikuti sidang-sidang kablanaan studi banding yang tidak memberikan nilai

belumnya, yang hanya mengutamakan kepentingannya manyankat umum, hanya mengutamakan kepentingannya manyankat umum, hanya modusnya tidak mirip untuk muntuntuan anggaran (budget). Mungkin belajar dari untulumnya yang banyak ditangkap tangan oleh KPK karena dari "kerja keras" mereka mengegolkan DPR periode sekarang ini belum cukup setahun bekerja manyak kontroversi terkait dengan penggunaan budget, dari komputer super mahal, mesin faximile, uang legislasi, renovasi rumah jabatan yang melonjak-lonjak (Rp. 445 andl bunding, usulan biaya pembangunan gedung DPR terlitun), pengesahan anggaran setiap komisi tanpa pouram yang jelas (Rp. 2 Triliun), terakhir usulan mpirasi konsituen dapil (daerah pemilihan) sebesar Rp.

Rp. 15 M/orang/dapil, dengan alasan pemerataan unun kp. 15 M/orang/dapil, dengan alasan pemerataan unun tidak tepat. Bila usulan ini diterima pemerintah, pemerutaun tapi masalah baru yang muncul, asumsi saya membuat ketimpangan baru antar wilayah. Tegasnya, dengan mengucurkan dana berdasarkan dapil sangat yudhang transfer, formula DAU saja yang diasumsikan tapil ketimpangan fiskal dan pembangunan belum

memberikan hasil yang optimum, apalagi dengan menggunakan formula pembagian dana berdasarkan dapil.

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi yang akan kebagian dana konstituen Rp. 315 M, Provinsi Banten tiga dapil sebesar Rp. 1,23 triliun, Jawa Tengah 10 dapil jumlah kursi 78 berarti akan mendapatkan kucuran yang lebih banyak karena penduduknya lebih total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 42 triliun. anggaran yang diminta sebesar Rp. 8,25 triliun/tahun. Selama lima tahun provinsi di Jawa-Bali sudah menyedot Rp. 4.705 triliun, lebih separuh mendapat jatah sebesar Rp. 135 M. Total jatah dana konstituen ini untuk memasukkan Provinsi Bali dengan jumlah kursi Sembilan, berarti akan Yokjakarta memiliki delapan dapil jatahya sebesar Rp. 120 dengan jumlah kursi 22 akan mendapatkan dana sebesar Rp. 330 M, Pulau Jawa, DKI Jakarta ada tiga dapil dengan total kursi sebanyak 21 Jika dikalkulasi lebih lanjut, dengan memasukkan provinsi lainnya di tiga provinsi ini sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 3,705 triliun. dengan jumlah kursi sebesar 87 setara dengan Rp. 1,305 triliun. Berarti akan mendapatkan jatah Rp. 1,17 triliun, dan Jawa Timur 11 dapil dengan jatah Rp. 15 M, berarti ekuivalen dana mengucur ke provinsi ini besar. Provinsi Jawa Barat ada 11 dapil dengan jumlah kursi sebanyak 82 paling banyak dapil, serta beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa-Bali

Bagaimana dengan kondisi di bagian timur Indonesia? Provinsi Papua dan Papua Barat dengan wilayah yang cukup luas dan infrastruktur yang buruk jumlah kursi 13 hanya akan mendapatkan dana sebesar Rp. 195 M, Sulawesi Utara dan Tengah masing-masing enam kursi berati mendapatkan jatah per provinsi Rp. 90 M. Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat masing-masing tiga kursi hanya mendapatkan Rp. 45 M. Provinsi-provinsi ini ditinjau dari aspek apapun jauh tertinggal dari Jawa-Bali. Dari kalkulasi saya, dana yang menggelontor ke Jawa-Bali akan makin memperparah ketimpangan dengan provinsi lainnya di Indonesia, terutama bagian timur.

Lalu logika apa yang dipakai para pengusul dan inisiator dana aspirasi konstituen dengan mengasumsikan dana ini untuk pemerataan pembangunan? Pemikiran dari mereka ini sangat inkonstitusional, sesat, bertentangan dengan UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah, UU ini menegaskan perlunya equalizing transfer. Daerah yang kapasitas fiskalnya rendah akan diberikan transfer lebih tinggi, sementara dengan menggunakan ukuran dapil justru ketidakadilan yang dipertontonkan karena daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya besar

mendapatkan jatah lebih besar, ketimbang daerah yang fiskalnya kecil, sehingga makin tidak mengatasi fiscal imbalance. Disamping itu dana aspirasi konstituen overlapping dengan dana otsus Aceh dan Papua, atau dana pembangunan yang diberikan ke Sulawesi Tengah.

Tidak itu saja, potensi melanggar berbagai UU sangaat terbu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/200 Perbendaharaan Negara, UU No. 32/2004 tentang Pemerintaha Bahkan konstitusi negara (UUD 45), karena DPR sudah me fungsi eksekutif, kendati fungsi budgeting juga melekat padaping bukan mereka yang menentukan anggaran, kewenangannya hanya "mengoreksi", menyetujui atau tidak yang diusulkan eksekutif. Kendati usulan anggaran itu diti kementerian, tapi ini namanya mensiasati dan mencari cel melakukan praktek-praktek yang tidak benar.

setiap saat dapat dicairkan (semacam voucer) atas permintaan legislatif diperkuat, bukan meminta dan menitipkan di kemente di daerah dan serapan anggaran yang tidak maksimal di ker usulan anggaran konstituen, karena banyaknya infrastruktur ya juga kurang tepat. Alasan lain yang dikemukakan untuk men setiap parpol yang mendapatkan kursi di parlemen, dari segi politik orang per orang. Pemerintah sudah memberikan anggar menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kelangsun umum kita, dalam era perpolitikan yang terbuka dan persain DPR jika tidak ada dana pembinaan untuk membina konstitue Budi Santoso (Wakil Ketua DPR RI) dari Golkar merasa suli mereka menganggap hal yang wajar, bahkan dalam pandan dewan untuk membenahi infrastruktur. kemudian setiap tahun silpa besar. Harusnya disinilah fungsi pe ketat itu resiko menjadi politisi, berpolitik memang mahal ta Fraksi Golkar sebagai inisiator tetap tak bergeming dengan u

Belum lagi dari aspek pertanggungjawaban pemanfaatan tersebut yang menyimpan potensi penyelewengan dan pelua antara pejabat nakal di daerah dan anggota dewan. Dengan men anggaran negara, para anggota legsilatif ini dengan mudah mengklaim keberhasilan pembangunan di daerah sebagai jerih sehingga ia tetap layak untuk dipilih untuk periode berikutnya para incumbent ini menanam "investasi politik" dengan me gratis (free riders).

Memotret "Prestasi" Daerah Pemekaran Sigi Biromaru

Dhakuur Eksekutif PSKP Sulawesi Tengah M. Amier Arham*

liminahaman kesejahteraan masyarakat umum. III manyahuti aspirasi daerah berkaitan dengan penguasaan manu pamarintahan daerah, 3) meningkatkan partisipasi masyarakat munitangunan daerah 4) mengurangi disparitas antar wilayah menjalankan desentralisasi. Dari minimum disetiap daerah, Illiani Tumunturian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan sekitar linuangan negara, 2) mendorong akuntabilitas dan

(1007) bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan alam dibandingkan dengan daerah-daerah yang and the sale of th III IIIIII IIIIII Miihi (2005) menunjukkan bahwa selama tahun 2001 — In Inputti Itu, semestinya selain mendorong peningkatan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin maka asumsi saya dikategorikan daerah gagal all all all all and a series of the series o masih utunum kapasitas fiskalnya masih rendah, PAD masih minim PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD mengindikasikan bahwa terjadi alimaharhan, daerah yang masuk kategori sudah lama, bahkan IIII IIIIIIIIIIIIIIIII pembangunan dan pemerintahan. Sementara hasi Ill milwell Tengah, selama pelaksanaan otonomi daerah sebagian Internation transfer dari pusat menjadi semakin tinggi. Hal yang sama Dalam beberapa tahun berjalan desentralisasi fiskal, minimum desentralisasi belum berjalan optimal. Banyak hasil studi musik tinggi (Adi, 2006). Hasil penelitian Susilo dan man dammiralisasi. Merujuk pada sasaran itu, jangankan daerah milin mellin membaik, malah sebaliknya yaitu ketergantungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di makin meningkat peranan transfer dari pusat I malin memperkuat kecenderungan tersebut bahwa kemandirian paramanaan lebih fokus pada kegiatan ekonomi produktif. ilianilingkan dengan PAD. Hal ini menunjukkan ketergantungan finition duri pusat terhadap penerimaan daerah masih yang blank dan daerah yang minim sumberdaya alam.

> ini daerah Induk dianggap kurang memberikan porsi perhatian, sehingga pelayanan. Selain itu mendorong percepatan pembangunan, karena selama Apalagi asumsi dasarnya melakukan pemekaran untuk mendekatkan publik, sekaligus memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat. terutama pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan kapasitas perekonomian daerah, diharapkan kemampuan merumuskan disparitas wilayah makin melebar. Apalagi daerah yang baru dimekarkan, fokus dan sasaran pembangunan

penting, pemekaran tidak sekedar melihat potensi SDA, akan tetapi memiliki kepentingan ketimbang masyarakat untuk sebuah pemekaran. kesiapan SDM birokrasi sangat menentukan. Apalagi jika SDM birokrasi tidak mendukung, padahal semestinya jauh lebih dampak secara langsung terhadap masyarakat. Para elit lokal jauh lebih bersifat independen. Dengana jabatan itu akan mengikut tunjangan dan perangkat pendukung pemerintah di legislatif atau lembaga negara yang menjadi pemburu rente (rent zeekers) dan pemburu jabatan (job zeeker). fasilitas kendaraan, nilainya ratusan juta ruplah, yang tidak memberikan dunia usaha. Banyak kasus pemekaran wilayah lebih didorong untuk amburadul. Dampaknya bukan hanya terhadap makin memburuknya Wilayah baru pasti akan banyak kotak jabatan yang perlu diisi, disamping pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi juga memberikan dampak pada baru, bukannya pelayanan publik makin membaik, sebaliknya makin pembangunan, mendekatkan pelayanan. Justru sebaliknya banyak daerah pemekaran wilayah tidak sekedar bagaimana melakukan percepatan Tapi mungkin itu terlalu ideal, karena tidak dapat dipungkiri motif

teknologi pendidikan, lebih aneh lagi kepala dinas PU-nya sebelum masuk bergelar sarjana ekonomi, kepala Bappedanya bergelar S3 disiplin Ilmunya tunjukkan. Salah satu kabupaten di Gorontalo, kepala bagian hukumnya bagaikan pungguk merindukan bulan. Ada potret kecil yang ingin saya dunia birokrasi the right man and the right Job terasa sulit terwujud, atau atau yang sudah menjelan pensiun. Selain itu menggaet dari guru-guru, karena dari segi kepangkatan mereka memenuhi syarat. Adigium dalam barang tentu, pegawai yang didrop itu kinerjanya yang tidak terlalu baik eselon. Karena itu tidak mengherankan SDM birokrasi daerah baru kebanyakan di drop dari pegawai provinsi, kabupaten/kota tetangga. Sudah Kesulitan yang kerap dihadapi daerah baru, yakni pengisian jabatan eselon-

Asumsi saya tidak jauh beda dengan Kabupaten Sigi, kabupaten paling bontot di Sulawesi Tengah. Baru berselang beberapa hari memperingati hari

dijajaran birokrasi adalah guru sejarah, melanjutkan pendidikan magister

bupatinya pun sudah dua orang. Rangkaian tulisan ini seka menggandeng salah satu kepala dinasnya. Baru berusia du menjejal jabatan lain dengan bertarung di Pemilukada Ko perangkat daerah, justru hanya dijadikan sebagai batu pejabat bupati akan membereskan postur birokrasi dar Wallahua'lam!! kita menyebut untuk kepentingan para elit lokal. Alih-ali menarik investasi ke Kabupaten Sigi. Daerah pemekaran t disiang bolong menghabiskan Rp. 10 M untuk perjalanan din money pada sektor keuangan (non tradeable). Karena itu s (pertambangan), serta arus modal yang masuk ke Indon Kondisi Investasi saat ini masih didominasi pada Kecenderungan para investor mencari wilayah yang suda menentukan daya tarik investasi suatu daerah. Umumn Bagi daerah baru, paling mungkin diharap investasi atau masih minim, tenaga kerja dan kondisi sosial politik belum regulasi terkait dengan investasi belum ada, apalagi infrastn hanya melihat potensi ekonomi semata, akan tetapi rasional, kalau hendak mengeluarkan uang hitungannya an pemerintah, sementara investasi swasta masih sangat sulit. mengoptimalkan menarik dana dari pusat, atau menarik da pembangunan. Saya termasuk orang yang tidak yakin b dinas yang dilakukan oleh pejabat Kabupaten Sigi dari pusat yang semestinya sekitar 40 % digunakan u Artinya, uang perjalanan dinas itu sebagian besar diambil o wilayahnya 70 % merupakan hutan lindung belum me kabupaten ini selama tujuh bulan sudah menghabiskan ar Belum lagi kita dikagetkan dengan biaya perjalanan dina miliaran rupiah. Secanggih apapun teorinya, untuk memb dikedepankan pembangunan taman, tugu dan trafic light (Radar Sulteng 11/8/2010). Dugaan saya pun PAD kabupa pelayanan publik, apalagi untuk meningkatkan kesejahtera kategori prasejahtera masih banyak. Tapi hebatn perencanaan fisik dan anggaran. Bagaimana mungkin, ka ini rasanya sangat sulit mencari korelasinya terhai menumpang, kantor-kantor SKPD sami mawon, masyar SDM birokrasinya juga menjadi masalah krusial, teru jadinya yang kedua sudah meraih banyak "prestasi". Dalai prestasi Kabupaten

Redenominasi Rupiah, Apa Dampaknya Terhadap Perekonomian?

Muh. Amir Arham* Penulls, Pengamat Ekonomi FEB UNG

Judah melakukan "gebrakan". Diawal kepemimpinannya, (III) akan melakukan redenominasi mata uang rupiah. IIII redenominasi ini sudah lama dilakukan oleh Bi, jauh Nauton masuk Bi. Terminologi redenominasi terasa kaku menyederhanakan pecahan uang rupiah atau wiliu menyederhanakan pecahan uang rupiah atau menyederhanakan peratuang digit (OOO), tanpa mengurang digit menyederhanakan peratuang peratuang peratuang peratuang digit (OOO), tanpa mengurang peratuang digit (OOO), tanpa mengurang peratuang pera

minulis jumlah angka (nol) yang berderet-deret cukup minimi ini ideal, yang digulirkan oleh Bank Indonesia, sangat millaran, memerlukan tas atau koper yang dapat In manyator uang di bank dengan jumlah puluhan juta. Apalagi 🚛 alauannya Bi melakukan redenominasi? Berdasarkan kajian Bi III melakukan transaksi. IIII IIII IIII pencatatan akuntansi keuangan, juga merepotkan musikipun nominalnya besar akan tetapi membawanya with yang banyak dianggap merepotkan untuk melakukan IIII IIII dari aspek keamanan dimana nominal rupiah seperti alau anlidaknya akan merepotkan bagi yang mencairkan, atau wan mambawa sejumlah uang puluhan juta, rasa aman sangat jiirampokan. Akan lain halnya jika rupiah sudah mutu uang rupiah dihilangkan tiga angka nol. Ini didasarkan wang Vietnam (Dong). Satu lembar Dong sebesar 500.000 jumlah angka rupiah dianggap terlalu besar, hanya kalah

mah melakukan redenominasi rupiah pada zaman orde mah hah Indonesia masa itu Syafrudin Prawiranegara. Implikasi mahan dari kabijakan ini melonjaknya inflasi, selain diakibatkan

dengan praktik BI melakukan pencetakan uang. Juga ada kecenderungan masyarakat enggan memegang uang cash, lebih memilih barang. Dampaknya, harga-harga barang melonjak tajam. Pengalaman ini pula yang pernah dialami oleh Zimbabwe. Hyperinflasi terjadi, harga sepotong hamburger bisa mencapal jutaan dolar Zimbabwe. Para pengusaha semestinya menerapkan sesuai praktik redenominasi, akan tetapi justru harga barang Rp. 1.000 persatuan pecahan lama, semestinya menjadi Rp. 1,- persatuan pecahan baru. Justru ia menetapkan harga Rp. 1,- persatuan pada pecahan baru. Kondisi ini sangat mungkin juga terjadi di Indonesia jika sosialisasi dan aturan kedisiplinan untuk melakukan redenominasi tidak dijalankan dengan ketat.

Kedepan jika redenominasi ini berjalan, dalam jangka pendek akan tetap mempengaruhi kondisi inflasi yang diakibatkan dari efek ekspektasi. Masyarakat kebanyakan memberikan ekspektasi atau apresiasi yang cenderung negatif, karena mereka akan memahami nilai nominal uang akan menurun atau dikurang) (sanering). Mereka beranggapan bahwa uang yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian dipangkas tiga nolnya (000) menjadi angka 1.000, sementara uang Rp. 1.000, berubah menjadi Rp. 1., Juga dalam jangka pendek berdampak terhadap investasi, dengan pemahaman yang hampir sama, nilai asset akan menurun yang dimiliki oleh investor. Selain juga kemungkinan rational ekspectation muncul, masyarakat yang rasional akan mengantisipasi terjadinya inflasi berupa tindakan pengurangan jumlah uang yang mereka pegang dalam membelanjakan kedalam bentuk barang riili.

Mengurangi angka dalam jumlah rupiah, tidak berarti kerepotan akan tereduksi dengan sendirinya, jika bentuk materi uang tetap sama, misalnya uang pecahan Rp. 100.000,- akan menjadi Rp. 100,- artinya bentuk uangnya tetap sama yakni satu lembar, yang dikurangi cuma angkanya saja. Terkecuali redenominasi dilakukan atau mencetak uang dengan pecahan nominal yang lebih besar, misalnya satu lembar nilai nominalnya menjadi Rp.500,-/lembar. Pemahaman orang Bi dan masyarakat tentu sangat jauh berbeda. Karena itu butuh waktu jangka panjang melakukan sosialisasi, tanpa sosialisasi dengan baik juga akan mengacaukan sistem transaksi bagi masyarakat. Harga barang yang tadinya Rp. 1.000.000, kemudian dalam transaksi akan mendapatkan uang dalam bentuk Rp. 1.000., meskipun itu nilai tetap sebesar satu juta, akan mempengaruhi persepsi mereka. Belum lagi transaksi dalam bentuk valas Jelas merepotkan masyarakat,

apalagi jika nilai tukar tidak stabil dan kecenderungan inflasi untuke atas. Pasti juga akan muncul pertanyaan, kalau Rp. 1.000, nolnya tiga tinggal menjadi dalam bentuk pecahan baru sebes Bagaimana kalau harga barang itu Rp. 250,- pecahan lama? Ini be Indonesia kemungkinan akan menerbitkan lagi uang dalam beseperti zaman revolusi, karena sudah barang tentu tidak sem harganya bulat-bulat Rp. 1.000,-. Juga syarat sebuah neg melakukan redenominasi mata uangnya paling tidak tingkat in rendah, ekonomi dalam kondisi steady state dan dukungan pekuat. Masalah inflasi memang masih terjaga di bawah dua digit, dapat dijadikan sebagai patokan bahwa perekonomian kita suda Daya beli masyarakat masih cenderung terus menurun, seiri makin melambungnya harga-harga bahan pokok.

Ekonomi kita seolah sudah tangguh, hebat sehingga redenomin redenominasi ini juga tidak memberikan dampak apa-apa kelemahan Bi. Berarti Dari sisi urgensi redemoninasi, beli Bank Century atau praktik perbankan yang nakal tidak ter cekatan menggagas dan mengambil kebijakan, tapi dari aspek im 2,0. Lalu apa urgensinya redenominasi rupiah yang dicanangka hanya tumbuh sebesar 3,4 % dan sektor industri dan manufakt primer yang paling banyak menyerap tenaga kerja, seperti sekto gas dan air bersih (9,6 %), dan sektor jasa-jasa (7,2 %). Semen tinggi, yakni sektor pengangkutan dan komunikasi (12,9 %), se dicapal pada kuartal kedua itu, tiga sektor mengalami pertumbu tahun sebelumnya (*year on year*) sebesar 6,2 %. Besaran pertumb mengalami peningkatan dibandingkan dengan kuartal yang s menunjukkan secara jelas pertumbuhan ekonomi pada kuartal k mengoptimalkan peran BI untuk menggerakkan sektor rill. perekonomian nasional. (Mungkin) jauh lebih penting mendesak, sebab banyak pekerjaan BI yang harus dituntaskan. sangat amburadul. Apalagi pengawasan, munculnya kasus me lama dan sosialisasi yang memadai. Sebab Indonesia (pemerint panjang. Dari segi konsep sangat baik, akan tetapi dibutuhkan v melakukan redenominasi mata uang, itupun dilakukan dalam v Turki dan Rumania mungkin termasuk negara yang rela

Anomali Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah

Han bahwa makin tinggi pertumbuhan (PDRB) sebuah mulu, makanan yang dibutuhkan sesuai standar kesehatan mal dangan kemiskinan, karena ia miskin maka asupan gizi un dampak terhadap menurunnya angka kemiskinan. Lalu mul danar ilmu ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan 👊 memenpai sekitar 12 % tahun ini. Dasar pemahaman man oleh Radar Sulteng, pertumbuhan ekonomi Sulawesi mm dibaca, jika pertumbuhan ekonomi double digit, tapi minggu lalu ketika membaca sebuah harian nasional IIIn dengan judul "gizi buruk di Sulawesi Tengah masih un allbell. Fenomena ini dapat dikatakan keterlepasan masyarakatnya tetap miskin. Gizi buruk jelas sangat mint sesuai dengan teori, pertumbuhan ekonomi boleh mengingat berita dua bulan lalu yang liuruk juga paling tinggi? Artinya pendapatan riil makin sejahtera masyarakatnya. Dengan pertumbuhan Junyerapan tenaga kerja juga makin besar yang

mininh kenuksesan periode pemerintahan. illurung oleh konsumsi, ili illumomi antara pertumbuhan dan kemiskinan. mumhuhan yang tinggi tidak berkualitas. Apalagi diklaim minial (underground economy). Atau pertumbuhan ekonomi miles tumbuh mond memang menyisakan ruang, bahwa boleh saja IIIII didominasi pada sektor non tradeable seperti industri and omdorung terjadi makin meningkatnya pekerja di wang double digit, karena sangat nyata mencerminkan mumbuhan ekonomi relatif kecil, apabila pertumbuhan mekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi lebih andalkan capital intensive. Kondisi ini pun dialami mulantla, akibatnya penyerapan tenaga kerja minim, illii atau membusungkan dada kalau pertumbuhan ilaii aektor pertambangan, telekomunikasi dan keuangan primerintah provinsi Sulawesi Tengah tidak boleh willindap kemiskinan kurang berpengaruh, atau tapi penyerapan tenaga kerja bukan investasi. Karena itu, dan

untuk menjustifikasi keberhasilan sebuah rezim untuk mempersiapkan diri kembali untuk

menggambarkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan belum

M. Amier Arham* * Penulis Lepas Tinggal Kota Palu

bertarung pada Pilgub mendatang, Pola-pola seperti ini seharusnya dihentikan, secara kasat mata selama sepuluh tahun terakhir Sulawesi Tengah tidak ada yang baru. Sangat anomali, daerah yang kaya sumberdaya alam tapi tertinggal dalam banyak hal dengan provinsi tetangganya. Inpres percepatan pun diharapkan dapat mengeskalasi pembangunan nyaris tak berbekas, atau memang tidak jalan sama sekali.

semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tercatat sampai bulan dinas pejabatnya yang sudah menghabiskan Rp. 10 M selama tahun Masih dalam berita itu dijelaskan secara detil untuk tahun 2010 Kabupaten Donggala pada ulang tahunnya beberapa bulan lalu, lebih elok, dan gizi buruk minimal jumlahnya tidak sebanyak itu. memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar masyarakatnya jauh untuk membangun taman dan traffic light ditunda, dan lebih produktif, niscaya tidak akan muncul kasus gizi buruk atau hasrat 2010 jika sekiranya dialokasikan ke sektor atau kegiatan ekonomi mereka miskin, atau kebijakan di bidang kesehatan mereka tidak Banggai Kepulauan 31 kasus. Kasus gizi buruk ini mucul karena tercatat 79 kasus gizi buruk, Donggala 61 kasus, Palu 33 kasus dan Juli terdapat 306 kasus gizi buruk. Kabupaten Sigi paling tinggi provinsi di Indonesia. Angka kemiskinan sekitar 18,98 % tertinggi semua itu? Kebijakan-kebijakan yang ditelorkan pemerintah daerah tidak jauh beda dengan Kota Palu secara fisik nampak ada ia lupa bahwa ternyata masyarakatnya masih banyak yang miskin, tersentuh. Untuk Kabupaten Sigi, rasanya dengan biaya perjalanan kedua setelah Provinsi Gorontalo untuk regional Sulawesi. substansi terhadap basic need masyarakat. Human development index baik provinsi maupun kabupaten/kota belum menyentuh secara masih banyak. Apalagi Banggai Kepulauan, lalu apa yang salah perubahan, tapi di depan mata ternyata orang papa di Kota Palu juga kepala Bappedanya membeberkan keberhasilannya secara fisik, tapi (HDI) Sulawesi Tengah juga masih bertengger diposisi 22 diantara 33

mengalami perubahan mendasar. Kendati setiap tahunny provinsi ini makin meningkat signifikan. APBD provinsi, mu kabupten/kota lebih banyak terserap untuk belanja pegamenduga, belanja pegawai inilah mendominasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Karena itu w pertumbuhan yang tinggi tidak (kurang) memberikan terhadap pendapatan masyarakat, lebih-lebih terhadap masalah kemiskinan.

Anomali atau trade off sosial ekonomi di Provinsi Sulawe memang perlu diputuskan, sembari merumuskan kebija tepat untuk mengurangi gizi buruk, atau meningkat Sulawesi Tengah ditengah gelimang kekayaan SDA, meski sekaya Kalimantan Timur, Riau atau Papua. Tapi jelas leb SDA-nya ketimbang dengan provinsi lainnya yang ada d Sulawesi. Mumpun menjelang Pilgub awal tahun depan, m Sulawesi Tengah perlu jeli mencari figur pemimpin ya komitmen mensejahterahkan rakyat, punya jiwa kewir bukan pemimpin yang tidak punya visi, sekedarnya si menjalankan agenda rutinitas. Disinilah perlunya kepemimpinan, bukan berputar-putar pada tokoh-tokoh ya juga. Banyak tokoh muda Sulawesi Tengah yang energi komitmen memajukan daerah, jaringan yang luas, sentrepreneurship government.

Sulawesi Tengah butuh lompatan-lompatan besar agar lel dengan daerah lain. Perbaikan pelayanan publik secan infrastruktur dasar mendesak untuk dikembangkan, sebal utama hambatan investasi berada pada dua simpul ini. I perizinan menjadi masalah krusial, tengok saja kelul investor yang berminat mengembangkan energi untuk me pembangkit listrik tenaga mikrohida di Sulawesi Tengah. mengurungkan niatnya setelah tak kunjung mendapat pemerintah daerah (Kompas, 8/10/10). Kesadaran p daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondu terbangun, padahal investasi yang paling diharapkan un menyerap tenaga kerja, dampak ikutannya terhadap p angka kemiskinan. Sehingga dalam jangka panjang kasus i tidak akan muncul kembali ditengah pertumbuhan Sulawesi Tengah yang tinggi. Ironis!!

Merumuskan Model Ekonomi Lokal Gorontalo Sebagai Spirit Entrepreneurship

M. Amier Arham* Takultas Ekonomi dan Bisnis UNG

harman kembali. Konon ungkapan ini dilontarkan oleh mili mili mili dengan dua, tapi juga tidak sama persis dengan man mumu dan pilihan (choice). Ekonomi bukan ilmu pasti, millin. Biarkan Gorontalo lepas dari Sulawesi Utara nanti menganalisis bisa meleset mana tanpa didasari data tak ubahnya ungkapan emosional manah hayang tentu memiliki landasan akademik, jika sekedar III demikian analisis ekonomi selalu dilandaskan pada apa man mendekati kebenaran tergantung kondisi internal dan m manunakan refleksi akhir tahun 2010 dan catatan menjelang Third Manado. Seorang ekonom dalam membuat www. www. kepentingan. Karena itu asumsi yang digunakan menal perekonomian. Provinsi Gorontalo. Provinsi ini ketika lepas dari

munduga ungkapan biarkan Gorontalo berdiri sendiri, mabung kembali ke induknya didasarkan pada kondisi bula liu. Angka kemiskinan yang begitu tinggi sekitar 75 munugurun besar, serta indikator kesejahteraan lainnya yang ada ulum dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada ulum Kompleksitas masalah sosial seperti menjamurnya munumal atau lebih akrab dipendengaran kita pedagang ulum bukota provinsi (Manado) seolah menjadi milik orang lain bukota perti itu lebih memperkuat dugaan "orang lain" turontalo tidak mungkin mampu untuk mandiri dengan ulum undiri, karena hanya mampu menjadi pengusaha bertinggalan Gorontalo dari berbagai segi, bukan munumpunn" atau etosnya orang-orang Gorontalo rendah, mungkan ekses kebijakan yang kurang berpihak pada

All Mariation makers dari Gorontalo ditingkat provinsi sangat

terbatas, itupun kalau ada tidak mampu memberikan warna dalam mengeksekusi kebijakan yang lebih berpihak ke wilayah Gorontalo. Juga rendahnya mutu SDM sebagai dampak dari desain yang sistemik memungkin peningkatan mutu SDM Gorontalo masa itu tidak dapat berkembang. Angka partisipasi sekolah ditingkat sekolah dasar begitu tinggi, bahkan tertinggi di Sulawesi Utara, pada tingkat sekolah menengah pertama mulai menurun sampai ditingkat perguruan tinggi makin menyusut. Itupun pada tingkat perguruan tinggi fakultas-fakultas yang dikategorikan sebagai "favorit" jumlah orang Gorontalo sangat minim, mungkin hanya satu dua orang.

Setelah lepas dari Sulawesi Utara, asumsi "ketidakmampuan" berdiri sendiri meleset. Secara statistikal angka kemiskinan menurun drastis dari 75 % menurun sampai 27 % pada tahun 2010 turun menjadi 23 %, indikator sosial lainnya makin membaik. Kepiawaian seorang Fadel Muhammad sebagai seorang manajer dan marketer, jangan lupa ia juga seorang politisi yang pasti akan selalu menjaga citra populisme, Gorontalo bisa melakukan sprint sehingga mampu sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia. Meski Gorontalo kalah populer dengan gubernurnya itu sendiri, jika menyebut Gorontalo yang terbayang Fadel Muhammad, bukan sebaliknya. Tidak salah banyak orang lebih mengenal Fadel Muhammad daripada Gorontalo, tidak jarang orang kerap bertanya Gorontalo itu dimana? Atau Fadel Muhammad itu gubernur dimana? Wajar saja karena Gorontalo satu-satunya provinsi yang ada di Sulawesi tidak menggunakan nama pulau itu.

Kemampuan lobbi gubernur, serta jaringan di pusat sangat kuat karena itu banyak program yang dapat dikerjakan di Gorontalo. Dampaknya tentu terhadap pembangunan ekonomi, juga termasuk pada akselarasi pertumbuhan ekonomi. Selama kepemimpinan Fadel Muhammad pertumbuhan ekonomi Gorontalo di atas rata-rata nasional sekitar 8 %. Tapi harap diingat, pertumbuhan yang tinggi itu lebih banyak dipicu dari supply side ketimbang demand side. Sekaligus menggambarkan bahwa uang yang di drive dari pusat oleh pemerintah sangat nyata, tapi dalam jangka panjang akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan perekonomian daerah. Jika transfer dari pusat selain DAU dan DAK menurun maka progresifitas perekonomian melemah, atau kemampuan lobbi pemerintah daerah serta jaringan tidak ada untuk men-drive uang dari luar, sulit mengharapkan perkembangan

ekonomi. Kondisi ini mulai terasa di Gorontalo setelah a kepimpinan ditingkat gubernur, setelah Fadel Muhamm Gorontalo

Perkembangan Gorontalo tidak dapat dipungk relatif positif, berkat kemampuan Fadel Muhammad m serta merumuskan prioritas utama pembangunan yang pengembangan SDM, kelautan dan perikanan, serta berbasis komoditi jagung. Pada periode kedua ka program ini mulai surut, pengembangan SDM mebeasiswa TPSDM sudah senyap. Program taksi mina b bergaung lagi, bahkan gagal meningkatkan kesejahte pesisir, sementara program agropolitan makin meredup. identik dengan Gorontalo, sebab daerah lain sudah secara massif komoditi ini, seperti Sulawesi Selatan meski tidak dapat dipungkiri "brand" itu masih melel Karena itu untuk memenuhi permintaan ekspor k

keseimbangan yang ada sebelumnya. Bersambung!! keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terpu penduduk. Sementara di negara (daerah) berkemban, perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan berlaku adalah pertumbuhan, berarti perubahan jangka merupakan dua hal yang berbeda. Bagi daerah (neg meletakkan pemahaman bahwa perkembangan da seperti itu, Schumpeter sebagaimana diuraikan oleh berdampak terhadap menurunnya angka kemiskinan. ekonomi tinggi, berarti angka pengangguran makin juga tinggi. Padahal secara teoritis menunjukkan, ji ekonominya kecil, pertumbuhannya amat tinggi tapi I nasional sangat kecil. Kerap terjadi di negara (d tinggi tapi elastisitasnya rendah dan share-nya terhada yang baru berkembang, daerah (negara) berkembang pe rendah tapi memungkinkan elastisitasnya lebih besar yang berbeda. Bagi daerah maju, pertumbuhan ekon pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi men Dalam konteks ini perlu dipahami secara

Merumuskan Model Ekonomi Lokal Gorontalo Sebagai Spirit Entrepreneurship (2

M. Amier Arham* Takultas Ekonomi dan Bisnis UNG

mum tiorontalo harus dibuatkan rumusan yang tepat, terutama han thurnh lebih maju kita tidak boleh menyandarkan pada hlngga 23 % angka kemiskinan di Gorontalo, namun with with (on the track). Kita punya kepentingan yang sama, milima politik kestabilan ekonominya tetap terjaga. Karena multi ukonomi lokal yang bertumpu pada keunggulan lokal in pendukatan kesisteman perlu lebih dikedepankan. Siapapun well yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya menlinya provinsi ini rada kehilangan jati diri. Data statisktik methyal segi. Sebab hari ini, memasuki sepuluh tahun umur III. III. ini sudah menjadi spirit, yakin Gorontalo makin munu pada figur pemimpinnya tapi lebih pada sistem yang minimulinnya kerap berganti tapi situasi ekonominya tetap www.mmpln daerah. Jepang mungkin boleh menjadi rujukan. mimpin sistem tidak berubah, atau sistem yang baku menjadi monunjukkan sekitar 25 %, dan klaim pemerintah www. wderajat dengan Indonesia seperti Thailand meski bahkan termasuk kategori sepuluh provinsi

Ind memunculkan dugaan dan apriori, angka unu dibanggakan pemerintah provinsi selama ini yang mutu-rata 8 % setiap tahun merupakan rekayasa, hanya pemeliranan. Bahkan muncul pertanyaan, kenapa angka pemeliranan. Bahkan muncul pertanyaan, kenapa angka dibangun Gorontalo? Secara dibangun Gorontalo makin meningkat seperii jumlah menah mewah terus dibangun, orang kaya landah yang angan tanya, siapa pemilik kendaraan dan landah yang anda telusuri yang punya tidak jauh-jauh yang ada di provinsi, kabupaten/kota, anggota legislatif lalu rakyat bagaimana? Petani jagung yang berjasa man Gorontalo sebagai penghasil jagung tidak menjadi menikanuti harga jagung dari mata rantai perdagangan, dan eksportir. Sedangkan pekerja profesional dan

jumlah pengusaha tidak bertambah secara signifikan, yang ada adalah kontraktor bergantung hidupnya pada proyek pemerintah, itupun kalau pandai-pandai memposisikan dirinya pada saat Pilkada. Jika salah mendukung, maka satu periode tidak mendapatkan "kue" dari penguasa.

Kontraktor dan pengusaha sangat berbeda. Jika kontraktor amat bergantung dari program (proyek) pemerintah, artinya dia akan melakukan proses produksi musiman, bekerja sekali dalam setahun bahkan faktor produksi yang dimiliki relatif terbatas, seperti capital, land, technology dan entrepreneurship. Sementara pengusaha, ketergantungan terhadap pemerintah relatif kecil, kemampuan melakukan produksi kontinyu yang didukung dengan faktor produksi yang memadai. Baumol dkk (2010) mendefinisikan entrepreneurship yaitu setiap badan usaha, baru atau yang sudah lama berdiri, yang menyediakan produk atau usaha, baru atau yang mengembangkan dan menggunakan metode baru untuk memproduksi atau menyebarkan barang dan jasa yang sudah ada dengan biaya yang lebih murah.

Dalam pengamatan saya, dengan mempersempit definisi di atas, pelaku ekonomi di Gorontalo seperti pemilik toko-toko besar sangat jarang dimiliki oleh etnis Gorontalo, lebih didominasi etnis Tionghoa, Arab dan Bugis-Makassar. Bahkan supermarket yang ada di Gorontalo semua dimiliki oleh etnis non Gorontalo. Walau saya sendiri tidak ingin melakukan kategorisasi dalam kegiatan ekonomi, karena saya menduga meski mereka yang sukses sebagai entrepreneurship non etnis Gorontalo lebih merasa orang Gorontalo sendiri. Tapi ini fakta yang tidak dapat diabaikan, dalam jangka panjang dapat memunculkan gesekan-gesekan kecil sebagai akibat dari disparitas distribusi pendapatan antar golongan, yang dapat merugikan kegiatan perekonomian Gorontalo secara keseluruhan. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan mendorong lahirnya pelaku-pelaku usaha dikalangan orang Gorontalo sendiri.

Maenstream berpikir anak muda Gorontalo yang terlalu political oriented perlu direduksi, ada banyak ruang yang kosong mesti diisi oleh mereka, selain dunia kecendekiaan terutama wilayah kewirausahaan (entrepreneurship) lebih dikembangkan. Sebab ukuran kemajuan suatu negara (daerah) sangat ditentukan oleh para pemilik modal (pengusaha), atau wirausahawan, bukan politisi. Hal ini sejalan yang diungkapkan oleh pakar entrepreneur, David McCelland jumlah wirausahanya paling sedikit 2 % dari jumlah penduduknya.

menyebutkan suatu negara akan mencapai tingkat kemakmu Sementara itu, Ciputra salah satu entrepreneur terkemuka d menyebutkan bahwa entrepreneurship adalah kunci menuju negara yang maju, dengan merangkul entrepreneurship men negara mencapai 'lompatan kuantum' dari keputusasaa kemakmuran. Carl Schramm dalam pengantarnya di b Capitalism, Bad Capitalism, And the Economics of G Prosperity (2010), para entrepreneur memainkan peranan per membantu kemajuan ekonomi, mereka menciptakan produ baru, dan secara bersamaan membantu mendorong ekonomi e menaikkan standar hidup lebih baik dan kemakmuran.

Meski tidak dapat diabaikan peran politisi juga n kontribusi terhadap perkembangan ekonomi suatu negara (wi proses politik (demokratisasi) yang tidak matang ju menciptakan cauvimistik (merasa paling mampu) menjadi yang akan merusak kondisi makro ekonomi. Gejala ini su nampak di Gorontalo, semua kepala daerah baik pada level pr kabupaten/kota mengklaim diri paling bisa menjadi gubernur. I kebijakan lebih banyak berorientasi pencitraan, ketimbang per secara substansial yang dapat mendorong perkembangan ekon mendidik generasi muda Gorontalo menjadi pengusaha.

banyak orang Gorontalo. Bersambung!! entrepreneurship, di wilayah timur Indonesia seperti di Sulaw Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang menghuni pasar-pa sektor pemerintah. Orang Gorontalo bukan tidak mem di Gorontalo sendiri background pendidikan generasi muda lel entrepreneurship. Pendidikannya mengarahkan kedunia usaha, "berorientasi" atau "dioreintasikan" pendidikannya untuk bel menjadi pengusaha besar bukan karena spirit ke-Goront dapat mengklaim bahwa mereka sukses karena orang Gorontal Rahmat Gobel dan Sandiaga Uno meski orang Gorontalo, tapi pengusaha baru di Gorontalo itu sendiri sekelas mereka. Arifir mereka sebagai orang Gorontalo. Tapi bagaimana melahirkan p kewirausahaan di Gorontalo. Kita tidak lagi sekedar mem Gobel atau Sandiaga Uno bisa menjadi figur untuk member Klaim success story pengusaha sekelas keluarga lingkungan keluarga yang memili

Merumuskan Model Ekonomi Lokal Gorontalo Sebagai Spirit Entrepreneurship (3)

M. Amier Arham* mudur Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

unp) perlu "pelembagaan" untuk menjadi kultur. Orang-orang menjadi pedagang atau pengusaha, karena kultur mereka mutuk mencari profesi atau bekerja pada sektor pemerintah tuntura, jaksa, hakim dan politisi. Pada akhirnya semua dugang, dalam kadar tertentu kondisi seperti ini dapat mutuk melahirkan wirausaha-wirausaha muda di Gorontalo.

whter pemerintah. Geliat ekonomian suatu daerah bila uhter pemerintah. Geliat ekonomi akan makin terasa jika tembang dengan baik yang tidak bergantung dari proyek mulah dolders, baik pemerintah maupun perguruan tinggi perlubah termasuk daerah adat di nusantara, sudah barang tentu kaya yang dapat melecutkan semangat. Jepang meskipun liberalisme-kapitalisme dalam mengembangkan kegiatan meninggalkan ajaran leluhurnya (ajaran meiji, atau pemikiran ekonomi politik disebut teori heterodoks, teori mulah (2010) merupakan teori yang menyempal dari liberal budaya dan struktur sosial yang sudah melembaga di mensinkronkan keduanya untuk mencapai hasil terah mengelish maju.

menjadi penghambat kemajuan, justru dapat menjadi penghambat kemajuan, justru dapat menjadi penghambat kemajuan, justru dapat menjadi bullyang dikenal sebagai daerah eksotik, juga menjajal potensi parawisata, termasuk Yokyakarta lebih buduyanya sebagai daya tarik pariwisata. Bali dan Yokyakarta industri parawisata, selain itu Yokyakarta industri menliki kontribusi yang tidak kecil. Dengan semangat yang tidak kecil. Dengan makin berkembang

hili dinimi Gorontalo sangat jelas menggambarkan bahwa sektor dinimi ya turhadap pembentukan PDRB sangat kecil, masih partanlan (primer). Hal yang sama, sektor jasa-jasa masih kecil yang perlu dikembangkan industri -industri kecil yang

memiliki linkage dengan sektor lainnya, misalnya penunjang industri parawisata itupun didominasi oleh sektor jasa pemerintah (belanja pegawai). Struktur ekonomi seperti itu mengindikasikan bahwa tidak dapat berharap dari sektor yang berbasis budaya. Atau mengembangkan industri kreatif yang tidak terlalu bergantung pada modal fisik, tapi lebih bersandar pada modal pengetahuan. Kecenderungan ekonomi kreatif atau biasa juga disebut sebagai economic knowledge makin tumbuh yang bermodalkan pada skill (kecerdasan).

Karena itu grand design-nya pemerintah daerah perlu intervensi untuk mengembangkan modal manusianya, hal ini sejalan pergeseran fokus pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengandalkan modal fisik, tetapi juga modal manusia yang menyangkut didalamnya pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Sementara itu, jagung yang terlanjur menjadi "brand" di Gorontalo perlu terus dikembangkan produksinya dengan tetap mempertimbangkan faktor ekologi. Agar memiliki value added, industri pengolahan jagung juga menjadi keharusan dibangun. Sebab produksi jagung yang sudah berorientasi ekspor selama ini nilai tambahnya sangat rendah, serta dampak ganda (multiplier effect) yang ditimbulkan kecil.

seperti perumahan, kendaraan dan konsumsi lainnya. Sementara penyaluran kredit rendah padahal investasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Desain untuk kegiatan produktif masih sangat rendah, karena itu peredaran uang di dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi lebih banyak pada kredit konsumtif, membiarkan mereka tumbuh sendiri niscaya tidak akan besar. Kelemahan itu tentu butuh intervensi pemerintah yang memadai, jika hanya pemasaran, serta kemampuan skill bagi pelaku usaha kecil dan menengah industri-industri kecil dan industri rumah tangga. Sebab ini masalah klasik, pembangunan infrastrurktur juga perlu perhatian pada pengembangan pembiayaan Didasarkan pada kondisi itu, pengeluaran pemerintah perekonomian Gorontalo, peran pemerintah tentunya tetap menjadi tumpuan kondisi daerah, dengan terbatasnya peran swasta untuk menggerakkan roda kebijakan untuk mengembangkan perekonomian daerah harus disesuaikan dengan pecahan rupiah umumnya uang lusuh. Kredit investasi tidak jauh berbeda, masih Gorontalo relatif lambat. Indikasi itu dapat dilihat dari uang yang beredar, industri jenis ini sulit berkembang karena minimnya akses pembiayaan dan Sementara itu, meski penyaluran kredit tetap tumbuh yang memungkin sclain memacu

Apalagi mengharapkan mereka mampu bersaing dengan produkproduk dari luar yang sudah kadung menyerbu pasar Indonesia, setelah ASEANChina Free Trade Area (AC-FTA) mulai berlaku awal januari 2010. Pemerintah di
tingkat kabupaten/kota tidak hanya mengadopsi keberhasilan daerah lain, atau apa
yang dikembangkan di luar yang dianggap berhasil belum tentu cocok
dikembangkan di Gorontalo. Tidak salah, dalam perumusan kebijakan masalahmasalah pengembangan ekonomi selain diperlukan visi yang jelas, juga
pentingnya melibatkan perguruan tinggi. Kebijakan pemerintah daerah bersinergi

dengan perguruan tinggi, PT didorong membuat inovasi dari produl yang beragam melalui riset, pembiayaan bisa dari pemerintah daerah. H dan inovasi perguruan tinggi dapat diterapkan oleh industri, jadi semua Sebab selama ini terjadi keterlepasan (decoupling) antara pemerint perguruan tinggi dan industri dalam melakukan inovasi. Padahal pengembangan salah satu pilar penting untuk mengembangkan perekon

Dalam pada itu, Gorontalo yang meneguhkan visinya sebag inovasi harus diperjelas. Visi bukan hanya milik gubernur, tapi dap energi penggerak bagi semua level (Kalangan). Pemahaman say dimaksudkan selalu membuat hal-hal yang baru atau melahirkan sesuat dari yang sudah ada, baik bersifat tangible maupun intangible. Atau se ditegaskan oleh Peter Drucker, inovasi adalah instrumen kh kewirausahaan. Jika itu acuannya maka kita rakyat Gorontalo patut be yang baru di Gorontalo? Jangan-jangan pola-pola pelayanan pemerinta publik masih begitu-begitu saja, atau ada sesuatu kebijakan yang menstimulasi kemajuan daerah, terutama pendapatan masyarakat? Jiki lalu apa hasil inovasi itu? Gagasan provinsi inovasi yang pernah dil oleh Fadel Muhammad terinspirasi dari visi atau slogan dari beberap besar yang menglobal.

white house, pusat pemerintahan Amerika?. Itulah (mungkin) k membumikan nilai-nilai lokal ketimbang mengadopsi kultur global y memberikan makna bagi kemajuan rakyat Gorontalo. Jauh lebih saya, jangan sampai provinsi inovasi hanya sebuah slogan kosong ya maka ia hanya akan menjadi slogan. Visi dan slogan jelas sangat berb membentang untuk mewujudkan sebuah visi. Jika visi tidak dapat o terbatas! penyakit miopik dan menggunakan kacamata kuda sehingga pengam Provinsi Gorontalo di ulang tahunnya yang kesepuluh. Atau entah, saya menyisakan identitas lokal, lebih mengadopsi bangunan kubah yang r bangunan-bangunan perkantoran pemerintah di Gorontalo ny lokalnya yang dapat menjadi keunggulan lokal (local genius). Ti identitas lokal, kenapa Gorontalo malah cenderung menanggalka Jika Malaysia menisbatkan dirinya sebagai "The Truly Asia" yang ses hidup yang bersandar pada agama (Islam) yang bisa menjadi guidance dengan slogan. Gorontalo sejak dahulu kala memiliki adat istiadat o hanya merupakan identitas (yel-yel) sebuah komunitas atau lembaga. Sementara pada organisasi publik (pemerintah) terlalu banya untuk mercalisasikan capaian visi jauh lebih kecil, atau nyaris dimana karyawan pada sebuah perusahaan relatif homogen. Resistensi diwujudkan karena internalisasi nilai-nilai korporasi yang menjadi p Patut diingat, visi sebuah korporasi (perusahaan) akan le

Kekerasan dan Ketimpangan Ekonomi

M. Amier Arham*
* Penulis, adalah Penulis

rudikal. Reformasi difahami sebagai bentuk kebebasan ludikal. Reformasi difahami sebagai bentuk kebebasan mengekspresikan dengan leluasa mengekspresikan kenderung destruktif. Fungsi lembaga negara terutama kenderung destruktif. Fungsi lembaga negara terutama ludihah hukum dan keamanan seolah tak berdaya diantara ludihah hukum dan kekamanan seolah tak berdaya diantara hukum. Dari rekaman mupun yang terjadi di depan Pengadilan Jakarta Selatan ludihan tak berdayanya aparat hukum. Dari rekaman mubukar rumah di Tarakan dengan santainya datang ludihan, mengangkat drum yang mungkin berisi bahan ludihan, mengangkat drum yang mungkin berisi bahan ludihan, membawa senjata api semua terjadi di depan ludihan, tidak ada upaya pencegahan sama sekali.

lul menjadi bangsa yang pemarah? Dugaan saya ada dua burkaltan dengan masalah-masalah penegakan hukum, kuduo ketimpangan distribusi pendapatan. Persoalan mencoderai rasa keadilan masyarakat seolah sudah mencoderai rasa keadilan masyarakat seolah sudah penegakan hukum menjadi tumpul jika menebas ke menulul tajam jika menebas ke bawah. Makin tergerusnya yarakat terhadap penegakan hukum, lalu mereka membentuk kelompok atau memanfaatkan dengan membentuk kelompok atau memanfaatkan yang memang sudah dibentuk berwatak kekerasan. Junkerahan dari aparat relatif nihil. Pada saat yang memilik nodal yang memiliki lahan-lahan kosong di kota-kota musuluh internal, seperti makelar kasus. Kondisi itu mendal yang memiliki lahan-lahan kosong di kota-kota musuluh kepada kelompok preman untuk menjaganya,

landa barda wandiri, tapi saya menduga sebagai akibat dari mendulah pendapatan, bahkan merupakan penyebab utama.

Janah yang dijalankan tidak membuat

ketimpangan makin membaik, Jakarta tetap menjadi tumpuan utama pertalian keluarga dikantor SKPD, apalagi yang direkrut lewat jalur honorer pengangguran. Tengok saja di daerah manapun, hampir semua PNS memiliki kekuasaan atau uang sogok tidak ada, mereka terpinggirkan menjadi untuk pembiayaan politik. Sementara yang tidak punya akses di pusat dengan kecurangan menggunakan uang sogok sebagai modal tambahan dialihkan ke istri ataupun anaknya. Proses rekrutmen pegawai pun penuh kekuasaannya dan penguasaan resources. Jika periodenya habis, Jabatan karena umumnya bupati/walikota maupun gubernur tidak akan melepaskan Pilkada melalui praktek money politic. Kondisi ini dibiarkan tumbuh subur, miskin mereka gampang dipelihara untuk dijadikan basis massa menghadapi korupsi dan memelihara perilaku miskin bagi rakyatnya. Dalam kondisi kerja. Tapi itu semua sulit terwujud, desentralisasi menyuburkan praktik perekonomiannya makin besar, dampaknya terhadap penyerapan tenaga memberikan kebebasan bagi daerah untuk berkreasi agar kapasitas mencari pekerjaan bagi usia produktif. Idealnya otonomi daerah

Ditingkat pusat, pemerintah terlalu sibuk membangun pencitraan, klaim pertumbuhan ekonomi yang terus membaik sekitar 6 % tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap berkurangnya disparitas distribusi pendapatan masyarakat. Klaim angka kemiskinan terus menurun, meski pun serapan tenaga kerja di sektor formal sangat kecil. Kondisi ini menggambarkan struktur ekonomi menggalami keterlepasan (decoupling) antar sektor. Penyebabnya, pertumbuhan ekonomi lebih didominasi dari sektor non tradeable, seperti telekomunikasi, pertambangan dan keuangan. Sektor-sektor ini lebih mengandalkan capital intensive ketimbang labor intensive turut memperparah ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Data makro statistik memang menunjukkan penurunan angka kemiskinan, tapi serapan tenaga kerja sektor informal makin meningkat sekitar 75 %. Pelaku ekonomi sektor informal merupakan underground economy yang tidak tercatat dalam PDB.

Pada sektor keuangan sendiri semakin membaik, arus modal masuk (capital Inflow) asing ke Indonesia makin besar, t

Salph of I do reference wears aged force

Membaiknya sektor ini bukan sesuatu yang menggembirakan, sebab termasuk kategeori hot money yang bersifat jangka pendek, setiap saat mudah terbang (capital flight) jika kondisi dalam negeri kurang mendukung. Kondisi ini pun sudah diingatkann oleh lembaga keuangan internasional

seperti IMF dan Bank Dunia agar arus modal yang besar h resikonya dapat menggerus devisa untuk melakukan inte hanya menguntungkan kelompok kecil masyarakat yang kaya. Situasi seperti ini makin memperburuk distrib lapangan kerja terbatas sehingga angka penganggurar tumbuh.

pemimpin seperti ini bahkan masih dapat memenangkan membabi buta dari massa yang sudah jadi peliharaan demonstrasi dukungan terhadap tokoh lokal atau bupati/v Gejala menjamurnya preman dan gelandangan bukan tu makin hari mereka terpinggirkan dari panggung kekuasaan. akumulasi berbagai persoalan terutama masalah ekonomi, memiliki modal (uang) besar sebagian dari hasil korupsi unt (menggerogoti APBD) masih mendapatkan dukungan dan pi jelas. Ada banyak bupati/walikota kendati sudah divonis m gubernur yang tersangkut dengan masalah hukum dapat menunggu jatah dari yang menguasai resources lo kecenderungan seperti ini membuat mereka terbiasa hid pemilik modal dan penguasa lokal cenderung memang mer pemalas, tapi makin sulitnya mencari lapangan pekerjaan sebagaimana pemicu awal kekerasan yang terjadi di dipicu, apalagi jika dalam kondisi tidak sadar pengaruh dari tidak ada pekerjaan tetap. Kerumunan-kerumunan seperti ujung gang atau perempatan dari pagi sampai sore, sab Menengok kembali masalah kerusuhan, umumnya pela kategori usia produktif, bahkan usia remaja yang aktifitasr

Yakin saja, orang yang memiliki pekerjaan tetap, setidak bulanan niscaya tidak akan mau berleha-leha nongkrong se gang atau jadi preman untuk diperalat menjaga kepentingan di daerah. Untuk mereduksi kekerasan massif, serta pember juga tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian sendiri, ha kebijakan dari pemerintahan secara keseluruhan. Pemerin sekedar membuat program instan seperti PNPM Mandiri, Ba Tunai dan sejenisnya. Tapi sektor rili harus dihela dengan ke industri yang mengandalkan *labor intensive*. Sementara daerah harus lebih serius mensejahterakan masyaral membuat program yang dapat menggerakkan mesin ekono memberikan dampak terhadap serapan tenaga kerja.

Kebijakan Privatisasi BUMN, Apa yang Salah?

Arham*

Adang Menempuh Program

Enpud Bandung

HUMN, tujuannya ada dua, yakni untuk osial. Karena itu korporasi (badan intu holeh semata mendatangkan profit, tapi menuembang misi sosial untuk menyediakan omidi), sekaligus dapat mengatasi kegagalan

mumberatkan keuangan negara, melalui badan usaha menjadi beban pemerintah, mumberatkan keuangan negara, melalui badan usaha menjadi beban pemerintah, mumberat kenomi klasik maupun neo-klasik maupun dalam kegiatan ekonomi, mumberat konflik interest juga tinggi, sebaban penjada dan operator.

unu dipurparah karena badan usaha ini di bawah ing langara, pengelolaannya harus didasarkan menan harvensi politik tidak dapat dihindari, pada menahan" partai, atau penguasa. Minimnya profit menggerogoti keuangan negara. Jauh maha ini tidak sehat, pengelolaannya pun masih

hannan IMF untuk membantu mengatasai krisis.

hannan IMF untuk membantu mengatasai krisis.

hannan dipatuhi debitur yang dituangkan dalam dulumya adalah melakukan privatisasi BUMN, dulum kegiatan ekonomi. Bahkan komoditi pasar. Privatisasi tentu baik, melepas lah (publik), selain memperbesar kepemilikan mulum makin kuat sehingga kinerja BUMN, atau pasar kepemilikan pasar kepemilikan makin kuat sehingga kinerja BUMN, atau pasar kepemilikan kuat sehingga kuat kepemilikan kuat kepemilikan kuat kepemilikan kuat kepemilikan kuat kepemilikan kuat kepemilikan kuat

hlumbanya makin membaik, tetapi juga dibebani Allan, Hasil privatisasi dijadikan sebagai salah allan kuman negara, selain berharap dari penjualan teorinya, hasil privatisasi sebuah korporasi negara, terapatan bahar teori, pada akhirnya maha nyalan usaha (perbankan) yang masuk ke dalam terapatan Nasional (BPPN), dilakukan privatisasi

(jual) secara massif, bahkan dibawah harga indikatif, setelah dilakukan restrukturisasi dan "perawatan intensif".

Bank-bank swasta nasional yang besar semua menjadi kepemilikan asing, yang tadinya mengidap penyakit kronis, setelah sehat kemudian dijual. Idealnya, justru badan usaha yang sakit tapi memiliki prospek yang dijual, bukan yang sudah sehat dijual, dengan harga relatif murah. Dominasi asing di perbankan nasional, turut memperparah disparitas penyaluran kredit, sebab mereka lebih fokus di Jawa saja. Selain itu tenaga kerja professional makin didominasi para ekspatriat, sementara rakyat Indonesia cenderung menjadi buruh kasar di rumahnya sendiri.

Kondisinya tidak jauh berbeda dengan BUMN itu sendiri, meskipun sudah ada perubahan kebijakan BUMN tidak terlalu dibebani lagi untuk menyetor devidennya kepada pemerintah. Tapi program privatisasi BUMN yang terus berlanjut menyisakan banyak masalah Jauh sebelum diprivatisasi, BUMN yang akan listing (privatisasi) terus digenjot untuk melakukan restrukturisasi dan profitisasi, sehingga pada saat Initial Public Offering (IPO) cukup menarik minat pembeli. Termasuk BUMN yang sudah listing di bursa efek didorong untuk terus melakukan right issu (menambah penjualan saham). Masalah yang timbul setidaknya dapat dilihat beberapa BUMN ketika melakukan IPO ditengarai dijual di bawah harga indikatif, seperti kasus Indosat. Selain itu penjualan asset negara terindikasi dijual murah, seperti penjualan kapal tanker pertamina.

Kontroversi privatisasi BUMN setidaknya dilihat dari dua masalah pokok, pertama berkaitan dengan harga jual yang kerap ditengarai terlalu murah, dan kedua porsi kepemilikan saham pemerintah, terutama di BUMN strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, beralih kepemilikan ditangan asing. Kontroversi penjualan Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd anak perusahaan Temasek Singapura yang menguasai banyak perusahaan di Indonesia melingkupi kedua kondisi di atas.

Temasek juga memiliki saham di Telkomsel, operator seluler terbesar di Indonesia. Dengan demikian, perusahaan pelat merah dari Singapura ini menguasai saham di pasar telekomunikasi. Pada akhirnya dicium oleh Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Temasek terindikasi melakukan praktek monopoli di sektor telekomunikasi (Indosat dan Telkomsel).

Tulisan ini bukan bermaksud membahas secara detail pelanggaran monopoli, tapi ingin menunjukkan titik kontroversi model-model privatisasi BUMN selama ini, terutama Indosat, Semen Gresik dan yang sekarang lagi menghan

gat Krakatau Steel. Temasek, lewat anak perusahaannya Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd, yang memenangkan divestasi 41,94 persen saham Pemerintah Indonesia di Indosat senilai Rp 5,62 triliun (Rp 12,950 per saham) pada tahun 2002. Setelah dinyatakan bersalah oleh KPPU karena melakukan praktek monopoli, dikuatkan oleh putusan pengadilan diwajibakan membayar Rp. 15 miliar (Kompas, 9 Juni 2008). Bagi Temasek Holding Pte Ltd, dari pada membayar kepada pemerintah Indonesia, mereka lebih memilih untuk menjual kepemilikan sahamnya di Indosat Tbk., sebesar 40,8 persen

saham Indosat Tbk milik Asia Mobile Holding Ptc Telecom (Qtcl) senilai 2,4 miliar dollar Singapura at 16,8 triliun dengan kurs Rp 9,300). Time lag selama li mendesak pun dapat dijual dengan harga yang fantast

knoud Iki akatau Ottesi.

Privatisasi Krakatau Steel (KS) yang juga memant bahkan Amien Rais menyebutnya privatisasi Krakat skandal Bank Century. Sebagian pihak menengarai s mengulangi kasus Indosat dengan menjual BUMN de Meneg BUMN menegaskan bahwa proses privatisa proses persetujuan oleh DPR sudah berlangsung lama proses persetujuan oleh DPR sudah berlangsung lama pemerintah (Demokrat) menyokong langkah Meneg KS sesuai mekanisme yang benar. Penjualan Indos berbeda dalam hal untuk mendapatkan modal, Insementara Krakatau Steel lewat IPO. Sehingga dibandingkan.

makin agresif, tapi harga yang pantas dan wajar. memenuhi kubutuhan baja dalam negeri, terutama p publik, atau sebanyak 3,15 miliar saham, sehingga de kesalahan berulang kali? Hanya keledai yang selalu salah, KS memang butuh modal untuk meningkatk permintaan (demand) harga makin meningkat (mahal murah. Layaknya, prinsip ekonomi semestinya d produsen baja ini. Ini indikasi awal, bahwa saham K sebesar Rp. 850 per saham pada masa penawaran aw para investor. Dengan makin membaiknya makro meningkat, kondisi makro ekonomi juga semakin n Pertanyaannya, kenapa dianggap murah? Selain pros dana sebesar Rp. 3,15 T, berarti ada potensi loose seki sebesar Rp. 2,6 T. Sementara jika harga kisaran Rp. Target Kementerian BUMN saham perdana KS akan dikisaran Rp. 1.000., per saham atau harga yang mend mencapai Rp. 2.000., per saham. Angka moderatnya per saham. Padahal dalam hitung-hitungan, harga pros Bagi saya, yang menjadi persoalan bukan pada mek calon calon investor ritel terus berjubel mengantre unt domestik maupun internasional terus tumbuh. Denga masuk ke Indonesia terus naik, saham-saham non u bawah harga indikatif yang ditetapkan sebelumnya d jualnya yang amat rendah, Rp. 850, per saham. Harga

Monarki Pemilihan Langsung Jauh Lebih Berbahaya

High M. Amier Arham* Doktoral Unpad Bandung

yokyakarta, termasuk posisi umungkap sebagai Gubernur dan Wakil perdebatan hangat. Pemantik perdebatan hangat pemantik mulan dari episentrum kekuasaan, istana umung yudhoyono memercikkan api pro utah mungkin dalam sebuah negara menjan lokal menganut sistem monarki hunyataannnya memang. Gubernur dan udan ini ditetapkan sebagai udan didapatkan karena pertimbangan

laminya. UUD 45 mengakomodasi laminya. UUD 45 mengakomodasi lami juga mengharuskan lulih secara demokratis. Saya tidak ingin lulih secara demokratis. Saya tidak ingin lulih secara demokratis. Saya tidak ingin lulih presiden tidak semuanya benar, sulih yang diterapkan di Yokyakarta semua danah maupun pengawasan sebagai danah proses politik di Yokyakarta berjalan lulih proses politik di Yokyakarta berjalan di Yokyakarta berjalan merupakan daerah yang paling

mulalul pemilihan, meskipun ada juga

sistem monarki mutlak kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.

justru melahirkan banyak raja-raja kecil yang perilakunya sangat Perilaku elit politik di daerah selama otonomi daerah berlangsung yang dipilih secara langsung belum tentu bersifat demokratis untuk level bupati/walikota maupun gubernur ada semangat pembangunan infrastruktur dasar sebagai overhead social tidak simbol pusat kekuasaan, sementara pelayanan publik maupun baru, yang pertama dibangun rumah dinas dan kantor sebagai mahal, rehab rumah jabatan, rehab kantor. Atau daerah pemekaran kebutuhan pribadinya didahulukan melalui pengadaan kendaraan diperlihatkan. Umumnya kepala daerah ketika pertama berkuasa seperti kaisar dan pangeran dengan terang benderang monarki dan anarkis meraih kekuasaan. Perilaku hidup mewah hanya dipahami secara sepihak atau dangkal, bahwa kepala daerah merusak tatanan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi jangan "monarki" yang lebih berbahaya, dalam jangka panjang akan menjadi urgen. Mungkin presiden lupa, bahwa fenomena Pilkada baik

Setelah berkuasa satu periode, hasrat untuk berkuasa kembali makin kuat. Mereka menikmati "kerajaan" itu seolah menjadi milik dan keluarganya, tidak sedikit suami menduduki jabatan bupati/walikota atau gubernur, istri pun ikut mengatur kedudukan dan jatah "kue" dipemerintahan suaminya. Selama menduduki jabatan kepala daerah yang terpikir bagi mereka mengumpulkan harta (rent seekers) sebanyak-banyaknya untuk digunakan pembiayaan politik periode berikutnya. Jika perlu untuk menantunya disisipkan di partai politik. Karena itu tidak mengherankan ada beberapa daerah suaminya bupati/walikota istrinya pimpinan dewan.

Fenomena Pilkada yang sudah berlangsung, juga makin menunjukkan perilaku monarki, seperti istri menggantikan posisi suaminya karena sudah dua periode menjabat bupati/walikota, atau anak menggantikan ayahnya sebagai kepala daerah. Tentu saja sepanjang dipilih secara "demokratis" tidak ada masalah istri menggantikan suami, atau anak menggantikan ayahnya. Akan

tetapi sudah menjadi pengetahuan umum, kepala daer berkuasa (incumbent) umumnya diraih dengan berbagai diluar kaidah-kaidah demokrasi. Sebagai incumbent ya mewariskan "tahtanya" kepada istri atau anaknya posisiny diuntungkan, karena menggunakan kekuasaan dan ja untuk mempengaruhi para pemilih dengan menggerakka birokrasi, simultan dengan mesin politik.

Sebagiana besar kondisi masyarakat yang pragmatis, proses pendidikan politik makin minir kencenderungan untuk memilih bagi calon kepala daer punya modal. Pertanyaannya, siapa calon yang pali modalnya? Sudah pasti incumbent, modal yang dimiliki besar dari hasil perburuan rente selama berkuasa atau m sponsor (pengusaha). Semenetara calon kepala daer memiliki kapasitas tapi tidak punya modal besar, jangan hadipilih oleh rakyat. Fenomena lain yang dapat ditangh justru menyuburkan perilaku politik monarki di daeral bupati/walikota dengan pimpinan dewan kakak berac bahkan ada daerah di NTB kepala daerah dan wakilm beradik. Nalar sehat, dan nurani yang bersih tentu i menerima atas fenomena ini. Pertanyaan penting yang pajukan, kepemimpinan seperti ini apakah bukan monarki?

Anggapan saya ini adalah model kepemimpinan dalam bentuk lain yang justru merusak tatanan demokras olah tidak ada lagi orang lain yang bisa menjadi kepala dae memang semua pintu munculnya kepemimpinan alternati rapat. Sebagai dampak dari makin dikuasainya semua resou penguasa atau raja-raja kecil di daerah. Dalam proses langsung juga semestinya menjadi perhatian serius oleh pe pusat, yakni makin massifnya money politics dalam proses langsung, atau memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara jabatan dengan segala macam cara jelas sangat bertentangan proses demokrasi. Lalu kenapa hanya mempersoalkan Yokyakarta yang sudah terbukti berjalan efektif dan k Sementara kebanyakan daerah yang dianggap kepala dipilih langsung oleh rakyat justru tidak kondusif,

UMKM Anak Tiri yang Menghidupi Perekonomian Nasional

moneter tahun 1998 dan krisis global 2008 III in sebagai tulang punggung perekonomian nasional www aspek kebijakan, seringkali kurang mendapatkan milli nasional (multi national company) banyak yang m yang besar, justru MNC menjadi anak kesayangan www.uektor UMKM tetap bertahan, malahan tumbuh IIII triliunan rupiah pada saat rontok.

memberikan konstribusi terhadap perekonomian m) mdah lebih dari 50 %, bahkan tahun 2010 diprediksi IIIIII transaksinya. mentif terhadap pelaku UKM. Dari segi kontribusi, ilim pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, negaraiii tormasuk Amerika Serikat, mempercepat layanan ındar bahwa peranan UKM sangat strategis dalam ılırı pengalaman dua krisis sebelumnya, sejumlah

meningkatkan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) III UMKM menyebutkan, sampai saat ini jumlah populasi IIII, pemerintah pusat, juga sebagian besar pemerintah limlah penyerapan tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian 17,1% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Dari Irillun untuk menjamin kredit lunak sebesar Rp. 20 monjot program-program pemberdayaan masyarakat, ili kondisi ini, UMKM tidak dapat dianggap remeh ipili 49,8 juta unit usaha atau 99,9% dari total usaha di

man UMKM di daerah, masih banyak kendala, kendati munungan UMKM sebab kurang mendatangkan manfaat myn sebatas lipservice sebagai pencitraan keberpihakan mili) sudah berlomba-lomba menerapkan "one stop IIIku ekonomi kecil pada saat kampanye Pilkada. Setelah mlisp daerah berbeda, sehingga akses informasi tentang naluri rent seekers, sebagian kepala daerah kurang wbagian pemerintah daerah, program pengembangan ilin pemasaran produk UMKM cukup menyulitkan lapkan pada berbagai kendala. Kondisi geografi dan myungnya, program ini kurang berjalan maksimal pengembalian pembiayaan kegiatan

> *Penulis, Pengamat Ekonomi FEB UNG Muh. Amir Arham*

melakukan inovasi masih rendah yang sebetulnya butuh bimbingan services". Selain kualitas produk dan manajemen pengelolaan untuk

SDA yang dapat menikmatinya. merata kesemua daerah, hanya provinsi yang memiliki kekayaan masih menjadi primadona. Jenis investasi yang terakhir ini, tidak di sektor keuangan, investasi di sektor telekomunikasi dan mining %, tapi bunga kredit perbankan masih di atas 10 %. Selain investasi resiko tinggi. Kendati BI sudah menurunkan BI rate pada posisi 6,5 ketimbang menyalurkan kredit ke UMKM yang dianggap memilik berbeda, lebih merasa comfortable menyimpan uangnya di SBI keuangan, terutama memburu SBI. Industri perbankan tidak jauh memang mengalir deras, akan tetapi lebih banyak terserap ke sektor riil) saat ini sangat sulit. Uang (investasi) yang masuk ke Indonesia menunjukkan bahwa berharap investasi untuk industri besar (sektor pertumbuhan ekonomi. Asumsi ini tidak salah, tapi realitasnya perekonomian di sektor industrilah yang mampu mendorong Sebagian kepala daerah masih berkeyakinan, bahwa

sudah terbukti mampu memberikan kontriubusi yang tidak sedikit, investasi yang terkadang tidak disadari pemerintah daerah. Daerah masih sangat sulit dalam realisasi, karena banyaknya hambatan bupati/walikota sampai keluar negeri untuk menggaet investasi miskin SDA harus menggenjot pengembangan sektor UMKM yang karena itu lebih realistis. yang minim SDA, harus lebih fokus pada pengembangan UMKM, termasuk penyerapan tenaga kerja. Upaya dan road show gubernur, Tidak salah kemudian, pemerintah daerah terutama yang

dirilis oleh International Finance Corporation (IFC) dan World "Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepeneurs" yang secara optimal. Karena itu, tidak mengherankan kemudian laporan ditelorkan, tapi sinergi dengan pemerintah daerah belum sejalan Pada tingkat pemerintah pusat, sudah banyak program yang

> sebelumnya berada diperingkat 115 dari 183 negara yar yang dipublikasikan oleh mereka dengan menilai as Laporan ini merupakan yang ke-8 dari rangkaian lapora Bank menempatkan Indonesia pada posisi 121, melorot o

regulasi bisnis kunci untuk perusahaan lokal.

pemerintah sepertinya kurang happy. dengan baik oleh pemerintah, sementara survey IFC ke 55 naik pada posisi ke 44. Survey yang terakhir cukup d yang merilis peringkat daya saing Indonesia meningkat d bertolak belakang dengan hasil survey dari World Econom kenaikan (perbaikan) adalah permulaan bisnis. Hasil ini t dianggap paling buruk adalah akses kredit, dan sedikit m investor, pajak, kontrak usaha, dan penutupan bisnis. T properti, kemudahan memperoleh kredit, perlindungan indikator usaha yang dijadikan dasar penilaian 'doing Indonesia, enam indikator menunjukan penurunan yakni pe batas, pelaksanaan kontrak dan penutupan bisnis. Dari bisnis, berkaitan dengan izin konstruksi, pendaftaran prope 2009 hingga Mei 2010. Sembilan indikator itu adalah: F berbagai indikator. 'Doing Business 2011' ini meliputi per kredit, perlindungan investor, pembayaran pajak, perdagan Peringkat dibuat berdasarkan 9 topik yang di

yang berbasis lokal, terutama kegiatan ekonomi kreatif ser merupakan penggerak utama ekonomi. Salah satunya sektor konsumen (rakyat) dan permintaan mereka untuk barang ekonomi lokal dari demand side kurang diperhatikan, menggerakkan perekonomian, kegiatan ekonomi daera sebagai produsen dan bersedia menciptakan barang dan ja banyak bergantung dari pemerintah. Sementara penger pusat, bertumpu pada supply side, artinya pemerintah t daerah terlalu bergantung transfer dan bantuan dari pe menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selama ini, pe semangat melakukan perbaikan. Pada tingkat lokal, pe daerah memiliki kewajiban untuk terus membenahi pelay: survey yang baik-baik saja, karena itu tidak akan me investasi bisa terus mengalir. Jangan hanya mau meneri diterima dengan terbuka sembari terus melakukan perbai Apapun hasil survey tentang daya saing Indones

terus didorong sebagai engine of growth ekonomi.

Kekerasan Terhadap TKI, Akar Masalahnya Kemiskinan dan Lemahnya Perlindungan (1)

Amier Arham* Manuel Arham Bisnis UNG

berbagai negara masih saja terus terjadi, muhan seolah tidak mengenal perikemanusiaan. Suyati karena membunuh majikannya muyurakat yang care terhadap kasus ini. Jika muncul, terutama jika menjadi headline pemerintah seolah sigap, terkesan sangat mureka yang mengalami kekerasan. Sehingga penanganan yang reaktif, ibarat pemadam murkas mereka, dan sepanjang tidak ada banyak berdiam diri.

makin mengindikasikan perhatian terhadap Suyati III IIIIM dibolehkan lagi menjadi TKI, ia menghadapi hanya saja tidak terekspose secara luas oleh media. mplinian hukum. Tapi faktanya keringanan hukum tidak pundungan kendati diklaim oleh pemerintah sudah IIII puncung, pemerintah tidak mengetahui sama sekali, III gunting oleh majikannya di Arab Saudi, serta HH Buyati. milik sekalipun semestinya tidak diperlakukan seperti a wolah tidak memiliki martabat sama sekali, jika ia would seorang diri, karena negara tidak hadir di sana berlunggungjawab tidak maksimal karena Im midah berulang kali terjadi, bahkan kasus yang Intiliwa yang memilukan ini menggambarkan bahwa manpah yang mencuat akhir tahun lalu bukan kasus Komalasari TKW dari Cianjur kemudian jasadnya schingga pemerintah kerajaan Arab dari segi usia, merunut pada aturan upaya

IKI serupa muncul seperti ini, tipikal pemangku

sudah berbuat, bahkan ada kementerian yang menangani masalah ini menterinya rajin mengiklan diri setiap usai menandatangani MoU tentang ketenagakerjaan sebagai bukti "keberhasilannya" membenahi regulasi ketenagakerjaan. Namun begitu masalah TKI muncul, pihaknya menganggap bahwa yang memiliki jangkauan kewenangan pelaksanaan, lembaga lain. Kasus pemancungan Suyati, sudah direspon oleh presiden meski sangat terlambat bila dibandingkan respon terhadap permasalahan yang mendera diri dan keluarganya, seperti SMS fitnah, pemberitaan negatif dari media asing, atau merasa jadi sasaran teroris.

Ini indikasi bahwa pemerintah begitu lemah memberikan perlindungan terhadap warganya, diplomasi terhadap negara tujuan pengiriman TKI begitu lemah, terutama TKW yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga (pekerja migran). Padahal mereka sangat berjasa mendatangkan remitansi (devisa) terhadap negara, karena itu disandangkan gelar, TKI sebagai pahlawan devisa. Berdasarkan data Worl Bank, pada tahun 2009 remitansi yang didatangkan para TKI di luar negeri memberikan kontribusi sekitar 1,3 persen terhadap PDB atau sekitar 6.793 dollar AS. Keberadaan mereka menyumbang remitansi terhadap negara asal dan ekonomi global. Sangat signifikan peran mereka, sekali pun hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga memungkin produksi barang dan jasa, implikasinya terhadap perputaran ekonomi global terus berjalan.

Dampak ikutan ekonomi atas kehadiran mereka cukup luas, menggiatkan bisnis perbankan, pengiriman barang dan uang, industri penerbangan dan firma hukum. Kondisi ini tentu saja menggiurkan banyak pihak, tidak hanya bagi TKI itu sendiri akan tetapi juga banyak berkepentingan, terutama Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Jumlah PJTKI terus mengalami penambahan, jasa TKI (pekerja migran) sepertinya menjadi "tambang emas" buat mereka. Calo dan kepanjangan tangan para PJTKI bergentanyangan keluar masuk kampung. Tempat-tempat sasaran beroperasi mereka di kampung-kamtong jumlah penduduknya relatif padat, dan di kantong-kantong kemiskinan. Mereka beroperasi mencari calon tenaga kerja dengan menjanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji besar.

Di tengah himpitan ekonomi, dan lingkaran setan kemiskinan terus melilit tidak ada pilihan lain, tawaran itu cukup menggiurkan.

Kendati para pekerja migran (TKW) meninggalkan anak selama bertahun-tahun. Hal ini sejalan dengan hasil survey remitansi TKI yang dirilis oleh Bank Indonesia, bahwa mot para pekerja migran yakni mencari penghasilan yang mengumpulkan modal untuk membuka usaha, menambah karena penghasilan suami kurang, terbatasnya lapangan p diajak tetangga, teman atau keluarga.

Jika ada pilihan lain profesi yang dapat di mencukupi biaya hidup mereka, menjadi buruh migran menjadi pilihan. Pekerja migran yang bekerja di luar n banyak resiko dan pengorbanan, tapi kenyataannya tidak daj karena tuntutan ekonomi. Selain alasan ekonomi, pekerja mi karena ada faktor pendorong dan penarik di dalamnya. Kh menyebutkan bahwa fenomena buruh migran tak uba urbanisasi, faktor penariknya peluang kerja di luar negeri contoh pendahulu yang "sukses". Sebaliknya, lapangan desa, kemiskinan dan marginalisasi menjadi faktor pendoron Asumsi saya faktor pendorong dan penarik da

Asumsi saya, faktor pendorong dan penarik da dengan cara menghentikan pengiriman TKI (pekerja misektor non formal, karena merekalah yang rentang terhada Cara lain dengan membangun industri pertanian, atau lapangan kerja di desa. Tapi sayang pemerintah, melalui Me Kerja dan Transmigrasi berasumsi bahwa menghentikan pekerja migran "melanggar" hak azasi manusia untuk 1 pekerjaan. Tanpa di sadari bahwa pemerintah justru lalai gagal memberikan penghidupan yang layak bagi pemerintahlah yang sesungguhnya melanggar hak azasi masy

Ia lupa bahwa menjadi pekerja migran dipilih kare lapangan kerja di desa mereka, indikasinya bisa dilihat seka nasional angka kemiskinan terus menurun, namun pada bersamaan angka kemiskin di pedesaan justru meningkat. Memiskinan di pedesaan sebagai akibat makin menurunnya pekeniskinan di pedesaan sebagai akibat makin menurunnya pekeniskinan di pedesaan sebagai akibat makin menurunnya petani). Demil kepemilikan lahan makin menyusut, rata-rata kepemilikan petani saat ini sekitar 0,25 Ha. Pembangunan yang terus justru membuat mereka makin terdesak (terpinggirkan). Bersa

Kekerasan Terhadap TKI, Akar Masalahnya Kemiskinan dan Lemahnya Perlindungan (2)

Hallar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG M. Amier Arham*

m daripada mereka menganggur, menjadi pekerja migran menjadi mutabatnya sekalipun dibayang-banyangi kematian dan mana mareka yang bekerja di sektor pertanian makin terpuruk iliperuntukkan pembangunan industri dan properti. Akibatnya mmupun revitalisasi sektor pertanian tidak memberikan minyanat, ackalipun sudah banyak aturan bahkan UU yang mannan pedessan. Para pemilik modal terus memburu lahan minimah untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan harus malahih selama implementasi otonomi daerah, tata guna lahan pembangunan milimuunn dari industri atau sektor non tradeable makin menggelembung, sektor jasa, properti yang makin memprioritaskan sektor industri yang berbasis mananani yang lebih banyak menggunakan capital ekonomi selama ini yang ditempuh,

manung kantong transmigrasi sangat sukses mina hanya gagai dalam manajemen ketenagakerjaan manimumi pun sepertinya tidak lagi menjadi agenda iliqui memberikan peluang menurunkan angka ment diserbagai daerah cukup sukses mengubah dan shonomi lokal. Tapi sepertinya Kementerian Hampung, Sumatera Selatan, Jambi,

man transformaci etos kerja, pada akhirnya in in a min lahan yang dapat digarap. Dengan i limit tijiun transmigrasi yang menolak III dan Papua manda manana daerah. Cukup rasional, para Hanna sala program transmigrasi menghadapi Manarnya audah memiliki etos kerja dari panduduk setempat merasa Ada banyak contoh, daerah-I and their transmigrast di Papua pilkada maka gandenglah pemimpin

and the latest informed, kemudian ikut and a subsection of the subsec harva dihidupkan kembali III IIIIIIII transmigrani, sebab ini juga Juga transmigran gagai

urusan ketenagakerjaan berbasis tansmigrasi sudah diserahkan ke daerah, tidak berarti menyambungkan kepentingan daerah asal dan daerah tujuan transmigrasi. Meskipun berupa lahan dan perumahan dijual dan kembali menggeluti pekerjaannya semula. Kehadiran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibutuhkan disini, kementerian ini membiarkan begitu saja.

Lemahnya Perlindungan TKI

Kematian, kekerasan dan pemancungan para pekerja migran maupun TKI secara keseluruhan masih tetap muncul. Bahkan ada 23 kasus yang sama dialami yang menangani TKI di luar negeri sudah lebih dari cukup, ada Kemenakertrans, BP2TKI, Kemenlu, PJTKI dan Kementerian Hukum HAM. Tapi untuk mengatasi hukuman dan tindakan bagi TKI adalah akibat, bukan sebab. Dari segi kelembagaan semacam Suyati menanti di Arab Saudi. Seharusnya lembaga yang menangani mereka kenapa tidak memaksimalkan saja lembaga yang sudah ada? Satgas sudah barang tentu memiliki implikasi, baik penganggaran maupun personil, yang terbiasa menyelesaikan masalah lewat Satuan Tugas (Satgas). Pembentukan masalah TKI sepertinya lembaga ini, presiden merasa tidak cukup, karena itu pihaknya bekerja keras membantu, dan terpenting mengatasi sumber masalahnya,

yang kerap muncul kepermukaan kasusnya yang menonjol yaitu di Arab Saudi dan tanggung-tanggung presiden pun membanggakan perbaikan ini yang disampaikan Manajemen penempatan dan perlindungan bagi mereka makin membaik. Tidak Malaysia. Meski demikian, kasus per kasus mengalami penurunan seperti klaim lewat pidatonya dihadapan peserta konferensi ILO awal bulan ini. Lain halnya dari pemerintah termasuk yang memegang otoritas penempatan TKI di luar negeri salahnya pemerintah dan LSM yang memiliki kompetensi melakukan advokasi orang. Perhedaan angka statistik ini sebetulnya sudah menjadi masalah, tidak ada maupun tidak digaji. Sementara data pemerintah (BNP2TKI) hanya mencatat ratusan sebanyak 5.563 orang baik karena penganiayaan, sakit, dan korban kekerasan seksual data mereka menunjukkan bahwa TKI (TKW) bermasalah, khusus di Arab Saudi pandangan LSM seperti Migran Care, menurutnya angka TKI bermasalah masih tinggi (BNP2TKI) bahwa jumlah pekerja migran (TKI) bermasalah terus menurun. terhadap pekerja migran bekerjasama, dan saling bersinergi. Permasalahan TKI di luar negeri begitu banyak dan beragam, akan tetapi

seperti data-data yang di lansir Migran Care. Dalam dialog yang cukup panas di salah (Jumhur Hidayat) bahwa data Migran Care itu mungkin dari langit ketujuh. pemerintahlah yang paling sah seperti yang diungkapkan oleh kepala BNP2TKI sekitar 4.000-an, sementara data BNP2TK1 melansir "hanya" seratusan. Terkesan, data menunjukkan bahwa pekerja migran yang menghadapi masalah di Malaysia saja ada satu televisi swasta nasional makin memperkuat dugaan saya ini, data Migran Care Tidak dapat disangkal, justru pemerintah terkesan menegasikan peran LSM

serupa terus berulang. Afirmasinya, pemerintah sangat lemah melakukan diplomasi Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri menetapkan usia minimal bekerja sebagai berungkat. Demikian juga UU No. 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan Malaysia misalnya tidak berjalan efektif, karena pekerja migran ini tetap banyak yang terhadap perlindungan TKI. Kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran ke Kokom sudah banyak, tapi penyelesaian secara hukum tidak tuntas, serta peristiwa Kekerasan yang dialami para pekerja migran jauh sebelum Sumiati maupun

pembantu rumah tangga diluar negeri adalah 21 tahun. Tapi nyatanya ban dibawah 21 tahun dipekerjakan melalui perdagangan manusia (irafick bekerja diluar negeri dengan memanupulasi umur mereka

wilayah timur tengah, juga menunjukkan titik lemah pemerintah karenuntuk pekerja rumah tangga dianggap urusan internal rumah tangga bagi dokumen dan alat komunikasi TKW berhak dikontrol oleh majikan budak, jika ia seorang wanita maka berhak dimiliki oleh tuannya (pria). I relasi gender sangat tidak setara. Bagi orang Arab, pembantu rumah ta ketenagakerjaan.Secara antropologis kultur orang Arab dan Indonesia san pengawasan berada di kementerian dalam negeri tempat bekerja para karena pekerja migran bukan dianggap sebagai pekerja (buruh). Pena hanya dihubungkan dengan penyalur tenaga kerja melalui agen. Status pek perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan penempatan TKW. Pek semacam ini sulit dirubah, termasuk persepsi bagi pemerintah dinegara-r kementeriam tenaga kerja. Implikasinya, mereka tidak terikat dengan a tengan. Sementara peristiwa kekerasan yang mendera para pekerja

mengurangi kekerasan bagi mereka. Paling penting dari semua itu ac alat komunikasi (handphone) bagi para pekerja migran bukan solus perlindungan yang jelas dan tegas. Ada hukum tertulis secara terinteg perjanjian kerja antar kedua negara. Selama ini tidak ada mekanisme da Dengan melihat kondisi itu, rasanya kebijakan pemerintah untul

hukum yang permanen untuk melindungi pekerja migran. Persoalan perlindungan pekerja migran, patut kita belajar dari

oleh Fhilippine Overseas Employment Agency (Kompas, 26/11/2010). migran sakit, hingga pengesahan kontrak kerja oleh kedutsan Filipina d layak dan makan tiga kali sehari, bebas biaya kesehatan dan rumah saki kurang dari delapan jam berturut-turut. Paspor dipegang pekerja migras Malaysia, antara lain jam kerja tidak lebih dari 10 jam, dengan waktu i kerja standar yang ditandatangani antar pekerja migran asal Filipna dan n dibekali keterampilan memadai, aspek-aspek perlindunganpun dimuat di melindungi pekerja migran mereka. Para pekerja migran Filipina se tenaga kerja. Pemerintah lebih banyak bertumpu pada admnistratifnya diperketat. Umumnya calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan sertifikasi calon tenaga kerja, dan ternyata sertifikasinya juga mudah dip kemampuan keterampilan maupun berbahasa semua diserahkan kepi Sclain perlindungan, pola rekrutmen, pengawasan dan penempatan perlu ekspektasinya. Dugaan saya, kekecewaannya kerap ditimpakan kepada majikan merasa dirugikan karena sudah mengeluarkan biaya yang komunikasi antara majikan dan pekerja migran dipastikan tulalit, te Kasus Sumiati menjadi cermin yang terang, ia tetap diberangkatkan k lagi diperlakukan kasar pada akhirnya ia bertindak nekat dengan kekerasan yang berulang-ulang, pada akhirnya seperti kasus Suy Mereka merasa kecewa karena pekerja rumah tangga yang didapat tidak kendati tidak dapat berbahasa Inggris dan Arab. Dengan kemampuan i

Hasil Pilgub Sulawesi Tengah, Menggantang Asa

M. Amier Arham* Hat Pusat studi Kebijakan Publik Sulteng

nemilihan Umum (Pemilu) sepertinya bukan lagi acara memilih wakil dan calon pemimpin. Ia sudah menjadi mulerung membosankan dan kurang memiliki lagi daya waktu lima tahun, setidaknya rakyat disibukkan dengan maling sedikit empat event Pemilu (Pemilu legislatif, pemilukada gubernur dan Pemilukada walikota/bupati).

Pemilu yang berlangsung di Indonesia sebagai menerapan demokrasi. Meskipun terkadang "demokrasi" butan apakah ia menjadi tujuan atau hanya "sarana" banyak studi dan literatur klasik megara yang relatif demokratis perekonomiannya lebih sejahtera. Tentu saja hasil studi ini perlumnyak juga negara menunjukkan perkembangan politik demokrasi tidak berjalan baik, akan tetapi ukup muju. Tiongkok dan Singapura boleh kita rujuk mudah maju secara ekonomi, tapi terkebelakang dengan

yang sudah berjalan baik, belum tentu bulun yang baik. Apalagi jika pemimpin lahir dari yang hanya bersifat prosedural. Meski demokrasi itu dengan prinsip suara terbanyak, entah dengan cara beluk, kendati pintu bagi calon independen sudah dibuka belum membutuhkan kapitalisasi yang besar, menyulitkan belum kementara figur yang ditawarkan oleh partai politik belugi, logi, log lagi). Pada akhirnya, figur pemimpin yang terbatas, atau yang itu-itu lagi.

Pemilukada (baca pemilihan gubernur) Sulawesi un burlulu, juga tidak terlepas dari kondisi itu, masih lokoh "4 L", atau figur lama, dan isu-isu kampanye muli unang. Untuk Pilgub tahun ini, ada lima pasangan ligur baru, bahkan itu-itu juga yang bertarung

lima tahun lalu. Kalaupun ada calon gubernurnya figur yang baru, tapi pasangannya figur lama yang sama-sama pernah berkuasa. Isu kampanye yang diusung pusarannya pada keterbelakangan Sulawesi Tengah diberbagai bidang. Pada sisi lain, calon yang pernah berkuasa merasa "berhasil" dan "berpengalaman".

Dari semua itu, ada fakta ekonomi yang menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang terluas di regional Sulawesi, paling kaya yang merupakan resources yang dapat menciptakan welfare buat masyarakat. Meskipun fakta juga menunjukkan bahwa daerah ini juga relatif tertinggal dengan provinsi tetangganya, meskipun provinsi yang baru dimekarkan. Kondisi ini disadari oleh pemerintah daerah, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota, karena itu diperlukan Inpres percepatan pembangunan.

Melihat kondisi itu, sembari mencermati para figur yang bertarung pada 6 April lalu apakah rakyat Sulawesi Tengah masih punya ekspektasi agar dacrahnya menjadi lebih maju, karena ditopang oleh resources yang cukup banyak? Mengingat, semua pasangan calon gubernurwakil gubernur masih berpusar pada pada tokoh-tokoh "4 L". Sulawesi Tengah yang kaya resources, butuh pasangan pemimpin muda dan visioner, sayang hasrat itu sepertinya belum dapat terwujud selama lima tahun kedepan. Wajar rakyat pesimis dengan para figur yang bertarung, meskipun tetap kita harus punya asa untuk maju, setelah pasangan Longki-Sudarto meraih suara terbanyak.

Sofyan Wanandi (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia), kendati ia seorang turunan Tionghoa, tapi nasionalismenya tidak dapat diragukan. Ia merupakan salah seorang kelompok minoritas menjadi bagian penting aktifis 66 pada masa lalu. Sekali waktu pernah berujar, perekonomian kita bisa tumbuh 6 %, sekalipun pemerintah tidak perlu bekerja, dan tidur-tiduran saja. Rakyat akan bekerja sendiri, hal ini mungkin serupa dialami oleh rakyat Sulawesi Tengah. Daerah ini diklaim sebagai penghasil rotan dan kakao terbesar di Indonesia, sementara Indonesia termasuk salah satu negara penghasil kakao terbesar dunia, selain Pantai Gading. Berarti Sulawasi Tengah termasuk kontributor kakao dunia, tapi saya mungkin miopik sehingga kurang jelas penglihatannya terhadap kebijakan pengembangangan kakao Sulawesi Tengah yang dijalankan oleh pemerintah, baik pada level provinsi maupun kabupaten penghasil.

Semoga bacaan saya yang sempit, tidak mengikuti perkembangan kalau ada kebijakan inovatif dari pemerintah untuk mengembangkan kakao. Kebun kakao yang ada di Sulawesi Tengah "nyaris" tak ada sentuhan dari pemerintah, produksi kakao yang tinggi diklaim keberhasilan tidak

lepas dari jerih payah petani itu sendiri, mulai penyiapan lahan, p pemeliharaan, panen, pasca panen dan penjualan semua dilak petani. Pemerintah tidak (belum) memberikan sentuhan untuk me produksi kakao, semua dilakukan sendiri oleh petani.

Sampai disitu, idealnya dalam proses penggara pemeliharaan biarkan petani bekerja sendiri, akan tetapi pada pe pemerintah tidak boleh lagi absen, apalagi menyangkut pemerintah harus men-drive hasil panen kakao, atau produk lainnya ke kantong-kantong pasar, baik regional maupun intu Suatu kenyataan, Gorontalo sudah dilabel sebagai penghasil jagur jagung itu sendiri banyak yang didatangkan dari Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan. Karena itu dalam kampanye Pilgub baru-ba sorotan, Sulawesi Barat yang baru dimekarkan sudah bergerak ci maju, Gorontalo baru lahir beberapa hari lalu sudah lebih maju, yang bersamaan ada komplain dari pasangan lain yang dia menyesatkan, bahwa jagung Gorontalo tidak seberapa, produk kal lebih rendah dari Sulteng.

Masalahnya, bukan berapa banyak jagung yang dip Gorontalo dan berapa banyak yang diangkut dari Sulteng, tapi I Gorontalo mampu men-drive komoditi ini kejalur pasar int Dengan permintaan yang tinggi, dan supply yang kurang dari sendiri, maka tentu akan mencari supply alternatif, karena mer memiliki "brand". Dengan tidak memiliki pretensi menggurui, mendasar Sulwesi Tengah, adalah kemampuan pemimpinnya u drive hasil komoditi pertanian yang lemah, usaha dan inov membuat "brand" tidak ada.

Dalam hayalan saya, gubernur-wakil gubernur yang ter pilgub tanggal 6 April 2011 dapat melakukan banyak inovasi, pemerintah provinsi dan kabupaten kota tidak boleh berjalan send Apalagi hanya menjalankan ruitinitas pemerintahan semata, ter melakukan inovasi. Sebab kunci dari kemajuan suatu daerah ter inovasi dan kreatifitas, kendati daerah kaya ditambah kucuran d percepatan pembangunan, niscaya daerah ini selamanya akan disemua bidang. Hal ini sudah menjadi bukti, Inpres percep mampu mengakselarasi pembangunan Sulawesi Tengah. Wajar berharap hasil Pilgub kali ini, meskipun kita tahu bukan hasil yang paling ideal, tapi minimal rakyat Sulawesi Tengah dapat me asa pada kedua figur yang sama-sama pernah memimpin l Semogal!

Pertumbuhan Kredit Perbankan di Gorontalo, "Paradoks Ekonomi"

ullun terakhir ekspansi bisnis perbankan di Gorontalo cukup ulluk tahun 2010 – 2011 ada empat bank swasta yang membuka na llunk Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega, Bank Sinar ullun lutuk menghimpun dana pihak ketiga, selain untuk lutut untuk menghimpun dana pihak ketiga, selain untuk lumang-masing bank swasta ini sudah barang tentu mem-berikan ulum menawarkan produk layanan yang memiliki daya tarik uluhan bank swasta di Gorontalo akan menguntungkan bagi masya-

munun wasta yang makin ekspansif membuka cabang baru, tidak dapat mununpak dari pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya dengan makin munu dapat menyalurkan kredit (asumsinya, jumlah uang beredar dumpak terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, tidak munun menjadi sehat, justru sebaliknya dapat menciptakan "paradox mpoktif itu, kita asumsikan saja bahwa pereko-nomian Gorontalo hunk umum (swasta) makin bertambah. Permintaan kredit terus hunk umum (swasta) makin bertambah. Permintaan kredit perbankan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Posisi menuntuhan menurut hasil rilis BI Gorontalo, per Februari 2011 sudah munun, pada bulan yang sama di tahun 2010 penyaluran kredit hanya

menulimulus pertumbuhan ekonomi kurang optimal, karena kredit III IIII yang dihimpun dari pihak ketiga (dana lokal), karena itu bank IIII yang relatif rendah. Namun, dilihat dari kontribusinya terhadap ham helapi kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena III purbunkan di Gorontalo lebih dari separuh untuk kredit konsumsi. IIIIIII. Dengan membandingkan dengan data penyaluran kredit dengan menintan kredit meningkat tajam, bahkan melampaui target nasional Inflimpun terjadi disparitas yang mencapai hampir Rp. I triliun. Satu menunjukkan bahwa peran mumburikan multiplier effect yang tinggi bila dibandingkan kredit milimida baik bagi perekonomian Gorontalo, karena kredit mengalami linni merupakan hal yang baik karena kredit konsumsi memiliki Malah ming yang dipinjam digunakan untuk keperluan pribadi atau minjum dana antar kantor bank untuk memenuhi permintaan kredit 🝿 whesar Rp. 2,16 triliun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya ili dihandingkan dengan bunga yang dihimpun dari dana lokal. Dari ternebut akan memberatkan bagi bank peminjam, karena bunga ilima pihak ketiga murni yang dihimpun di Gorontalo sampai masalah bagi perbankan itu sendiri, apabila pengucuran kredit

> M. Amier Arham* * Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis-UNG, Kandidat Doktor Umu-Ekonomi Pascasariana Unpad Bandung

investasi atau modal kerja.

Walau demikian kredit konsumsi tetap berperan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini meng-indikasikan bahwa perekonomian Gorontalo terus meng-alami pertumbuhan (growth). Meski elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap serapan tenaga kerja relatif rendah. Karena itu pertumbuhan ekonomi seperti ini tidak ber-kualitas, ia mengalami overheating karena kurang berdam-pak terhadap penyerapan tenaga kerja. Ditingkat nasional pun mengalami hal serupa, world bank sudah mengingat pemerintah Indonesia untuk mewaspadai perekonomian saat ini yang terus tumbuh, bahkan pertumbuhannya terlalu cepat. Sementara angka pengangguran masih tinggi, ini adalah gejala pemanasan ekonomi (overheating economy).

Seiring dengan makin membaiknya kondisi makro ekonomi nasional, permintaan kredit perbankan juga makin tumbuh. Bank umum terus membukukan pertumbuhan keuntungan (profit) sepanjang tahun 2010 lalu, meskipun suku bunga bank luar negeri lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga dalam negeri. Akan tetapi keadaan ini sekaligus menjadi daya tarik untuk berinvestasi di sektor keuangan, bahkan bank umum pun ikut-ikutan lebih suka menyimpan uangnya di BI karena tingginya suku bunga, dibandingkan untuk menyalurkan kredit ke sektor usaha. Dampaknya, beban BI terus bertambah untuk membayar bunga, sektor industri kurang berkembang terutama industri berbasis labor intensive.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah Daerah?:

Makin tingginya permintaan kredit perbankan terutama untuk konsumsi, memancing beberapa bank umum melakukan ekspansi membuka cabang baru di beberapa daerah. Selain itu, bank-bank umum nasional dalam menyalurkan kredit konsumsi sudah semakin mudah. Tengok saja bagaimana bank menawarkan produknya di pusat-pusat perbelanjaan dengan membuka gerai untuk menjaring calon pengguna kartu kredit (credit card), dengan proses yang sangat mudah.

Penawaran kartu kredit yang makin massif, kurang selektif terhadap calon pengguna, baik dari segi usia maupun penghasilan berimplikasi pada kemampuan untuk membayar utang. Tidak berbeda jauh, pemberian kredit konsumsi untuk para PNS prosesnya pun begitu gampang. Akan lain halnya kredit investasi, atau kredit untuk usaha kecil yang menyentuh langsung masyarakat berpenghasilan rendah, perilaku bank berkebalikan. Syaratnya cukup ketat, prosedurnya relatif berbelit-belit.

Secara nasional, pada tahun 2010 permintaan kredit untuk konsumsi mencapai 30,6 persen dari total permintaan kredit, lebih tinggi dari kredit investasi sekitar 20 persen.

Dilihat dari penyaluran kredit secara sektoral, partum-buhan kredit selama ditopang oleh kredit perumahan, kendaraan, dan alat-alat rumah tangga. Dit (Gorontalo) tidak jauh berbeda dengan kondisi nasional. Penyaluran kredit l Gorontalo mendominasi pangsa kredit terbesar di Gorontalo yaitu sel persen. Sementara itu, kredit modal kerja tercatat memiliki pangsa sel persen terhadap total kredit.

Apabila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Gorontalo dengan derkredit, asumsinya dapat mengakselarasi pertumbuhan ekonomi sekaligus terhadap makin menurunnya jumlah pengangguran dan angka kemiskin menujuk pada data yang ada, angka pengangguran di Gorontalo 2010 mene jiwa dari 430.334 orang angkatan kerja, sementara angka kemiskinan ber persen. Kemiskinan Gorontalo masih yang tertinggi di Sulawesi serta ma atas presentase nasional yang berada di tingkatan 14,15 persen. Angka-ang hatannya tidak terlalu besar, akan tetapi jika diprosen-tasekan dengan jumla Gorontalo, dengan membandingkan dengan provinsi yang berpendu jumlahnya lumayan tinggi, karena itu angka tersebut memberikan gaml bahwa perekonomian Gorontalo mengalami gejala "paradox".

Dengan mencermati uraian itu, kredit konsumsi yang lebih tinggi dibanding kredit usaha di Gorontalo, peran pemerintah daerah diperlukan, dengan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Efisiensi penggunaan anggi diperlukan, terutama untuk belanja pegawai, sebaliknya belanja publik sebab selama ini biaya rutin belanja pegawai merupakan salah satu kontril permintaan kre-dit konsumsi. Ditengah rendahnya kemampuan dunia us sangat berperan menciptakan stimulasi perekonomian daerah terutama pe infrastruktur atau pembiayaan overhead social lainnya. Pada saat yang pemerintah daerah menghilangkan berbagai jenis hambatan dunia usaha utama dunia usaha saat ini adalah minim dan rusaknya infrastruktur, beban usaha menjadi tinggi.

Minimnya investasi swasta, serta belum berkem-bangnya industri-indus Gorontalo, kegiatan pembangunan melalui pembiayaan APBD merupakan satunya mendorong kegiatan ekonomi produktif, maupun menggerakkan Selain bersumber dari APBD, bantuan pemerintah pusat menjadi san Pemerintah pusat, sudah seharusnya membuat kebijakan yang bersifat "big daerah, seperti Gorontalo yang masih minim investasi swasta. "Big pusi yang dimaksudkan yaitu memberkan pembiayaan yang besar pada si potensi. Apresiasi yang patut kita berikan kepada Menteri Kelautan dari dengan mengalokasikan dana program minapolitan sebesar Rp. 16 M, deng di Gorontalo Utara. Setidaknya ini dapat menjadi stimulasi bagi per Gorontalo di sektor perikanan dan kelautan yang berdampak luas bagi per Semogai.

Negeri Importir; Implikasi Kebijakan yang Kurang Berpihak (1)

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

mundi incaran negeri-negeri Eropa. Lama-kelamaan kekayaan alamnya, mureka, berlanjut pada sistem kerja rodi untuk memproduksi dibutuhkan di pasar Eropa, sekaligus menjadikan nusantara burlanjut hingga kini meskipun dengan metode yang berbeda, lalu dikelompokkan, setidaknya ada dua potensi utama dupat dijadikan sebagai "keunggulan komparatif", yakni mam dan jumlah penduduk yang besar, selain China, India dan umberdaya alam berada di atas tanah, di bawah permukaan di dalam laut. Meski demikian kekayaan sumberdaya menjadi kutukan bangsa ini, sebab hasilnya belum mampu banyak

otu besar sampai di pelosok desa, anak putus sekolah disetiap lulun, penduduk desa bermigrasi masuk kota mencari yang layak, TKI jutaan di luar negeri yang tidak terlindungi mul, karena minimnya ketersediaan lapangan kerja dalam mek lain, berulang kali pemerintah mengklaim sukses dalam terutama mengatasi stabilitas makroekonomi, cadangan kemiskinan menurun, serapan tenaga kerja meningkat, serta muksesan lainnya. Pada kenyataannya memang, secara statistik

mynk cerita di bidang perekonomian, pada saat yang bersamaan itu menyimpan potensi "duka" dan amat membahayakan nusional dalam jangka panjang. Meski efeknya sudah terasa purtinya pemerintah tidak beranjak dari model kebijakan yang ditempuh dari tahun ke tahun. Dalam PDB, jika peraktor ada sembilan sektor sebagai kontributor netidaknya bila dibedah satu persatu permasalahannya memiriskan hati sebagai bangsa yang kaya sumberdaya dan busur. Mulai dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan aktor industri pengolahan, sektor listrik gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa.

yang banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah. itu mafioso ekonomi turut bermain pada kegiatan ekspor-impor yang kurang peduli dengan kepentingan bangsa, mereka sesungguhnya pemburu rente (nasionalisme) seringkali dikalahkan dengan pragmatisme kebijakan. Selain terhadap kesiapan perangkat pendukung, keberpihakan terhadap bangsa untuk kepentingan bangsa. Pada level pengambil kebijakan biasanya abai aspek ekonomi dan mengabaikan faktor sosial, apalagi masalah keadilan eksploitatif yang kurang menguntungkan secara ekologis, lebih melihat pada saja pemanfaatannya kurang optimal. Bahkan kebijakannya cenderung sebab pada dasarnya kekayaan yang dimiliki bangsa ini begitu besar, hanya menutup kemungkinan ada pemikiran alternatif sebagai bantalan kebijakan, bahkan kedalam sub sektor. Dari konstruksi masalah yang ada, tidak Tidak sekedar itu saja, akan ditelaah berbagai implikasinya secara luas, turunanya, sebab sektor paling banyak digeluti angkatan kerja kita. Sektor ini hanya hendak mengulas masalah yang dihadapi sektor pertanian dan juga sesungguhnya memiliki keunggulan daya saing, namun justru terpuruk. Namun dari keseluruhan sektor yang disebutkan di atas, tulisan ini

Negara Agraris dan Membanjirnya Produk Impor Pertanian.

pengembangan kegiatan di luar pertanian (off-farm). peningkatan kesejahteraan petani hanya besar masih terfokus pada aktivitas di lahan pertanian (on-farm), padahal populasi. Kegiatan sektor pangan dan sub sektor pertanian lainnya sebagian dari potensi yang ada, dan pertumbuhannya berkejaran dengan pertumbuhan ekspor industri olahan. Namun perkembangan sektor ini masih lebih rendah (PDB), atau malahan menjadi sektor andalan dalam kegiatan ekspor, terutama komoditi karet, sawit, kakao, kayu dan rotan di tengah lesunya kontribusi yang nyata terhadap total nilai ekspor dan produk domestik bruto Sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, separuh angkatan kerja Indonesia. Bahkan sektor tersebut juga memberikan peternakan, perikanan, dan hortikultura. Meski pada kenyataannya sektor Ada banyak masalah yang dihadapi bagi sektor dan subsektor pertanian, memberikan kesejahteraan secara maksimal bagi masyarakat secara luas. pertanian memiliki peran penting memberikan lapangan kerja bagi hampir sumberdaya alam sangat melimpah. Akan tetapi kekayaan itu belum Indonesia dikenal sebagai zamrud khatulistiwa, didukung

diperhadapkan oleh berbagai kendala, seperti buruknya sisten sarana publik terutama yang di dalamnya ketersediaan air irig petani, jaringan jalan perdesaan untuk distribusi pasokan bahan usahatani, dan ketersediaan dukungan permodalan. Ediperhadapkan pada penurunan kuantitas dan kualitas lahan teru banyaknya lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan kom kegiatan pertanian.

Dari sekian banyak masalah yang dihadapi sekto terutama sub sektor pangan, pada akhirnya petani yang menggelu kerap diidentikkan dengan kemiskinan. Karena itu banyak d beralih profesi bekerja serabutan di kota-kota besar, padahal subsektor pertanian cukup memberikan peluang untuk mens pulau-pulau besar di Indonesia, lahan tidur ratusan he pertanian dengan baik. Pada saat yang bersamaaan bar produktif beralih fungsi.

Selain itu politik pertanian, dalam hal ini berkait menunjukkan adanya keterlepasan keterkaitan antar sektor. Dala transformasi struktural, diasumsikan bahwa peranan sektor pertan menurun seiring dengan perkembangan industri. Meski pengembangan industri tidak boleh melupakan basis sumberdaya tektor pertanian, sebab bagaimana pun juga Indonesia merupak agraris. Sektor pertanian tetap dibutuhkan, karena itu diperlukan produktifitas. Minimnya prasarana dan sarana pendukungan kebijakan dengan sektor yang terkait, seperti indus kembali predikat yang pernah di raih, Indonesia sukses swasembada beras seperti pada tahun 1984.

Sebaliknya, dari periode ke periode pemerintahan k politik pertanian begitu elok didengar, namun dalam impleme tidak seindah dengan "dongen" dalam kampanye. Khusukomoditi beras sendiri, jangankan untuk mencapai swasembada impor beras tetap berjalan. Pernyataan pejabat publik yang me sektor pangan, tidak jarang kita terkesima mendengarnya namukesempatan yang berbeda mengkerutkan kening kita mender Bersambung!

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

ili bertolak belakang dengan pernyataan pejabat publik lainnya, mm Impor beras. Bahkan Selama 2010 ini total impor beras Illum lain bagi Indonesia untuk memenuhi stok pangan dalam melakukan ekspor beras. Beberapa bulan kemudian, ulul penambahan impor lagi sebanyak 250 ribu ton. whingga Indonesia tak perlu mengimpor dari luar. Malahan (7010) produksi beras nasional melampaui tingkat kebutuhan pemerintah jumlahnya bakal mencapai 1,33 juta ton, setelah misalnya pernyataan menteri pertanian, mereka menjamin

IIII berkaitan dengan sub sektor pangan, misalnya kedelai meski Wh kedelai cukup tinggi, dan bahkan sudah menjadi menu inni trendnya meningkat setiap tahun. Sebab protein yang winbuatan makanan tempe, tahu, susu, kecap dan lain-lain masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan iin) ditutupi dengan kebijakan impor. Kedelai sebagai bahan liipi kebijakan pendukung dari pemerintah cenderung kurang, pengadaan kedelai sebagai bahan baku produk makanan stok

minintaan yang lebih besar akan impor juga telah diramalkan miya, peningkatan impor kedelai yang mencolok belakangan ini llirung meningkat sejak 1975, dan berlanjut hingga saat ini. mangi jumlah impor kedelai kedalam negeri. Sebab impor Makan yang membuat harga kedelai dipasaran stabil dan Inhan untuk produksi kedelai cukup tersedia. Upaya produksi itu perlu di dukung oleh sektor hilir (off farm). undorong produksi lokal yang berdampak terhadap penghasilan iliiksi kedelai dalam negeri kendati mengalami peningkatan, jumlah kedelai impor. Peningkatan produksi kedelai tentu webngai komoditi pokok, seharusnya ada kebijakan affirmatif III, hasil produksi petani kedelai hanya sekitar 400 ton, atau hahwa produksi dalam negeri ketinggalan di jula ton pertahun. Dengan demikian impor kedelai mencapai memenuhi kebutuhan nasional sekitar 20 % dari total

mikhir, namun tidak mampu diimbangi oleh produksi dalam iii upnya meningkatkan produksi dalam negeri cenderung tidak nurika Scrikat telah menjadi negara pengekspor kedelai yang Indonesia. Kendati permintaan kedelai terus meningkat selama

Negeri Importir; Implikasi Kebijakan yang Kurang Berpihak (2)

insentif atau stimulasi yang dapat menarik bagi petani untuk menanam kedelai. Apalagi harga kedelai impor yang murah (terutama dari Amerika pengembangan kedelai di dalam negeri. ada, kalaupun ada petani enggan menanam kedelai, karena kurangnya Serikat) dan tidak adanya tarif impor menyebabkan tidak kondusifnya

pengembangan budidaya kedelai. daerah dan aparat pertanian (penyuluh) serta masyarakat pertanian dalam menekan ketergantungan pangan dari impor; (iii) partisipasi aktif pemerintah tercapai, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholder: (i) sistem permodalan, pengembangan infrastruktur, serta pengaturan tata niaga peningkatan efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan (ii) komitmen dari stakeholder swasta/pengusaha untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah, mulai dari subsisten hulu hingga ke subsistem hilir, dan insentif usaha. Agar tujuan dan sasaran pengembangan kedelai dapat kualitas produk, peningkatan nilai tambah, perbaikan akses pasar, perbaikan produksi melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, Untuk menekan laju impor diperlukan strategi peningkatan

4,3 juta ton. 6 %. Sebagai negara yang berpenduduk besar, bagi produsen gandum, sejak zaman orde baru hinga saat ini belum ada program pengembangan impor gandum menembus 5,85 juta ton atau setara dengan konsumsi terigu impor komoditi ini dimonopoli oleh perusahaan yang sudah menggurita dan bahkan diperkirakan setiap tahunnya konsumsi gandum nasional naik sekitar budidaya gandum, sementara kebutuhan terigu setiap tahunnya meningkat, linkage dengan industri makanan olahan lainnya. Untuk tahun 2010 realisasi Indonesia merupakan potensi pasar yang paling baik, belum lagi kegiatan Tidak jauh berbeda, gandum sebagai bahan dasar pembuatan terigu

terigu. Tapi industri hulunya (produsen gandum) tetap menguntungkan bagi olahan berbahan baku terigu naik. Jadi meski terjadi peningkatan impor mereka, apalagi produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi impor karena negara ini sudah menjadi sentra produk makanan olahan berbahan turunan terigu. Sampai disitu, bagi bangsa Indonesia cukup menguntungkan gandum tidak 100 % untuk konsumsi domestik, sebagian diekspor produk Permintaan terigu setiap tahunnya juga meningkat karena permintaan produk suplai pasti terganggu dan berdampak terhadap kenaikan harga-harga produk Saatnya nanti jika negara penghasil gandum mengalami gagal panen, maka turunan terigu (gandum). Porsi terbesar impor gandum untuk terigu, setara dengan 1 juta ton.

rendah atau tak memenuhi skala ekonomis, selain itu pemerintah tropis. Kalaupun ada, luas lahan produktivitas gandum tropis relatif masih efektif, alasan utamanya gandum kurang cocok dikembangkan di daerah Selama ini pengembangan budidaya gandum belum berjalan

> mengembangkan gandum dan tanaman gandum ditanam di datar untuk mencari lahan seperti itu bukan perkara sulit. Saya mend tinggi. Sepertinya, jika ini menjadi kendala utamanya, terasa agak dengan tanaman padi. Gandum lebih cocok ditanam di daerah k menganggap sangat sedikit lahan yang cocok untuk gandum, karen sehingga harus bersaing dengan tanaman sayuran yang lebih menjar penampungan hasil gandum, tak ada upaya khusus dari pemerin awal abad 20 secara terbatas di Jawa yaitu di Pengalengan, Dieng, Menurut Asosiasi Produsen Terigu Indonesia (Aptindo), pen berkembang dan tak pernah melampaui luas lahan 2.000 hektar p dan Amanumbang. Luas tanaman gandum di Indonesia tal kebutuhan pokok. Padahal penanaman gandum di Indonesia sudah karena perhatian pemerintah belum ada, kendati gandum sudah pengembangan gandum di Indonesia tak berkembang karena i

skala ekonomi menghadapi berbagai kendala, terutama pada pada saat yang bersamaan produksi beras dalam negeri berflukn alternatif yang sudah menjadi makanan pokok perlahan-lahan diti masyarakat dengan beralih ke komoditi beras, pada akhirnya pokok bagi orang yang berada dibelahan timur Indonesia, perlah (marketable product) selain lemahnya sarana transportasi. karena produk belum memenuhi kuantitas yang layak d Pemasaran hasil pertanian dalam skala agribisnis sangat jarang pertanian yang dijual antara lain adalah umbi-umbian dan pertanian mereka ke pasar desa yang hanya buka 1-2 hari seminggi dan lembaga pemasaran hasil pertanian. Petani biasanya menjua pegunungan. Salah satu kendala tersebut adalah tidak adanya infi pemenuhan kebutuhan stok dilakukan dengan mengimpor dari dan mendorong permintaan terhadap konsumsi beras meningkat. S ditinggalkan. Politik pangan pemerintah cenderung menggerus Thailand, bahkan dari Jepang. Pengembangan sumber pangan k keberadaannya. Produk umbi-umbian dan sagu yang merupakan menggantikan beras dan gandum semakin lama Sementara komoditi pangan tradisional lainnya yang se

melakukan kegiatan ekspor, seperti Gorontalo akan tetapi kebutuha pesat sebesar 6,6 persen per tahun, sementara produksi hanya menga Selain itu, selama tiga dekade terakhir permintaan jagung untuk ba bahan baku berbagai makanan olahan serta sebagai sumber minya peningkatan sekitar 2,5 persen per tahun. Meskipun ada beberapa pakan dan industri perunggasan. Kebutuhan jagung domestik n pakan domestik terus meningkat seiring dengan berkembangny Tidak jauh berbeda, komoditi jagung sebagai sumber pa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

muni yung disesuaikan dengan iklim dan lahan yang akan produksinya tinggi, karena teknologi transgenik bisa ■ III ton/ha. Dengan menggunakan benih jagung transgenik IIII lurjangka internasional untuk penyerahan sampai tahun 2012 iii i ion/iii. Menurut data Dewan Jagung Nasional (DJN), IIII US\$ 550/busel. Perkembangan harga jagung di pasar memadai. Sebab kendala selama ini yang dihadapi para him dijudikan peluang bagi Indonesia, dengan catatan ada international trendnya meningkat, bahkan diperkirakan harga hwya jagung domestik cenderung berfluktuatif sementara muliipiikan bibit yang baik, serta produktifitas lahan masih millim benih jagung hibrida dan transgenik, produktivitas

(hillyida). Jika perlu, bibit hibrida digratiskan kepada petani III II in produktifitas jagung, jelas diperlukan eksentifikasi ke with pengembangan jagung masih begitu luas di beberapa minini dan dukungan kebijakan pemerintah yang memadai miniliki lahan yang potensi, sembari dilakukan penyuluhan Manual Manual Manual Sekitar 30 % dari seluruh lahan Ma tanam dari satu kali musim tanam menjadi dua kali musim www biblt jagung hibrida masih fokus di daerah-daerah yang mihirkan bahwa pengembangan komoditi jagung, tidak

IIIIII hambu itu yang mencapai 20 % jika dibandingkan Illulininya. Hal ini memicu meningkatnya permintaan kapas. menyehabkan kepanikan pasar dunia. III III IIII penghasil utama kapas seperti India, Pakistan dan menturn produksi dalam negeri hanya sekitar 25 ribu ton Illigunakan untuk industri tekstil, dan sebagian besar produk API), diakihutkan oleh imbas pemanasan global dan banjir bilijili bilian baku sandang, seperti kapas. Secara nasional ilimum makin majunya perekonomian China, terjadi lonjakan m kahunan, selain sawit dan karet kebutuhan domestik masih melonjak hingga 100 %, berimbas pada kenaikan harga kimalkan harga kapas dunia, setidaknya menurut Asosiasi www ywng tinggi, berdampak terhadap industri garmen. Pada IIII musih impor 99% dari total kebutuhan nasional

IIIIIII IIIIII IIIIIIII dengan harga yang kompetitif, selain masuknya III III Indonesia yang bergantung dari kapas impor tentu sulit manni jarmen banyak gulung tikar karena tidak mampu bersaing Introdup pengurangan pekerja. Kondisi ini jelas memperkuat liidissiri tekstil mengurangi produksinya,

Negeri Importir; Implikasi Kebijakan yang Kurang Berpihak (3)

tekstil illegal. Dengan melihat luas lahan yang tersedia, seharusnya komoditi kapas ini dapat dibudidayakan di Indonesia, akan tetapi kebijakan pendukung untuk memproduksi komoditi amat minim. Karena itu, bagi industri garmen yang masih garmen yang tidak mampu bertahan, mereka beralih menjadi pedagang tekstil bertahan mereka mengandalkan pasokan kapas dari China dan Afrika, bagi industri

terutama dari India dan China dengan harga yang miring. Sementara sub sektor peternakan, tidak jauh berbeda. Siapapun menterinya

swasembada daging bergeser ke tahun 2014, dugaan saya targetnya sangat politis lepas dari praktek kolusi, yang cenderung menguntungkan partai pengendali kementerian yang berkaitan dengan komoditi ini. Permainan kongkalikong impor Dari total kebutuhan daging, sekitar 30 % masih diimpor. Kegiatan impor daging tidak pemerintah berupaya meningkatkan populasi sapi, sehingga produksi daging juga diharapkan bisa naik dari 250.800 ton tahun 2009 menjadi 420.400 ton tahun 2014. program swasembada daging. Bahkan kementerian pertanian menargetkan tahun 2010 atau pejabat publik yang menangani sektor ini kerap bersuara lantang akan membuat bentuk yayasan mendapatkan kuota impor melebihi dari kuota pemain lama yang daging dari Australia pernah mencuat dimedia nasional, karena ada pemain baru dalam lalu sebagai tahun swasembada daging, target tersebut meleset. Saat ini target sudah berpengalaman. karena tahun tersebut merupakan akhir periode pemerintahan saat ini. Karena itu

ridak suka mengkonsumsi paha ayam karena itu agar produsen tidak mengalami menteri perindustrian dipimpin oleh Rini M. Suwandi. Umumnya, orang-orang USA kerugian, pengusaha peternakan ini biasanya mendekati pengambil kebijakan untuk kontroversi, masih ingat dengan prahara impor paha ayam dari USA pada zaman terutama di supermarket. Bahkan impor daging unggas yang kerap menimbulkan perlu dikembangkan dan mendapatkan perhatian sebagai subtitusi dari daging sapi saja, akan tetapi juga melibatkan petani kecil. Sebab potensi dan lahan untuk pengembangan peternakan tersebar di seantero Indonesia. Selain itu, daging unggas petani peternak. Target swasembada daging tidak hanya menguntungkan bagi pemodal memasukkan paha ayam sebagai komoditi impor. tidak cukup, akan tetapi butuh komitmen yang kuat sebab akan berdampak luas bagi sebab daging unggas meski belum dibuka lebar kran impor, namun banyak beredar Tekad untuk mengurangi impor atau bahkan mencapai swasembada daging

disebutkan bahwa sektor kelautan mampu menyumbang US\$ 140 miliar per tahun. terbesar dengan luas lautan tiga per empat dari luas daratan, dari hasil studi yang ada Sebagai negara yang memiliki garis pantai yang panjang dan sebagai negara kepulauan negara pemilik garis pantai terpanjang diduduki Amerika Serikat (AS), lalu Kanada Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Rusia. Sedangkan ini. Jika di tarik dalam garis ekuasinya, panjang pantai Indonesia yaitu 95.181 km dikenal sebagai bangsa maritim, kegiatan impor ikan masih berlangsung sampai saat Mungkin yang paling menghentakkan nalar sehat kita sebagai bangsa yang

selama ini dihasilkan dari kegiatan penangkapan. Artinya, secara jumlah, Indonesia lele, teri, dan ikan asin. Ikan-ikan tersebut merupakan ikan laut utama (dominan) yang menciderai para nelayan. Jenis ikan yang diimpor diantaranya adalah ikan kembung kehidupan nelayan tradisional. Impor ikan yang melanda negeri ini 6,4 juta per ton per tahun, sedangkan luas laut Indonesia 5,8 juta kilometer persegi Tapi ironisnya, ternyata impor ikan tidak sedikit, ini jelas berdampak terhadap Potensi ikan begitu melimpah, potensi produksi lestari ikan laut Indonesia

> yang menjadi payung hukum bagi impor Ikan, hanya mengatur masalah ikan, tidak diatur pembatasan jenis ikan. Akibatnya, Impor ikan yang seje tidak kekurangan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 ikan lokal pun terjadi. Ikan hasil tangkapan nelayan tradisional pun kalah s

sektor perikanan cukup rendah, sementara kebutuhan konsumsi ikan begitu pengusaha, dan bahkan kalah bersaing dengan nelayan dari luar karena semakin menurun, mereka kalah bersaing dengan nelayan-nelayan yang dir berbanding terbalik. Kehidupan nelayan tidak jauh berbeda dengan kehi dengan alat tangkap yang modern. Belum lagi dukungan lembaga keua petani, mereka identik dengan kemiskinan dan keterbelakang. Kemampu maritim semestinya para nelayan sudah sangat sejahtera, namun Kebijakan di sub sektor perikanan ini memang cukup pelik, seb

komoditi yang sesungguhnya punya potensi untuk dikembangkan. Justru ad gampangnya saja, yang penting dapat keuntungan? garam (importir garam). Ataukah bangsa ini memang hanya mau praktek impor ingin dipertahankan karena komoditas ini sudah dikuasai pa sulit, memang semua serba sulit jika komitmen sangat rendah untuk meng infrastruktur pendukung. Disamping itu, ada anggapan proses pembuatan gi klise rasanya, alasan rendahnya produksi garam nasional karena terbentur garam untuk diekspor, malahan perusahaan ini hanya melakukan kegiatan ir 384.210 ton pada tahun 2010. Ini jelas memprihatinkan, apalagi PT Garan 2 persen dari total kebutuhan. Kemenperin mencatat, impor garam konsums juta ton per tahun, sementara produksi garam nasional hanya mampu diper pun sebagian besar diimpor. Kebutuhan negara kita akan garam mencapai yang seharusnya perusahaan ini membuat garam untuk masyarakat atau Tidak jauh berbeda, meskipun dikenal sebagai negara kepulauan

minim, kalaupun ada kalah bersaing dengan produk Thailand, China, New Zaela jual ketimbang jeruk produk lokal, seperti jeruk medan. Selain harganya mural dengan balk. Namun kondisinya tidak jauh berbeda dengan produk pertanian lai produk pertanian USA. Sebagai negara tropis, buah-buahan sebetulnya dapat dik pedagang kontinu serta rasanya lebih manis. mi dipedagang kaki lima dengan mudahnya didapat, bahkan lebih banyak jeruk impor, seperti jeruk ponkam dari China dulunya hanya bisa didapat di super mark seperti buah apel, durian, jambu, pear, jeruk dan semacamnya. Produksi lok berkaitan dengan dengan buah-buahan, saat ini yang dikonsumsi kebanyakan t persoalan karena kebutuhan domestik dapat dipenuhi oleh produksi lokal, Sedangkan sub sektor hortikultura, untuk sayur mayur tidak terli

Kemunapun kita belanja barang akan ditemukan made in China, kenapa t menemukan produk made in Indonesia, sepertinya "made" dari Bali saja yang ban menyerbu Indonesia, akan tetapi produk lain pun dari China dengan harga ya dongeng untuk turunan kita kelak. Karena sepertinya bukan hanya produk pert impor buah China baru mencapai USS 390 juta. Jika kondisi ini dibiarkan begih ada tindakan konkrit maka negara agraris yang subur hanya menjadi cerita Malahan kementerian pertanian merilis sepanjang tahun 2010 neraca perdaga diberlakukan ASEAN-China AFTA impor buah-buahab dari China makin buahan makin jomplang, hingga mencapai U\$S 600 juta, bila dibandingkan vang membanjiri pasar Indonesia, seperti Apel Fuji dan Pear Shandong Selain jeruk ponkam yang diimpor dari China, masih ada jenis bi

Gorontalo: Politician Makin Banyak, Entrepreneur Sangat Minim (1)

Penulis, Pengajar FEB UNG Muh. Amir Arham*

pengguna internet dan media elektronika karena fenomena momi terus mengalami peningkatan, angka kemiskinan terus mh ini dijadikan sebagai tujuan studi banding. Gorontalo lidak sedikit orang luar memalingkan pandangan ke provinsi Kemajuan teknologi informasi, setidaknya Gorontalo makin pusat ibukota terus berbenah diri menuju ibukota metropolis. ingung tersebut. Masalah pengelolaan pemerintahan, tidak makin dikenal luas, ada banyak fenomena sosial yang muncul Duri segi pembangunan fisik, nampak kemajuan, indikator lidak dapat menafikkan provinsi ini sudah mengalami "Polisi India" dari Gorontalo menyemarakkan pamor mengolah isu, menjual komoditi jagung ke berbagai event mak mudanya. Lirik lagu andai aku Gayus Tambunan dan sinpapun itu pasti setuju berkat kemampuan seorang Fadel saja menghelat perayaan ulang tahun yang ke-10

IIII Iepi, karena posisi tawar orang Gorontalo saat itu masih di hip proses politik apapun untuk tingkat Sulawesi Utara, orang ill politik lokal Gorontalo yang mewarnai perhelatan Pilgub pıllıng tinggi kedudukannya sebagai wakil gubernur. Jabatan menjadi takdir politik bergantian dengan tokoh-tokoh dari politik menerpa daerah ini. Lima belas tahun yang lampau, Pemilihan Gubernur (Pilgub). Gorontalo makin riuh, semua, tidak berapa lama bahkan dalam hitungan hari akan

ilililiknya ada empat bupati/walikota yang akan bertarung lumpir semua kepala daerah berlomba dalam lintasan arena IIII Sulawesi Utara, meskipun proses politik untuk pemilihan han Fadel Muhammad, politik di bumi Gorontalo makin lawan tanding dalam Pilgub tidak imbang. Pasca udah dua kali dilakukan sebelumnya, tapi tidak terlalu

Kader Politik Makin Banyak:

Gorontalo setahun yang lalu bukan perkara sulit baginya. nyata, bukan berkarya kata". Sebagai seorang yang berlatar belakang Gorontalo. Ia merasa mampu dan sudah berbuat banyak di Gorontalo menjadi calon gubernur setelah menggenggam ketua Partai Golkar pemerintahannya, jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk pengusaha, alat peraga berupa iklan sudah disebarnya diseantero Utara, karena itu menisbatkan dirinya sebagai pemimpin yang "berkarya Gorontalo Utara yang baru menghabiskan separuh

menjadi bupati. partainya belum seratus persen, dan tidak memenuhi syarat pencalonan dapat kita baca, yaitu kurang percaya diri karena sokongan politik dari akan tetapi ia bersedia menjadi wakil dengan melihat kemungkinan yang Provinsi Gorontalo, yang sudah menjabat dua periode Bupati di Boalemo. Meskipun dalam jagat politik, Bupati Boalemo lebih senior, kampanye turut mempengaruhi sikapnya, kendati sudah dua periode pasangan. Dan nampaknya jatuh hati pada Ketua Partai Demokrat jika hanya bermodalkan Partai Demokrat. Selain itu, sokongan dana Dengan memiliki kekuatan politik dan ekonomi, ia bebas memilih

"Davidson" terasa asing, terkecuali orang yang hobbi pada otomotif atau menggunakan jargon "Davidson". Bagi masyarakat awam, Mungkin karena segmennya kelas menengah ke atas, maka pasangan ini digandenglah mantan rektor UNG yang memiliki basis kelas menengah tinggi. Meskipun ia sendiri tidak yakin mendapatkan sokongan politik ke atas, selain memegang tampuk pimpinan beberapa organisasi sosial independen. Untuk memperkuat basis dukungan independesinya, maka dari partai yang ada di Gorontalo, karena itu menggunakan jalur kedua, hal ini menjadi modal untuk mengelola pemerintahan yang lebih periode menjabat bupati, meskipun juga belum tuntas periodenya yang cemerlang yang pemah di miliki oleh Gorontalo, selain sudah dua sederhananya dapat dibaca karena ia dianggap sebagai birokrat Kementerian Dalam Negeri. Motivasi untuk meniti tangga kekuasaan, programnya "mobile government" yang konon sudah diadopsi oleh sukses meniti karir birokrasi di dua provinsi, ia popular dengan Bupati Gorontalo, tentu saja tidak akan ketinggalan. Sebagai orang yang

memiliki pengetahuan lebih tentang motor gede (moge) yang

publik (negara). menggunakan idiom "maju pak...." yang banyak dipasang pad perubahan di Gorontalo, karena itu tagline dalam posteri keyakinan, dan merasa dibutuhkan oleh masyarakat untuk r akan menggunakan perahu apa, dan berpasangan dengan siap dan baliho dimana-mana. Walau hinggi hari ini belum ada lama pula mempersiapkan diri untuk bertarung dengan memas akan menggunakan partai berlambang pohon beringin itu. Si ketinggalan. Kendati ia seorang kader Golkar, kemungkinan t serta ia sudah merasa berbuat banyak di Kota Gorontalo, posisinya sebagai ketua Golkar dan pimpinan ormas Nasional Walikota Gorontalo, sebagai orang yang berpengalaman di du

gubernur, tetap akan melanjutkan pembangunan. serta beberapa keberhasilan, karena itu ia merasa perlu melanj Gorontalo", meski saya sendiri yakin bahwa siapapun yang te dirintis bersama Fadel Muhammad setidaknya sudah ada yang memiliki modal sokongan politik yang ada di parlemen ma periode mendampingi Fadel Muhammad, tentu merupakan m yang sudah ada. Pilihan jargonnya, "mari lanjutkan pem parlemen, meski ia sendiri masih belum menemukan pe Gubernur yang pernah menjajal berbagai jabatan di birokrasi politiknya untuk berlomba di arena politik. Program pembangi untuk melanjutkan jejak langkah politiknya dalam Pilgub. mereka akan mencari lintasan yang berbeda pada Pilgub Selain mereka berempat, Gubernur dan Wakil Gubernur n

pertarungan politik. Bersambung!. kepastian pilihan kendaraannya, bisa-bisa ketinggalan dala gubernur. Ia sudah mempersiapkan diri pula dengan menyeb belum pasti, apakah naik perahu, naik mobil atau pesawat. Bila poster itu masih dalam kesendirian, kendaraan yang akan o dari Bone Bolango sampai di Pohuwato, meski yang terpampa berkemas-kemas untuk meniti satu tangga lagi untuk men Golkar yang "homeback" jadi wakil gubernur di Goront Tokoh bisinis, pernah memimpin Kadin Papua dan pengi

Gorontalo: Politician Makin Banyak, Entrepreneur Sangat Minim (2

Penulis, Pengamat Ekonomi FEB UNG Muh. Amir Arham*

minimalan untuk ikut meramaikan bursa pemilihan gubernur. Poster dan III lurus mempersiapkan diri keluar dari jabatan itu, karena itu ia juga tidak mendukungnya pun sudah ditebar meski tidak terlalu mencolok. Tentu mummg karena hingga hari ini belum jelas hendak pakai apa, dan dengan Dorontulo tentu saja harus berhitung langkah taktis, bagaimanapun n tokarang sebagai pejabat karir di birokrat sudah mentok. Tidak ada mgan tangan.

him yang mungkin kurang dikenal banyak oleh publik Gorontalo terutama my Pilgub tentu membutuhkan sokongan politik dari partai, atau maju hija pembangunan kantor gubernur Gorontalo di Botu. Dengan harena ia memang besar dan berkarir di luar Gorontalo sebagai konsultan Ilinginnya. Mungkin hanya sedikit yang tahu kalau ia merupakan salah mengerti arti iklan itu. Banyak kota di Sulawesi sudah dirubah wajahnya iiii, ia yakin mampu mengakselarasi pemhangunan Gorontalo, dengan maib kitorang... 2 x + v Jangankan masyarakat awam, saya Kaat ini kitapun dengan mudah menjumpai posternya, dengan jargon

modvasi dan implikasinya secara luas bagi Gorontalo itu sendiri. Dengan m ngakselarasi pembangunan dari berbagai segi. di bandingkan dengan which want yang ada, kemajuan Gorontalo saat ini dari aspek pembangunan hii hanyak lahan pengabdian yang kosong belum diisi oleh mereka, yang miyii bupati/walikota untuk meniti tangga kekuasaan pada level lebih huli dokoh politik yang akan bertarung dalam Pilgub. Namun melihat pada piirii tokoh-tokoh Gorontalo, termasuk generasi mudanya terlalu political mi nudah diuraikan di atas, tujuannya bukan untuk merangkum atau whilm proses perkaderan politik di Gorontalo cukup sukses. Atau dapat dilpenden kemajuan dalam bidang politik

IIII Jmin, nhli bahasa JS. Badudu, ada pengusaha nasional T. Gobel dan minimal dibawah level Jasin atau ahli bahasa yang memiliki reputasi hulupun, setidaknya tidak hanya bertumpu pada orientasi politik semata miligino. Namun harus disadari itu cerita masa lampau, menjadi bagian minerani teknorat baru dari Gorontalo, ahli geologi sebagai penerus Katili mang punya tokoh teknorat, seperti BJ. Habibie, ahli geologi JA. Katili

> politik muncul diberbagai ruang, mereka tidak hanya memainkan panggung politik Meski minim pengalaman, aktor politik yang berada dalam kekuasaan maupun didekat semata, tetapi juga berupaya menganeksasi kedalam penguasaan resources ekonomi. lebih berkuasa dalam pengaturan kegiatan proyek di SKPD yang ada, ketimbang kekuasaan secara terus-menerus mengais proyek. Bahkan tidak jarang, aktor politik ini panitianya itu sendiri. Jika pimpinan SKPD tidak mengikuti kehendak politis

terjun untuk kegiatan bisnis (tepatnya, jadi kontraktor). Sehingga itu, mereka lahir ekonomi yang instan, tipe ini hanya karena dekat dengan pusaran kekuasaan mencoba ekonomi, umumnya hendak mendapatkan kekayaan yang bersifat instan. Atau pelaku kondisi banyaknya pemburu rente. Politisi yang berhasrat menguasai resources Agak sulit memang akan menemukan lahirnya entrepreneur-enterpreneur dalam pemburu rente, resiko jabatan menjadi taruhannya.

economy tipe seperti ini memiliki daya tahan yang kuat. Sementara entrepreneurs dalam berusaha. Jiwa entrepreneurship-nya tinggi, dalam menghadapi turbulence lahir dengan by process yang panjang dan berliku, karena itu mereka sangat tangguh Bila melihat keberhasilan para pengusaha nasional yang sukses, secara umum mereka bukan by process, tidak jarang kelahirannya premature. beberapa perusahaan, ia hanya berkantor di hotel dan dari resto ke resto. Selama 10 usaha, bahkan hanya berperan sebagai "broker" dengan memiliki saham bodong di yang dikatrol, dekat dengan lingkaran kekuasaan kebiasaannya meminta proteksi bertumbuhan. Idealnya, entrepreneur harusnya makin banyak. Pemekaran wilayah dihitung jari. Daerah otonom yang dimekarkan terus bertambah, kecambah politisi pun tahun jadi provinsi, ratusan politisi lahir di Gorontalo, sebaliknya entrepreneur dapat sejatinya memberikan dampak ekonomi, mendorong lahirnya entrepreneur dalam berbagai bidang. Peluang ini justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha dari luar.

menjalankan tugasnya, kalaupun mereka bekerja hanya menjalankan rutinitas semata. dilakukan para bupati yang hendak bertarung dalam Pilgub tidak lagi mereka periode pemerintahannya baru berjalan setengahnya. Saya menduga, apa yang entrepreneur. Tidak sekedar memikirkan jabatan gubemur, apalagi sebagian dari kondisi ini untuk mendorong lahirnya pelaku-pelaku ekonomi yang berjiwa Sejatinya, para kepala daerah yang hendak berebut jabatan lebih tinggi, memikirkan diekspose secara massif sebagai bagian dari pencitraan. Inovasi dan terobosan kerja sudah berhenti, kalaupun ada terobosan mereka hendak

maupun wakil gubernur tidak lagi punya concern. Acara kunjungan kerja lebih sering Dalam pencermatan kita, para kandidat yang hendak maju sebagai calon gubernur tinggi, angka kemiskinan masih tertinggi di regional Sulawesi. oleh masalah-masalah sosial ekonomi yang cukup krusial, angka pengangguran masih calon pemilih. Sejatinya, para bupati ini bekerja maksimal, apalagi kita diperhadapkan dilakukan, yang esensinya justru kampanye terselubung untuk mendekatkan diri pada

Pengangguran dan kemiskinan sebagai potensi sumbu ledak kerusuhan sosial, jika dapat merangsang tumbuhnya investasi itu sendiri. Kultur kewirausahaan dibangun pada sektor pemerintah. Investasi swasta diperluas dengan membuat regulasi yang pemerintah daerah harus menciptakan banyak lapangan kerja, tidak hanya bertumpu tidak ditangani dengan baik akan memberikan dampak sosial yang luas. Solusinya

bagi kalangan generasi muda, sebagian pandangannya dialihk

memberikan dampak ekonomi yang luas. Dalam pandangan says diharapkan setidaknya pada sektor industri manufaktur, sebab roda ekonomi untuk sektor ini relatif pendek, karena sebagian dip masuk di Gorontalo untuk skala menengah dan besar adalah sekto Agak sulit berharap suatu daerah akan maju bila investasi minir konsumsi langsung.

dikatakan prihatin. "Kelas menengah" Gorontalo tiap tahunnya adalah "kelas menengah" parasit bagi pemerintahan, tidak punya ke seiring dengan makin banyaknya pemekuran wilayah. Namun seb begitu adanya. Hanya saja dalam jangka panjang kita perlu waspar kemajuan, pendapatan regional makin meningkat. Pandangan itu tid Ada pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa Gorontalo aman, meleburkan diri kedalam partai menjadi jalan pilihannya. ketergantungan secara ekonomi begitu tinggi terhadap pemerinta perubahan atau posisi tawar bagi pemerintah daerah, apalagi

multipartai, kita memiliki banyak kelompok yang berkemampu berkualitas, secara ekonomi mereka lemah karena tidak terdorong sosial. Istilahnya kelompok yang mengisi "kelas menengah" "Kelas menengah" seperti ini tidak dapat diharapkan akan melak menawarkan perubahan. Di kelompok itu juga tidak muncul wirau masuk partai politik. Akan tetapi, sayang sekali mereka sebagai k kenaikan kelas menengah di Indonesia. Bersamaan dengan refor Meminjam istilah Revrisond Baswir bahwa ada fenomena yang g Dalam kiprah politiknya tidak memberikan pengaruh, apalagi penghidupan yang hasilnya secara materi dan budaya jauh di at kualifikasi teknisnya dapat menjual tenaga serta pikiranny oleh Anthony Giddens, kelas menengah adalah mereka yang kare tangguh. Jika merujuk perdefinisi kelas menengah sebagaimana

entrepreneur-enterpreneur baru. Sebab yang nampak ruang ini be diharapkan memiliki peran sebagai agen perubahan. Perubahan tra pendapatannya lebih tinggi dari masyarakat biasa. Tidak itu diharapkan meningkatkan konsumsinya untuk menggerakkan pe Sementara dalam perspektif ekonomi kelas menengah acuannya hampir semua orang Gorontalo punya kemampuan untuk jadi gube seremoni dan melobi anggaran dari pusat. Rasanya jika hanya perkantoran mewah, menandatangani prasasti, menggunting pit gubernur Gorontalo, bukan sekedar menjalankan tugas ruti tetapi melahirkan kelas menengah dari perspektif definisi ekonomi ekspektasi yang sama hasil Pilgub kedepan akan melahirkan tidak menengah yang sesungguhnya. Tidak jauh berbeda di Gorontalo, k dan munculnya gagasan-gagasan baru dalam berbagai aspek dan pengeluaran yang relatif tinggi. Dengan bertambahnya kel

Interpreneur di Gorontalo:

IIII ilii dengan mudah kita menjumpai politisi di Gorontalo. Aktor-aktor milimum saya, proses perkaderan politik di Gorontalo begitu massif dan

Menjaga Popularitas di Tengah Meroketnya Subsidi BBM

M. Amier Arham* mgajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

tuhun mengalami kenaikan. Semenjak SBY jadi presiden, tuhun mengalami kenaikan. Semenjak SBY jadi presiden, tuhun mengalami kenaikan. Semenjak SBY jadi presiden, tuhun Rp. 1000 T lebih. APBN yang makin "tambung" tengen takan makin membaik dan yurakat makin meningkat, dengan asumsi jika besaran APBN dipunakan untuk pembiayaan peningkatan infrastruktur dan tuhuk. Namun pada kenyataannya, kenaikan nominal APBN setiap tuhuh tidak berasa di masyarakat, sederhananya dilihat dari minim unya infrastruktur, pelayanan publik tidak menjadi lebih baik meningkatnya APBN.

nyusunan APBN tidak bisa dipisahkan dari politik anggaran yang lih pemerintah dan DPR. Maka dari itu, kenaikan APBN bukan memenuhi kebutuhan pembiayaan (pengeluaran), akan tetapi lujuwab kebutuhan asumsi makro yang disusun sebelumnya, lujuh asumsi makro ekonomi dalam APBN yang harus selalun yaitu PDB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, SBI, harga liling minyak mentah. Bila target asumsi makro ini tidak tercapai dipustikan APBN mengalamai tekanan yang membutuhkan wana itu disebut APBN-Perubahan (APBNP).

www.menentukan skenario asumsi makro ekonomi, tidak hanya womi semata yang bicara, akan tetapi interest politik juga dulamnya, misalnya target kenaikan PDB, pertumbuhan lay minyak kerap dipatok dengan angka optimistik, sementara WII dan harga minyak mentah dunia dipatok dengan nilai yang la Target dan pencapaian asumsi makro tersebut sebagai wihasilan pembangunan ekonomi, akan tetapi menjadi masalah morintahan dan secara luas makro ekonomi terganggu manakala nomun meleset.

hun berdampak luas terhadap "kesehatan" APBN yaitu target hun berdampak luas terhadap "kesehatan" APBN yaitu target hun minyak mentah dunia yang kerap jauh dari asumsi yang NAPBN 2011 target lifting minyak sebesar 970 ribu barrel per hari hun lilakukan perubahan target menurun menjadi 945 ribu bph. hun harga minyak mentah dunia, yang berlaku mekanisme huri bahkan menit mengalami perubahan, dengan demikian hungunng terhadap APBN karena berkaitan dengan

subsidi. Membaiknya makro ekonomi global biasanya permintaan minyak melonjak di pasar internasional, sebaliknya jika terjadi *turbelance* ekonomi seperti pada tahun 2008 di USA, Jepang dan beberapa negara Eropa lainnya permintaan minyak menurun dibarengi dengan penurunan harga. Oleh karena itu menjelang Pemilu tahun 2009, pemerintah menurunkan harga BBM pada level harga semula

Penurunan harga BBM tidak bisa dipisahkan sebagai kebijakan pencitraan, meski tidak dapat dikesampingkan berdampak terhadap inflasi. Namun sebagai komoditas strategis dunia, sudah dapat dipastikan harga minyak akan merangkak kembali berbarengan dengan pulihnya krisis ekonomi global. Tentu saja situasi ini akan menimbulkan masalah, karena harga BBM dipatok pada harga tetap, sementara harga dunia trendnya meningkat. Opsi pemerintah yang akan dihadapi sudah pasti terbatas, menaikkan harga BBM, atau membatasi BBM bersubsidi. Menaikkan harga BBM akan menimbulkan inflasi terlebih akan memunculkan gejolak sosial sekaligus merusak citra pemerintah yang berkuasa. Mempertahankan pada level harga yang ada dipastikan subsidi membengkak dan membebani APBN.

Dalam APBN-P 2011 pemerintah memprediksi subsidi BBM akan naik dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 120,7 triliun. Artinya, terjadi kenaikan subsidi sebesar Rp 24,8 triliun atau naik 29 persen dari pagu anggaran 2011 (JPNN, 06/7/2011). Dampak ikutannya, yakni defisit APBN membesar maka pembiayaan defisit tersebut dipastikan tidak jauh sumbernya dari hutang. Walau secara teoritis, defisit anggaran sesuatu yang halal, bahkan "wajib" yang tujuannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi defisit terjadi karena dampak dari pembiayaan sektor riil. Opsi lain yaitu membatasi BBM bersubsidi, namun yang kita lihat opsi ini tidak berjalan efektif, kelangkaan BBM meluas ke berbagai daerah, moral hazard tetap timbul karena disparitas harga yang tinggi dengan BBM non subsidi. Imbauan moral (moral setion) tidak akan dihiraukan, bahkan rencana menggandeng MUI alih-alih mendapatkan apresiasi positif, justru pemerintah dianggap frustrasi dan MUI dikecam.

Semua opsi tidak berjalan, implikasinya kemudian BBM bersubsidi akhirnya ditambah dari 38,6 juta kiloliter (KL) menjadi 40,49 juta KL. Dengan perincian premium 24,54 juta KL (bertambah 1,35 juta KL), solar 14,15 juta KL (bertambah 1,07 juta KL), minyak tanah 1,8 juta KL (diturunkan 0,52 juta KL). Dengan demikian, jika volume BBM bersubsidi ditambah, maka ekses dana akan ditambah Rp. 25 triliun, schingga total akan menyerap dana subsidi BBM menjadi Rp. 120,7 triliun. Dari total subsidi BBM tersebut yang paling banyak menikmati yaitu decile masyarakat atas, bahkan simulasi Kemenkeu sekitar 75 % dinikmati bagi

kalangan yang tidak layak disubsidi. Kendati demikian, sepertinya p tetap pada posisinya tidak akan menaikkan harga BBM dengan al menimbulkan gejolak sosial dan angka kemiskinan akan melo alasan ini sudah pasti lebih banyak berbicara pada muatan cit pemerintahan, tidak lagi bicara tentang persoalan ekonomi *an sic* Bagi saya, kondisi APBN yang tertekan kebijakan yang tidak popu pun wajib untuk ditempuh bukan hanya pada level pemerintahan pusat, termasuk pemerintah daerah dalam konteks APBD.

BBM sebagai komiditi strategis dan bersifat unreneable si trendnya meningkat dari sisi harga, kendati pada kondisi tertentu karena BBM subtitusinya masih terbatas. Menurunkan harga BBM remilu merupakan kebijakan yang amat populer akan tetapi tidak i yang justru menimbulkan masalah dikemudian hari yang sudah terini. Saya menduga, jika kebijakan penurunan harga BBM menjelar tidak ditempuh maka beban subsidi BBM seperti yang dialami sekar terlatu berat. Karena opsi untuk menaikkan harga BBM sebesar perliter saja diprediksi akan berdampak langsung terhadap kenaik sebesar 2,25 %, akhimya merembes ke angka kemiskinan. Ma sesungguhnya yang ditakutkan oleh pemerintah, yakni persoalan kermenjadi taruhan citra dan akan menggerogoti popularitas pemerinta memang sudah terus tergerus sebagai dampak belum terselesaikanr Nazaruddin.

popularitas, ratusan triliun rupiah dihabiskan untuk asap knalpot hari, angka kemiskinan di Indonesia bisa mencapai 60 %. Demi ukuran world bank ukuran garis kemiskinan 2 US\$ pengeluaran per k sekitar 60 juta penduduk. Tentu saja akan lebih parah jika meng sama miskin, karena pengeluarannya di bawah Rp 10.000 per hari, seluruh penduduk Indonesia. Kedua kategori ini sesungguhnya adali 2011 jumlah penduduk miskin sebesar 30,02 juta orang atau 12,49% 280.488 atau masih dibawah Rp 10.000 per hari. BPS mencatat p garis kemiskinan, berarti pengeluaran per kapita perbulannya di b Rp. 8.000 per hari, sedangkan hampir miskin ukurannya adalah 1,2 kemiskinan yaitu Rp 233.740 pengeluaran per kapita perbulan, ata batasannya sangat tipis. Merunut ukuran yang digunakan pemerintah akan menjebak kita, karena bila diukur dari segi pe berbeda. Belum lagi definisi kemiskinan dan hampir miskin yang d dan ukuran, masing-masing lembaga pemerintah baik pusat maupu polemik, definisi kemiskinan menjadi tidak baku dalam banyak p Sementara masalah kemiskinan disisi lain juga men

Fenomena Pembagian ZIS, Gambaran Kemiskinan Sesungguhnya

luruan merenggut jiwa sebanyak 21 orang. varian. Sebagian masyarakat pun menunggu momentum lirnh), Infak dan Sadaqah (ZIS). Ada banyak orang kaya il Rp. 50.000,- atau malahan kurang dari nilai itu. Pembagian untuk mensucikan hartanya, baik dalam bentuk zakat (mal asih terekam dengan baik peristiwa kekacauan pembagian makan hanya untuk mendapatkan sembako gratis atau uang bulan suci ramadhan, para dermawan muslim memanfaatkan dari pagi hari hingga menjelang malam. Penuh sesak rutinitas kedermawanannya ini membagikan ZIS dalam langsung sangat nampak tidak terkelola dengan baik, terlaksana hanya sekali dalam setahun dengan rela

 Persoalannya, apakah lembaga resmi ini mendapatkan muupun dalam bentuk lain yang dikelola oleh swasta seperti nestapa orang miskin. Disamping itu, di Indonesia sudah dari publik (kaum muslim) itu sendiri atau sebaliknya?. baga resmi pengelola zakat, baik yang dikelola oleh a kurang baik (zu'uzhon), akan tetapi pembagian zakat ngan berat bagi pengelola Badan Amil, Zakat, Infaq dan dan dibalik itu semua menyimpan potensi kericuhan dan miskin. Bukan mempertontonkan "kesalehan sosial" kepada ung sebaiknya diberikan dengan mencontoh khalifah Abu epada yang berhak, atau mungkin saja tidak terlepas dari linya karena mereka meyakini lebih berkah jika memberikan \ZIS) yang dibentuk disetiap daerah untuk dapat bekerja ZIS secara langsung yang dilakukan para dermawan, dugaan dengan membawa langsung gandum secara diam-diam Apapun motivasinya saya tidak punya pretensi untuk

menganggap bahwa bagi hasil (keuntungan) yang diraih yariah masih mengemuka, bahkan tarik menarik. Pihak eluarkan zakat tidak lagi dikenakan beban pajak. Cara nya belajar dari metode pajak, dan aktifitas ekonomi yang arela lain halnya dengan pajak yang mengikat dan bersifat g dikelola oleh lembaga keuangan syariah mesti dikenakan lara pemerintah (direktorat perpajakan) dengan lembaga laran untuk berzakat dan sejenisnya masih rendah, karena lara lembaga syariah menganggap tidak perlu karena secara saya ZIS merupakan potensi untuk memberdayakan umat, Untuk mengoptimalkan zakat sebaiknya bentuk

> * Penulis, Pengajar FEB UNG Muh. Amir Arham*

otomatis sudah mengeluarkan zakat.

Khalifah Umar Bin Khattab. sebaiknya ia ditebas dengan pedang satu persatu seperti "kekesalan" kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Jika berwujud manusia ekonomi, sekaligus mengentaskan kemiskinan. Dalam perspektif agama, sumber alternatif pembiayaan kegiatan masyarakat untuk kemandirian merosotnya kepercayaan publik tentang pengelolaan pajak sebagai untuk pemberdayaan ekonomi umat di sektor riil. Ditengah makin sumber utama pembiayaan pengeluaran pemerintah, zakat dapat menjadi (semacam bantuan langsung tunai), tapi dalam bentuk pemanfaatannya menghimpun dana. Selanjutnya disalurkan bukan dalam bentuk tunai Pengelolaan zakat, infak dan sadaqah ini sangat penting,

sehingga menjadi BRICI. memasukkan Indonesia sebagai new comer kedalam emerging market, menyandingkan dengan negara-negara bertumbuh pasar (emerging market), yaitu Brazil, Rusia, India dan China (BRIC) dengan diinternal pemerintah itu sendiri, Peter Drucker pun ikut memuji dengan pembagian ZIS, yang mengantri di sana adalah orang miskin, atau boleh Indonesia dan penurunan angka kemiskinan bukan hanya datang jadi yang dikategorikan hampir miskin. Pujian kinerja ekonomi masyarakat yang mengantri makanan dan minuman gratis atau juta jiwa seolah menjadi antitesa dari kondisi pembagian ZIS. Ribuan kemiskinan yang terus turun tinggal sekitar 12,49 % atau sekitar 30,02 kedua tahun ini, bahkan angka optimisktik dari itu, serta deklarasi angka sesungguhnya. Klaim pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5 % pada triwulan bahkan menelan korban jiwa menggambarkan kemiskinan yang Melihat fenomena pembagian ZIS, diberbagai tempat penuh sesak

benar, tapi realitas sosial menggambarkan fenomena lain bahwa orang mendorong penurunan angka kemiskinan. Secara statistikal seolah sudah menjelaskan dengan gamblang bahwa pertumbuhan ekonomi akan perekonomian Indonesia terjadi keterlepasan (decoupling), secara teoritis ekonomi, klaim itu tidak salah berbagai indikator makro ekonomi terus membaik, akan tetapi dampaknya menjadi persoalan lain. Terlihat membangun citra atau ungkapan gombal semata? Dalam hitung-hitungan Lalu apakah kita lantas berkesimpulan, pemerintah membual, sekedar

miskin di Indonesia sepertinya bukan hanya 30,02 juta jiwa, I

Dilain sisi, secara tidak langsung BPS sebagai lembaga resmi dari pengeluaran perkapita per hari sekitar Rp. 8.000,-. Apalagi ukuran yang digunakan pemerintah, standar kemiskina

antar sektor dan antar wilayah yang membutuhkan perhatian. membaik, tapi ada realitas yang nampak dihadapan mata kemiskinan masih begitu tinggi, terjadi ketimpangan antar pen bukan hanya melihat indikator makro ekonomi semata yang pendapatan antar sektor dan antar wilayah. Karena itu, kinerja el Dugaan saya, ini merupakan salah satu penyebab ketim rendah, dan terkonsentrasi di pusat-pusat kegiatan (wilayah) ek telekomunkasi lebih tinggi padahal penyerapan tenaga kerjany Sementara sektor yang non tradeable seperti sektor transports 50 % tenaga kerja, nampak pertumbuhannya belum menggemb % ditopang oleh sektor pertanian dan industri yang menyerap lel 2002 hingga 2010 juga naik dari 0,29 menjadi 0,32 (BPS, 2011). Perkembangan gini ratio di desa lebih fluktuatif, namun demikia gini ratio di kota sejak 2002 hingga 2010, naik dari 0,33 menja rasio yang bergerak diangka 0 berarti terjadi pemerataan. Perken nilai 1, berarti terjadi ketimpangan yang tinggi, sementara ang Dengan mencermati struktur pertumbuhan ekonomi yang menca indikasi kurang bagus. Interpretasinya, jika angka gini rasio me pendapatan ini ditunjukkan dengan perbedaan gini ratio, ketin diperkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan, ar disparitas pendapatan mengalami kenaikan. Disparitas d sensitif terhadap kemiskinan, terlihat dari tingkat kemiskir pemerintah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indone-

produktif, maka akan menurunkan angka kemiskinan secara bukan sekedar kamuflase dalam bentuk angka-angka statistik yang l 217 triliun. Jika diasumsikan dana sebesar itu digunakan untuk Nasional dengan pihak IPB lebih besar lagi, potensi zakat sekita mencapai Rp. 100 triliun. Sementara perhitungan Badan Amil dibuat Asian Development Bank (ADB), potensi zakat di Indonesi yang baik perlu ditumbuhkembangkan, sebab menurut perhitungar rakyat sudah lelah menunggu janji. Gerakan ZIS dengan mana jika berharap banyak dari pemerintah untuk mengentaskan kemis menciptakan proses pemiskinan massal, hingga kini pencegaha pemberantasannya yang dilakukan oleh pemerintah belum mak justru kerapkali kontraproduktif. Dalam kondisi seperti itu, terlal Makin maraknya kejahatan korupsi, sebagai sumber masalah bang

Dari Pusat Industri Rotan dan Kakao Menjadi "City for All" (1)

Muh. Amir Arham*

* Penulis, Warga Kota Palu

lin yang dapat dijadikan sebagai striggle pembangunan.

Juan potensi maupun keunggulan itu dapat dikelola dan ham baik, pada akhirnya memiliki nilai jual. Dibutuhkan masing-masing "manajer" daerah mengolah hahau pun potensinya minim dapat memanfaatkan pun potensinya minim dapat memanfaatkan wa, seperti menjadikan suatu daerah sebagai wilayah (haha), berlanjut menjadi pusat pengolahan (industri manupun industri jasa).

milih dasar pemahaman Walikota Palu. Enam tahun minimut visi dan misi pada pencalonannya sebagai walikota, mya terlibat secara terbatas. Kota Palu hendak dijadikan ini Industri dan perdagangan rotan dan kakao nasional. In Ini sudah terbangun, minimal yang dapat dilihat kekolah kejuruan khusus rotan, maupun UPT serta minimul kakao, walau skalanya belum terlalu besar.

www. sejauh mana kekuatan konstruksi fondasi tersebut www. pembangunan Kota Palu, maupun secara umum munh. Masih sulit untuk mengukur capaian itu, sebabun industri rotan di Kota Palu tidak terlalu signifikan. Mulasi industri rotan tidak bertambah, malahan ada yang pun kepemilikannya tidak bertambah. Beberapa industri dimiliki orang yang sama. Meski beberapa event, wutri dan kerajinan kerap ditampilkan, tapi dampaknya konomian daerah relatif kecil. Mudah diduga, serapan lulusan sekolah kejuruan rotanpun sangat

mun Industri rotan di Kota Palu sekaligus gambaran secara muri rotan nasional. Selama ini Cirebon sebagai sentra masional mengalami deindustrialisasi, banyak mung tutup, sebagian beralih profesi dari pengolah

menjadi pedagang meubel. Asumsi saya, Cirebon saja sebagai sentra industri rotan nasional mengalami masalah serius terutama pasokan bahan baku, apalagi kota lain yang baru memulai. Masalah utama yang dihadapi industri rotan di Cirebon yakni pasokan bahan baku yang makin terbatas, sebagai imbas dari kebijakan menteri perdagangan yang membuka kran ekpor bahan baku (mentah) rotan. Kebanyakan ekspor itu tertuju ke China dan Vietnam yang memiliki kemampuan industri yang kompetitif, selain kemajuan inovasi yang terus berkembang. Implikasinya kemudian, produk China maupun Vietnam yang berbahan baku rotan harganya sangat kompetitif, selain desain mebel yang dibuat sangat diminati pasar domestik Indonesia.

Biaya produksi yang murah, serta penggunaan teknologi mengakibatkan mebel China maupun Vietnam sulit untuk disaingi produk dalam negeri. Konsumen, bahkan lembaga pemerintah pun banyak yang menggunakan mebel impor, bahkan ada yang ditengarai mebel impor digantikan lebelnya dengan produk dalam negeri. Dalam bentuk lain, berkat kemampuan inovasi teknologi, China memiliki kemampuan membuat rotan imitasi yang berbahan baku poliyester. Coba tengok, kebanyakan restoran maupun pusat-pusat perbelanjaan maupun hotel menggunakan rotan imitasi impor dengan desain futuristik. Gempuran produk impor makin memukul industri rotan nasional, untuk menyiasati agar pelaku usaha mebel dan industri rotan dapat bertahan, mereka banyak beralih kegiatan sebagai pedagang mebel.

Kondisi ini tentu saja tidak jauh berbeda dengan industri rotan di Kota Palu, meskipun ada asumsi dari awal bahwa Cirebon dalam jangka panjang agak sulit bersaing sebagai sentra industri rotan, sebab bahan baku rotan di Jawa semakin menipis. Umumnya bahan baku diantarpulaukan dari Sulawesi dan Kalimantan, ada juga sebagian diimpor. Karena itu pemerintah Kota Palu memiliki keyakinan bahwa industri rotan di Kota Palu akan berkembangan dinamis, karena bahan baku cukup tersedia di Sulawesi Tengah. Namun asumsi itu kurang terbukti, Cirebon sudah kadung memiliki kemampuan kompetitif pada level nasional sebagai sentra industri rotan, meskipun secara global sulit bersaing saat ini. Pada akhirnya kita dapat berkesimpulan, visi Kota Palu sebagai sentra industri rotan

menentukan harga kakao dunia, serta memberikan dam apalagi terhadap penyerapan tenaga kerja. Bagaimana berkembang. Dampaknya terhadap perekonomian daerah yang rendah maupun perkembangan industri secara kuanti nasional sulit terealisir dengan berbagai kendala, kemampua berbicara masalah industrinya. rehabilitasi kakao nasional belum memberikan dampak luas penurunan karena banyak diserang hama. Program lahan komoditi lain sebab makin hari produksi kakao m yang patut dicermati, sudah banyak lahan kakao beralih Sulawesi Tengah berkontribusi besar. Walaupun demikian nasional. terhadap perekonomian daerah yang berimplikasi lua sebagai penghasil utama kakao dunia. Idealnya, Indones Indikasinya dapat dilihat, posisi Indonesia termasuk ti, berkembang, maupun luasan lahan komoditi kakao terus be industri kakao?, secara nasional produk kakao sebetulny Dari keseluruhan wilayah penghasil kakao di li

Berkaca pada fenomena itu, mungkin visi dan misi Walil (pemerintah) tidak tercapai secara optimal. Bahkan bebera mempertanyakan sejauh mana visi dan misi yang dibuat en lalu memberikan resonansi terhadap kemajuan Kota Palu, kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Sumber pe daerah Kota Palu, sepertinya tidak ditemukan dari dua kon (rotan dan kakao). Walau ini akan menjadi perdebatan, ba dan misi tidak harus menghasilkan sesuatu secara konkr bentuk tunai, tetapi ia merupakan pijakan untuk membuat serta arah perubahan yang akan dituju kedepan oleh sebuah Masalahnya, visi dan misi yang dibuat tergambar secara tidak hendak dikatakan bersifat "bendawi", maka se memang memberikan implikasi secara nyata maupun dalar rupiah.

Poinnya, yakni bahwa sebuah visi dan misi sesungguhny abstrak tapi dapat diukur capaiannya selama lima tahun atau pemerintahan. Dan tidak harus menetapkan satu atau dua sebagai pijakan pembangunan, karena kota bersifat multipro multiaktifitas. (Bersambung)

Dari Pusat Industri Rotan dan Kakao Menjadi "City for All" (2)

Muh. Amir Arham*
*Penulis, Warga Kota Palu

ini titik tekannya pada aspek sosiologis, ketimbang aspek llur) yang dinamis, ulet dan pekerja keras menularkan perkembangannya cepat. Lain halnya wilayah yang relatif lambat untuk berkembang, kompetisi sangat rendah. mbangunan, sebab ia merupakan bagian dari social capital. perkembangan ekonomi, maupun menghasilkan produkiiii dengan masalah ekonomi, maka akan berdampak wbih massif. Apalagi jika kultur, budaya maupun etos yang illur lain yang kurang dinamis, pada akhirnya memberikan tterogen, memiliki karakter dan budaya yang berbeda. Ada M. antar masyarakat punya kemampuan kompetisi sebab Ika kultur kurang mendukung. Wilayah yang memelihara profesi. Secara faktual tidak dapat dipungkiri, negara atau dimaksudkan adalah potensi manusianya yang multietnis yn. Tapi tidak menutup kemungkinan dapat menjadi ii, City for All---. Secara samar-samar saya menangkap visi kan dengan visi sebelumnya, dengan mengusung konsep -dua ini sebagai imbas dari kurangnya capaian visi dan misi luga, perubahan visi dan misi Pemerintah Kota Palu pada Sepertinya visi dan misi jilid kedua ini lebih abstraktif bersifat melting pot relatif lebih maju atau minimal

w inilah pemahaman sosiologis yang saya bisa tangkap dari visi dan misi jilid dua pemerintah Kota Palu saat ini. memang demikian, Palu salah satu kota di Indonesia keragaman budaya, meski dalam ornamen-ornamen mendominasi etnis Kaili. Tapi dalam aktifitas keseharian, mm macam etnis, maka ia dapat disebut *melting pot* dalam latin ekonomi. Akan tetapi dibalik "potensi" sosial itu, ada lain yang tersimpan dibalik keragaman itu yang dapat mi gesekan bahkan benturan keras jika tidak didukung yang tepat.

yang sudah dicapai Kota Palu saat ini memberikan tarikan

dari luar orang datang beraktifitas maupun melakukan kegiatan ekonomi. Penguasaan ekonomi, bahkan cenderung monopolistik pada etnis tertentu akan melahirkan disparitas pendapatan antar penduduk

Akumulasi kapital maupun penguasaan asset saatnya nanti akan menjadi pemicu disorder social. Kerusuhan rasial, atau huru-hara yang terjadi di London beberapa hari lalu sesungguhnya dipicu oleh adanya disparitas dalam berbagai aspek. Riak-riak separatisme di Papua, juga menggambarkan keadaan kesenjangan antar penduduk lokal yang kurang skill dan masyarakat pendatang yang menguasai berbagai ruang aktifitas. Maka visi dan misi, ---Kota Palu Untuk Semua--- perlu dibuatkan rumusan yang tepat, serta program yang baik agar dapat mendorong masyarakat Kota Palu berkompetisi secara sehat, termasuk di dalamnya memberikan spirit baru untuk menciptakan etos kerja bagi penduduk yang relatif terkebelakang secara ekonomi.

Jika space ini dibiarkan kosong oleh pemerintah kota, hanya mengharapkan terisi secara natural, lama kelamaan akan menggeser penduduk setempat kepinggiran. USA sebagai salah satu contoh negara yang sudah lama menganut sistem melting pot mengalami kondisi dimana penduduk asli (Indian) termarginalisasi dari segala hal. Justru para imigran yang lebih dominan, baik dalam aktifitas ekonomi maupun kegiatan politik. Meski diakui negara ini termasuk paling stabil secara politik, dan kompetisi antar penduduk sangat dinamis.

Masyarakat yang masih terkebelakang dalam banyak hal harus dipersiapkan menghadapi perubahan-perubahan bahkan loncatan, sebab tidak menutup kemungkinan mengalami "shock culture". Ada banyak indikasi kemajuan yang sudah dicapai Kota Palu, setidaknya kota ini akan mengalami pergeseran sektoral, dinamika perekonomian makin maju kearah sektor tersier (jasa), sementara sektor sekunder relatif lambat. Jika sektor jasa berkembang pesat, apalagi yang memerlukan skill khusus, maka dalam jangka panjang kemungkinan tenaga kerja bagi penduduk lokal yang tidak siap berkiprah di industri jasa sangat minim terserap. Lain halnya jika industri, atau sektor riil biasanya serapan tenaga kerjanya relatif merata, tidak terlalu membutuhkan kemampuan khusus.Sinergi visi

pemerintah daerah, dan arah kebijakan kurikulum pada pitinggi tidak boleh dibiarkan berjalan terpisah, apalagi sendiri-sendiri. Sebaliknya saling terkait, bersinergi satu untuk mengantisipasi kecenderungan perubahan ekonomi Apalagi menisbatkan Kota Palu sebagai kota transit, meluapan dari spreedwash ekonomi Kota Makassar yan dinamis, maupun penghubung dengan wilayah lainnya yar Kalimantan. Selama pelaksanaan otonomi daerah, Kalimant secara spasial memberikan kontribusi ekonomi nasional rel tinggi dibandingkan dengan Sulawesi. Kegiatan ekonoming dinamis karena keberkahan kekayaan sumberdaya alam, sesungguhnya menjadi penghubung yang strategis diantara etersebut.

Pada perspektif lain, sebagai kota transit kesiapan infrastruk maupun ekonomi perlu terus dibenahi, tujuannya untuk r dan menciptakan kenyamanan bagi banyak orang untuk lama homestay di Palu. Ini akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Kegiatan sektor jasa, terutama perhot tumbuh tentu saja berdampak terhadap industri turunan membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan perkembangan ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daer mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan jasa perhotelan dan industri pendukungnya.

Industri manufaktur di Kota Palu masih sulit diharapka tumbuh pesat, karena itu sektor jasa maupun perdagangan le untuk dikembangkan. Dengan catatan kebijakan pendu cukup memadai, serta program yang menopang ker menyambung. Niscaya lima atau sepuluh tahun kedepan K akan sejajar dengan kota-kota besar lainnya yang ada di la Tapi itu terpulang pada sejauh mana implementasi, interprodan misi yang dibuat oleh pemerintah Kota Palu, tentu s terjadi keterlepasan (decoupling) dengan visi pemerintah Kota Palu tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, atau arah h bertolak belakang dengan pikiran pemimpin di level provin Kota Palu dari jauh adalah view dan dari dekat sebagai gate Tengah.

Resentralisasi Kewenangan Kepegawaian, Antisipasi Kebangkrutan Daerah

M. Amier Arham*
mgajara Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

momi daerah ditinjau dari sudut pandang manapun sesuatu yang b merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan bernegara, temberikan pelayanan publik yang lebih demokratis. Sementara tomi memperlihat kecenderungan yang lebih baik dengan alasan ang publik lebih efisiensi, mendorong kompetisi dan penduduk membayar kewajiban-kewajibannya. Sementara dukungan terlunya desentralisasi dikemukakan oleh Tiebout Model yang kan sebagai rujukan pengadaan local public goods maupun untuk migan desentralisasi dan pertumbuhan.

gkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang un lebih baik dan efisien. Kondisi peningkatan pelayanan barang un kaitannya hubungan antar daerah otonom akan memberikan upetisi persaingan antar kabupaten/kota untuk memaksimalkan upetisi persaingan antar kabupaten/kota untuk memaksimalkan upetisi persaingan antar kabupaten/kota untuk memaksimalkan upetisi masyarakat. Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan ulah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui un karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari un publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan

yn, apakah konsep yang ideal itu dalam implementasinya cara empiris membuktikan hal tersebut cukup baik, tapi tidak gagal dalam menjalankan misi desentralisasi. Ada banyak us yang tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah itu onsistensi pemerintah pusat pun turut memparah kondisi nemerintah daerah basit pelaksanaan otonomi daerah.

pemerintah daerah begitu luas, apalagi didukung kekuatan akibatnya banyak bermunculan bad practice pemerintahan, un kekuatan terhimpun di tangan kepala daerah, sehingga bu memiliki "powerfull" menentukan segalanya. Dampaknya, ah tergoda mempraktekkan pemerintahan yang cenderung un kekuasaan ekonomi dan politik berpusar dekat dirinya. Ada un untuk merawat sifat totaliternya dengan melakukan kepada bawahannya (PNS) secara politis, bukan pengawasan uk pembinaan birokrasi. Tidak banyak pilihan bagi birokrat disadari mereka terseret kearah pusaran politik kekuasaan. Di birokrat cenderung tergerus dengan situasi politisasi

birokrasi, orang yang memiliki kemampuan yang baik cenderung disingkirkan sementara birokrat yang punya kemampuan "komunikasi politik" terhadap kepala daerah, kendati kemampuannya relatif rendah akan dipakai dengan kedudukan yang lebih prestisius.

Maka tidak mengherankan mutasi jabatan, penempatan seseorang dalam suatu instansi, ada kecenderungan tidak didasarkan pada kemampuan dan penguasan keilmuan seseorang, tapi lebih pada mendudukkan secara politis. Posisi kepala dinas, atau kepala badan sebagian besar kepala daerah menganggapnya sebagai --jabatan politis--. Latar belakang keilmuan dan kedudukan jabatan bagi PNS daerah tidak lagi menjadi pertimbangan penting.

Politisasi terhadap sekolah, guru dan kepala sekolah tidak luput. Semenjak anggaran pendidikan terus naik, memberikan imbas yang besar ke daerah. Dinas pendidikan menjadi rebutan berbagai pihak, ada banyak kegiatan serta menitipkan pesan sponsorship, agar kepala dinas maupun kepala sekolah resikonya. Tidak jarang kepala sekolah dicopot dari jabatannya dan dijadikan resikonya. Tidak jarang kepala sekolah dicopot dari jabatannya dan dijadikan sebagai guru fungsional karena keengganan menuruti permintaan pesan struktural sama sekali tidak sesuai dengan kompetensi jabatannya. Tidak jauh berbeda, kepala dinas pendidikan pun menjadi incaran. Beberapa daerah, Idealnya, kepala dinas pendidikan pun menjadi incaran. Bebarapa daerah, Idealnya, kepala dinas didasarkan pada kompetensi keilmuannya. Banyaknya masalah yang dialami oleh para guru mulai tingkat SD sampai

SMA, berimplikasi pada perkembangan dunia pendidikan di daerah. Paling terasa dan nyata politisasi guru makin menguat. Tidak itu saja, politisasi bagi PNS daerah makin mengkuatirkan terhadap pembinaan PNS baik untuk pengembangan karir maupun profesionalisme aparatur negara. Setidaknya (mungkin) ini yang menjadi pijakan pemerintah pusat, sehingga muncul wacana untuk melalukan resentralisasi kewenangan pembinaan dan penataan dengan berupaya melakukan resentralisasi kewenangan pembinaan dan penataan dengan berupaya melakukan resentralisasi kewenangan pembinaan dan penataan penataan guru-guru.

Secara konsepsional kebijakan resentralisasi sangat tidak baik, akan tetapi pada prakteknya jauh lebih buruk jika kewenangan itu terus melekat di daerah. Sepanjang praktek pemerintahan tidak profesional dan amburadul. Tidak semata masalah pembinaan PNS, tapi implikasi lebih jauh yakni hubungannya dengan pembiayaan PNS daerah. Konsep yang coba ditawarkan pemerintah yaitu menghapus status kepegawaian pembeda selama ini antara pegawai pusat dan pegawai daerah. Indikasi itu dilihat dengan pemberian nomor induk pegawai, selama ini nomor identitas itu jelas ada

pembedaan antara pegawai pusat dan pegawai daerah. Tapi esensi disitu, jauh lebih penting masalah pebinaan dan pembiayaan. Pembinaan pegawai yang amburadul di daerah herdampak

Pembinaan pegawai yang amburadul di daerah berdampak pembebanan anggaran negara. Ada daerah yang kelebihan pegawai daerah justru kekurangan. Pada akhirnya distribusi pegawai tida baik pada level nasional maupun ruang lingkup provinsi itu sendi yang sudah "over capacity" pegawainya masih saja terus me formasi penerimaan CPNS setiap tahun, pada saat yang bersamaan tenaga honorer terus berjalan, akibatnya belanja pegawai men Proporsi pengeluaran dalam APBD jauh lebih besar untuk belanja belanja modalnya 1 sampai 15 %. Dari 124 daerah tersebut, seb Lumajang yang memiliki belanja pegawai hingga 83 % dan belar Revitut 16 k.

i Berikut 16 kabupaten/kota dengan belanja pegawai 70 % ke at Tasikmalaya 70 % Kabupaten Klaten 70 %, Kota Bitung 70 % Kot Sidempuan 70 % Kabupaten Srgaen 70 % Kabupaten Purworej Kabupaten Pemalang 70 % Kabupaten Kulon Progo 71 % Kabupaten Familang 70 % Kabupaten Kulon Progo 71 % Kabupaten Kuningan 71 % Kota Palu 71 % Kimalungun 72 % Kabupaten Agam 72 % Kota Ambon 73 % Karanganyar 75 % dan Kabupaten Lumajang 83 % (Fitrah, 2011).

Membengkaknya pegawai di suatu daerah tidak terlepas dari bagian 1

penerimaan CPNS, sebab mereka anggota keluarga pejabat daera sukses dan keluarga politisi. Sepertinya pemerintah daerah tid berpatokan berapa jumlah standar kebutuhan pegawai. Kebijakan moratorium penerimaan CPNS mulai tahun ini yang di

oleh pemerintah pusat perlu disokong. Jika kewenangan rekrutmen masih berada di tangan pemerintah daerah, rekrutmen tidak peduli berapa besar alokasi anggaran dalam APBD untuk pegawai. Lalu bagaimana daerah mau membangun jika anggaran belanja publik makin menipis?

Kebijakan ini bukan perkara gampang sebab banyak daerah yang men seperti delapan kabupaten di NTT menolak adanya moratorium pene CPNS. Alasannya mereka masih kekurangan pegawai, kendati sudah r pengetahuan jamak daerah ini relatif rendah kemampuan fiskalnya. A lagi, ada pemahaman dikalangan pejabat daerah dengan membuka 1 penerimaan PNS akan menurunkan jumlah pengangguran. Sejatinya, pemerintah bukan lembaga yang diharapkan untuk menyerap banyak kerja. Ini lebih pada pembuktian bahwa daerah gagal menciptakan dina perekonomian daerah yang berdampak terhadap penyerapan tenaga ker,

Menelaah Kemampuan Fiskal Daerah

* Peneliti LP2EB FEB UNG M. Amier Arham*

Dengan kondisi itu, menggambarkan bahwa tujuan otonomi daerah iri pusat terutama DAU sebagian besar digunakan untuk membayar gaji lan. Bagaimana dengan kemampuan fiskal daerah selama sepuluh tahun ipni, kendati sudah berjalan satu dekade. urah makin tergantung dari transfer pusat. Sementara realitasnya, bahwa proporsi transfer ke daerah makin meningkat sekalipun PAD an oelah munculnya bad practice. Revisi payung hukum tentang muli akan kembali diajukan pemerintah ke DPR untuk dibahas dan iiii berjalan belum ditemukan formula yang ideal, masih saja ikan masalah otonomi daerah, termasuk di dalamnya desentralisasi numun secara presentase PAD terhadap transfer pusat makin menurun. desentralisasi?. Dari hasil riset yang ada, seperti yang dilakukan oleh melekat, seolah tak ada ujungnya. Selama sepuluh tahun kebijakan

APBD setiap daerah naik, akan tetapi sebagian besar sekitar 70 km untuk belanja tidak langsung. Sementara untuk belanja langsung odal dan barang), rata-rata 10 - 20 % saja itupun banyak mengalami telaah APBD mulai tahun 2000 - 2010 yang saya lakukan rata-rata berkisar Rp. 100 M - Rp. 200 M, tapi selama sepuluh tahun berjalan orah sudah banyak daerah nilai nominal APBD mencapai Rp. 1 T. terus merangkak. Pada awal otonomi daerah rata-rata daerah otonom daerah otonom memang makin meningkat, tapi kenaikan belanja

dal menurun sekitar 8 %. nin barang jasa 19 %, belanja modal 25 % dan belanja lainnya 14 % yaknya jumlah daerah, disamping alasan bertambahnya kebutuhan olonja lainnya meningkat dalam nilai yang relatif konstan, sementara mt-besar jenis belanja tersebut, belanja pegawai, belanja barang dan dacrah. Sedangkan prosentase jenis belanja, dimana belanja pegawai llu, hasil rilis yang dilakukan oleh direktorat perimbangan keuangan h menunjukkan bahwa, total belanja meningkat sebesar 83 % dari sumpai tahun 2011 yang kemungkinan besar disebabkan karena

muk tahun 2010 tinggal 8 % dari sebelunnya 10 % pada tahun 2007. iik fungsi ekonomi seperti perkebunan dan penanaman modal relatif im infrastruktur dasar di daerah terus mengalami penurunan, sangat ii memang, kenaikan APBN maupun APBD setiap tahun nampak untuk belanja modal begitu minim. Tidak jauh berbeda, persentase hunpir semua daerah jalannya rusak dan sulit diperbaiki karena nhah setiap tahunnya. Sekaligus mempertegas bahwa biaya untuk

IIIIII tersebut menjadi cerminan peranan mekanisme transfer dari pusat

memiliki korelasi negatif terhadap pengeluaran untuk belanja barang dan belanja modal, sementara belanja pegawai berkorelasi positif. Meski masih ada secercah cahaya yang dapat menerangi keadaan itu, karena fungsi-fungsi pelayanan umum, merupakan alokasi terbesar untuk tiap tahunnya yaitu mencapai 36 % dari total pendidikan, kesehatan relatif meningkat. Alokasi untuk fungsi pelayanan umum

umumnya dilakukan oleh BUMN, bukan pemerintah daerah. untuk direalisasikan. Kalaupun ada pembangunan pasti lebih banyak transfer rendah, apalagi membangun pelabuhan laut dan udara di daerah sangat berat (bantuan kementerian) dari pusat, untuk pelabuhan udara dan laut yang terbangun jalan baru sangat sedikit, untuk memperbaiki jalan rusak saja anggarannya begitu infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi tidak berjalan. Membuka belanja langsung begitu minim, maka dampaknya dapat dibaca, pembangunan Peranan PAD yang minim, transfer dari pusat makin bertambah, proporsi untuk

memiliki proporsi total penerimaan yang sebagian besar dipenuhi dari bagi pajak dan bukan pajak (BHSDA), diantaranya; Bengkalis, Kampar, Siak, tercermin dari kemampuan PAD masing-masing daerah yang kaya SDA relatif unreneable. Saatnya nanti akan habis, schingga kemungkinan daerah tersebut semata dari hasil kekayaan SDA, karena umumnya kekayaan tersebut bersifat sebaliknya ketergantungannya terhadap transfer dari pusat begitu tinggi, hal itu jangka panjang daerah-daerah tersebut tidak boleh mengandalkan atau bergantung Walaupun demikian, bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang tinggi. Untuk Banyuasin, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Penajam Paser Utara. hanya daerah tertentu saja yang memiliki. Ada sekitar delapan daerah saja yang sekaligus pemicu lahirnya disparitas antar wilayah, sebab hasil kekayaan SDA pusat bisnis. Dengan mengacu pada faktor itu, tentu saja sangat terbatas daerah transfer dari pusat, hanya terjadi di daerah-daerah yang kaya resources dan pusatmenolong untuk memperbesar PAD. Kalaupun terjadi penurunan kertergantungan yang punya endowment factor seperti itu. Artinya, endowment factor tersebut pada tahun 2009, dengan memperluas basis penerimaan daerah tidak banyak Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diluncurkan Mus

diantaranya: DKI Jakarta, Surabaya dan Badung sebagian besar memiliki kemampuan untuk memenuhi total pendapatannya, Sedangkan daerah yang mampu memenuhi kebutuhan pengeluarannya, maupun

ebagian besar sumber PAD-nya dari pajak hotel dan restoran yang tidak ditransfer dari pusat, karena daerah ini merupakan daerah parawisata yang Badung, memiliki PAD sekitar Rp. 1 T jauh melampaui dana perimbangan yang nasional PAD-nya mencapai Rp. 2 T lebih, sementara dana perimbangannya jauh lebih rendah secara proporsi dari PAD Kota Surabaya. Sedangkan Kabupaten sebagai kota terbesar kedua dari Jakarta merupakan sentra industri dan bisnis proporsi terhadap PAD Jakarta itu sendiri lebih dari separuh. Kota Surabaya Sekalipun termasuk tinggi bila dikomparasikan dengan daerah lain, memiliki PAD lebih dari Rp. 16 T, dana perimbangan yang diterima sekitar Rp. 8 Jakarta sebagai ibukota (pusat pemerintahan), sekaligus juga sebagai pusat bisnis

dibagikan ke provinsi maupun pusat.

mengatasi masalahnya sendiri terutama meningkatkan pelayanan p mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada. fiskal yang melekat dari tujuan otonomi daerah, yakni mendorong mandiri. Idealnya daerah otonom seperti itu, sebab esensi dasar dari transfer dari pusat, mereka tetap hidup dapat membiayai pengelua fiskal daerah. Tapi mungkin itu terlalu ideal, paling tidak da Jika dianalisis lebih lanjut, ketiga daerah ini sekalipun tidak ad

Bagaimana Kemampuan Fiskal Gorontalo?

pendapatan semua daerah mengalami hal serupa, bukan hanya Go kabupaten/kota yang ada di dalamnya. Gorontalo makin mandiri dari segi fiskal bisa menyesatkan. Kenali kemunduran. Bila hanya melihat nominalnya akan menjebak, apalag Perimbangan terhadap total pendapatan justru menggambarkan pendapatan meningkat secara nominal, tapi proporsi peranan PAD m diperhatikan, yakni PAD dan Dana Perimbangan. Bisa jadi ke perlu kita hati-hati. Masalah fiskal daerah ada dua hal yang i kemampuan fiskal Gorontalo baik pada level provinsi maupun ka Kemajuan Gorontalo secara fisik adalah fakta, tapi perdebata Dari jauh saya mencoba meneropong perkembangan ekonomi

karena peranan transfer dari pusat meningkat, justru ada indikasi keterga perimbangan peranannya terhadap total pendapatan Provinsi Gorontalo menggambarkan bahwa Provinsi Gorontalo bukan makin mandiri dari a tahun 2010 sebesar 80,65 % dan tahun 2011 naik sebesar 80,71% tahun 2010 sebesar 19,34 %, pada tahun 2011 turun menjadi 19,28 %. Seda merupakan target. Proporsi peranan PAD Provinsi Gorontalo terhadap total anggaran 2011 baru berjalan triwulan kedua, artinya besaran PAD tahu Rp. 103,283 Milir naik menjadi Rp. 122,283 Miliar pada tahun 2011, Dugaan saya benar, kendati nilai nominal PAD meningkat pada tahun 2 awal apakah kemampuan fiskal Gorontalo makin meningkat atau sebalikny sampel ini terlalu pendek range waktunya, tapi minimal sudah memberiki kabupaten/kota dengan mengambil sampel secara series selama dua tal dengan data keuangan daerah Gorontalo baik pada level provin data-data keuangan daerah seluruh Indonesia yang saya miliki. Selanjutny pihak menjadi daya tarik buat saya, klaim itu memacu adrenaline unt Diskusi mengenai kemajuan Gorontalo dan kemampuan fiskal yang dikli

perimbangan naik, kondisi ini tentu tidak ideal bagi sebuah daerah otonom. kecenderungan yang sama dengan provinsi, peranan PAD-nya turun pendapatan lain-lainnya naik. perimbangan pada saat yang bersamaan juga mengalami penurunan, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo peranan PAD turun, m PAD terhadap total pendapatan naik, dan peranan dana perimbangan trendnya baik yakni Bone Bolango dan Gorontalo Utara, kedua daerah Pada level kabupaten/kota berdasarkan data pada tabel di atas ada dua kabu Kabupaten Boalemo dan Pohuwato mem

talo Post, 11 September 2011

Pola Penganggaran dan Kebijakan yang Koruptif

diterapkan dalam penyusunan APBN/APBD. Sistem wan seperti ini diharapkan menciptakan efisiensi dan pemanfaatan uang rakyat, sebab semua uang yang keluar in program kerja yang ada, atau menghindari kebiasaan untuk meghabiskan anggaran yang ada, tanpa melihat ikur outcome. Anggaran berbasis kinerja juga menuntut rogram-program yang terukur, bukan sekedar menuai mada indikator target. Namun anggaran berbasis kinerja juga menuntut mada indikator target. Namun anggaran berbasis kinerja juga anggaran diprioritaskan untuk keperluan yang kun memberikan dampak langsung terhadap kegiatan penyarakat.

ikait dengan itu, nampak prioritas anggaran untuk 10 masih jauh dari aspek anggaran berbasis kinerja, DPR liki hak budgeting dengan seenaknya membuat program nggaran untuk membangun kantor DPR RI dengan (p. 1,8 triliun. Anggaran jumbo ini didasarkan pada wa gedung DPR RI sudah mengalami kerusakan, dan g berlantai 24 sudah miring sekitar 7 derajat. Kendati n PU membantah kalau tidak pernah mereomendasikan RI mengalami kemiringan, hanya perlu perbaikan dan tapi tidak total.

wenangan DPR RI yang begitu besar dalam hal budgeting blah praktek kolutif dan koruptif, hal ini bisa dilihat mgesahan APBN-P 2010 selain merencanakan in kantor baru juga munculnya program-program yang lan jelas tapi anggarannya cukup lumayan besar, dalam garan tersedia tapi program belum tersusun dengan ada anggaran yang dialokasikan ke DPR RI, bahkan dan anggaran sendiri mengakui kalau memang ada miliar untuk DPR akhirnya dibagi rata setiap komisi ng dialokasikan kemana?. Pola peganggaran seperti itu ertentangan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja

Muh. Amir Arham*
* Penulis, Pengamat Ekonomi FEB UNG

yang didengung-dengungkan bahkan menjadi tuntutan DPR ke pemerintah. Idealnya, bahkan harus ketika disahkan, APBN sudah mencegah perincian program. Itu merupakan keharusan untuk jelas masuk ke dalam APBN-P. Pengesahan APBN-P 2010 tanpa program adalah sebuah langkah legislasi tanpa kelaziman dan program terperinci akan disusulkan dan dibahas kembali dengan program terperinci akan disusulkan dan dibahas kembali dengan program terperinci akan disusulkan dan dibahas kembali dengan menyusulkan program secara tersendiri, terbuka luas kesempatan menyusulkan program secara tersendiri, terbuka luas kesempatan berlangsungnya praktik mafia anggaran. Program-program siluman pun akan leluasa diakomodasi, maka dapat dibaca kemudian akan memancing datangnya para mafioso anggaran yang memang banyak bergentanyangana di Senayan.

daerah ditangkap tersandung kasus hukum, dan sepertinya tidak puluhan anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun tingkat sarang "penyamung", ini bukan ungkapan halusinasi karena sudah besar wakil rakyat, pengembang amanah rakyat justru menjadi dikelabui menjadi kotor. Keadaan itu seolah melekat bagi sebagian dalam tubuh yang normal pun dianggap tak wajar, yang tegap dan kokoh dianggap miring, yang bersih dihadapan mata dapat syahwat politik yang besar dan kerakusakan yang menyelinap sarkastik boleh dibilang bila otak sudah rusak dan kotor serta selalu disamapaikan anggaran tidak cukup bahkan tidak ada. Secara tidak bisa, namun bila menyangkut hajat rakyat alasan klise yang dasar masyarakat. Apapun kebutuhan mereka seolah tidak ada yang kebutuhan anggota dewan dikedepankan ketimbang kebutuhan membangun kantor yang lebih mewah dan mengesahkan anggaran yang belum jelas programnya menunjukkan hasrat mementingkan Pesan yang dapat ditangkap disini, keinginan untuk

akan berhenti karena masih saja terus berulang.

Anggaran jumbo yang disahkan DPR dalam APB untuk pembangunan gedung baru DPR RI sekalipun i berubah angkanya tetap sulit diterima masyarakat. Ar ditengarai lebih besar ketimbang untuk anggaran Program I Harapan (PKH) yang hanya senilai Rp 1,3 triliun untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Padahal, dengan a Rp 1,8 trillun anggaran ini bisa mengkover 1,1 juta triliur dibandingkan Gedung DPR yang hanya dinikmati 560 anggo

wikelah baru, berat. Dengan anggaran Rp. 1,8 triliun sara dengan 12 ribu go yang rusak, dengan rincian 4.151 rusak ringan dan 1.542 1 11.629 rusak berat. Sementara itu juga terdapat 5.693 gedung Pertama, terdapat 16.360 gedung yang rusak, 4.731 rusak ringan 66.990 rusak berat. Sementara untuk gedung Sekolah Mene sebanyak 139,461 yang rusak, meliputi 72,471 rusak ringar data tahun 2007/ 2008 tersebut terdapat gedung Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Umum, Berdas gedung sekolah itu mulai dari gedung Sekolah Dasar, Se hampir rubuh".Data itu berasal dari statistik 2007/2008. Keru gedung sekolah rusak tersebut mengalami rusak berat d kemiringan lebih dari 7 derajat dan mendekati 90 derajal dalam keadaan rusak, yakni 161 ribu bangunan. "45 perse Nasional. Dari data statistik itu, diketahui banyak gedung s statistik per sekolah yang dimiliki Kementerian Pend pendidikan sangat memprihatinkan yang justru seha diperjuangkan secara maksimal bagi DPR RI, ICW menguti Sementara bila dikomparasikan dengan keadaan d kepentingan yang sama yang mengabaikan hak dasar yang terjadi simbiosis mutualisme, kedua belah pihak biaya perjalanan dinas untuk DPR RI juga terus meningkat, al tahun, namun harapan itu terlalu ideal bagi orang banyak bagi eksekutif karena kecenderungannya biaya ini meningka mempolopori pemangkasan biaya perjalanan dinas ke luar Anggota DPR sepatutnya menjadi ujung

Politik Anggaran: Membuka Peluang Korupsi dan Potensi Pengurasan APBN dan APBD (1)

M. Amier Arham*
* Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

tut. Kedua kasus ini beraroma penyuapan, korupsi dan ungun dengan pusaran politik kekuasaan dengan perilaku *abuse*. Duri banyak rangkaian itu, pangkal muasalnya dari sistem ungunan negara, termasuk daerah yang belum baik. Apalagi ulitik dan pendanaan partai yang cenderung tidak menganut umbu etika. Negara dirampok secara berjamaah yang justru oleh elit-elit politik yang semata-mata lebih mementingkan dan materi untuk menghidupi kelompok dan partainya, kepentingan bangsa dan negara dikesampingkan.

ungun sistem politik yang kumuh membuka celah munculnya ungun sistem politik yang kumuh membuka celah munculnya ungun sistem politik yang kumuh membuka celah munculnya ungun oleh KPK pasti menyerempet ke lembaga politik (partai) dan partai penyokong kekuasaan. Ada indikasi bahwa uang ungun dengan memanfaatkan celah politik anggaran yang ungun dengan memanfaatkan celah politik anggaran yang ungun bermasalah. Ia bermasalah karena sengaja diciptakan ungun belum tertata baik akan mengundang kehadiran para ung kita kenal sekarang mafia anggaran.

www.m tidak sekedar bau aroma, bisa dicium tapi tidak bisa www.m ia adalah fenomena yang faktual dan berada dimanalompok mafia anggaran berpusat di tiga atau empat lokasi, lutif pusat, legislatif, pemerintah daerah dan di tengahnya ada mutura). Perantara ini umumnya kepanjangan tangan politisi lutu dirangkap oleh politisi yang memegang kendali di Mufin bekerja secara rapi, tugasnya ke daerah menawarkan mag dibiayai oleh APBN, tentu saja tidak ada makan siang Politik anggaran yang jomplang, serta besarnya kewenangan politik anggaran yang dimiliki, makin membuka celah masuknya

bentuk anggaran yang berpotensi diinfiltrasi mafia, yakni pulun pembangunan infrastruktur daerah (DPPID). Indikator urtu formulasi besaran yang ditransfer ke daerah ukurannya dan acuannya hanya di dasarkan oleh peraturan menteri dan diputuskan dalam rapat kerja dengan badan anggaran. Mul, duna DPPID ini dapat berubah 180 derajat di tangan hadan anggaran atau pimpinan DPR RI, dengan dalih DPR hadan anggaran atau pimpinan anggaran ata

untuk diselewengkan karena formulasi pembagiannya agak longgar, maka peluang untuk mendapatkan dana tersebut daerah harus punya cantolan di DPR. Bila tidak jangan harap akan mendapatkan dana DPPID, kalaupun dapat tidak didasarkan pada kebutuhan daerah pengusul, serta besaran yang diharapkan.

Karena itu sejumlah daerah mempertanyakan dasar pengalokasian DPID pada APBN perubahan 2010 maupun 2011. DPPID APBN 2010 totalnya mencapai Rp. 5,5 triliun yang justru lebih cenderung memperparah prinsip equalizing transfer, sehingga menjauhi prinsip perimbangan keuangan daerah. Sebab ada daerah yang mendapatkan DPPID puluhan miliar yang lainnya hanya dibawah 5 miliar, seperti yang dikeluhkan beberapa bupati dari kawasan yang relatif tertinggal. Bagaimana mungkin dalam APBN Perubahan 2010 ini ada daerah yang mendapatkan alokasi hingga Rp 24 miliar, sementara daerah lain hanya mendapatkan Rp 1 miliar atau bahkan ada yang tidak mendapat sama sekali? Padahal Untuk penguatan infrastruktur pasti semua daerah membutuhkan.

transfer yang sudah baku dalam perimbangan keuangan pusat dan politik anggaran sangat amburadul yang cenderung merusak mekanisme inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan, sekaligus memperlihatkan untuk penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Maka Rp 1 miliar ada 41 daerah. Dana Rp 1 miliar itu semuanya dialokasikan menerima Rp I miliar. Kabupaten/kota yang menerima DPPIPD senilai Dari 30 provinsi yang menerima alokasi DPPID, 14 di antaranya hanya Kabupaten oleh badan anggaran DPR RI diantaranya daerah yang dikategorikan tidak menerima DPIPD itu daerah tertinggal, seperti Kabupaten Melawi, tertinggal. Tapi DPPID 2010 ada sebagian dari kabupaten/kota yang Memang indikator serta formula pembagian DPPID ini sudah dijelaskan Bengkayang, dan Kabupaten Sumba Tengah,

Keberadaan DPPID tidak dibisa dihapus stigma sekedar bagi-bagi anggaran bagi politisi ke daerah pemilihannya, dan memang cenderung overlapping dengan dana transfer lainnya ke daerah, seperti DAK. Bila

kita cermati Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Ni /PMK.07/2011 sebagai dasar penentuan DPPID, pos-posnya ti yang berbeda atau kurang lebih sama dengan item-item ya DAK selama ini. Karena itu DPPID sesungguhnya perlu dides memiliki formula yang baku dan masuk dalam bagian UU per atau model transfer lainnya. Dengan demikian potensi kebo dikorup akan terkikis. Sebab dimana ada kewenangan yang hanya didasarkan pada aturan yang lemah, dan diputuskan sebadan anggaran dan kementerian keuangan, maka disitula penyalahgunaan kewenangan. Muaranya akan muncul prakta secara berjamaah.

Munculnya DPPID pada dasarnya juga cenderung merus alokasi anggaran atau berpotensi menabrakan aturan lain yada, seperti UU Keuangan Daerah, UU Perimbangan Keuanga dan UU Bagi Hasil Pajak. Kasus suap yang melibatka Kemenakertrans juga berpangkal muasal dari munculnya DPPID bidang transmigrasi. Bahkan dicurigai anggaran Rp. langsung nyelonong dalam PMK tanpa pembahasan di kom artinya dana ini ada hanya lewat badan anggaran dan ke terkait. Apalagi DPPID transmigrasi diserahkan atau badan memiliki kewenangan yang lebih untuk menetapkan, namur kriteria penetapannya tidak baku.

DPPID transmigrasi sesungguhnya juga berpotensi untuk diba berbagai pihak. Jika merujuk pada prinsip dasar otonomi daera transmigrasi, bidang ini menjadi kewenangan pemerintah Dengan asumsi, jika itu menjadi kewenangan daerah otono kementerian teknis tidak perlu membuat program dan mer anggaran ke kementerian keuangan. Otonomi daerah, peri keuangan pusat daerah menganut prinsip money follow functio kegiatan, program yang diserahkan ke daerah penganggarannya dengan sendirinya. Prinsip ini yang dilanggar oleh kementeria kerja dan transmigrasi, kendati sudah dijelaskan bahwa kemen hanya mengusulkan program ke kementerian keuang pelaksanaannya tetap daerah, termasuk kuasa penggunaan berada di tangan bupati (dinas).

Jalur pengusulan program dan pendanaan seperti itu justru berliku da panjang, semestinya semua diserahkan ke daerah saja. Dengan jalur yan dan berliku justru akan membuka celah masuknya mafia anggaran, yang terjadi di kemenakertrans saat ini. Mafia anggaran yang ditengara justru berada di pusaran eksekutif dan legislatif. Bersambung!!

Illalo Post, 26 September 2011

Politik Anggaran: Membuka Peluang Korupsi dan Potensi Pengurasan APBN dan APBD (2)

ekarang, begitu banyak lembaga di pusat dibuat, sementara gan pemerintah pusat yang melekat hanya sekitar lima. lembaga pemerintah di pusat posturnya dirampingkan. Tidak stru dikurangi untuk dibagikan kedaerah, dengan asumsi ldak langsung. Namun seharusnya alokasi anggaran kementerian ınsfer, akan tetapi ada alokasi untuk bayar utang, subsidi dan ng untuk dipusat, meski jujur diakui alokasi APBN bukan hanya ni jauh lebih besar dibanding belanja daerah yang hanya Rp Rp 781,5 triliun atau sekitar 69,33 persen dialokasikan untuk ya menjadi salah satu pertimbangan dan dasar pijakan politik ngan keuangan pusat dan daerah yang sudah memiliki UU liun (30,61 persen). Idealnya anggaran ke daerah lebih besar usat, kecenderungan APBN/APBN-P 2011 masih tetap sama. , namun jika kita telaah alokasi APBN/APBN-P 2010 yang lalu,

Scharusnya menjadi pertimbangan penting sejauhmana capaian Akibatnya, program yang disusun dengan pembiayaan APBN erealisir dengan menggunakan anggaran sehemat mungkin. malkan penyerapan anggaran. Tergambar disitu, keberhasilan tansi diukur dari seberapa besar penyerapan anggaran akan mpir semua hotel dan pusat-pusat pelatihan full booking oleh APBD akan digenjot dihabiskan anggarannya sebelum masa emata banyaknya penyerapan anggaran dalam kurun waktu tu tahun, kemudian indikator pengukuran keberhasilannya lebih igi, politik anggaran yang sekedar menetapkan pagu anggaran akhir tahun berakhir. Maka jangan heran, tiga bulan diakhir pemerintah untuk membuat kegiatan dalam

upun di daerah akan menjadi pertimbangan utama untuk enjalankan program. Instansi yang dianggap sukses, baik di tan anggaran tahun berikutnya. itau tidak, yang penting ada laporan kegiatan, sudah dianggap waktunya, entah itu indikator keberhasilannya secara fisik terjadi selama ini, instansi yang berhasil menyerap anggaran

ran" yang perlu diberikan *punishment* oleh legislatif dengan hnya mereka melakukan penghematan dianggap sebagai instansi yang masih minim penyerapan anggaran, kendati

* Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG M. Amier Arham*

memiliki politik anggaran yang baik untuk mendukung implementasi visi pemerintahan yang dibuat. Kesimpulan saya, badan anggaran, termasuk pemerintah itu sendiri tidak selama lima tahun, itu yang diberikan anggaran yang lebih banyak konsisten, kemana arah visi presiden? Apa yang yang menjadi prioritas berbeda. Jika DPR yang mayoritas pendukung pemerintah harusnya anggaran. Padahal setiap komisi memerlukan kebutuhan dana yang lebih berorientasi bagi-bagi anggaran atau bagaimana menghabiskan komisi. Formula pembagian dana ini tidak jelas ukurannya, kelihatan membagikan setiap komisi sebanyak Rp. 100 miliar karena ada 11 diduga dana tak bertuan, sehingga badan anggaran berinisiatif mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp. 1,1 triliun. Anggaran ini bisa menerima akal sehat, misalnya pada APBN-P 2010 badan anggaran pertimbangan, baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Sulit rasanya Efektifitas penyerapan anggaran juga semestinya perlu mendapatkan mengurangi atau memangkas anggaran tahun yang akan datang

terjadi pada kasus DPPID transmigrasi daerah yang mana yang berhak mendapatkan dana DPPID, seperti yang kewenangan menentukan besaran anggaran, termasuk menentukan hanya melakukan sinkronisasi anggaran antar komisi, bukan melampaui Anggaran DPR. Sesuai tugas pokoknya badan anggaran seharusnya dalam bahasa APBNP-nya disebut DPD FPPD (Dana Penguatan anggaran, karena tidak ada kriteria yang jelas dan ditetapkan oleh Badan 7,1 triliun. LSM Fitra menengarai dana ini jadi lahan subur calo Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah) senilai Rp Pada APBN-P 2010 muncul semacam "dana aspirasi terselubung" atau ada, baik bersifat block gram maupun specific gram (DAU dan DAK). Belum lagi muncul model formula pembiayan kedaerah yang aneh-aneh yang kelihatan tidak jauh berbeda dengan model transfer yang sudah

endapatkan dana sebesar Rp. 500 miliar tanpa melalui pembahasan di

Ketimpangan Anggaran

ke pusat mendapatkan bantuan pembiayaan. mengoptimalkan program teknis di daerah maka mereka luntan kekurangan dana sebab sentralisasi fiskal masih besa baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namu kegiatan-kegiatan kementerian umumnya juga dilakukan ole sebagai fungsi koordinasi, termasuk bertugas supervisi progran daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Kementeria alokasi anggaran ke daerah jauh lebih kecil ketimbang alokasi dirampingkan, fungsinya selama ini diserahkan sepenuhny belanja pemerintah pusat. Idealnya kementerian-kementeri yang diserahkan ke daerah begitu banyak (11 kewenangan Otonomi daerah sudah berjalan selama 10 tahun, kewenangai

yang bukan pusat bisnis dan jasa ketergantungannya terhadap pusat tetap tinggi. hanya daerah pusat-pusat bisnis dan jasa, sedangkan daerah ka diserahkan ke daerah seperti pajak hotel dan restoran yang diur diserahkan ke daerah basis pajak yang kurus-kurus. Basis paj karena basis pajak yang gemuk masih ditangani oleh pus anggaran muncul, disamping karena tingginya derajat sentralis: membantu mengurus bantuan itu dengan harapan akan ada terbuka lebar. Boleh jadi oknum-oknum kementerian yang dit (komitmen fee). Jadi persoalan mendasar disini yakni keti membuka peluang percaloan, potensi hadirnya matia anggara dinas akan selalau berada di Jakarta untuk melobi anggaran. Ki Gampang diterka, kepala daerah setiap bulannya atau pejab

kabupaten/kota belanja pegawai (belanja tidak langsung) di atas 50 bahkan ada yang mencapai 80 persen. Sungguh sebuah masalah dari APBN. Proporsi pembiayaan APBD tidak jauh berbeda, 2.5 persen dari total penduduk Indonesia mendapatkan alokasi 82, modal sebesar 19,5 persen. Sangat ironi, karena PNS yang jumlahny negeri sipil. Ini berarti rakyat hanya mendapatkan jatah melalui persen di antaranya dialokasikan untuk anggaran rutin seperti gaji daerah. Rancangan APBN 2012 diperkirakan sekitar Rp. 1.400 trili Bentuk ketimpangan lain soal alokasi anggaran baik di pusat ma

Pemilihan Gubernur Gorontalo, Persepsi Publik Yang Berubah (1)

M. Amier Arham* *Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

nnya yang juga diangkat menteri untuk pos kelautan dan alo, gubernur yang kalah merupakan pengganti gubernur nt sebagai menteri dalam negeri. Pola ini sama dengan na Barat petahanan kalah dari new comer, meski diakui lien/kota di Indonesia sudah banyak petahanan yang kalah lgub lainnya, secara umum incumbent masih terlalu perkasa kental ketimbang hasil evaluasi kinerja kabinet. Sementara iin. Bedanya, mantan gubernur Gorontalo hanya menduduki un merupakan pengganti karena gubernur sebelumnya esaingnya, sementara di level provinsi selama setahun nun (incumbent) kalah, dengan selisih suara yang agak besar. voling day pemilihan Gubernur Gorontalo menunjukkan mick count yang dilakukan beberapa lembaga survey politik dua tahun, direshuffle karena intrik dan tensi politik yang ini baru dua, yakni Sumatera Barat dan Gorontalo. Pilgub pencermatan saya, beberapa Pilkada langsung

hun petahanan di Gorontalo ada banyak kemungkinan dan politik. Jauh-jauh hari sudah saya duga, bahwa siapapun elanjutkan periode kepemimpinan Fadel Muhammad akan umi kemerosotan citra, bukan karena kinerja atau prestasi dari persepsi publik. Selama Fadel Muhammad memimpin dari persepsi publik. Selama Fadel Muhammad memimpin banyak orang memotret kedaerah ini. Fadel Muhammad marketer, piawai menggunakan momentum dengan public-nya cukup baik, sehingga hal-hal yang kecil bisa dipoles kelihatan besar. Bahkan "manipulasi" angka-angka statistik ning dilakukan, seperti jumlah produksi jagung seolah yang tinggi sehingga wajar jika melakukan ekspor. Terbukti, permintaan jagung Gorontalo yang tingi kuota yang

diminta tidak mencukupi, untuk menjaga trust bahwa Gorontalo punya komoditi jagung kuota ekspor di-drive dari Sulawesi Selatan.

Demikian halnya ekspor sapi yang dilakukan terkesan memaksakan diri, sebab kebutuhan daging domestik masih begitu tinggi. Gorontalo lebih mengedepankan citra publik, seolah hendak berkata Gorontalo bisa. Dugaan saya yang ingin dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo saat itu agar ia punya nilai tawar, tentu saja beroleh popularitas dimata rakyatnya, sehingga cenderung melawan arus kebijakan nasional. Kebijakan ini pula yang coba diimpelementasikan di kementerian kelautan dan perikanan dengan menyetop kebijakan lama berupa impor ikan dan garam. Tapi policy ini melawan maenstrem "mafia impor", meminjam istilah Rhenald Khasali "beruang-beruang ekonomi" menguasai lisensi impor berbagai komoditi, termasuk garam. Mereka pemburu rente yang memegang lisensi impor bertahuntahun merasa terusik kenikmatan ekonominya oleh kebijakan Fadel Muhammad.

Kembali ke masalah Pilgub Gorontalo, setelah Fadel hengkang (tepatnya kembali) ke Jakarta pamor Gorontalo terasa menurun. Polesan berbagai kebijakan maupun kegiatan relatif sepi dari penggantinya (Gusnar Ismail). Meski ikon dan program merupakan kesinambungan dari sebelumnya, tapi style manajemen pemerintahan tentu berbeda. Pada akhirnya, publik melihat terjadi kemunduran, Gorontalo seolah tenggelam dari percaturan nasional. Gorontalo tidak lagi identik dengan jagung, bahkan menjadi isu pokok dalam debat kandidat Gubernur, apakah betul Gorontalo masih mampu memproduksi jagung? Terbukti tahun 2009/2010 produksi jagung merosot, kegiatan ekspor ditengarai tidak ada lagi, atau diantarpulaukanpun sudah terhenti. Kalau pun akhir-akhir ini Gorontalo mencuat popular terlebih karena munculnya fenomena video youtube "Gayus Tambunan" dan "Polisi India". Tapi itu tidak ada signifikansinya antara kebijakan gubernur dengan

dan Jakarta). Gorontalo yang menonjol lebih banyak berk Gorontalo, karena hampir-hampir tidak ada emas dihutan lindung. Tokoh saudagar ini tio publik Gorontalo menolak perusahaan yang orang yang paling terdepan "menganeksasi" penggunaan "ijazah palsu". Tokoh yang sa yang sementara menduduki jabatan wak yang bersamaan muncul negative campaig Wartabone untuk pembukaan lahan tambang Ditengah upaya membangun citra positif bag regional Sulawesi hanya menyumbang sebesa sebesar 0,2 %, sementara secara spasial te tinggi, namun kontribusinya terhadap peml tinggi, hal itu sesuatu yang harus terjadi, jil karena hal semacam itu terlalu akademis. secara statistikal memang tinggi tapi kurang income. Itupun meski kelihatan pertumbuha ini tidak berkontribusi terhadap pembentuka pertumbuhan ekonomi yang dipublis piha yang dikecap publik bertolak belakang sec sebagai kampanye prestasi lebih nampak do terlalu merespon. Angka-angka kemiskinar Gusnar Ismail - Toni Uloli (GITU admin Ismail bagian di dalamnya. Klaim keberha kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya kolektif, program pemerintah Provinsi Go dianggap sudah lama berada di puncak Bo Ismail) meski baru beberapa tahun berada Gorontalo ingin sesuatu yang baru, kare Kemungkinan lain bisa dibaca atas kekala mendompleng ke mereka pada fenomena kreatifitas mereka. Justru terbaca di p anak muda yang popular lewat media sosial.

Pemilihan Gubernur Gorontalo, Persepsi Publik yng Berubah (2)

M. Amier Arham* *Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

a banyak gedung perkantoran yang dibangun, atau seberapa daerah dimanapun. an kerja dan seremonial yang memang umum dilakukan ten termuda di Gorontalo, lebih banyak pemberitaan acara itaan mengenai inovasi apa yang dikembangkan di ngun Gorontalo Utara. Meskipun itu masih sangat ing yang diusung oleh Partai Golkar, dianggap sukses ping itu, terbuka lebar ditafsirkan oleh banyak orang bahwa ntahan relatif baru, tapi didampingi oleh birokrat yang relatif nlo Utara juga tidak terlalu menonjol, bahkan sepi dari ble, karena kemajuan suatu daerah bukan diukur semata barkan beberapa kali acara silaturahmi di Kota Gorontalo. iri" keseantero Gorontalo, pemenang setidaknya dianggap aja" dan tidak neko-neko. Ditambah dalam tahap sosialisasi, ninya pemenang sementara, kedua-duanya merupakan figur rumah jabatan berdiri. Terobosan dalam pembangunan di dari petahanan lewat gerakan tak langsung dengan dimata publik Gorontalo. Meski pengalaman di

n kemajuan suatu daerah diukur dari welfare masyarakat, terjadi kenaikan karena dampak langsung dari kebijakan gunan. Bila itu terjadi, minimal mengindikasikan bahwa ia membangun daerah. Selain itu, juga dilihat dari seberapa emandirian daerah dalam masalah fiskal. Khusus masalah luasi saya, ada perbaikan. telaahan yang saya lakukan data keuangan daerah trend PAD kabupaten Gorontalo cara prosentase meningkat seiring dengan trend penurunan se transfer dari pusat. Sementara daerah lainnya cenderung

itulah potret umum Pilkada dihampir semua tempat. pilihan rasional, perasaan lebih dikedepankan ketimbang rasio, dan seorang pemimpin. Pilihan emosional jauh lebih kuat ketimbang kurang percaya jika itu menjadi dominan daya tarik untuk memilih legal". Sementara tawaran program (visi) saya orang yang termasuk antara rakyat dan calon, money politic sudah menjadi "praktek Dalam Pilkada langsung ditengah maraknya transaksi langsung terstruktur) atau dalam bentuk varian lain berkedok sumbangan. terang-terangan (bahasa hukumnya, sistematis, massif dan Selama praktek Pilkada langsung dilakukan mustahil tanpa money politic, tergantung seberapa jauh kemasannya dilakukan apakah tidak menjadi concern saya, karena itu relatif kita menilainya. Masalah money politic yang banyak dibicarakan publik Gorontalo on the track walau dari kemandirian fiskal masih jauh dari ideal. Artinya, dari perspektif desentralisasi fiskal Gorontalo Utara sudah prosentase kontribusi PAD terhadap APBD trendnya menurun. terbalik, prosentase transfer dari pusat cenderung naik dan

Pilgub sudah berlalu, walau sebagian pihak pasti tidak puas utamanya orang yang punya ekspektasi politik dan ekonomi. Bagi yang tidak puas, curiga terhadap proses Pilgub, pemerintah sudah menyiapkan sarana untuk sengketa pemilu lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Ketidakpuasan sangat tidak elok ditumpahkan dijalan, merusak dan berkonflik. Apapun itu hasilnya yang menang dan kalah sama-sama "anak negeri Gorontalo", pasti punya keinginan yang sama membangun Gorontalo yang maju. Harus kembali ke "Khittah" siapapun pemenangnya, dan pihak yang dikalah musti patuh terhadap janji dan deklarasi yang dibuat bahwa siap menang dan siap kalah.

Bagi pemenang, ada banyak agenda yang harus dibuat. Perekonomian Gorontalo masih amat bergantung dari investasi pemerintah, sementara investasi swasta baik PMDN maupun PMA

masih sangat minim. Anggaran pemeri investasi swasta sangat terbatas masuk ke pertumbuhan ekonomi Gorontalo sekalipu elastisitasnya terhadap penyerapan tenaga Secara nominal angka pengangguran di Gutapi jika diukur dari angka prosentase den secara keseluruhan termasuk tinggi.

Tidak akan mungkin daerah maju tanpa karena itu pembenahan pola daya tarik inve Kegiatan ekonomi di sektor riil sangat industri yang berdampak luas terhadap disadari industri besar masih sulit untu Gorontalo, minimal industri-industri keci dengan potensi lokal Gorontalo.

dan biasnya ke publik. keranah kebijakan pemerintahan, karena pasti ditanggalkan, masalah pribadi sebisa mung sekata dengan pemerintah provinsi. Ego sekto menjadi alibi, kabupaten/kota masing-masing lompatan ekonomi. Meski disadari otonomi da tarik investasi harus senafas, tanpa itu sulit provinsi dan kabupaten/kota wajib bersiner membuktikan itu bahwa "Gorontalo olo pertumbuhan yang berkualitas. Kini sebesar itu niscaya akan mnggerakkan roda masuk ke Sulawesi Selatan sebesar Rp. 28 tril Dalam kurun waktu enam bulan setidaknya dari provinsi senior, seperti Sulawesi Selati Masalah pola daya tarik investasi tidak ada menarik investasi dengan membuat Perda memenangkan regional champion sebagai

ntribusi kawasan ini relatif kecil, juga dilihat dari berbagai bigi pembentukan perekonomian nasional. Berbicara masalah wial, Kalimantan berkontribusi terhadap pembentukan PDB ninnya masih jauh tertinggal dengan Sumatera, apalagi Jawa un ini didorong akselarasinya akan memberikan kontribusi wasan Timur Indonesia (KTI) selama ini belum dioptimalkan 3 %, Sulawesi 4,61 %, Nusra-Maluku-Papua 3,83 %. membicarakan regional, yang meliputi di dalamnya Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Secara

emberikan dampak ekonomi yang besar, tapi cenderung an kompleksitas masalah sosial seperti konflik agraria, ang membutuhkan tenaga kerja yang berpengetahuan tinggi, lokal sangat minim. enagakerjaan, kerusakan lingkungan. Apalagi dalam sejarah mtasi capital intensive. Keberadaan tambang disuatu wilayah am jumlah besar umumnya pada investasi pertambangan emampuan sumberdaya manusia masih rendah dan investasi tambang di Indonesia kontribusinya terhadap negara maupun palagi dukungan kebijakan pada masalah lalu kurang onsekuensi pilihan idiologi pembangunan yang lebih nk faktor penentu rendahnya kontribusi wilayah KTI, secara optimal, pembangunan lebih berpusat di Jawa. In il masih begitu timpang. Infrastruktur pendukung sangat Investasi baik PMDN maupun asing cenderung diabaikan di jumlah penduduk kecil, disamping sebaran penduduk di semua menumpuk di Jawa, jika pun ada investasi yang pada efisiensi (pertumbuhan), ketimbang memilih

Kebijakan ini seolah mati suri, secara kelembagaan KAPET masa lalu, seperti pembentukan Kawasan Ekonomi Terpadu serta program untuk mendorong percepatan pembangunan di wasan ini diabaikan dengan menghilangkan kementerian imnya investasi di kawasan ini. Meski disadari ada banyak puangan di KTI masih sangat kecil sebagai implikasi dari halnya, proporsi penyaluran kredit, maupun keberadaan terutama pemerintahan SBY baik jilid satu maupun jilid dua menangani KTI yang dibentuk oleh Presiden Abdurrahman tapi sudah tidak ada aktifitasnya. Belakangan komitmen

diubah menjadi kementerian daerah tertinggal, artinya tidak nggal dalam hal apapun ada di kawasan ini. Walau di Jawa saja tapi semua wilayah. Sementara daerah yang paling

Membaca Peluang Kawasan Timur Indonesia Dalam MP3EI (1)

* Penulis, Pengajar FEB UNG Muh. Amir Arham*

KAPET selama ini diharapkan akan menjadi "engine of growih" di KTL selain akan menjadi penarik sebagian penduduk yang ada di Jawa memacu agar memiliki spreedwash ekonomi dengan kasawasan barat, tapi hanya jadi aksesoris, tak berdaya, namun secara kelembagaan masih pulau ini. Idealnya, lembaga yang mengurusi KTI tetap ada untuk pembangunan, infrastrutur relatif sudah baik. Hanya saja daya dukung faktor demografi, karena penduduk Indonesia lebih dari 50 % ada di untuk sektor primer (pertanian) makin menurun karena dipengaruhi perspektif lain, Jawa sebetulnya sudah "overload" dalam proses sendiri masih ada daerah tertinggal, tapi tidak seberapa. Dalam

perhatian lebih di KTI. atau kebijakan pembangunan yang berubah-ubah itu, akan memberikan banyak kendala yang dihadapi daerah ini. Kita berharap, apapun model Pola ini tidak terlalu banyak menolong ketertinggalan KTI, sebab ada dan KBI masing-masing didorong untuk bersaing secara bersamaan Asumsinya, dengan kebijakan atau pola pembangunan seperti itu, KTI dimiliki di wilayah KTI yang tidak dimiliki oleh wilayah barat. Namun jika kita telaah dengan baik, tidak ada komoditi spesifik yang wilayah diharapkan mengembangkan komiditinya sebagai selling point pembangunan secara simultan disemua kawasan. Dengan masing-masing lokal. Artinya, desain MP3EI, pemerintah ingin mengakselarasi wilayah diberikan peluang yang sama dengan berbasis pada keunggulan terakhir Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Koridor Ekonomi dan Indonesia (MP3EI) tidak menekankan secara spesifik KTI, tapi semua

diletakkan di Jawa atau pusat perekonomian nasional, seperti pelabuhan Jawa maupun untuk kebutuhan ekspor. Pelabuhan direct call tetap dijadikan sebagai pengumpang (feeder) komoditi yang dibutuhkan di murah dengan biaya angkut sebaliknya. Dari desain perencanaan MP3E Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Papua yang dibuat nampak hanya sama, atau biaya angkut ke daerah Maluku dari Makassar misalnya lebih menciptakan biaya ekonomi tinggi. Biaya angkut transportasi berbagai tidak banyak memacu ketertinggalan KTI, karena secara umum koridor juga memperlihatkan kecenderungan bahwa program ini sebetulnya komoditi antar KTI sendiri begitu timpang kendati jaraknya hampir Ketertinggalan KTI dari berbagai aspek, terutama infrastruktur

> potensial, terutama ke kawasan Asia Timur dan Amerika. koridor Sulawesi dan koridor Maluku-Papua lebih dekat den dan Manado-Bitung dijadikan alternatif port international Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Priok Jakarta, kendati

nikel, migas dan perikanan. sementara koridor Maluku-Papua meliputi pertanian pangan, diantaranya sektor pertanian pangan, kakao, perikanan, nikel di Sulawesi kegiatan utama ekonomi yang didorong yakni lim batubara, kelapa sawit, besi baja, bauksit dan perkayuan. kegiatan utama ekonomi meliputi enam sub sektor yakn mempertimbangkan bahwa koridor yang ada di KTI seperti K banyak, tapi yang paling krusial masalah infrastruktur. yang dihadapi koridor Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Pap insentif khusus untuk mempercepat ketertinggalannya. Kend Dilihat dari perspektif ini, KTI jelas memerlukan special treat

Kalimantan begitu tinggi, antara daerah tambang dan dae tambang. dikawasan ini masih tetap rendah. Akan halnya disparitas bersifat unrenewable. Apalagi realisasi investasi pemb Kalimantan, karena itu tidak boleh mengandalkan sektor tamba menjadi persoalan yang berdampak pada keberlanjutan produksi sektor migas dari tahun ke tahun, tentu dalam jangka PDRB dari sektor tambang. Akan tetapi ada trend penurun Kalimantan. Wilayah ini kontribusi utamanya dalam pem pendukung yang memadai. Belum pengolahan sektor primer, Ketiga koridor itu semua berbicara tentang pusat produ karena kendala lain, seperti itu memerlukan infi

Bersambung! menjadi pemicu baru terciptanya disparitas antar KTI dai dengan adanya MP3EI. Jika perlakuannya sama, justru MP31 merupakan andalannya. Karena begitu banyaknya kendala mal infrastruktur terbatas dan produktifitas pertanian belum optim atau mobilitas penduduk yang rendah, investasi yang ada keberpihakan bagi pemerintah, agar KTI tidak makin te Papua lebih banyak kendala yang dihadapi, seperti Jumlah pe sekitar 50 % tenaga kerja, tapi pertumbuhannya sangat me invetasi yang rendah serta infrastruktur yang terbatas. Koridor l rendahnya nilai PDRB perkapita dibandingkan dengan pulau atau penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB, dan m kegiatan utama perekonomian hampir 40 % didominasi sektor p Untuk koridor Sulawesi hambatan yang menghadang dikedepar

Membaca Peluang Kawasan Timur Indonesia Dalam MP3EI (2)

utama. Hal ini berarti Pemda juga lebih fokus sesuai potensi MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi eleh pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan adang dikesampingkan demi mengejar sebuah prestise. hat di luar sana, tertarik pula mengaplikasikan di daerahnya unan beserta pusat ekonominya, dan berikut kegiatan ebijakan pemerintah pusat terkadang implementasinya di 500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara endapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 nempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 aya saja, bahwa desain perencanaan yang dibuat kedalam dak sesuai dengan potensi, apalagi kebutuhan masyarakat iliki koridomya, sebab tidak jarang pemerintah daerah apa dak sejalan. Masing-masing koridor sudah dibuat tema merintah pusat dan pemerintah daerah kurang berjalan akan transformasi ekonomi. MP3EI mengedepankan noi gitu elok, karena MP3EI dibuat oleh pemerintah untuk 4,5 Triliun. Sementara persoalan klasik, seperti koordinasi pendapatan. Kekuatiran saya, desain ini jika dibaca dengan usual dengan melibatkan semua stakeholders. Melalui mengurangi pola ketimpangan antar kawasan, maupun

Posisi Gorontalo Dalam MP3EI?

kumen MP3EI ada delapan program utama yaitu pertanian, ngan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, gembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang akan dibagi an keunggulan lokal masing-masing koridor dengan pankan semangat not bisnis as asual, terutama untuk unan infrastruktur. Model pembangunan infrastruktur ini yang dilakukan mengandalkan pembiayaan dari h melalui APBN dan APBD. Terbatasnya anggaran yang oleh pemerintah, baik dipusat maupun di daerah tentu ulit pembangunan infrastruktur. Not bisnis as usual n cara pandang yang berubah, pembangunan infrastruktur n kerjasama semua pihak dalam bentuk Indonesia

Muh. Amir Arham* * Penulis, Pengajar FEB UNG

Dalam hal ini juga dikembangkan metode pembangunan infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi. Peran Pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membangunan daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi. Menarik untuk dikaji masalah Mapara beritah daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.

Sementara di Sulawesi Tengah tersebar pengembangan simpulkomoditi strategis yang dapat dikembangkan kedua wilayah tersebut. koridor ekonomi di Sulawesi kelihatannya memang beberapa simpul Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Ilustrasi pengembangan manfaatnya sedikit sekali di wilayahnya, jauh lebih diuntungkan dalam program MP3EI. Bagi Gubernur Sulawesi Tengah, MP3EI peluang bagi masing-masing kepala daerah (gubernur) di regional masing wilayah. Dengan mendasarkan pada kenyataan itu, terbuka pusat ekonomi yang didasarkan pada endowment factor masingpengembangan koridor empat dengan jelas digambarkan pada setiap Sulawesi untuk menginterpretasikan peluang apa yang dapat diraih mengedepankan tema pembangunan pusat produksi dan pengolahan kakao, perikanan, nikel dan minyak bumi dan gas (migas). Ilustrasi meliputi pertanian pangan (padi, jagung, kedelai dan ubi kayu), Mamuju, Palu, Gorontalo dan Manado), kegiatam ekonomi utama nasional. Terdiri dari enam pusat ekonomi (Makassar, Kendari, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan akan dikembangkan disetiap koridor, Koriodor empat (Sulawesi) Menarik untuk dikaji masalah MP3EI, begitu banyak program yang

simpul komoditi, tidak hanya berpusat di Palu.

perikanan Sulut, Sulbar, Sultra dan Sulsel. perikanan. Justru yang dijadikan simpul pengembangan pemerintah pusat, sehingga Gorontalo bukan termasul Gorontalo. Usaha itu sepertinya kurang mendapatkan ke mina bahari, baik yang di perairan Tomini maupun perai perikanan yang besar, bahkan dahulu memiliki gagasan m jagung. Berulang kali pemerintah, baik dilevel provinsi kabupaten/kota di Gorontalo bahwa wilayahnya memilik Badan Otorita Teluk Tomini. Disamping memiliki progr ditetapkan sebagai MIFEE (Merauke Integrated Food o mengembangkan, seperti Lampung, Sementara komoditi jagung sudah banyak wilay tanaman pangan (jagung), simpul komoditi lainnya t Estate), bahkan Sulawesi Selatan sendiri sudah surplus MP3El wilayah ini hanya dijadikan sebagai basis peng Bagaimana dengan Gorontalo? Diantara enam pusat ekono termasuk Merau

jagung). Berakhir! sebagai pusat produksi dan pengolahan pertanian pangan (b pusat untuk menempatkan Sulawesi, dan Gorontalo secara dari pemerintah daerah. Juga konsistensi dukungan dari per dengan segala upaya yang didukung dengan regulasi dan k Gorontalo perlu memanfaatkan kebutuhan pasar domestik sebanyak 800.000 ton dari total kebutuhan 5 juta ton. masih tinggi, pada tahun 2010 Indonesia masih mengimpo olahan. Tidak hanya pasar ekspor, kebutuhan jagung dome punya "brand" jagung, tapi masih rendah value added-nys kebanyakan jagung yang diproduksi diekspor dalam ben diupayakan sebagai pusat pengolahan jagung. Gorontal peluang ini, tidak saja sebagai pusat produksi jagung ta pertanian pangan (jagung). Gorontalo perlu meraih secara r koridor ekonomi Sulawesi, sebagai pusat produksi dan pe ekonomi lainnya. Dengan merujuk pada tema pembangun dikembangkan, kendati dianggap kurang kompetitif deng jagung. Walau tidak menutup kemungkinan komoditi lain p yang dianggap lebih potensial dikembangkan di Goronta Hal ini berarti dari lima kegiatan ekonomi utama di koridor

Sulawesi Selatan; Antara Spirit Kearifan Lokal dan Pilar Nasional

enulis, Penulis Lepas Tinggal di Makassar Muh. Amir Arham*

ekilas bahasa ini mendorong-dorong orang Sulawesi Selatan untuk bertikai yang iulawesi Selatan semangat dan punya spirit yang kuat untuk maju, sejajar agai dorongan untuk bertikai satu sama lain, tapi ia bagian dari togline agar agian masyarakatnya teguh memegang prinsip. yang diintisarikan dari kearifan lokal, meskipun kelihatan narsis atau terkesan n lainnya di Jawa yang sudah lebih dulu leading. urinya. Gubernur sebelumnya, gemar menggemakan kata --- Ewako atau pemerintahan di Sulawesi Selatan kerap menggunakan jargon penyemangat Kamajumaki. Kalimat ini dijumpai dihampir semua sudut Kota Makassar saat frasa Bahasa Bugis-Makassar. Saya menangkap Tapi Ewako disini bukan

 Kamajumaki". Saya mencoba menafsirkan pesan apa yang hendak dibalik kalimat ini. Masyarakat Sulawesi Selatan diajak oleh pemimpinnya tan tumbuh di atas rata-rata nasional, mencapai 9 % pada tahun 2010, termasuk giatan ekonomi baru tumbuh dimana-mana, dalam kurung waktu lima tahun lawesi Selatan boleh dibilang fantastik, terutama di Makassar. Pusat-pusat luk berbangga atas capaian yang sudah diraih dipelbagai bidang. Secara fisik mya sudah berlalu, kini digantikan dengan spirit baru dengan frasa dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia intoran. Disamping geliat ekonomi begitu besar, schingga perekonomian assur Convention Center (MCC), Bandara Internasional, Hotel Berbintang numental bersifat komersil maupun sosial di Makassar hadir, seperti Trans

ota Makassar?. Spekulasi ini tidak bisa dilepaskan dari aroma rivalitas antar punya peran besar, apakah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau ntan yang terkonsentrasi di Kota Makassar menimbulkan spekulasi politik nıı bertahun-tahun agak minim. Sehingga dibalik kemajuan yang dicapai disparitas wilayah yang makin tinggi, apalagi jika melihat kondisi infrastruktur la lainnya masih banyak yang tertinggal. Dengan kondisi seperti itu justru dapat erpisah haluan. Kedua-duanyapun pada waktu yang bersamaan meraih bintang walikota, meski mereka berangkat dari tempat star politik yang sama tapi di relatif lebih baik, dibandingkan dengan wilayah selatan hingga ke Sinjai hipaten/kota tidak seimbang. Nampak kondisi jalan diwilayah tengah, hingga us diakui, pembangunan ekonomi masih terkonsentrasi di Makassur, sementara ıngat buruk. Tidak dipungkiri, perhatian pemerintah provinsi diwilayah bagian

nkan persepsi bagi dunia usaha yang tidak kondusif, pada akhirnya el seperti ini justru baik bagi daerah. Rivalitas yang tidak sehat, Valikota. Tapi tidak sedikit investasi yang masuk ke Makassar juga jerih payah giatan pemerintahan dan pembangunan. Pertikaian antar tingkat pemerintah eran masing-masing pihak yang perlu dihindari, karena pasti akan berdampak gum pembangunan, serta kebijakan keduanya nampak terjadi sılan tidak terhindurkan, kemajuan Kota Makassar sah rasanya sebagai sukses perlombaan

> grassrooth memaknai berbeda itu indah Disamping masyarakat berharap mereka mempertontonkan indahnya berdemokrasi, seperti yang dipraktekkan tokoh-tokoh politik Kematangan kedua tokoh politik yang berbeda perahu dituntut, meski ada rivalitas tapi hubungan keduanya tetap perlu dijaga dengan baik. Dipastikan keduanya akan head to head dugaan saya yang disebut "Banggamako, Kamajumiki" bersama masyarakat, dan semua pihak menikmati, dan itulah makna sesungguhnya menurut sipeppa", walau berbeda tapi tetap satu. Kemajuan yang dicapai atas jerih payah pemerintah soliditas masyarakat Sulawesi Selatan makin kuat yang menganut falsafah "mahbulo (founding fathers bangsa) pada masa lalu, bahwa politik itu game. Jika itu terbangun pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan awal tahun 2013, sehingga masyarakat di

dapat membangun kesan negatif bagi daerah Sulawesi Selatan. Dalam artian, tugas seorang juga berkewajibun merubah pola pikir bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Ada banyak keurifan lokal, seperti "Siri", pelecut semangat "Ewako" atau "Banggamako" pemimpin bukan hanya merubah wajah kota maupun menggenjot pertumbuhan ekonomi tapi mahasiswa seolah menjadi pemandangan umum, aksi demonstrasi yang kurang substantil dan sekitarnya bukan kota yang nyaman terhadap semua orang. Kebiasan tawuran bagi kriminal yang menonjol ditampilkan dimedia elektronika jelas membangun image Makassar dengan Sulawesi Utara. Demikian halnya fenomena sosial, seperti kekerasan dan kasus Sulawesi Selatan, seperti angka kemeskinan masih tinggi, HDI masih rendah jauh tertinggal yang kerap menimbulkan "patologi sosial" bagi orang lain merupakan bentuk perifaku yang ada fakta ekonomi didepan mata yang tidak boleh ditutupi oleh pemerintah Provinsi Meski dibalik pesan itu jangan sampai melahirkan rasa berpuas diri sampai disitu saja, sebah

jangan sampai disalahaplikasikan yang cenderung destruktif. "Siri' merupakan prinsip atau jati diri yang perlu dipelihara tapi kedalam kegiatan konstruktif. Ada rasa "Siri' kalau terkebelakang, bodoh, tidak sukses, tidak sekolah dan sebagainya, dalam konteks seperti itu 'Siri' perlu ditegakkan.

dijadikan sebagai pilar nasional pemerintah provinsi kita bisa menduga bahwa inilah landasannya sehingga daerah ini hendak bagi perekonomian nasional masih kecil?. Sembari melihat deretan prestasi yang dicapai mendeklarasikan bahwa Sulawesi Setatan merupakan pilar nasional, sementara kontribusinya sebesar 2,23 %. Bagi saya tidak ada salahnya bertanya, mengapa mereka dengan percaya diri secara nasional sumbangannya terhadap pembentukan PDB masih sangat kecil, hanya dikawasan Sulawesi tertinggi sebesar 49,5 % dibandingkan dengan provinsi lainnya. Namun Memperingati hari jadi Sulawesi Selatan yang ke 342 mengusung tema "Sulawesi Selatan Pilar Nasional". Secara spasial kontribusi Sulawesi Selatan terhadap perekonomian

pusat bagi Sulawesi Selatan untuk menggaet investasi sebanyak-banyaknya. Pola seperti ini satu PMDN. Serta banyak "kewajiban-kewajiban" lainnya yang harus dipenuhi pemerintah tentu akan menjadi daya pacu bagi daerah lain agar melakukan hal yang sama untuk pemerintah pusat berkewajiban mendatangkan dua investor kedaerah jawara, satu PMA dan Champion menjadikan provinsi ini akan mendapatkan kemudahan berinvestasi, dimana penghargaan bergensi bagi Sulawesi Selatan sebagai juara satu -Regional Champion-Sulawesi Selatan pada tahun 2009 menduduki peringkat kedua setelah Sulawesi Utura dinobatkan sebagai daerah pelayanan publik terbaik (Prasamya Karya Bhakti Praja dengan menyisihkan 10 provinsi lainnya. Keberhasilan Sulawesi Selatan meraih Regional dalam bidang ekonomi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan penghargaan yang diraih sebanyak 96 penghargaan disemua SKPD. Tidak kalah pentingnya Nugraha). Setidaknya dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, selain itu ada banyak

> Kepala BKPMD sendiri melimpahkan ke frontliner. pelimpahan wewenang dari Gubernur ke Kepala BKPMD untuk pengurus konsisten menjalankan dan melakukan kreasi serta modifikasi sedikit dengar semacam ini sudah banyak dilakukan daerah lain, tapi Pemerintah Sulav dengan membuat Perda No. 11 tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Satu Pir pelaksana teknis di lapangan. Langkah awal yang dilakukan penguatan regula bisa dibuat oleh semua provinsi, tergantung dari komitmen yang kuat bagi pe Champion untuk kemudahan berinvestasi tidak terlalu rumit apalagi dibilang menciptakan daya tarik investasi. Kemampuan Sulawesi Selatan meraih Regiona

pembangunan rel KA jalur Makassar-Parepare serta beberapa proyek yang bemi pembangunan monorail Gowa-Makassar-Maros, pengembangan kawasan in 200 ha, kemudian akan menanti proyek kota terpadu --Mamminasata-- sejenis J dan perhotelan. Pada saat yang sama memproses pengembangan terminal peti k di dalamnya akan dibangun center park, kawasan konservasi, padang golf, kaw memberikan multiplier effect economy, seperti pembangunan centre point of Ind banyak proyek pembangunan yang akan dimulakan bersifat megaproyek yang membangun BKPM tower, deal investasi bisa dilakukan via elektronik. Dil dengan menghasilkan investasi sekitar Rp. berhenti disitu saja, untuk mendukung daya tarik investasi di Sulawesi Selatan dengan menghasilkan investasi sekitar Rp 10 Triliun (Fajar, 12/10/20 keseluruhan total investasi semester pertama tahun 2011 sebesar Rp. 28,83 T. Meski belum cukup setahun dimplementasikan sistem ini sudah mengeluar

munculnya MP3EI akan banyak manfaat yang diperoleh, dibandingkan de investasi, atau minimal ada pembenahan untuk mengantisipasi luapan (spreedwas ekonomi lainnya di Sulawesi (koridor empat). Apalagi saat ini Gubernur Sulaw kondisi seperti itu, provinsi yang lain tidak ada salahnya melakukan inovasi untu Makassar sebagai pintu gerbang KTI yang akan meninggalkan provinsi tetangga menjabat sebagai ketua harian koridor empat MP3El. Ini akan makin me sebagai (salah satu) pilar nasional dalam pembangunan ekonomi nasional. Ditam Jika semua rencana proyek ini berjalan, Sulawesi Selatan pantas menempat

Walau selama ini disektor pertanian merupakan penopang utama, khususnya produksinya sudah surplus sekitar 1,5 juta ton. Indonesia yang sudah diantarpulaukan ke 16 provinsi di KTL Demikian ju pangan. Provinsi ini merupakan lumbung pangan, atau penghasil beras ketiga melakukan diversifikasi ekonomi (produk), yang tidak mengandalkan satu komod Beberapa jenis proyek yang dirintis di atas menggambarkan Sulawesi Se

desain yang menyesuaikan zaman, serta kebutuhan kenyamanan penggunanya. Ti merek lainnya semua dimulai dari hal yang sederhana, kemudian dikembangkan ir jepang, hari ini Malaysia dan India sudah memulai, kenapa Indonesia tidak bisa? diproduksi di Korea. Menengok sejarah otomotif dunia di Jepang, seperti Toyota at mobil nasional, yang tentu beda dengan mobil nasional merek Timor pada masa nama mobil toko (moko). Visinya jelas, moko diharapkan kedepan akan menjadi Bidang inovasi juga digalakkan. Mereka sadar tanpa inovasi maka bangsa ini akan tertinggal dan hanya sekedar jadi tujuan pasar produsen bangsa lain. Mesederhana, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggandeng pergur sehingga desain tahap awalnya masih berbentuk mobil pick up dan moboi box y lokal mengembangkun mobil lokal. Mobil ini akan diperuntukkan bagi pedagang-

Dimana Posisi Sulawesi Tengah Dalam MP3EI?

* Direktur Eksekuif PSKP Sulteng

en pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu ın inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2014 menjadi 2015 - 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh ıng berkisar antara USD 14.250 - USD 15.500 dengan nilai total an dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan engan melibatkan semua stakeholders. Melalui langkah MP3EL endorong percepatan pembangunan sekaligus mengurangi pola inkan karakteristik negara maju (bappenas.go.id, 2011). kannya target di atas, diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar mian (PDB) berkisar antara USD 4,0 - 4,5 Triliun. Untuk rakan transformasi ekonomi. MP3EI mengedepankan not bisnis as engan rinci begitu elok, karena MP3EI dibuat oleh pemerintah untuk ngan antar kawasan, maupun distribusi pendapatan. Desain ini jika un Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) oleh pemerintah perencanaan yang dituangkan kedalam Masterplan Perluasan dan persen pada periode 2011 - 2014, dan sekitar 8,0 - 9,0 persen pada n sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per

rubah, pembangunan infrastruktur dibutuhkan kerjasama semua am bentuk Indonesia incorporate. unan infrastruktur. Not bisnis as usual merupakan cara pandang ncrintah, baik dipusat maupun di daerah tentu mempersulit ttur selama ini yang dilakukan mengandalkan pembiayaan dari sing-masing koridor dengan mengedepankan semangat not bisnis as lokumen MP3El ada delapan program utama yaitu pertanian, th melalui APBN dan APBD. Terbatasnya anggaran yang dimiliki rutama untuk pembangunan infrastruktur. Model pembangunan egiatan ekonomi utama yang akan dibagi berdasarkan keunggulan angan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri ngun, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta

insentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatan produksi dan al mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat tur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa nlam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, ini juga dikembangkan metode pembangunan infrastruktur

han ekonomi (bappenas.go.id, 2011) h pusat dan pemerintah daerah harus membangun linkage merintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang ya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi. pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha (sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka

> simpul komoditi, tidak hanya berpusat di Palu. tersebut. Sementara di Sulawesi Tengah tersebar pengembangan simpulbeberapa simpul komoditi strategis yang dapat dikembangkan kedua wilayah llustrasi pengembangan koridor ekonomi di Sulawesi kelihatannya memang wilayahnya, jauh lebih diuntungkan Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. menginterpretasikan peluang apa yang dapat diraih dalam program MP3EI. Bagi Gubernur Sulawesi Tengah, MP3EI manfaatnya sedikit sekali di masing-masing kepala daerah (gubernur) di regional Sulawesi untuk wilayah. Dengan mendasarkan pada kenyataan itu, terbuka peluang bagi pusat ekonomi yang didasarkan pada endowment factor masing-masing dan ubi kayu), kakao, perikanan, nikel dan minyak bumi dan gas (migas). pusat ekonomi (Makassar, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo dan Manado), perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Terdiri dari enam llustrasi pengembangan koridor empat dengan jelas digambarkan pada setiap kegiatam ekonomi utama meliputi pertanian pangan (padi, jagung, kedelai tema pembangunan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, dikembangkan disetiap koridor. Koridor empat (Sulawesi) mengedepankan Menarik untuk dikaji masalah MP3EI, begitu banyak program yang akan

perikanan, bersama Gorontalo, pengembangan koridor, Sulawesi Tengah tidak dimasukkan sebagai simpul yakni Selat Makassar, Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Dalam ilustrasi blow up kepermukaan yang dianggap potensial, seperti komoditi rotan memang ada beberapa komoditi andalan Sulawesi Tengah selama ini yang di (perkayuan) maupun potensi perikanan yang berada di tiga kawasan (zona), uringan di dalam forum rapat kerja KADIN Sulteng beberapa waktu lalu, terutama ilustrasi pengembangan koridor empat. Pada kenyataannya sedikit manfaatnya bagi Sulawesi Tengah. Pandangan Gubernur Sulawesi Tengah mungkin akan jadi perdebatan jika kita mencermati dengan baik, dengan berpandangan agak apriori terhadap MP3EI. Baginya, MP3EI sangat Sekilas saya bisa mahfum mengapa Gubernur Sulawesi Tengah uring-

alternatif. Untuk mengantisipasi limpahan muatan dari kawasan barat, atau mendrive komoditi dari kawasan timur. Penetapan itu tentu ada alasannya, Makassar dan Manado-Bitung dijadikan sebagai port of international apriori Gubernur Sulawesi Tengah di dasarkan pada keberadaan pelabuhan Sulawesi Tengah karena akan lahir industri-industri turunan. Saya menduga, added di Palu, yang justru memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat industri. Komoditi-komoditi itu kemungkinan besar mendapatkan value Sulawesi Tengah, karena Palu mendapat kebagian sebagai simpul kluster menutup kemungkinan hasil komoditi dari provinsi tetangga diolah juga ditetapkan sebagai simpul pengolahan nikel di Morowali selain di Tengah masih terbuka lebar mengembangkan komoditi lain, dan tidak Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian peluang Sulawesi disamping komplek LNG dan kluster industri di Palu bersama Makassar, simpul pengembagan kakao bersama Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, Tapi kita mesti yakin, Sulawesi Tengah akan kebagian kegiatan lain sebagai

> termasuk simpul perikanan. Justru yang dijadikan simpul peng komoditi perikanan Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Ter mendapatkan kesan bagi pemerintah pusat, sehingga Goront Sulawesi Selatan. Gorontalo bahwa wilayahnya memiliki potensi perikanan yang bes dahulu memiliki gagasan membentuk Badan Otorita Telul Tomini maupun perairan utara Gorontalo. Usaha itu sepertin Disamping memiliki program taksi mina bahari, baik yang c Berulang kali pemerintah, baik dilevel provinsi maupun kabupa bahkan Sulawesi Selatan sendiri sudah surplus produksi jagung. ditetapkan sebagai MIFEE (Merauke Integrated Food & Ener wilayah yang mengembangkan, seperti Lampung, termasuk Me komoditi lainnya tidak ada. Sementara komoditi jagung suc dijadikan sebagai basis pengembangan tanaman pangan (jagu Gorontalo. Diantara enam pusat ekonomi, dalam MP3EI wilaya dimanfaatkan oleh Sulawesi Tengah bagi kegiatan ekonomi i ditetapkan pada koridor empat (Sulawesi). Sulawesi Tengah ri lainnya yang ada di wilayah Sulawesi. Persoalannya, peluang apa karena kedua pelabuhan tersebut baik letak geografis maupu relatif lebih lengkap dibanding pelabuhan yang ada di Palu, ata keuntungan dengan konsep MP3EI dibandingk

perlu diupayakan sebagai pusat pengolahan jagung. pada tema pembangunan untuk koridor ekonomi Sulawesi, seba secara maksimal peluang ini, tidak saja sebagai pusat produksi ja produksi dan pengolahan pertanian pangan (jagung). Gorontalo per dianggap kurang kompetitif dengan pusat ekonomi lainnya. Denga tidak menutup kemungkinan komoditi lain pun boleh dikembangka dianggap lebih potensial dikembangkan di Gorontalo hanya jagur Hal ini berarti dari lima kegiatan ekonomi utama di koridor Sula

semata dari pusat ekonomi lainnya di Sulawesi, lebih luas di KTL En Gorontao akan meraih manfaat yang maksimal, atau hanya sebagai e Waktulah yang akan membuktikan "kerisauan" itu, apakah dengan MP3EI jauh lebih diuntungkan Sulawesi Selatan dan Sulawes keyakinan yang mirip dengan pernyataan Gubernur Sulawesi Tengal MP3EI dampaknya di Gorontalo begitu minim, dan saya pu pengolahan pertanian pangan (komoditi jagung). Jika itu diabaikar Sulawesi, dan Gorontalo secara khusus sebagai pusat produ pentingnya konsistensi dukungan dari pemerintah pusat untuk mene didukung dengan regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah. T memanfaatkan peluang pasar domestik tersebut dengan segala up 800.000 ton dari total kebutuhan 5 juta ton. Artinya, Goront tinggi, pada tahun 2010 Indonesia masih mengimpor jagung olahan. Tidak hanya pasar ekspor, kebutuhan jagung domestik p karena kebanyakan jagung yang diproduksi diekspor dalam be Gorontalo sudah punya "brand" jagung, tapi masih rendah value a

Undang-Undang Pangan, Melindungi Kepentingan Siapa?

n merupakan komoditas strategis yang perlu dijaga mjutannya, karena ia menyangkut hajat hidup dasar rakyat. kan pendukungnya senantiasa adaptable terhadap berbagai nbangan sosial politik, bahkan budaya. Tidak hanya melihat pek ekonomi semata. Kecenderungan berpikir ekonomi semata p komoditi pangan biasanya melahirkan kebijakan pragmatis menekankan pada efisiensi. Karena itu, bila terjadi ngan pangan, jalan mudahnya dilakukan impor. Bukan hanya kebijakan produksi pangan yang dianggap praktis cenderung kebijakan produksi pangan yang dianggap praktis cenderung la perisien pengadaannya ketimbang jenis pangan lainnya, kebida masa lalu semua rakyat "dipaksakan" mengkonsumsi dii

Secara historis, terutama kultur masyarakat kebiasaan nsumsi pangan di luar beras sudah terjadi turun temurun pada tertentu. Namun kebijakan melakukan "mewajibkan" si beras, perlahan sumber pangan lain ditinggalkan. sinya, terjadi hukum permintaan yang diakibatkan dengan uhnya jumlah konsumen untuk mengkonsumsi beras. Sejalan itu, lahan pertanian produktif terus menyusut, yang terjadi impor menjadi pilihannya. Dibalik kebijakan ini melahirkan macam pemain yang lebih berorientasi profit ketimbang ketahanan pangan nasional. Moral hazard para importir dimana-mana, yang dirugikan tentu masyarakat, terbuka importir memasukkan beras ilegal atau menghindari bea

Tahun 1984 kita berhasil mencipatakan swasembada beras, a yang terjadi defisit (kelangkaan). Instrumen kebijakan uh tidak jauh dari impor, sementara untuk mendorong tan produksi pangan lebih banyak muatan politis (janji yang sulit direalisasikan. Diversifakasi pangan pum tak baik, masyarakat tetap cenderung mengkonsumsi beras, nendongkrak produksi pangan belum terlihat, masalah-klasik penghambat tidak dilakukan perbaikan, seperti irigasi, penyuburan lahan dilakukan secara instan yang athan ongkos produksi pertanian meningkat. Akibatnya un petani cenderung menurun, banyak diantara mereka

Muh. Amir Arham* * Penulis, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

beralih profesi dengan melakukan urbanisasi. Ini menjadi akumulasi sehingga ketergantungan terhadap impor beras, maupun jenis pangan lainnya yang didatangkan dari luar makin tinggi.

Ditengah kondisi seperti itu, DPR berupaya membuat dianggap banyak kalangan terutama akademisi lebih berorientasi terhadap pengadaan pangan, idealnya pangan yang merupakan komoditas strategis harus "dijauhkan" dari mekanisme pasar. Tapi sebab komoditi pangan yang dihasilkan tidak semua daerah bertindak diuntungkan karena memiliki kewenangan untuk mengaturnya, sebagai produsen. Bila cenderung diliberalisasi, daerah surplus akan miskin atau bukan produsen pangan selamanya akan mengimpor dan bergantung. Apalagi jika kewenangan pemerintah pusat hilang, maka gain yang lebih besar, ketimbang mengantarpulaukan ke daerah kekurangan pangan dengan harga yang kurang kompetitif.

Pemerintah daerah bukan hanya diberikan keleluasaan melakukan ekspor-impor tapi juga diberikan diskresi untuk merancang dan mengelola pangan sendiri. Belum lagi, nampak peran untuk menyerap produksi gabah yang dihasilkan oleh petani. Dengan selama ini kerap menolong para petani melalui penetapan harga dasar menetapkan harga dilingkungan petani. Kewajiban Bulog menyerap harga yang dilakukan petani saja, petani tidak berdaya terhadap permainan diwajibkan. Dengan jelas, petani kecil makin terpuruk dan tak berdaya jika UU Pangan yang baru ini diimplementasikan. Peran keleluasan mengelola cadangan pangan.

Kelahiran UU Pangan ini tentu menyisakan ban yang sangat serius, tidak saja di hulunya tapi juga di hil jelas makin kurang berdaya, posisi tawarnya makin turu keleluasaan pedagang makin besar yang tentu memi bahkan mungkin saja akan dilindungi kekuatan pedagang memburu rente. Apalagi kewenangan diperluas, sementara kita paham bahwa umumnya kepala serius mengurusi masalah pangan mulai dari hulu hing SDM di daerah untuk merancang, mengelola dan kegia kekacauan pangan yang berimplikasi pada yang akan mu

penyusunan UU tersebut, pertanyaan yang wajib dijawab bagi yang berkepentingan t segelintir orang saja yang diklaim sebagai orang terhori rakyat yang digunakan membahas UU akan menguap, d Konstitusi, pada akhirnya akan dibatalkan. Jika itu terjadi me legislasi? Jangan-jangan UU ini akan berujung di Mi UU Pangan punya perspektif yang luas atau sekedar memenu Siapa yang diuntungkan? Apakah DPR yang berinisiatif m patut curiga, rancangan UU Pangan yang baru ini pesana pangan dengan harga yang dimainkan oleh daerah produsen. yang lemah selamanya akan miskin dan bergantung pac akan melahirkan hukum rimba siapa yang kuat akan mena dibuat jika kecenderungan merugikan petani (masyarakat), a pangan masyarakat secara ekonomi. Lalu untuk apa Ul cenderung pada nuansa politiknya, ketimbang pemenuhan k ketersediaan pangan memang akan dilakukan akan tet gain untuk digunakan pada pembiayaan politik. Maka i kewenangan juga mengelola pengadaan pangan yang me (Pemda) akan berkolaborasi dengan para pedagang yang pangan diberikan keleluasaan kepada daerah, dugaan say penerimaan. Apalagi jika kewenangan merancang dan sentuhan pemerintah semua dikenakan pungutan untuk me kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang ny ketimbang menggunakan untuk kegiatan produktif. Seme di lembaga keuangan, yang umumnya bersumber dari tra pengelolaan pangan. Daerah saat ini lebih cenderung menu untuk diurus dengan baik, apalagi menambah kewenar kekacauan pangan yang berimplikasi pada masalah sosial-Kewenangan yang ada pada daerah saat ini saja

ntalo Post, 11 November 2011

Perekonomian Stabil: Peringkat IPM Turun dan Daya Saing Melorot

tif baik, dibandingkan dengan Tiongkok, dan d. Tumbuhnya unnya, c. Negara yang majemuk, sudah menjalankan demokrasi hkan Indonesia opportunity-nya lebih besar karena setidaknya ngan" ini dengan memperkuat ekonomi domestik, sebab pangsa nng publik di Zona Euro. Atas krisis itu, tiga negara di Asia pmian Global. Selama ini lebih dari separuh perekonomian dunia euangan di USA dan krisis utang Zona Euro membuka peluang stabilan makro ekonomi dan politik relatif terjaga. yaan sumberdaya alam yang besar, belum dioptimalkan masyarakat Indonesia begitu banyak, sekaligus potensi pasar, beberapa kekuatan, yakni; a. aspek demografi, rata-rata usia ndorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan (demand rtinya, pangsa pasar ini sekaligus punya peluang dapat menjadi a digabung ketiganya hampir mencapai 50 % pangsa pasar ya China, India dan Indonesia dapat memanfaatkan lunculnya krisis keuangan sebagai dampak dari menumpuknya pelaku usaha dari luar, sehingga capital inflow makin deras oleh dua kawasan tersebut, sekaligus menjadi tujuan pasar perekonomian domestik dimasing-masing negara sehingga kawasan Asia memainkan peran dalam dinamika

erus-terus di-supply. hindar dari USA karena nilai portofolio relatif kecil, lembaga kalipun USA melakukan hal yang sama, namun para investor derung investor asing melakukan capital gain dalam jangka ak pada sektor keuangan (portofolio) karena suku bunga begitu nan capital inflow begitu deras, keluarnya (capital flight) juga mikian perlu diwaspadai karena namanya hot money, besar jadi. Apalagi selama ini investasi yang masuk ke Indonesia kan oleh Indonesia, sebab dampak krisis relatif kecil, arah mata engendus negara-negara yang dianggap aman dari krisis finansial di USA dan Zona Euro, dipastikan banyak hot stasi menuju ke Indonesia. Pasar domestik perlu dioptimalkan. nan akan melambat. Karena itu momentum ini atraktif. Kriteria itu ada pada China dan India, tapi pertumbuhannya sudah cukup tinggi bahkan sudah krisis, panas kedua perlu

M. Amier Arham* * Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

Dalam kondisi seperti itu, pertumbuhan ekonomi boleh saja tinggi tapi cenderung tidak berkualitas, Triwulan III 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5 %. Nilai pertumbuhan yang tinggi menyisakan berbagai pertanyaan. Jika dikaji lebih jauh kedalam, memperlihatkan bahwa perekonomian digerakkan oleh sedikit perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sangat kecil, karena sebagian dikuasai oleh perusahaan yang nontradeable, atau sektor finansial. Dengan melihat modal asing masuk ke Indonesia saat ini, utamanya di pasar modal belum penghela ekonomi nasional. Demikian halnya aksi korporasi swasta, melewatkan momentum krisis Eropa. Akibatnya nilai tambah ke sektor sampai 20-an yang listing di BEI untuk memanfaatkan modal asing. Walau dari sisi lain hasil survey finance corporation menempatkan daya saing usaha Indonesia berada pada urutan 124 dari 120 negara yang

Walau dari sisi lain hasil survey finance corporation menempatkan daya saing usaha Indonesia berada pada urutan 124 dari 129 negara yang disurvey. Dengan daya saing yang rendah, asumsinya korporasi BUMN dan swasta lebih baik memanfaatkan capital inflow yang ada. Lain halnya jika investasi dalam bentuk penanaman modal langsung disektor riil, atau kegiatan produktif yang bersifat labor intensive, variabel pendukung daya tarik investasi menjadi pertimbangan penting untuk berinvestasi. Jadi sekalipun Indonesia memiliki potensi, ekonomi makro cukup karena digerogoti oleh negara itu sendiri, birokrasi masih kedua tersibal penganggu.

Kedua variabel tersebut masih menjadi "barikade" bagi Indonesia sehingga daya saing menurun. Jika di bandingkan Thailand dan Malaysia kedua negara ini proses memulai usaha cukup dilakukan masing-masing 3 dan 6 hari, sedangkan Indonesia masih berkisar 2 bulan (60 hari). Peringkat Indonesia melorot juga diakibatkan faktor daya dukung infrastruktur yang masih minim, terutama di daerah. Problema utama pola daya tarik investasi selama ini sekalipun pemerintah pusat

menyehatkan, mereka tetap cenderung memperbesar bela infrastruktur. langsung. Kondisi ini turut memperparah merosotnya daya tari sakit sepertinya Pemda-Pemda belum berupaya maksin pembiayan pembangunan, maupun perbaikan infrastruktur. A selalu menengadahkan tangan ke pusat untuk meminti Satu-satunya cara yang dilakukan Pemda untuk membangun ir 80 % alokasi APBD terserap kebelanja tidak langsung (belanja terbatas untuk dialokasikan ke belanja modal dan barang, kan terbatasnya anggaran. Sebetulnya anggaran bukan tidak ada, schingga terkendala dalam pembangunan infrastruktur, malah sebaliknya (disintensif). Masalah utama yang dihad Pada level nasional, insentif pemerintah kemungkinan ada ta akibatnya ongkos angkutan barang dan jasa menjadi besar. jalan yang menjadi bagian kewenangan daerah hampir se Sinkronisasi masih belum berjalan maksimal. Infrastruktur d Indonesia karena minimnya pembangunan dan per membenahi, akan tetapi daerah masih saja

(termasuk daerah) tidak mengelayut setiap saat, ekonomi tum indeks pembangunan manusia turun, daya saing melorot pula. daerah. Dengan cara itu, paradoks-paradoks perekonomian I seluruh pemangku kepentingan bangsa, mulai dari pusat hi untuk memperbaiki keadaan. Jauh lebih penting komitmen yang juga terus diperbesar, tapi anggaran bukan faktor dominan satu penyakit menular. Kendati anggaran di sektor kesehatan pada terus naik, ada kemungkinan turunya IPM karena faktor m pendidikan cenderung membaik setiap tahunnya karena alokasi dilihat dari aspek kinerja pendidikan dan derajat kesehatan berbagai macam gangguan kesehatan, atau merebaknya tahun 2010 turun pada posisi 124 tahun ini. Mengukur IPM s lain yang terlihat seperti IPM Indonesia turun dari peringkat dampak yang baik terhadap kesejahteraan rakyat, tapi ada pem diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya me Indonesia sangat stabil, dan terus tumbuh. Hal ini terbuka pelu makro ekonomi tercapai sesuai target, itu artinya pere Paradoks ekonomi lain yang perlu dicermati, hampir semu

italo Post, 22 November 2011

Jangan Bangga Dengan Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi

usat Statistik (BPS) sudah melansir kinerja ekonomi tahun dikator makro ekonomi yang kerap ditonjolkan sebagai keberhasilan kinerja perekonomian salah satunya han PDB. Dalam APBN 2011 asumsi pertumbuhan yang likisaran 6,4 – 6,5 %, pada akhirnya memang perekonomian di tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5% dengan nilai PDB Rp 7.427 triliun, tertinggi atau kondisi perekonomian setelah krisis ekonomi tahun 1998. Akselarasi kinerja han sebesar itu secara otomatis mendorong peningkatan un perkapita. BPS mencatat, pendapatan per kapita atas rga berlaku mencapai Rp. 30,8 juta atau USD 3.542,9, gkan dengan tahun sebelumnya (2010), nilainya meningkat pp. 27,1 juta (USD 3.010,1).

Sebentar lagi partai akan ikut serta mengklaim keberhasilan nhwa PDB bukan tolok ukur satu-satunya yang tepat untuk ah) tidak salah, justru penggunaan PDB menjadi bagian mian Indonesia makin maju, apalagi capaian kinerja nasalah seperti diungkapkan oleh Stiglitz, Sen dan Fitoussi ılisis ilmiah, artinya angka-angka yang dilansir oleh BPS penassiran bahwa pemerintah lewat BPS berbohong, gara. Dengan mengandalkan nilai PDB semata terbuka yang duduk dikemeneterian ekonomi. Meski demikian kita pihak, dan seperti biasanya pihak pemerintahpun akan ingka-angka di atas dengan terang memberikan pesan bahwa dalam menghitung pendapatan perkapita sudah melewati stian perekonomian Eropa, karena itu capaian ini diapresiasi ı rakyat begitu banyak yang masih susah. Namun yang n mungkin pendapatan perkapita secara nominal naik tapi hati dan mencermati peningkatan PDB, karena itu bukan satu-satunya untuk melihat kesejahteraan masyarakat di sepanjang tahun tahun 2001 diperhadapkan pada

it tidak ingin terjebak pada perdebatan konsepsi penggunaan uk mengukur kesejahteraan, namun lebih melihat pada sisi gka-angka yang justru lebih memperjelas bahwa betapa han ekonomi menyisakan problem tersendiri yang justru intonkan paradox. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi terutama oleh konsumsi masyarakat yang memberikan kontribusi 4,6 %. Sementara peranan investasi hanya berkontribusi donasi terhadap PDB, meski harus diakui donasi

Muh. Amir Arham* *Penulis, Pengamat Ekonomi FEB UNG

57,6% ekonomi Indonesia dikuasai pulau Jawa, kemudian diikuti berbarengan dengan penurunan angka kemiskinan yang cepat. ketimbang diperkotaan. Idealnya, output ekonomi makin tertinggal, karena orang miskin lebih banyak di daerah rural pertanian makin mempertegas kecenderungan daerah perdesaan diharapkan tumbuh optimal karena sektor-sektor tersebut menyerap Sementara ketimpangan secara spasial terlihat dengan mencolok, 20 % menyerap tenaga kerja. Rendahnya pertumbuhan sektor tenaga kerja banyak, pertanian sekitar 40 % dan manufaktur sekitar dan sektor industri pengolahan 6,2 %, semestinya kedua sektor ini golongan menenggah tumbuh 6,62%. Apalagi jika diperlihatkan dari golongan ekonomi bawah hanya meningkat 2,75%, sementara kecenderungan kontribusi sektor pertanian kecil hanya sebesar 3,0 %. sederhananya bisa disebutkan yang kaya makin kaya, yang miskin kapita meningkat hanya segelintir orang yang menikmati, orang, jadi disparitasnya cukup tinggi. Kalaupun pendapatan per tidak beranjak jauh dari kehidupannya semula, sebab pendapatan nontradeable. Apalagi pertumbuhan angka kerja setiap tahun 2,91 Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi pada pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 10,7 %, juta orang, dan pertumbuhan lapangan kerja tersedia hanya 1,6 juta kesejahteraan, serta utilitas penyerapan tenaga kerja masih rendah, Indonesia sepanjang 2011 belum memberikan jaminan peningkatan sebesar 6,8 %. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,2 % dan sektor keuangan mencolok baik secara sektoral maupun spasial. investasi mengalami peningkatan. Kedua, ketimpangan masih sangat sektor-sektor dominan tersebut merupakan sektor sektor sektor

mendasar kendati MP3EI sudah berjalan selama setahun. spasial yang kelihatannya belum mengalami perubahan pemerintah mengurangi disparitas antar individu, sektoral mempertegas keadaan yang sesungguhnya, maka inilah tug: secara simultan dengan membagi enam koridor? Atau jangar salah satu solusi untuk mengakselarasi perekonomian Ir lebih mapan? Angka-angka yang sudah ditampilkan kebijakan ini justru lebih banyak menguntungkan daerah yan 2%. Porsi tersebut menurun jika dibandingkan kuartal I sebesar 2,6%. Bali dan Nusa Tenggara pun juga me Dibalik itu semua, tidak salah kalau saya bertanya, benarkah pertumbuhan dari 4,5% tahun 2010 menjadi 4,6% di tahu Sulawesi, patut kiranya tersenyum sebab Sulawesi sedikit me penurunan dari 2,7% di 2010 menjadi 2,6% di 2011. Sebag dengan kuartal IV, porsi pertumbuhan kedua wilayah tersebu sebesar 2,4%, sedangkan pada tahun ini sebesar 2,1%. B tahun lalu. Pada 2010 porsi pertumbuhan untuk Maluku da ekonomi ke luar Jawa terutama wilayah timur belum mem sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan prohasil. Porsi pertumbuhan tersebut justru menurun jika dibar sayangnya, upaya pemerintah untuk menggeser porsi perti Indonesia. Efektifnya MP3EI mulai berlaku tahun 2011 serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memak menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pu pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun ya diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pu keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggula Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pe menggeser pusat-pusat perekonomian di luar Jawa. Salah se Pembangunan kebijakan dimaksudkan yakni Master Plan Percepatan dan kebijakan untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru secara konsepsional pemerintah terus melakukan p pemangku kepentingan lainnya serius melakukan pembenah kaku, tapi dibutuhkan pencermatan agar pemerintah sekunder dan tersier, Pulau Jawa masih menjadi per sekunder dan sektor tersier, secara spasial sektor prin Gambaran angka-angka ini tidak sekedar ditampilkan yan terbesar, yaitu masing-masing sebesar 66,5 % dan 66,7 %. didominasi oleh wilayah luar Pulau Jawa (74,3 %). Sedangi Ekonomi Indonesia (MP3EI), kebija

di Pulau Sumatera urutannya adalah Riau (7,0 %), Sumatra Utara 5,2 %), dan Sumatra Selatan (3,0 %). Apabila pengelompokan kegiatan ekonominya dibedakan ke dalam sektor primer, sektor

provinsi penyumbang terbesar di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta

Sulawesi 4,6 %, dan sisanya 4,6 % di provinsi-provinsi lainnya. Berdasarkan perbandingan provinsi-provinsi di Indonesia, tiga

(16,5 %), Jawa Timur (14,7 %), dan Jawa Barat (14,3 %). Kemudian,

oleh Pulau Sumatera sebesar 23,6 %, Pulau Kalimantan 9,7 %, Pulau

Kenapa Harus Pendidikan dan Kesehatan Gratis?

ve memang begitu terbatas. Dari debat itu saya mencoba Mungkin karena dibatasi waktu, karena slot yang tersedia rtanyaan panelis maupun antar calon relatif datar-datar onomi, sekalipun tidak utuh karena saya menonton eksplorasi originalitas pemikiran para calon kurang lon gubernur/wakil gubernur Gorontalo di Metro TV saya menganggapnya hal biasa-biasa saja, kurang intisari dari perdebatan maupun pertanyaan panelis

eknya pendidikan gratis di lapangan masih dijumpai ada ogram nasional. Dan bukannya tanpa masalah, karena ratis karena saat ini program pendidikan gratis sudah salah pendidikan, sepatutnya daerah tidak lagi membuat anji pendidikan dan kesehatan gratis jelas merupakan au pembiayaan yang bersifat wajib. ah membuat program pendidikan dan kesehatan gratis. fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Karena itu banyak nasyarakat bagi yang kurang mampu tidak dapat halnya masalah kesehatan gratis, problem utama yang pemerintahan akan mengecap pendidikan tanpa kecuali. kan mengupayakan semua rakyat dalam wilayah populis, dapat menyenangkan semua pihak dengan akan mencacah secara keseluruhan yang sempat saya tidak hendak membedah satu persatu visi dari pasangan

ga perlunya memikirkan output sekolah menengah dari nng digratiskan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah an tinggi disesuaikan, sementara yang kurang peluang bagi orang yang mampu berpartisipasi dalam ikan sekedar mencapai angka kelulusan SMA yang ng kurang mampu tapi memiliki prestasi yang baik. Ini lipun sifatnya fleksibel memberikan pendidikan gratis u dan yang kurang mampu. Kontribusi orang tua yang pu dan yang tidak mampu disamakan. Sekaligus on bagi masyarakat, karena perlakuannya bagi orang ertama. Khusus sekolah menangah atas diperlukan ın pendidikan. Idealnya yang dibuat bukan pendidikan tetapi melakukan diferensiasi perlakuan bagi orang dasarnya justru mencipatakan

> * Pengajara Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG M. Amier Arham*

sesuai yang diharapkan. Pada akhirnya layanan yang didapatkan bagi masyarakat tidak penghasilan, akhirnya mereka memberikan pelayanan apa adanya. manusiawi, pasti tidak akan bekerja optimal karena terganggyunya tenaga kesehatan dan paramedis rumah sakit tidak diterima. Secara bersangkutan tidak optimal. Sekaligus merembes kepada tunjangan pemerintah setempat, akibatnya pelayanan di rumah sakit yang gratis. Tidak sedikit rumah sakit daerah yang hampir kolaps karena daerah lain yang sudah terlebih dahulu membuat program kesehatan banyaknya tunggakan pembayaran jaminan kesehatan daerah dari implementasinya kerapkali bermasalah. Kita boleh bercermin bagi Masalah kesehatan gratis sepertinya bagus, tapi dalam

development index (HDI). pendidikan dan kesehatan atau biasa diukur dari segi human mengedepankan human capital, dimana pilar dasarnya adalah ekonomi, dalam kaitannya dengan teori pertumbuhan baru yang yang memberikan impact yang besar terhadap pertumbuhan publik. Pendidikan dan kesehatan gratis hak dasar warga negara pengeluarannya besar, utamanya untuk membiayai kebutuhan Dalam neraca anggaran, jika penerimaan besar maka patut pula berdampak terhadap penerimaan negara yang makin tinggi pula. ini berjalan manakala income masyarakat sudah tinggi yang optimal). Meskipun patut diakui bahwa program pendidikan dan lama. Mengadopsi pola ini esensinya baik, tapi yang ideal program kesehatan gratis secara umum di negara yang mapan sudah berjalan memberikan dampak positif tapi disisi lain efeknya negatif (kurang subsidi akan menciptakan distorsi ekonomi, disatu pihak Pada prinsipnya program gratis bentuk lain dari subsidi, lazimnya

kesehatan gratis kurang berjalan normal sebab rumah sakit daerah yang punya rumah sakit pemerintah Kota Makassar, pelayanan merupakan aplikatif kebijakan gubernur Sulawesi Selatan. Tapi Kasus ini pernah terjadi di Makassar, program kesehatan gratis bupati/walikota, apalagi jika rivalitas antar level pemerintah terjadi. Patut diwaspadai, dalam konteks ototomi daerah, kebijakan pada level provinsi kerapkali tidak sejalan dengan kebijakan

(Makassar) kerap menolak pasien gratis dengan dalih

pemerintah kabupaten/kota yang memiliki. akan terjadi, sebab provinsi belum punya rumah sal yang memprogram kesehatan gratis probabilitasnya kemu kesehatan gratis pemerintah provinsi, bukan pemerintah Kota Makassar. Kejadian ini boleh ja terulang di daerah lain seperti di Gorontalo, Gubernur Go

merupakan dana CSR dari Aneka Tambang. Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian besar pembiayaan dan kesehatan gratis, seperti yang diterapkan oleh Peme perusahaan-perusahaan dijadikan sebagai pembiayaan pend SDA, dana sosial (community social responsibility) pertumbuhan ekonomi. Lain halnya daerah atau provinsi yang infrastruktur fisik yang mempengaruhi dalam jangka p pendidikan dan kesehatan gratis jelas akan mengurangi pemb infrastruktur yang rendah seharusnya menjadi prioritas. Pr masih kurang mapan, penghasilan yang masih rendah, serta k mengorbankan kepuasan orang lain). Dengan kondisi daeral pelayanan yang optimal, karena ada pihak lain yang terkena d pareto optimal (memaksimumkan kepuasan individu dan kesehatan gratis pada dasarnya tidak akan menda tinggi. Meski ada hipotesis lain menunjukkan bahwa pendengan penghasilan masyarakat yang baik, penerimaan daera diimplementasikan sepanjang kondisi daerah sudah esta Pikiran ideal kita, pendidikan gratis dan kesehatan grati

(dirasa). gratis dan kesehatan gratis indah dengar tapi tidak enak dipar membuka peluang untuk saling menegasikan. Akhirnya pendid dimaksimalkan sebab jika ini tidak terbangun antar unit leml pemerintah, maupun satuan organisasi pemerintah tidak berjalan optimal. Koordinasi antar level pemeri masih ditemukan beberapa kelemahan yang pada akhirnya se ada salahnya berkaca pada daerah alin sudah menjalankan pendidikan dan kesehatan gratis ini dijalankan di Gorontalo y atau mengalihkan beban kepada orang tua siswa. Kala alternative pembiayaan tambahan yang tidak jauh dari pun terjadi pihak sekolah dengan komite sekolah akan me tercover, kalau iya satuan pembiayaannya yang kurang. Jik aplikasinya ditemukan dilapangan tidak semua item satu pendi Penetapan program kesehatan dan pendidikan gratis

Mengapa Torang *Pe Bank* Bukan Bernama Bank Sulut-Gorontalo

M. Amier Arham* *Pegajar FEB UNG

annya, mengabaikan profesionalisme. Tidak jauh berbeda, rekrutmen awan pun kebanyakan nepotisme. Tapi perlahan kondisi itu sudah prate yang sehat dan kompetitif. buh, hampir semua BPD yang ada di provinsi-provinsi para kepala gacu pada prinsip corporate. Meskipun tidak dapat dinafikkan intervensi di Indonesia terus melakukan transformasi dan membangun culture ıh sebagai shareholders sadar akan pentingnya profesionalisme. Bank ah instansi pemerintahan, seolah jabatan politik. Yang duduk disana ja usaha, apalagi jika gubernur (kepala daerah) tidak memiliki visi da masih kerapkali hadir setiap saat yang berpotensi mengganggu ntingan pemerintah daerah. Namun dalam menjalankan usahanya, bank tujuan yang sama dengan bank umum lainnya di Indonesia. Walau pada dirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada dasarnya memiliki misi s yang cenderung meletakkan semua persoalan dengan masalah politik yang disukai oleh gubernur, sehingga memilih orang yang dekat jarang penentuan jabatan direksi maupun dewan komisaris layaknya yang mayoritas dimiliki sahammnya oleh Pemda setempat tetap tertentu BPD memiliki fungsi spesifik yang berkaitan dengan

elolaan BPD secara umum sudah diserahkan kepada para bankir dan sional, karena itu kinerja bank-bank daerah terus membaik. Produk urukat menggunakan BPD makin beragam, terus menarik minat urukat menggunakan jasa perbankan BPD. Perubahan branding juga dilakukan layaknya korporasi yang mapang, karena itu hampir semua dil Indonesia berubah nama yang relatif dinamis tidak monoton dengan ling seragam, bernama BPD, yang membedakan hanya nama provinsi kangnya. Hasil transformasi dan perubahan branding memberikan efek f, selain diiringi kinerja yang terus tumbuh, bahkan beberapa bank seperti Bank Jabar-Banten (BJB) sudah listing di bursa efek, disusul bank DKI. Sebagaimana lazimnya, perusahaan yang sudah go public lolaannya makin profesional dan prinsip-prinsip good corporate lementasikan, sehingga gangguan-gangguan yang bersifat politis akan

terminimalisir.

dikucurkan sebanyak Rp. 3,9 triliun (banksulut.co.id) 5,7 triliun atau tumbuh 33 % dari tahun sebelumnya, dan kredit yang Sementara laba yang berhasil dihimpun dari dana pihak ketiga sebesar Rp. tumbuh sebesar 36 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. pun terus meningkat, posisi per Mei 2012 asetnya sebesar Rp. 6,9 triliun atau award lainnya, pertanda bahwa bank ini sudah "branded". Dari segit aset Award, Best Perpformance Overall, The Best Bank Service Excellent, serta berkinerja baik, ada banyak penghargaan yang diraih seperti, Platinum persaingan industri perbankan. Bank Sulut termasuk bank daerah yang membuka cabang di Jakarta dan ekspansi ke daerah lain di tengah sengitnya sebagai lembaga keuangan yang kredibel, melebarkan sayapnya hingga ke satu bank daerah yang sudah menasional dan sudah memiliki reputasi yang ada di wilayah Sulut dan Gorontalo. Bank Sulut tidak dimungkiri salah ibukota negara dan Surabaya. Hanya sedikit bank daerah yang mampu Provinsi Sulawesi Utara, sisanya dikuasai oleh pemerintah kabupaten/kota pe bank". Bank ini kepemilikannya 49,45 % dipegang oleh Pemerintah Demikian halnya BPD Sulut menjadi --Bank Sulut--, dengan tagline "torang

Sudah Saatnya Menjadi "Bank Sulut-Gorontalo"

tidak dapat dipisahkan memang, namun secara yurisdiksi pemerintahan spektrumnya terpisah dengan jelas, karena itu sudah saatnya nama --Bank "hoki" dari aspek ekonomi. Sulawesi Utara dan Gorontalo secara historis merupakan identitas sosial, kultur, politik, harga diri dan mungkin saja seseorang adalah do'a, harapan dan cita-cita, bagi sebuah lembaga nama olher name would smell as sweet. Bagi saya nama tetap penting, nama untuk William Shakespeare: What's in a name? That which we call a rose by any pada level kabupaten/kota bahkan gubernur tidak memiliki concern tentang maksudkan adalah "Bank Sulut" di Gorontalo. Saya menduga, kepala daerah sekalipun daerah ini sudah berdiri selama 10 tahun. "Branding" yang saya "identitas" Bank Sulut, mungkin dalam pikiran mereka seperti ungkapan memori saya kenapa ada "branding" (identitas) yang sesungguhnya Gorontalo juga memiliki, tapi identitas dan nama Gorontalo tidak ada, tentu ada perubahan identitas. Namun di Gorontalo, acapkali muncul dalam provinsi memiliki karakteristik ekonomi, identitas sosial dan budaya yang relatif berbeda, dengan sendirinya setelah ada provinsi baru sudah barang Dalam 10 tahun terakhir ada tujuh provinsi baru, termasuk Gorontalo. Setiap

Sulut-- memunculkan dengan terang identitas -Bank Sulut-Gorontalo---.

Meski jika dilihat dari kepemilikan, Pemerinta pemegang saham terbesar, sementara Pemerin sahamnya tidak ada, hanya kabupaten/kota ya share-nya hanya sebesar 18,17 % dengan perinc Gorut (0,1 %), bone Bolango (0,1 %), Pohuwa %) dan Boalemo (7,3 %). Kemungkinan karena maka identitas Gorontalo tidak dinampakkan dengan Bank Sulselbar, Pemerintah Provinsi memiliki saham di bank Sulselbar, hanya lii wilayah Sulbar yang memiliki share, itupun jau Itu artinya perubahan nama dari Bank Sulsel medidasarkan pada besar kecilnya saham kepemili bentuk penghargaan identitas kedaerahan.

selamanya kita menjadi daerah yang inferior? kepada bupati/walikota dengan dukungan Bank Sulut-Gorontalo---, semoga saja saya salah hal yang urgen mengusulkan perubahan nama -menduga, bahwa pada dasarnya pemerintah di Go sementara daerah lain berada pada posisi i Gorontalo yang tergambar superioritas kedaerah: merasa bagian dari kebanggan itu. Dengan tid membanggakan, namun rasa-rasanya sebagian b Gorontalo, termasuk membuka kerjasama de kinerja yang baik, dan melakukan ekspansi kesetaraan, rasa saling memiliki dan penghargaan bermakna untuk dicantumkan, karena itu akan r agar Bank Sulut sekalipun 80 % shareholders-n kabupaten/kota di Sulut, identitas ke-Gorontalo dengan daerah lainnya, sebagai warga Gorontalo menggunakan nama daerah induk didepannya. B Bank Maluku dan Bank Papua karena nama Bank Riau-Kepri, Bank Sumsel-Babel, Bank J identitas dan nama dengan menampilkan nama (Provinsi atau bank daerah lainnya pun melakuka

Jangan Lupakan KTI dan Mengabaikan Gorontalo

M. Amier Arham* engajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

ar jumlah proyek yang teridentifikasi dalam enam koridor tersebut erupakan proyek jangka panjang pemerintah selama 15 tahun yang triliun dengan membangun enam koridor ekonomi. Khusus untuk pada tahun 2011 untuk membangun sekitar 762 proyek senilai etak biru pembangunan infrastruktur melalui MP3EI. Cetak biru mentara pemerintah pusat bersifat menginisiasi antara swasta dan nun infrastruktur di wilayanya masing-masing kepada pihak ebih mendorong peranan pemerintah daerah untuk menawarkan an dan proyek potensial yang akan dikembangkan (dibangun) di njang promosi berbagai proyek yang tersedia, proyek yang al Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE). Forum ini conferensi infrastuktur tahun 2012 baru saja berlalu, konferensi aerah berdasarkan enam koridor yang telah disusun dalam daerah dalam forum tersebut, karena pemerintah pusat sudah Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahunnya mengupayakan melakukan Indonesia

ur yang akan dikembangkan terbagai dalam tiga kategori pelaku, trintah, BUMN dan swasta yang bersifat partnership. Pada tahun ek yang diprioritaskan meliputi transportasi laut, jalan tol, air itasi dan power plant, hingga Juli 2012 sudah ada 135 proyek tar Rp. 500 triliun yang sudah dimulai (groundbreaking) di enam pnomi. Namun demikian, dari 396 proyek sekitar 40 % proyek table, proyek-proyek yang dikategorikan kurang fisiable umumnya awasan Timur Indonesia (KTI).

oritas MP3EI yang bersifat Public Private Partnership (PPP) cunakan dalam waktu dekat maupun yang sudah groundbreaking onsentrasi di bagian barat Indonesia, sementara di wilayah KTI Sulawesi hanya pembangunan Toll Road Manado-Bitung Utura) dan Hydro Power Plant di Sulawesi Barat, dan kawasan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Dengan kondisi tujuan MP3EI untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru wasan-kawasan ekonomi baru di luar Jawa masih sulit terealisir. hana ini proyek-proyek yang ditawarkan pemerintah di daerah gannya swasta lebih memilih daerah yang memiliki jumlah ung besar,

sementara daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah dan penduduknya sedikit seperti di KTI kurang diminati. Kondisi seperti ini justru tetap mempertahankan disparitas wilayah (kawasan), bukan mengurangi sebagaimana tujuan penyusunan MP3EI.

Kawasan yang diminati investasi tarikannya makin kuat terhadap wilayah lain sehingga tidak saja menciptakan konsentrasi ekonomi pada satu kawasan akan tetapi juga memberikan dampak terhadap persoalan kependudukan (demografi). Orang-orang yang memiliki pendidikan yang baik akan bermigrasi ke pusat-pusat kegiatan ekonomi, demikian juga orang-orang yang kurang skill turut serta. Dengan demikian membutuhkan intervensi pemerintah berupa insentif fiskal melalui keringan pajak dan bea, jika perlu insentif moneter berupa instrument rate yang berbeda. Sehingga wilayah yang kurang diminati investor akan menarik dan menjadi tujuan investasi, terutama di sektor riil yang memiliki interkoneksi dengan wilayah sudah maju dan linkage dengan hulu dan hilir, sebab selama ini KTI lebih mengandalakan produk pertanian yang belum diolah.

sebesar 4,7 % dan sisanya kawasan lainnya di KTI. ekonomi) sebesar 57 %, Sumatera sebesar 23 %, Kalimantan 9 %, Sulawesi menunjukkan peranan kawasan Jawa terhadap pembentukan PDB (share dari tahun-tahun sebelumnya. Data statistik untuk semester pertama 2012 tertinggal, hal ini dapat dilihat dari peranan kawasan belum jauh beranjak Barat Indonesia (KBI). Jika perlakuannya sama, selamanya KTI akan pembangunan dan pendekatannya tidak dapat disamakan dengan Kawasan pembangunan ekonomi di KTI masih sangat dibutuhkan, membangun infrastruktur di KTI jauh dari harapan. Perlakuan khusus di wilayah itu sangat mahal, maka tentu saja pelaku usaha yang diharapkan per sak. Dengan harga semen selangit tentu biaya pembangunan infrastruktur harga semen di Papua bahkan di wilayah pegunungan mencapai ratusan ribu sosial untuk mengakselarasi pembangunan di wilayah yang tertinggal di bidang infrastruktur untuk bermain di KTI. BUMN pada dasarnya tidak (Persero) agar membangun pabrik semen di Papua salah satu solusi karena Inisiatif menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mendorong PT. Semen Gresik hanya berfungsi mencari profit akan tetapi mereka juga memiliki fungsi mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak Selain memberikan insentif kepada swasta, pemerintah juga perlu model

MP3EI dan Gorontalo

Pelaksanaan Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) yang baru saja berlangsung, sekitar 23 gubernur menghadiri ajang tahunan tersebut dan sekitar 19 gubernur memaparkan kekhasan masing-masing daerahnya untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi yang berkaitan dengan produksi pangan. Berdasarkan p koridor ekonomi dalam MP3EI, wilayah Sulawesi dijadikan seb seperti Gorontalo, Palu, Kendari dan Mamuju. Utara (Manado - Bitung) dibandingkan dengan wilayah outlet p dikategorikan outlet utama yaitu Sulawesi Selatan (Makassar) dan dan kebagian untuk pengembangan pangan (jagung). Hanya produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, seperti listrik dan pelabuhan, termasuk infrastruktur penunjang pertambangan nasional. Gorontalo tentu saja termasuk pusat per dugaan saya Gorontalo memiliki Potensial Projects di bidang in berskala besar yang membutuhkan PPP tampaknya belum terekspi termasuk wilayah yang tidak membutuhkan pembangunan infi Gorontalo termasuk di dalamnya?. Namun dari dokumen Pub Infrastruktur di Gorontalo tentu saja masih kurang memadai, na Lalu apa yang dapat dibaca pada posisi seperti itu, apakah Projects dan Potensial Projects Provinsi Gorontalo tidak ada di da Nasional, proyek baik yang dikategorikan Ready for Offer Project Partnership (PPP) yang disusun Kementerian Perencanaan Pemba infrastruktur daerahnya, saya luput memperhatikan apakah infrastrukturnya. Dari 19 gubernur yang memaparkan potens lebih jauh, MP3EI lebih menguntungkan wilay

Gorontalo. Semoga dugaan saya salah.! tanpa disadari pemerintah terkesan melupakan KTI dan men sebagai penghasil jagung sudah meredup. Dengan melihat keny MP3EI hanya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara yang diur salah kemudian, Gubernur Sulawesi Tengah menganggapnya ke perkebunan kakao dan eksplorasi LNG. Sementara Gorontal Sekalipun dalam MP3EI, Sulteng dijadikan pusat kluster industr kebagian "jatah" pusat produksi pangan (komoditi jagung) yang (Bitung) karena industri perikanan sudah ada di Bitung, Karena Gorontalo, misalnya komoditi hasil laut yang diuntungkan Sulaw dijadikan basis ekspor. Mungkin saja kondisi ini akan diala seperti produksi kakao dimana Sulawesi Tengah pada dasarnya wilayah outlet pendukung sehingga berdampak meningkatnya ket Outlet utama jelas akan memberikan tarikan ekonomi yang l karena wilayah outlet utama tersebut memiliki infrastruktur lebih b ini tercatat dalam kegiatan ekspor Sulawesi Selatan yang lebih kakao terbesar dibandingkan dengan Sulawesi Selatan, akan tetapi antardaerah. Maka dipastikan yang diuntungkan wilayah outle (backwash economy) yang kurang memberikan trickle down effect

APBN Tidak Sehat, Elite Politik Menghindari Resiko

M. Amier Arham* Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wekonomian dalam satu tahun kedepan. Nilai satuan dalam APBN kedar neraca keuangan negara, namun menggambarkan orientasi hukan leadership pemerintahan. Selama ini ulasan mengenai politik lukan leadership pemerintahan. Selama ini ulasan mengenai politik lingkan belanja rutin dan belanja pembangunan. Banyak pihak lingkan belanja rutin dan belanja pembangunan. Banyak pihak lingkan belanja rutin besar ketimbang belanja pembangunan, idealnya dibalik. Namun banyak yang lupa bahwa besar kecilnya belanja rutin linglikasi dari keputusan para elit politik yang cenderung draft APBN cari selamat, ketimbang menyusun APBN yang dan sehat, namun memiliki resiko politik dan agresi sosial dari

Dalam kurun lima tahun terakhir, Belanja Negara di atas Rp. 1.000 pi lebih dari separuh dialokasikan untuk membayar utang, subsidi nya pegawai. Postur anggaran yang demikian memperlihatkan wienan dan tidak produktif. Dalam APBN-P 2012, anggaran terbesar belanja rutin pemerintah sebesar Rp. 724 trilliun, belanja pegawai pesar Rp. 212 triliun, subsidi energi sebesar Rp. 137 triliun dan rung sebesar Rp. 186 triliun. Sementara belanja modal hanya Rp. bilik berharan behava APBN-P 2012.

Publik berharap bahwa APBN 2013 yang baru disahkan pemerintah PR postur APBN akan mengalami perbaikan secara signifikan, ebih berpihak kepada publik. Pada kenyataannya APBN 2013 lalah mengalami peningkatan dari Rp. 1.439 trilium tahun 2012 naik nutngan birokrasi, pembayaran utang dan subsidi energi rilium dan transfer ke daerah Rp. 528 trilium. Belanja pemerintah pusat sendiri sebesar dari belanja pegawai malahan naik sebesar Rp. 241 trilium, Rp. 167 trilium, subsidi energi Rp. 193 trilium dan pembayaran raik sebesar Rp. 241 trilium, Rp. 113 trilium. Sementara belanja modal hanya sebesar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian besar Rp. 216 trilium.

membayar gaji pegawai, itu artinya dana yang di daerahkan juga lebih banyak melayani kepentingan birokrasi. Dengan demikian postur anggaran kelihatan gemuk akan tetapi kurang produktif dan tidak efisien menciptakan stimulasi ekonomi.

Postur APBN yang tidak sehat ini bukannya tanpa disadari oleh bukan hanya diputuskan oleh pemerintah sendiri akan tetapi realitas politik berkehendak lain. Politik anggaran konstitusional mesti melibatkan DPR yang memiliki hak budgeting. Sebagai sebuah lembaga politik, anggaran yang disusun harus mengakomodasi mereka tahu bahwa APBN kita tidak sehat. Dalam menetapkan asumsi makro ekonomi sudah dapat dipastikan jalan pikiran pemerintah dan simulasi kebijakan sementara secara umum DPR hanya mengandalkan intuisi sudah pasti dilakukan secara bersama-sama, akan tetapi resiko APBN yang tanggungjawab semata ke pemerintah.

UU APBN 2012 memberikan isyarat kepada pemerintah agar dapat ketika pemerintah akan melakukan penyesuaian harga BBM, reaksi publik negatif, DPR pun baik pihak oposisi maupun pendukung koalisi ramai-ramai mensahkan UU APBN. Tahun anggaran 2013, UU APBN Pasal 8 Ayat 10 penyesuaian harga energi apabila asumsi makro ataupun parameter yang ada BBM dan mengurangi subsidi energi akan mendapatkan penyesuaian harga publik, mudah ditebak fraksi-fraksi di DPR akan ikut serta ramai-ramai pemerintahan dalam mengelola koalisai pemerintahan begitu leadership berbagai kebijakan yang strategis dan tidak populis banyak dimentahkan oleh pendukung koalisi pemerintah sendiri.

Olch karena itu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah harus yang krusial dalam APBN setiap tahunnya semenjak dahulu, bahkan siapapun dan partai apapun penguasanya akan mengalami hal serupa, subsidi dalam APBN 2013 mencapai 18,8 % dari total belanja negara, atau triliun, subsidi listrik Rp. 80,9 triliun, dan subsidi non energi Rp. 42,5 triliun.

Namun masalahnya subsidi BBM dan listrik lebih bany oleh orang yang tak berhak disubsidi. Akan tetapi perbaikan petap diperlukan, subsidi energi yang lebih banyak dinikmati olel tak berhak harus dikurangi, sembari memperbaiki pengelolaan en yang selama ini lebih banyak melayani kebutuhan asing ketimban domestik. Subsidi non energilah yang patut diperbesar seperti sub transportasi.

iransportasi, pupuk dan subsidi lainnya yang banyak di dilakukan, diluar itu program-program dengan tujuan m ketahanan pangan dan pembangunan infrastuktur tidak bersifia didukung dengan mengurangi belanja birokrasi, subsidi yang sasaran maupun pembayaran utang.

akan dipersoalkan oleh mereka. resiko politik karena itu peningkatan subsidi yang tidak tepat sasa partai-partai pasti akan cari selamat sendiri-sendiri dengan mekemungkinan popularitas akan menurun. Apalagi menjelang Pem publik, dipastikan pemerintah dan partai pendukungnya kena imbe menaikkan harga BBM maupun tarif listrik pasti akan menimbulk fundamental dalam jangka panjang. Pengurangan subsidi, dengan memang tidak populis, akan tetapi memberikan dampak perbaik ketimbang menempuh kebijakan yang penuh resiko politik dan sos nasional cenderung akomodatif terhadap kepentingan politi yang kurang. Belum lagi sudah menjadi ciri khas dan karakter kepe mengurangi subsidi, tetapi political action yang belum berja memperbesar anggaran pembangunan infrastuktur sudah ada deng bawah anggaran subsidi BBM, hanya sebesar Rp. 188 triliun, Po kelemahan utama rezim pemerintahan sekarang ini implementasi Anggaran pembangunan infrastruktur pada APBN 201

Untuk menciptakan postur APBN yang sustainable diperlukan leadership pemerintah yang kuat, mau menanggung repemingung jawab. Periode pemerintahan sebelumnya kita masil terjadi penyesuaian harga BBM dan dan siap menanggung resiko. L seorang Wakil Presiden, namun menjelang Pemilu 2009 hargi diturunkan dengan inisiatif penuh dari Presiden tanpa perlu pertin yang lama. Arahnya mudah ditebak, penurunan harga BBM untuk per sejarah, baru kali ini harga BBM diturunkan —. Tapi mereka tidak memenurunkan salah. Akhirnya maju kena, mundur kena.

Kebijakan Subsidi, Pemerintah Seperti Menari "Poco-Poco"

Muh. Amir Arham* Wils, Pengajar Ilmu Ekonomi FEB UNG

dua isu menarik bila dicermati dengan baik dalam dua bili ini berkaitan dengan subsidi, yakni rencana penghapusan dan kemungkinan makin membengkaknya subsidi BBM. Api Indonesia (KAI) bersikukuh akan menghapus KRL lulum kegiatan operasionalnya disubsidi oleh pemerintah, ildi kereta komuter ber-AC, konsekuensinya tarif ekonomi ildak berlaku. Tarif semula sebesar Rp. 2.000,- dinaikkan 8.000,- bolak-balik berarti pengguna KRL ekonomi akan biloya transportasi perhari sebesar Rp. 12.000,- Sementara ildonesia yang berpenghasilan di bawah Rp. 12.000,- masih juta jiwa. PT. KAI dalam menjalankan operasionalnya berpikir profit, karena statusnya badan usaha. Penghapusan umi didasari karena KRL ekonomi sering mogok, biaya wa makin tinggi dan spare partnya makin langka.

www.mun perlu diingat, KAI adalah milik negara, pemerintah kukan intervensi melalui kebijakan, salah satunya subsidi omi bukan barang haram karena penggunanya adalah kelas bawah, yang memang perlu dibantu. Kebijakan subsidi ada ubsidi ke penyedia jasa (KAI) atau subsidi langsung kepada KRL ekonomi. Jalur pertama akan jauh lebih efektif on dengan jalur kedua yang diusulkan oleh PT. KAI agar KRL ekonomi harus memiliki Surat Keterangan Miskin. Juan menggunakan Surat Keterangan Miskin merupakan cara-began, dan tidak efektif karena akan menambah kerumitan, pemerintah maupun pengguna KRL ekonomi sendiri. KAI mencari profit, namun badan usaha negara jangan melupakan mengemban misi sosial. Oleh sebab itu, KAI tetap perlum pilihan-pilihan yang berbeda bagi pengguna jasa kereta, pemerintah wajib membantu PT. KAI lewat subsidi

Isinilah dibutuhkan keberpihakan pemerintah, tidak hanya bauan moral kepada KAI agar menunda penghapusan KRL Sikap pemerintah sangat berbeda dengan subsidi BBM, subsidi BBM lebih banyak orang mampu yang citimbang kelas menengah yang berpenghasilan Rp. 12.000,-

Kebijakan pemerintah terkait dengan ini kelihatan maju mundur dan mutar-mutar bak orang menari poco-poco. Besaran subsidi energi dalam APBN 2013 lebih dari Rp. 274 triliun, ada kemungkinan membengkak karena kecenderungan harga minyak mentah dunia naik, sementara lifting minyak dalam negeri makin menyusut. Oleh karena itu pengurangan subsidi BBM tidak terelakkan untuk dilakukan, persoalannya apakah pemerintah berani? Ada banyak skema dan skenario kebijakan yang dirancang akan tetapi dalam implementasinya tidak berjalan, mutar-mutar. Kini muncul usulan baru hanya sepeda motor saja yang boleh menggunakan BBM bersubsidi kelak, selain itu Kementerian ESDM pun telah mengeluarkan Kepmen No. 1 Tahun 2013 tentang larangan truk pertambangan dan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi, boleh jadi keputusan logis namun dalam prakteknya di lapangan akan sulit, kecuali mereka punya SPBU khusus.

Kecenderungan pemerintah berpikir politis lebih kuat, dengan menjaga citra tetap mempertahankan subsidi untuk menghindri resiko gejolak dan penolakan. Apalagi memasuki tahun politik, pengambil kebijakan yang terkait langsung merupakan orang-orang partai, karena itu terkesan lebih memilih APBN jebol ketimbang suara partai yang jebol tahun depan. Sikap pemerintah yang menari poco-poco akan membawa konsekuensi penyehatan anggaran, baik di pusat maupun di daerah. Pada tri wulan pertama, subsidi energi sudah habis menguap lebih dari Rp. 50 triliun, maka kemungkinan kuota BBM akan ditambah dengan sendirinya subsidi bertambah. Ini akan memberikan dampak terhadap makro ekonomi, dengan meningkatnya defisit anggaran, semula dipatok sekitar 1,6 % naik menjadi 2 %.

Sementara pembiayaan defisit dipastikan sumber utamanya lewat utang. Dalam APBN 2013, pemerintah mengupayakan pembiayan defisit dengan sumber pembiayaan dari pembiayaan non-utang sebesar Rp 8,1 triliun dan pembiayaan utang Rp 161,4 triliun. Pembiayaan utang Rp 161,4 triliun. Pembiayaan utang Rp 161,4 triliun. Pembiayaan utang Rp 180,4 triliun, pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 19,5 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 500 miliar. Ini merupakan indikasi kuat bahwa kebijakan pengendalian BBM bersubsidi tidak lagi efektif, pilihannya hanya ada satu menaikkan harga BBM. Kondisi ini akan terus berlanjut bilamana pemerintah tidak menempuh kebijakan yang drastis,

diperkirakan tahun 2014 menghadapi Pemilu konsumsi BB tambah naik, kendati ada rencana subsidi energi akan dibatasi.

Konsekunesi anggaran yang banyak tersedot ke subsi maka belanja modal berkurang, demikian halnya dana transfer menyusut. Hitungan sederhananya, jika sekiranya subsi dikurangi seperempatnya saja kemudian dibagikan ke daer provinsi akan mendapatkan Rp. 1 triliun lebih dan sisany langsung ke pengguna KRL ekonomi. Bagi daerah, ketamba transfer akan mengerek pertumbuhan yang lebih tinggi, peminfrastruktur akan banyak yang terealisir. Di tengah minimnya ke daerah, terutama wilayah timur dana transfer sangat m karena mengharap investasi langsung dari swasta masih sul minimnya infrastruktur. Investasi swasta masih cenderung terke di wilayah yang memiliki infrastuktur yang lengkap, sehing melakukan pemerataan pembangunan antar kawasan masih pemerah bibir.

Pilihan memangkas subsidi energi merupakan kebijakan ya popular, membawa konsekuensi bagi pemerintah dan partai partai papular, membawa konsekuensi bagi pemerintah dan partai papular, menghindari resiko bagi pemimpin dan pemerintah, medengan menghindari resiko akan membawa banyak dampak yang lebih buruk. Karenanya dibutuhkan bagi pemerintah ken mengelola resiko itu, mampu menjelaskan secara logis dan rasi kebijakan yang ditempuh. Selain itu manajemen pengelolaan en sumber daya mineral juga diperlukan, karena dari sini Pengelolaan energi hulu merupakan titik lemah, beberapa tahun lifting minyak makin menurun karena tidak ditemukan sumur tu sumur-sumur tua makin kurang produktif. Sementara kebijaka alternatif dari berbagai sumber belum berjalan optimal, yan mengurangi penggunaan energi fosil.

Menurut hemat saya, kompetensi seorang menteri teknis di bidan

juga diperlukan, menjadi penting dipertimbangkan seorang ESDM sepatutnya yang memiliki visi untuk dapat mengeml energi alternatif. Maka kita layak berharap kedepannya, kemente diserahkan kepada orang profesional bukan orang partai yan banyak bercakap politik praktis, dan konsentrasinya terpecah me partai yang terpuruk. Kalau kita cermat, sepertinya akhir-al Menteri ESDM lebih banyak berrbicara tentang partainya ketin tugas pokok dan model kebijakan pengelolaan energi.

Mengapa Bank Indonesia Membatasi Kartu Kredit?

kartu kredit itu "malaikat" atau "hantu"?. Kartu kredit h kita menggunakan dengan bijak dapat menjadi dewa nut, menjelma menjadi malaikat karena dapat membantu in transaksi apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Selain itu dit relatif simple dibandingkan dengan membawa uang tunai, ing pula pemegang kartu kredit mendapatkan akses kemudahan ongan untuk transaksi di pusat-pusat kegiatan ekonomi. Meski secara psikologis, hasrat melakukan konsumsi selalu muncul h seseorang memiliki kartu kredit, tawaran dan sale off barang-rtentu seolah tak ada hentinya datang menggoda bak "setan" ila hasrat belania terus datang dangan menggoda.

nkan menghantui nasabah. Ada banyak nasabah yang masuk ng bersangkutan membayar tagihan. mengenal waktu datang menagih dan meneror nasabah sampai kit atau bahkan meregang nyawa ditangan debt collector, berhadapan dengan debt collector, maka kemungkinan setiap lsi itu terjadi, seperti selama ini pemegang kartu kredit harus mana belum dilakukan pembayaran minimum setiap bulannya. kak, sementara penghasilan cenderung tidak meningkat. "hantu", tanpa terasa pemakaian kartu kredit tagihannya un dengan Menggunakan Kartu (APMK) perlahan ia akan ila hasrat belanja terus datang dengan mengandalkan Alat tor ini lebih mengedepankan "otot" ketimbang "otak", setiap ni keuangan keluarga, bunga akan berbunga pada saat jatuh industri jasa penagihan (debt collector). Masalahnya para pemberian kartu kredit kepada masyarakat mendorong pembayaran tagihan penggunaan setiap bulannya justru

Itu, revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai APMK mgatur waktu penagihan dan melarang menggunakan debil luar karyawan bank, kalaupun menggunakan tenaga alih tidak boleh lepas tangan manakala ada masalah. Aturan ini rikan apresiasi, karena itu BI harus menjalankan "extra mengatur secara teknis hal yang demikian yang bertujuan tilndungi nasabah bank. Bank jangan hanya ingin makan pencapaian tujuan internalnya semata, yaitu na laba sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan kondisi

perbankan selalu memegang "frame" yang baku untuk kredit kepada nasabah, baik perorangan maupun badan m prinsip kehati-hatian (prudential). Tapi sepertinya

> M. Amier Arham* *Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

untuk pemberian kartu kredit yang akan digunakan sebagai APMK cenderung longgar, seolah syarat minimum baik dari usia maupun penghasilan seseorang tidak dijadikan rujukan. Para sales yang umumnya karyawan *outsourching* perbankan ditebar di pusat-pusat perbelanjaan menawarkan menjadi member dengan persyaratan yang begitu mudah kepada setiap pengunjung pusat perbelanjaan.

Selama limat tahun jumlah kartu kredit terus bertambah, posisi per tahun 2006 jumlah kartu kredit tercatat 8,3 juta kartu dan akhir tahun 2011 jumlah kartu kredit mencapai 14,7 juta kartu, atau naik rata-rata 12 persen pertahun, dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi tahun ini. Nilai transaksi melalui kartu kredit tersebut mencapai Rp. 180 triliun per bulan. Potensi ini tentu saja menggiurkan industri perbankan, karena itu penawaran kartu kredit tidak terbatas penawarannya ke individu-individu semata, ada banyak varian kerjasama dengan produsen atau provider jasa menjadi sasaran.

Oleh karena itu BI selaku otoritas moneter perlu melakukan penataan dan "kesehatan" bank yang berimplikasi pada perekonomian nasional. menjadi resiko bisnis industri perbankan, sekaligus dapat menggerogoti NPL rata-rata perbankan di 2,55% tahun lalu. Tingginya NPL dapat dan macet mencapai 4,26 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan tagihan kartu kredit yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan (Statikstik Perbankan, 2012). Sementara NPL atau presentase nilai nasional (BUSN) tercatat Rp 432 miliar khusus NPL kartu kreditnya campuran sebanyak Rp 215 miliar. Sedangkan bank umum swasta mencatat NPL kartu kredit sebesar Rp 147 miliar, kemudian bank terbesar hingga Rp 726 miliar, bank milik pemerintah atau bank persero kredit per 2012 mencapai Rp 1,52 triliun. Bank asing mencatat NPL nyatanya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) kartu hatian dalam pemberian kredit atau penggunaan kartu kredit, tapi pihak perbankan kerap mengklaim sudah menerapkan prinsip kehati-Meski demikian bisnis jasa perbankan ini bukan tanpa resiko, bahkan

aturan untuk menjaga perbankan tetap sehat, selain memberikan kenyamanan bagi nasabah (masyarakat). Menurut hemat saya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK perlu diapresiasi bagi masyarakat maupun pihak

perbankan sendiri, sebab PBI mengandung unsur edukasi d bagi masyarakat. Secara ringkas kisi-kisi APMK menjelaskan minimum 21 tahun dan batas minimum penghasilan Rp. 3 jut yang pendapatan per bulannya antara Rp 3 sampai Rp 10 j hanya diberikan plafon pinjaman tiga kali besar pendapat hanya diperbolehkan memiliki kartu kredit maksimal dari du Kemudian Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DA antara lain membatasi denda keterlambatan pembayaran tag kredit maksimal 3 persen dari total tagihan.

Peraturan ini tentu akan mendapatkan resistensi, setidaknya pihak yang saya catat mempertanyakan, bahkan merasa kebe tersebut, misalnya manajer Asosiasi Penerbit Kartu Kredit (AKKI) mempertanyakan alasan mendasar membatasi jum kredit bagi individu yang berpenghasilan Rp. 3 juta – Rp. 10 j dibolehkan memiliki dua kartu kredit, Menurut pihak AKKI Indonesia dibatasi seseorang memiliki kartu kredit dengan pe tertentu, di negara lain tidak, seperti Malaysia dan Singapu Finance, 19/6/2012).

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, bukan berperilaku seekers" dalam jangka pendek juga memiliki misi dan fungsi "sosial" mendorong pertumbuh bersifat long run. Kenyataan itu harus dijalani perbankan, seba mendapatkan gain dari mata rantai kegiatan perekonomian, se terhadap pendapatan masyarakat, dan siklusnya pihak perbanka bersamaan akan mendorong laju pertumuhan ekonomi yang ber didorong untuk meningkatkan profitabilitas bank, dan pada sa tetapi kredit investasi terutama pembangunan infrastruktur per sejatinya perbankan tidak hanya mengandalkan kredit konsun penyaluran kredit lainnya selain kredit konsumsi. Karena 1 untuk menciptakan differensiasi produk layanan maupun untuk meningkatkan penghasilannya, dilain sisi mendorong pe Terbitnya PBI saya meyakini memberikan motivasi bagi ma jasa perbankan selayaknya tidak hanya memikirkan profitabilitas demikian, pihak perbankan atau yang terkait langsung dengan p akan memberikan efek pada penurunan profitabilitas perbankan tidak perlu dibatasi. Keberatan ini dapat dimaklumi, karena PBI akan makin selektif memberikan kartu kredit, karena itu bun bahwa dengan adanya pengetatat pemberian kartu kredit pihak p bunga kredit paling tinggi sebesar 3 persen perbulan karena mer Selain AKKI, Ketua Perbanas pun keberatan dengan adanya pe

talo Post, 24 April 2013

Rumitnya Kebijakan Subsidi BBM di Tahun Politik

Pengajara Ilmu Ekonomi FEB UNG

ttiap tahun pemerintah dipusingkan dengan lonjakan subsidi debatan dan silang pendapat pun bermunculan mengenai ubsidi, kondisi ini menambah kebimbangan pemerintah untuk opsi mana yang terbaik akan ditempuh. Namun harus disadari kontra merupakan konsekuensi dalam sebuah pengambilan upalagi keputusan melibatkan parlemen yang dihuni berbagai k memiliki agenda yang berbeda. Oleh karena itu, masalah rrai politik. Mereka partai politik sepatutnya memiliki platform gi, punya konsep yang memadai bagaimana membangun visi n energi dalam jangka panjang, energi fosil yang murah bukan ya. Partai politik jangan lagi mencari justifikasi bahwa tugas kun tetapi harus tepat sasaran.

BN 2013 mengalokasikan subsidi sekitar Rp. 300 triliun, lebih untuk subsidi BBM (premium dan solar). Konsumsi premium digunakan untuk transportasi darat, dengan rincian kendaraan gunakan 45 % dan kendaraan motor sekitar 40 %, sisanya 15 % num (Kompas, 29/4/2013). Sementara penggunaan solar sekitar ransportasi darat, dialokasikan 30 % untuk bus, 39 % angkutan kitar 26 % untuk untuk truk tambang (Pertamina, 29/4/2013). nggunaan BBM sangat jelas lebih banyak dinikmati oleh orang tik inilah pemerintah perlu menjelaskan secara terang kepada termasuk mahasiswa yang menjadi garda terdepan menolak jika kun mendapatkan BBM. Membiarkan subsidi terus membengkak nu mendapatkan BBM murah justru akan mempertahankan ng miskin.

ernpa pihak, termasuk partai politik ada yang cenderung bluritas belaka dengan tidak mendukung upaya pemerintah bisidi BBM. Di tengah beratnya beban fiskal, mereka mencari olitik menolak kenaikan harga BBM ke tingkat keekonomian terjadi selama ini. Harga minyak mentah dunia diatur oleh wur, sementara Indonesia sudah lama menjadi net import uksi minyak (lifting) yang ditargetkan setiap tahun dalam trunh tercapai, malahan cenderung seret. Oleh karena itu tidak bugi pemerintah mengenai kebijakan subsidi BBM.

Keputusan yang cepat diperlukan, opsi menaikkan harga BBM tetap menjadi pilihan "terbaik", apalagi UU APBN sudah memberikan mandat kepada pemerintah melakukan penyesuaian harga.

Mempertahankan subsidi BBM dalam jangka pendek memang pertumbuhan ekonomi, pada saat yang bersamaan perkapita masyarakat naik. Dalam kurung waktu kurang dari 10 tahun terakhir, menurut data Bank Dunia jumlah kelas menengah di Indonesia meningkat dari 37,7 % tahun Peningkatan jumlah kelas menengah dengan sendirinya mendorong hasrat konsumsi, termasuk permintaan otomotif. Walhasil konsumsi BBM tentu tidak akan mencukupi. Bilamana besaran kuota tetap dipertahankan penputaran roda ekonomi. Dapat dipastikan pemerintah akan mengganggu jumlah kuota BBM. Namun resikonya beban fiskal akan makin berat karena infrastruktur dan overhead social lainnya.

Kebijakan mengenai subsidi BBM, kelihatan pemerintah masih ketidakpastian bagi berbagai pihak, terutama pelaku usaha. Lambatnya inflation expectation, harga-harga mulai merangkak naik sebelum ada naik pasca perubahan harga BBM, dan kemungkinan kenaikan harga-harga mulai merangkak naik sebelum ada naik pasca perubahan harga BBM. Apa yang ditakutkan oleh pemerintah kepastian, intinya inflasi sebetulnya sudah ada selama kebijakan tidak ada Menaikkan harga BBM sudah pasti akan terjadi shock ekonomi, akan tetapi oleh kenaikan harga BBM, ia akan muncul dua bulan kedepan seiring BBM inflasi tetap diperkirakan naik, karena itu keputusan kenaikan harga BBM, ia akan muncul dua bulan kedepan seiring BBM inflasi tetap diperkirakan naik, karena itu keputusan kenaikan BBM lebih cepat akan lebih baik.

Namun nampaknya pemerintah akan meminimumkan resiko dengan menerapkan twin price BBM. Untuk kendaraan pribadi harga solar dan premium ditetapkan sebesar Rp. 6.500/liter sementara kendaraan umum masalah, terutama pada pengawasan kendati ada usaha menggunakan chip card untuk mengontrol perilaku moral hazard pembelian BBM di luar kebutuhan pemilik kendaraan. Pemasangan chip card tentu membutuhkan

ongkos, termasuk menempatkan pihak keamanan di setiap SPBU ya memerlukan pembiayaan. Artinya, kebijakan twin price tersebut cer akan menciptakan biaya tambahan berinak

akan menciptakan biaya tambahan, ketimbang dengan m harga BBM secara serentak (harga tunggal).

Kompensasi beras miskin (raskin) maupun pemberian bantuan pendidikan dan kesehatan jauh lebih tepat ketimbang bantuan la kompensasi selayaknya tidak dibawa ke ranah politik bagi partai pe diperlukan kompensasi bagi masyarakat miskin, hanya saja reaksi sesaat, dan menambah populasi orang miskin. Namun sudah berulang kali dilakukan, keputusan ini memang akan menin pemerintah sendiri yang akan kerepotan. Padahal menaikkan harg kepentingan politik, pertimbangan politik cenderung dikedepanka keputusan mengenai subsidi BBM karena sudah tercemari cenderung mempertahankan citra, apalagi dalam tahun politik. La pemerintahlah yang kurang siap menaikkan harga BBM karen mau (tidak siap) ada kenaikan harga BBM. Padahal sesun BBM. Manakala persepsi itu dibangun maka selamanya masyaral cenderung mempersepsikan masyarakat tidak siap terhadap kenaik Pernyataan-pernyataan pejabat publik kerapkali membingungkan Menteri ESDM bahwa kemungkinan menerapkan harga tunggi Belum tuntas kebijakan twin price kini muncul wacana

Riset Energi Terbarukan Masih Jalan di Tempat

Akibat dimabukkan dengan subsidi BBM, triliunan rupia semestinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktu mengembangkan riset, justru menguap menjadi asap. Selama ini se kalangan paham bahwa Indonesia kaya sumber daya mineral, ter minyak dan gas, maka dari itu mereka tetap berkeinginan harga BBM, unrenewable, cadangannya makin menipis dan impor minyak makin makin meningkat. Apalagi penggunaan energi alternatif dan terbahum berjalan optimal karena dukungan pemerintah masih lemah niset-riset. Padahal ada banyak sumber energi alternatif terbarukan te belum digarap. Idealnya subsidi BBM direalokasi untuk riset, selan dari negara-negara tetangga, Thailand 0,25 %, Malaysia 0,6 % kebijakan energi nasional belum kelihatan aplikasinya hendak kemana jangka panjang?.

Peringkat Utang Indonesia Menurun, Apa Dampaknya?

M. Amier Arham* ijar Fakultas Ekonomi dan Bisnis-UNG

llaan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah pada dasarnya aspek penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure), dimaksudkan lebih memperkuat analisis dari sisi expenditure, en pengeluaran pemerintah perlu dicermati karena menyangkut untuk pembiayaan pemerintah. Rezim anggaran yang dianut rezim defisit, walau secara normatif defisit anggaran ingan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui yaan pembangunan. Akan tetapi defisit anggaran ada ambang essar 3 % terhadap PDB, batas toleransi tersebut musti dijaga si anggaran.

nensi dari munculnya defisit maka diperlukan sumber uranya melalui a) Pajak, b). Pinjaman atau utang, c) Pencetakan dan d) Penjualan asset pemerintah (privatisasi). Dari keempat in defisit, yang paling krusial adalah pinjaman (utang), baik ri maupun utang dalam negeri (obligasi). Pada awal utang pemerintah seringkali hanya digunakan sebagai nenutupi defisit anggaran. Sering meningkatnya pembiayaan ngakibatkan terjadi pergeseran peranan dari semula sebagai sumber utama pembiayaan. Pada tahun 1980-an proporsi APBN masih didominasi non utang, mulai tahun 1990-an ru bersumber dari utang. Persentase pembiayaan defisit APBN 1980 sebesar 35 %, tahun 1990 sebesar 82,3 % dan tahun 1980 sebesar peranan utang mengakibatkan akumulasi stok ngkat setiap tahun hingga mendekati Rp. 2.000 triliun pada seeram itu pula mengindikasikan bahwa ketergantungan putang untuk membiayai defisit anggaran makin tinggi.

in terbilang proporsi utang luar negeri trendnya makin eningkatan utang domestik. Kedua sumber utang tersebut u, utang luar negeri baik bilateral maupun multilateral relatif akukan penjadwalan ulang (reschedulling) pembayaran pokok in utang dalam negeri yang harus diselesaikan apabila jatuh utang luar negeri, peminjam menggunakan sistem asistensi melakukan intervensi sangat terbuka. Kedaulatan negera na agenda negara donor turut serta dijalankan oleh negara ngutang). Oleh karena itu pemerintah secara perlahan makin utang luar negeri, kendati nominalnya masih tinggi.

nng luar negeri jika dilihat dari perkembangannya dari tahun n 2011, secara nominal meningkat sebesar USD 90,3 miliar tan terjadi baik pada utang luar negeri pemerintah maupun ikian, pada periode yang sama peningkatan utang luar negeri ngkatan PDB (harga berlaku) yang relatif lebih besar yaitu

pemerintah sehingga akan menyulitkan perekonomian, atau akan mengganggu fiscal sustainability. terjadi goncangan dan shock ekonomi domestik akan memperparah beban utang secara nominal beban tersebut cenderung tidak akan menurun signifikan. Jika mengkuatirkan. Profil utang pemerintah dan waktu jatuh temponya menunjukkan ditutupi melalui penarikan utang baru. Dengan kondisi utang seperti itu, tetap peningkatan beban pembayaran utang dan jatuh tempo utang-utang lama yang terhadap utang untuk membiayai defisit anggaran. dari anggaran tahun 2012 yang sebesar Rp 221,8 triliun. Peningkatan volume sebesar Rp 6,97 triliun. Jumlah penarikan utang di tahun 2013 meningkat 3,7% pemerintah sudah lebih cenderung mengandalkan pembiayaan defisit melalui utang dalam negeri. Dalam APBN 2013, penarikan utang baru berjumlah Rp penarikan utang pemerintah, selain disebabkan masih tingginya ketergantungan pinjaman luar negeri sebesar Rp 45,9 triliun, dan penerus pinjaman luar negeri 230,2 triliun melalui penerbitan Surat Berharga Negara (netto) Rp 177,3 triliun, luar negeri sebesar Rp. 33.7 triliun. Dengan komposisi itu menunjukkan bahwa triliun, diantaranya bunga utang dalam negeri Rp. 88,5 triliun dan bunga utang alasan kuat memperbesar defisit anggaran setiap tahun. Konsekuensinya, secara umum dihitung berdasarkan rasio PDB. Pada akhirnya pemerintah punya mendorong hasrat pemerintah melakukan penarikan utang baru, karena utang sebesar USD 536,8 miliar (190,2 %). Peningkatan PDB akan cenderung tahun, Realisasi APBN 2012 untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp. 122.2 pembayaran cicilan bunga utang dan pokok akan memberatkan anggaran setiap Juga karena terjadi

Apa Pengaruhnya Jika Peringkat Utang Naik atau Turun?

Peringkat utang naik dimaksudkan adalah kemampuan anggaran untuk membayar utang lebih besar karena pembiayaan sektor produktif dalam APBN cenderung meningkat. Sebaliknya, peringkat utang menurun karena kondisi anggaran yang kurang sehat lebih banyak dialokasikan untuk pembaiyaan subsidi (non produktif). Peringkat utang Indonesia ada kecenderungan naik turun sebagai dampak dari politik anggaran pemerintah yang dijalankan setiap tahun. Dua tahun (Positive Outlook), peringkat utang Indonesia berada pada posisi BBB-menurunnya pembiayaan pinjaman, terutama hasil imbal surat utang negara yang membebani APBN. Dengan demikian akan memperkuat likuiditas dan cadangan devisa, sehingga biasanya arus modal asing akan cenderung meningkat baik dana jangka pendek maupun dana jangka panjang. Peringkat utang yang positif di Tahun 2013 mengalami penuruman dari posisi BBB-" positive outlook ke posisi BB+" stable outlook sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P).

Peringkat tersebut berdampak terhadap investment grade rating, dengan kata lain Indonesia relatif makin menjauh dari peringkat investment grade. Penurunan peringkat utang, pihak asing memandang Indonesia sebagai negara yang dianggap "bermasalah" perekonomiannya yang kemungkinan kurang menguntungkan. Artinya, saat ini komunitas internasional menganggap Indonesia termasuk negara kurang kompetitif di bidang investasi. Menurunnya peringkat utang Indonesia membawa sentimen negatif dimana minat investor untuk

membeli aset-aset Indonesia, khususnya instrumen keuangan dan objemerintah menurun. Selain itu penurunan peringkat utang membuat pindonesia makin berat dalam bersaing dengan negara-negara lain di kaw ASEAN untuk meraih dana asing. Pada saat yang bersamaan S & P j meningkatkan peringkat Filipina dari 'BB+' menjadi 'BBB-' positive outlook.

masih cenderung berinvestasi di kawasan yang relatif mapan. selayaknya dibenahi masalah-masalah klasik, seperti perbaikan infrastruk kebijakan pemerintah yang disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonc tentu berdampak terhadap kinerja makro ekonomi (pertumbuhan). Rencana pi belanja pembangunan terutama di Kawasan Timur Indonesia, karena swa koordinasi pemerintah pusat dan daerah masalah kemudahan berinvest dengan waktu tersebut mengakibatkan inflasi lebih tinggi, maka sudah bar menyumbang inflasi. Upaya untuk mengurangi subsidi BBM yang berdek keamanan dan kepastian hukum. Disamping itu, memperbesar belanja modal menghadapi liburan sekolah, puasa dan lebaran yang secara bersamaan a maju-mundur mengakibatkan pergeseran waktu untuk menaikkan harga B ditengarai salah satu faktor penurunan rating, karena membebani APBN. S paket kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terut pada triwulan II. Kelambanan keputusan untuk mengurangi subsidi B dan kemungkinannya akan makin memberatkan masyarakat karena t Dengan kondisi seperti itu, langkah yang harus dilakukan pemerintah menyia pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 6,02 persen, lebih rendah dibandin periode yang sama tahun 2012 sebesar 6,3 persen. Selain itu, BPS juga men bahwa ekspor menurun dan pembentukan modal tetap bruto yang juga ti berekses terhadap makro ekonomi. BPS mencatat di kuartal pertama Akan mudah ditebak penurunan peringkat utang Indonesia

Pemerintah menyadari penurunan peringkat utang itu terkait den kebijakan anggaran, salah diantaranya masalah subsidi BBM yang makin be Namun sikap pemerintah tidak saja terkesan hati-hati akan tetapi lebih dipanda sebagai sikap inkonsisten, sikap tersebut menggambarkan pemerintah bimbang. Wa terutama masalah inflasi yang akan bimbang akan tetapi memikirkan secara mata miskin. Namun harus disadari bahwa masalah inflasi yang akan berdampak terhadap bertambahknya masyara miskin. Namun harus disadari bahwa masalah inflasi, kenaikan harga BBM har juga dapat menciptakan inflasi. Kebijakan tata niaga daging, bawang putih dan bawa Dengan demikian makin meyakinkan kita bahwa sumber inflasi di bulan maret – apu dengan sikap pemerintah yang lamban.

Kebijakan subsidi energi yang tinggi sudah barang tentu sebuah masala beban APBN makin berat, akan tetapi saya berkeyakinan berubah-ubahnya sik pemerintah bukan economic pure semata. Hanya pemerintah yang berpandang adanya sikap inkonsistensi mereka karena murni ekonomi semata, merunut sejar kenaikan harga BBM, misalnya tahun 2005 kenaikannya sangat signifikan, mes disadari periode tersebut menciptakan shock ekonomi tapi bersifat short term. Pad dengan pola seperti itu sulit untuk dipercaya bahwa ijakan subsidi BBM pun economic. Saya lebih percaya pertimbangan politiklah yang dominan dibalik ji semua.!!

Paket Kebijakan Ekonomi, Efektifkah Menstabilkan Rupiah?

h. Amir Arham* Ilmu Ekonomi FEB UNG

un rupiah bukan urusan pemerintah tapi urusan uh Bl...... ". Kutipan ini merupakan ungkapan nko Perekonomian Hatta Rajasa beberapa waktu un rupiah. Beberapa minggu terakhir rupiah terus idap dollar. Dalam APBN-P rupiah dipatok tukar rupiah di pasar spot pada perdagangan kemarin, sempat menyentuh level Rp 11.433 per

W pejabat yang semestinya bertanggung jawab il tidak patut diungkap seperti itu, sekalipun ada hwa pemerintah akan merespon melakukan resep kebijakan ekonomi. Tapi setidaknya rakyat kan berprasangka buruk, bahwa betapa seorang derung tidak paham permasalahan ekonomi dan b jika ada masalah, sebaliknya akan mengklaim omian maupun rupiah stabil. Memburuknya kerapkali juga dibarengi dengan eufimistik para nderung menipu sesungguhnya, pejabat otoritas wa seolah rupiah tidak sendirian melemah tapi u mengalami kondisi serupa, dengan kata lain tapi dollar yang menguat.

prjadi. Dampaknya lebih jauh barang-barang domestik). Seiring dengan itu, otoritas moneter ukan masalah moneter semata, banyak faktor, un kembali menciptakan sumber inflasi baru. iliik menjaga tergerusnya devisa, sehingga diti, sementara barang-barang yang diimpor maupun kebutuhan mata uang asing meningkat. n inflasi, karena penaikannya menjelang bulan ggi, kenaikan BBM yang melewati momentum lungani oleh Bank Indonesia, tapi penyebab itau turunya nilai rupiah memang merupakan nilai tambah untuk negara produsen, kebalikan n sekolah. 2) defisit neraca perdagangan yang r, efeknya terhadap tekanan rupiah. 4) ekspor kebutuhan domestik melalui impor, sehingga waktu jatuh tempo makin mendekat yang

Boleh jadi pemerintah (Hatta Rajasa) tidak sadar bahwa serangkaian permasalahan tersebut merupakan wilayah pemerintah. Selain yang disebutkan diatas penyebab melemahnya nilai rupiah begitu banyak kesemuanya merupakan urusan langsung pemerintah. Intinya, pelemahan rupiah_saat ini dominan sentimen negatif dalam negeri ketimbang global. Mengurangi defisit neraca berjalan, menekan angka inflasi, serta menahan keluarnya modal asing pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan pemerintah. Urusan domestik dengan memperjelas arah perekonomian akan mendorong rupiah menjadi perkasa merupakan urusan fiskal yang berada dibawah kewenangan pemerintah.

Melemahnya nilai rupiah otoritas moneter dan fiskal harus sejalan, tidak boleh terjadi decoupling satu sama lain. Masalah moneter dan pasar uang seringkali bermain pada wilayah efek psikologi yang menimbulkan sentimen negatif, sementara permasalahan fiskal cenderung rasional (rational expectation), semua pelaku ekonomi bertindak secara rasional dapat mengetahui permasalahan ekonomi hingga kedepan, termasuk arah dan kebijakan perekonomian dari pemerintah.

Pada sisi ini, bank sentral patut diberikan apresiasi dengan membuat amunisi baru untuk menguatkan rupiah dengan merilis sejumlah beleid baru soal operasi moneter dan pembelian valas, diantaranya BI mengeluarkan kebijakan sertifikat deposito Bank Indonesia (SDBI). Surat berharga dalam <u>rupiah</u> ini berjangka waktu 12 bulan. Selain itu, BI melakukan penyempurnaan aturan mengenai pembelian valas untuk kegiatan ekspor barang dan jasa. Salah satu poinnya, pembelian valas hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah menjual valas atas hasil ekspor mereka. Jangka waktu term deposit valas juga mengalami perubahan dari semula tujuh hari ,14 hari dan 28 hari menjadi satu hari sampai dengan 12 bulan. Kebijakan BI tersebut diperkirakan bisa menambah likuiditas dollar AS di dalam negeri.

Lain halnya kebijakan fiskal efektifitasnya masih diragukan untuk menguatkan nilai rupiah dalam jangka pendek. Paket kebijakan pemerintah yang dikeluarkan antara lain; 1) perbaikan neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah. 2) pemberian insentif dengan menghapus pajak barang mewah beberapa produk, pembebasan PPN dan pengurangan PPh untuk industri tertentu. 3) Menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi, dan 4) Percepatan investasi.

Sepanjang penyebab pelemahan rupiah tidak dilakukan perbaikan secara fundamental rupiah masih akan sulit didongkrak, sementara penguatan fundamental ekonomi bersifat long term. Defisit neraca transaksi bukan masalah yang baru muncul, tapi masalah klasik karena ketergantungan impor hampir semua komoditi begitu tinggi. Impor menjadi

resep yang gampang karena instan untuk menjaga kebutuhan domestik, perbaikan produksi dalam negeri masih saja berkutat pada perencanaan. Effirmasi aksinya sangat lemah, contohnya harga kedelai yang meroket saat ini karena terjadi kelangkaan, menstabilkannya dipastikan Bulog akan mengimpor kedelai sebanyak 100,000 ton dari USA.

Selain itu, pemberian insentif dengan menghapus pajak barang mewah beberapa jenis produk ditengarai tidak akan memberikan efek terlalu besar untuk short term. Permasalahannya jenis produk yang dihapus pajaknya pada dasarnya bukan lagi barang mewah (luxury goods), seperti peralatan rumah tangga dengan harga Rp. 5 juta atau Rp. 10 juta, pesawat penerima siaran televisi dengan harga dan ukuran di bawah Rp. 10 juta dan 40 inchi, lemari pendingin (kulkas) di bawah Rp. 10 juta, mesin pengatur suhu udara (AC) di bawah Rp8 juta, pemanas air dan mesin cuci di bawah Rp. 5 juta, proyektor dan produk saniter di bawah Rp. 10 juta.

Pelemahan rupiah yang terjadi saat ini dengan mengandalkan produk impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat inflasi tetap akan tinggi. Apalagi harga minyak mentah dunia terus bergerak naik, dalam APBN-P 2013 harga minyak mentah dipatok sebesar US\$ 108/barel sekarang sudah naik dikisaran US\$ 110. Sejumlah industri dan perusahaan yang memiliki komponen biaya minyak dalam fungsi produksi akan mengalami lonjakan ongkos produksi. Adanya kenaikan ongkos produksi berdampak terhadap kenaikana harga-harga barang, efeknya terhadap kemampuan daya beli masyarakat tergerus, itu artinya inflasi bukannya menurum.

artinya Menko Perekonomian belum melakukan diagnostik penyakit berwewenang ucapan adalah "kebijakan" perekonomian secara komprehensif sebelum berucap, seorang pejabat memebutuhkan penanganan jangka pendek karena berdampak luas. cukup baik tapi cfeknya jangka panjang, sementara pelemahan rupiah sumber pelemahan rupiah karena banyaknya utang swasta yang akan jatuh tempo. Maka dari itu, paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah rendah. Melemahnya nilai rupiah terhadap dollar menjadi masalah baru negeri dianggap masih terlalu tinggi sedangkan bunga deposito terlalu luar negeri relatif rendah akan tetapi rupiah terdepresiasi. Apalagi salah satu pinjaman. Suku bunga pinjaman dalam negeri tinggi, sementara suku bunga terhadap kegiatan investasi, pelaku usaha tidak memiliki alternatif sumber infrastruktur dan keamanan. Pembenahan hambatan investasi tersebut menjadi hambatan yang serius, termasuk masalah disisentif. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga seringkali membutuhkan waktu yang lama. Dari sisi perbankan, bunga pinjaman dalam Sementara masalah investasi, bukan hanya masalah insentif dan kelembagaan,

Berharap *"Trade Off"* Perekonomian Berkurang di Tahun 2014

dilanda krisis, angka pengangguran masih tinggi dan beban dilanda krisis, angka pengangguran masih tinggi dan beban besar. Begitupun perekonomian USA walau secara perlahan lan kemungkinannya mengurangi stimulasi (tapering off) tahun lini kawasan euro dan USA merupakan tujuan pasar ekspor pada akhirnya dampak krisis itu cenderung memukul domestik, terutama permintaan ekspor komoditas. Selain mal, masalah internal perekonomian sepanjang 2013 juga kesehatan ekonomi, tingkat inflasi yang relatif tinggi memiliki ugsung terhadap angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik ungka kemiskinan pada 2013 mengalami peningkatan, pada 013 tercatat 28,55 juta orang miskin atau 11,47 persen dari duk, naik sebesar 11,37 persen atau sebanyak 28,07 juta orang 013. Tidak dapat dipungkiri inflasi merupakan faktor pemicu ebagai dampak dari kenaikan BBM.

nuikan BBM tahun 2013 memang tidak dapat dihindari, nicu peningkatan inflasi, hanya saja respon kebijakan terlambat uh menjadi salah satu penyebab utama. Momentum penaikan ukan, kenaikan pada bulan Juni justru menciptakan trap inflasi de schingga menambah kemiskinan. Reaksi negatif terlebih ul seperti kenaikan harga-harga berbagai kebutuhan pokok ukan harga BBM, pasca kenaikan BBM pun harga terus u mundurnya keputusan pemerintah menaikan BBM juga udap peringkat utang menurun sehingga daya saing melorot.

in inflasi, defisit neraca pembayaran terus berlangsung hampir un 2013, dimana penyumbang defisit terbesar adalah impor gas sekitar US\$ 10 dengan besaran prosentase 19,5 persen, onen automotif (4,1 persen), kendaraan CBU (2,3 persen) dan rr (1,2 persen). Defisit neraca pembayaran mengakibatkan ollar naik, efek dominonya rupiah terdepresi, melemahnya kspor juga turut memperkuat tekanan defisit. Permintaan or andalan menurun seiring krisis yang dialami tujuan pasar Melihat struktur perekonomian kita yang masih didominasi meditas primer, bersamaan makin meningkatnya impor migas prediksi tahun ini masih sulit neraca perdagangan menggapai

ra teoritis untuk menciptakan surplus perdagangan, ekspor ikan. Hanya saja struktur perekonomian perlu digeser dengan i (dominan) dari komoditas primer. Larangan ekspor bahan olahan diyakini salah satu kebijakan yang tepat, sehingga pertambangan berorientasi ekspor bahan jadi. Nilai tambah dihasilkan sekaligus meminimalisir ekspor komoditas primer verjalan efektif, pemerintah sudah berubah sikap dengan

M. Amier Arham*

* Pengajara Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG
memberikan pengecualian perusahaan tambang raksasa, seperti Freeport dan

Newmont dengan alasan kedua perusahaan tersebut sudah membangun

Terkoreksinya pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebagai dampak ekonomi global tidak dapat dikesampingkan, namun faktor internal sesungguhnya menjadi problem utama. Defisit neraca perdagangan bukan gangguan ekonomi yang muncul secara tiba-tiba, ia merupakan masalah ekonomi sudah menahun yang dapat diantisipasi kemunculannya. Ketergantungan ekspor komoditi, serta minimnya diversifikasi pasar ekspor merupakan masalah tersendiri belum mendapatkan perhatian lebih serius. Pasar Asia saat ini menjadi engine pertumbuhan ekonomi global sejatinya disasar, termasuk diperlukan perubahan secara fundamental, bergeser ke struktur ekonomi sekunder dan tersier.

Berbagai Trade Off Kebijakan Ekonomi

Ada empat paket paket kebijakan pemerintah yang ditelorkan ditahun 2013, perbaikan neraca transaksi berjalan (current account), menjaga nilai tukar rupiah, pemberian insentif, dan menjaga daya beli masyarakat dengan menurunkan tingkat inflasi dan percepatan investasi. Paket kebijakan ini terbukti kurang efektif karena dampaknya jangka panjang. Sementara perbaikan defisit neraca perdagangan dari sisi kebijakan fiskal sepertinya menemui berbagai kendala, harga komoditas andalan di pasar dunia belum kunjung beranjak, alternatifnya yang dapat dilakukan dengan mengurangi impor melalui kenaikan tarif pajak, termasuk menaikkan harga BBM.

Kebijakan ini sebetulnya cukup efektif, hanya saja sulit dilakukan ditahun politik, sehingga kebijakan fiskal tidak lagi efektif melakukan perbaikan untuk mengurangi impor. Maka pendulum kebijakan pemerintah diarahkan kesektor moneter, Bank Indonesia (BI) memikul beban untuk mengerem laju pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan impor. Menaikkan suku bunga merupakan instrumentasi pokok yang kerap dijalankan BI, dengan demikian suku bunga yang tinggi praktis akan mengurangi investasi. Laju investasi yang direm terutama investasi yang sangat besar membutuhkan komponen impor sebagai pemicu defisit neraca non pertanian. Namun kebijakan ini diyakini banyak pihak kurang berhasil, perdagangan.

Namun sesungguhnya yang ideal pertumbuhan ekonomi

diharapkan terus meningkat, karena itu dari sisi kebijakan fiskal menjadi salah saru paket untuk mengurangi tingkat penganggur bermuara pada menurunnya angka kemiskinan. Kedua otoritas pekebijakan nampak bertolak belakang (trade off), hanya saja kondis dapat dihindari karena struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia ce kurang berkualitas, didominasi sektor konsumsi. Efek den perekonomian turut pula menjadi variabel yang tidak kecil me kegiatan impor, pertumbuhan ekonomi didominasi oleh konsumsi se indikasinya. Impor migas, komponen otomotif, CBU dan telepon merupakan penyumbang defisit neraca perdagangan. Bahkan penguna telepon seluler di Indonesia lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk itu sendiri.

Kondisi serupa, kebijakan pembatasan kuota BBM bersubs dilakukan pemerintah, juga memunculkan trade off dengan pengadaa murah. Keberadaan mobil murah dipastikan akan meningkatkan ka BBM, meskipun argumentasi awal pemerintah bahwa mobil murah lingkungan diarahkan untuk menggunakan bahan bakar yang berokta (pertamax). Tapi pada kenyataannya mobil murah yang beredar menggunakan BBM bersubsidi, hal ini juga bertolak belakang dari pemerintah daerah untuk mengurangi kemacetan. Kebijakan mobil tidak lain dimaksudkan untuk mendorong industri dalam negeri, asumsi komponen mobil murah lebih dari separuh merupakan penakan negeri. Akan tetapi sesungguhnya masih sulit kita mengukur sebesar pemakaian komponen produksi dalam negeri yang digunakan unit mobil murah.

Upaya pemerintah menurunkan inflasi juga cenderung kontu (trade off) dengan kebijakan Pertamina menaikkan harga gas elpiji kenaikannya cukup signifikan mencapai 60 persen. Kebijakan men harga elpiji akan berdampak terhadap industri kecil, biaya pr meningkat, pilihan mereka terbatas dengan menaikkan harga jual, akhirnya daya beli masyarakat menurun. Dipastikan sebagian konsumet beralih menggunakan gas elpiji 3 kg, lonjakan permintaan gas bersubs bila moral hazara dipraktekkan, baik oleh Pertamina itu sendiri maupu agen. Kemungkinan lainnya, pengoplosan gas elpiji bersubsidi dari kegas elpiji non subsidi 12 kg akan marak karena disparitas harga terlalu tinggi.

Penaikan harga gas elpiji non subsidi memang me kewenangan korporasi, hanya saja perubahan harga perlu memperha kondisi makro ekonomi. Berkaca pada kenaikan harga BBM momentumnya tidak tepat justru menciptakan sumber inflasi berganda. karena itu koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi kata kunci i menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, agar berbagai macam traci yang muncul dapat diminimalisir di tahun 2014 Semoga!!!

Beratnya Beban Ekonomi Kota Gorontalo

lidak itu saja ia berliku penuh perdebatan di lembaga Pemilihan Kepala Kepala Daerah (Pilkada) Kota melahirkan tesis atau bahkan disertasi, karena belum dalamnya. Perdebatan yang panjang pada akhirnya dengan dilantiknya Pasangan Marthen Taha dan Budi MaDu) Kini masyarakat Gorontalo mendapatkan memiliki pemimpin definitif, dibalik itu semua terselip oktasi terhadap kepemimpinan walikota baru.

liri sudut pandang ekonomi, sebab pemerintahan dilevel ll rakyat (ekonomi). inlo barometernya berada di Kota Gorontalo. Sinergitas Jokan view dari Provinsi Gorontalo, karena itu kemajuan ndu, dipastikan visi dan misinya berujung pada upaya ntan bersifat resiprokal dengan Provinsi Gorontalo. Ada wintahan menjadi keniscayaan, Kota Gorontalo tidak boleh wek pada akhirnya minim manfaat (mubazir). an seria program pemerintah daerah terkadang jiplakan dari melihat kebutuhan rakyat berdasarkan preferensi mereka komodatif dalam berbagai pemikiran, mendengar masukan minya masyarakat Kota Gorontalo menunggu realisasi janji yang dihadapi Kota Gorontalo saat ini, namun tulisan ini um MaDu, seraya berharap pola komunikasi dan karakter tidak sesuai kebutuhan masyarakat setempat, Kota lebih

illiarik dalam ranah teori perubahan struktur ekonomi illi dikembangkan oleh Chenery dan Syrquin (1975), bahwa tegiatan perekonomian didominasi oleh sektor primer illidian bergeser ke sektor sekunder (industri manufaktur) sama sektor tersierpun (jasa) berkembang. Jika melihat (Gorontalo cenderung berbeda dengan kota-kota laimnya ktor pertanian masih cukup potensial terutama komoditi Hanya saja karakteristik ini dipastikan tak dapat tum jangka panjang, sebab Kota Gorontalo sebagai ibukota inikan memicu migrasi.

liam papan (rumah) sehingga mempercepat laju konversi menjadi kompleks perumahan, peruiagaan Gejala ini limena umum di daerah perkotaan, upaya apapun yang fungsi lahan tidak dapat dibendung. Walaupun ada tungsi lahan melalui Perda, justru akan memicu

M. Amir Arham*

*Penulis, Pengajar Ilmu Ekonomi FEB UNG

lonjakan biaya konstruksi. Saat ini indeks kemahalan konstruksi Kota Gorontalo sudah setara dengan kota-kota besar di Indonesia, sementara tucome perkapita lebih rendah Maka tidak mengherankan harga tanah dan properti di Kota Gorontalo termasuk tinggi, ada banyak ruko dibangun tetapi tidak digunakan.

untuk belanja langsung (modal dan investasi) terbatas. akibatnya kemampuan untuk bermanuver mendesain alokasi anggaran Gorontalo lebih dari separuh untuk belanja tidak langsung (pegawai), belanja daerah untuk menggaji mereka. Padahal alokasi belanja daerah Kota akan menjadi masalah yang krusial bagi pemerintah karena membebani orang yang berharap kelak akan diangkat menjadi pegawai tetap, tentu saja honorer di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo terdapat sekitar 700 tenaga kerjaa di sektor pemerintahan sangat terbatas. Hingga kini tenaga produktif bekerja di sektor pemerintahan, sementara serapan (penerimaan) (industri). Kesempatan kerja yang terbatas akan menggiring angkatan kerja membuka kesempatan kerja relatif terbatas dibandingkan dengan sektor riil penduduk Kota Gorontalo, karena umumnya sektor jasa kemampuannya Loncatan transformasi ekonomi akan menyisakan masalah bagi sebagian kenyataannya sektor industri manufaktur belum (tidak) berkembang proses transformasi, hanya saja tahapan proses transformasi ekonomi di mengenai masa depan. Dalam konteks seperti itu, mendorong percepatan Kota Gorontalo mengalami loncatan ke sektor jasa karena pada tinggi serta menjadikan kota sebagai tempat mewujudkan impian-impian penghidupan yang lebih layak, melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih Kota menjadi daya tarik masyarakat ruval untuk mencari

Idealnya, jika sektor sekunder belum berkembang dengan baik utama untuk menggerakkan perekonomian daerah, terutama untuk baru Kota Gorontalo, mengurangi pegawai honorer merupakan pilihan yang penyediaun barang publik. Situasi ini menjadi beban bagi pemerintahan rasional tapi dipastikan akan menjadi blunder secara politik. Masalah lain yang dihadapi Kota Gorontalo, mininmya sumber-sumber pendapatan masyarakat masih sangat rendah, apalagi Kota Gorontalo presentase kenaikan biaya hidup tertinggi kettga di Indonesia lima tahun terakhir, Daerah (PAD) terhadap total penerimaan masih sangat kecil (tahun Daerah (PAD) terhadap total penerimaan masih sangat kecil (tahun

menjadi tumpuan, sekalipun kenyataannya hampir semua daerah mengalami hal serupa. Transfer pemerintah (Bagi Hasil DAU da realitasnya sebagian besar diperuntukkan untuk gaji pegawai. Di beban APBD Kota Gorontalo kedepannya makin berat, sebab ada varian program gratis yang dijanjikan oleh pasangan MaDu, jika negarive tax, yang biasanya diberlakukan bagi negara (wilayah) pendapatamnya sudah tinggi, namun tetap dilakukan diferensiasi pendapatamnya sudah tinggi, namun tetap dilakukan diferensiasi penerima yang lebih diorientasikan bagi kelompok pra separa wang tidak tepat asart kampanye pada pemilihan walih kartu sehat untuk berobat gratis di puskemas dan rumah sakit bagi pasangan MaDu, jika program ini direalisasikan akan bera terhadap sumber pendapatan daerah.

Menghadapi sinasi jebakan anggaran dibutuhkan terobosa dengan melakukan efisiensi melalui pengurangan perjalanan pembatasan kuota bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas, ref birokrasi dengan berpijak pada prinsip kaya fungsi miskin st Disamping menyisir potensi-potensi pajak yang selama ini belum terjuga termasuk memberdayakan aset-aset daerah agar produktif. Ada t gedung dan bekas perkantoran dinas yang tidak termantaatkan, sela justru membutuhkan biaya perawatan, aset-aset itu dapat disewakan menambah sumber pendapatan.

pasangan MaDu selama lima tahun kedepan ini akan menjadi beban ekonomi yang cukup berat untuk dipanggul diversifikasi usaha tidak berjalan sehingga daya saing melemah. Sung wirausahawan potensial di Gorontalo pada akhirnya disorientasi ka tergoda dengan kekuasaan dunia politik. Jika sudah berada di dunia pe kemampuan melakukan inovasi produk tidak tumbuh, termasuk didalan ritel (super market) hampir keseluruhannya milik pendatang. Ada ba usaha-usaha lainnya seperti perbengkelan dan rumah makan, apalagi produsennya lebih banyak dikuasai oleh etnis Tionghoa, demikian mentalitas juga perlu diperkuat, produk UMKM seperti kue pia j digunakan untuk konsumsi. Tak kalah pentingnya spirit kewirausahaan oleh masyarakat yang bersifat stimulan dari pemerintah justru dapat berjalan dengan baik. Kenyataannya bantuan yang kerap dit point, tapi membutuhkan kecermatan bagi pemerintah agar progra bantuan modal usaha bagi berkembangnya UMKM merupakan s UMKM menjadi prioritas. Program pasangan MaDu dengan memb masyarakat, di tengah minimnya investasi masuk ke Gorontalo Sementara yang berkaitan dengan pemberdayaan ek

lo Post, Kamis 5 Juni 2014

Sinergitas UNG dan Pemkot Gorontalo Dibutuhkan tantangan berat, karena itu dalam periode kepemimpinan Walikota-Wakil

l'enulis, Pengajar Ilmu Ekonomi FEB UNG M. Amir Arham*

nya apapun yang dilakukan alih fungsi lahan tidak dapat dibendung. luh memberikan kompensasi bila masyarakat hendak menjual atau CAFA umum karakteristik perekonomian wilayah perkotaan hampir persawahan merupakan milik pribadi (private right), tidak ada w perniagaan. Gejala ini merupakan fenomena umum di daerah uu mempercepat laju konversi lahan produktif menjadi kompleks sebagai ibukota provinsi, sekaligus berfungsi sebagai pusat overti, sekalipun ada pembatasan alih fungsi lahan, seperti wilnyah perkotaan akan mendorong kenaikan permintaan papan n persawahan sulit untuk dipertahankanuntuk jangka panjang, sebab wih potensial. Hanya saja karakteristik Kota Gorontalo yang masih nukun perekonomian didominasi oleh sektor sekunder dan tersier. serta pusat jasa dan perdagangan akan memicu migrasi. Migrasi Gorontalo memiliki kekhasan tersendiri, karena sektor primer

potensi pasar dan modal untuk menggerakkan perekonomian nija di sektor jasa, sementara Kota Gorontalo amat bergantung iiiniimnya penduduk yang bergeser ke daerah penyanggah werun penduduk Kota Gorontalo perlu dijaga, karena mereka արաքող Bonc Bone Bolango) dan Telaga (Kabupaten Gorontalo). un lima tahun terakhir, setelah Kota Puwokerto dan Kota mya sebagian penduduk kota akan bergeser ke wilayah pinggiran undisi ini akan menguntungkan wilayah pinggiran, seperti Kabija II potensi pengembangan ekonomi yang berefek pada penerimaan sementara pendapatan per kapita masyarakat tergolong masih lorontalo presentase kenaikan biaya hidup tertinggi ketiga di lun konstruksi Kota Gorontalo sudah setara dengan kota-kota besar buhan penduduk sebagai dampak dari migrasi dan mortalitas m sisi jika pembatasan alih fungsi lahan dilakukan pemeruntah dun secara administratif di luar wilayah. Dengan sendirinya kota memicu lonjakan biaya konstruksi di Kota Gorontalo. Saat ini

Gorontalo mengalami loncatan ke sektor jasa, itupun sektor jasa nya Jasa pemerintah masih mendominasi. Ini merupakan arapannya sektor industri tumbuh, hanya saja proses transformasi ılı pasti tidak dapat lagi diandalkan sebagai kontributor utama ser ke sektor sekunder (industri manufaktur) dan kurang lebih un perekonomian didominasi oleh sektor primer (pertanian), ng dikembangkan oleh Chenery dan Syrquin (1975), bahwa pada ditarik dalam ranah teori perubahan struktur ekonomi sterpun (jasa) berkembang. Artinya, bahwa sektor primer

alo Post, Kamis 12 September 2014

jasa-jasa tertinggi. kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor basis ini perlu dioptimalkan, karena peluangnya cukup besar, terutama melayani mengoptimalkan sektor jasa-jasa, sebab PDRB Kota Gorontalo peranan sektor Walikota Gorontalo saat ini perlu dilakuan reformulasi perekonomian dengan kawasan Teluk Tomini dan wilayah perbatasan utara dan selatan.

nilai dan dapat dikembangkan menjadi ornamen hiburan. Gorontalo dan UNG dapat bersinergi dan sejalan, budaya Gorontalo sarat dengan Gorontalo (UNG) sebagai universistas berbudaya. Pada titik inilah antara Kota saja keinginan luhur ini sejalan dengan visi jangka panjang Universitas Negeri budaya. Revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal mutlak dilakukan, dan tentu parawisata yang dapat diandalkan di Kota Gorontalo, terutama berdimensi sebaliknya daerah yang bergantung bantuan pusat rentang dengan krisis. Sektor daerah yang tidak terlalu bergantung transfer dari pusat tetap stabil, dan mandiri dalam pembiayaan. Jika terjadi turbulance ekonomi di tingkat nasional. restoran berkembung. Dana Alokasi Umumnya (DAU) rendah sehingga lebih Pada umumnya daerah dimana sektor jasa-jasa dan perdagangan, hotel dan parawisata merupakan penerimaan sepenuhnya bagi sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, disamping penerimaan di sektor jasa kabupaten kota) yang tidak dibagihasilkan dengan pemerintahan di tingkat atas. Sektor jasa parawisata patut dipertimbangkan dijadikan undalan, sebab daerah otonom

Pemerintah Kota Gorontalo perlu didukung. entrepreneurship perlu didorong dan difasilitasi, seperti bantuan permodalan perubahan pola pikir masyarakat Gorontalo perlu dirubah orientasinya. Budaya ABC (Arab, Bugis dan China). Ini sangat erat kaitannya dengan mentalitas, grafis) termasuk perizinan usaha gratis sebagaimana yang dicanangkan ekonomi, terutama sektor ritel didominasi oleh masyarakat Gorontalo dari suku spirit *entrepreneurship* bagi masyarakat Kota Gorontalo. Pada realitasnya pelaku Kecil dan Menengah (UMKM) jelas diperlukan optimalisasi, serta mendorong Gorontalo, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sektor Usaha. Mikro, Disamping itu, untuk mendorong pengembangan perekonomin di Kota

adalah mengoptimalkan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kecamatun. Sekaligus ditujukan untuk menata kawasan perekonomian Ekonomi Kecamatan (KEK) merupakan langkah tepat. Konsep dasar dari KEK China dan Gorontalo). Selain itu, pengembangan ekonomi Kota Gorontalo yang didasarkan pada sistem "chustertng" melalui program pengembangan Kawasan dari suku ABC akan tetapi bergeser atau bertambah menjadi ABCG (Arab, Bugis, sehingga dalam jangka panjang pelaku ekonomi di Kota Gorontalo, bukan hanya program pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat Kota Gorontalo, UNG melalui Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) bisu disinergikan dengan Pembinaan generasi muda (mahasiswa), terutama yang dilakukan oleh

Itupun sangat kompetitif kedepaa, karena penerimaan CPNS makin ketat, seperti (Pegawai Negeri Sipil), sementara formasi penerimaan PNS cukup terbatas. masyarakat setelah menempuh pendidikan akan bekerja pada sektor pemerintah ekonomi) masih sangat rendah, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya mentalitas dan pola pikir. Masih mendominasi dalam pola pikir Selanjutnya, daya saing Kota Gorontalo (menyangkut SDM dan

> untuk program internasionalisasi siswa/mahasiswa masyarakat Kota Gor umumnya lulusan dari luar daerah yang terakomodasi. Oleh k pengembangan SDM yang berdaya saing dan unggul sangat layak yang dialami oleh Universitas Negeri Gorontalo dua tahun terai "penyemaian" bibit SDM unggul melalui pembinaan secara dini (tingk

sangat berdampak terhadap pembiayaan. Oleh karena itu proporsi belan honorer di Pemerintah Kota Gorontalo mencapai sekitar ribuan orang. menarik minat melalui proses seleksi tenaga honorer, hingga saat ini Minimnya serapan tenaga kerja di sektor swasta harapannya menja Kota Gorontalo kurang ditopang oleh sektor produktif (industri mani perguruan tinggi luar negeri. Sementara daya saing ekonomi (1 penting disini, sebab UNG sudah melakukan rintisan kerjasuma pelakunya) juga lemah ini terjadi bukan penyebab tunggal karena perel bebas, Kerjasama antara Pemerintah Kota Gorontalo dengan UNG SDM unggul dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) c penguatan bahasa asing ofeh pusat bahasa UNG. Muaranya adalah mer berdasarkan bidang kepakaran, selanjutnya ditingkat kelas III akan dengan menggunakan tenaga pengajar dari Universitas Negeri (Pembinaan SDM unggul harus dimulai ditingkat kelas II SI

dan Gorontalo Utara dan kategori rendah Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo eukup baik, dari enam kabupaten/kota di Gorontalo Kota Gor kapasitas fiskalnya tinggi, sedangkan kategori sedang adalah Boalemo, Poh Gorontalo dibandingkan dengan daerah otonom (kabupaten) yang s tabu, namun perlu ada batasan rasio. Secara umum kemampuan keuangai besar daripada penerimaan (revenue), walau pada dasamya defisit bukan h Gorontalo saat ini adalah defisit APBD, sebab pengeluaran (expenditure berkualitas. Disamping itu, masalah yang dihadapi oleh Pemerintah penggunaan anggaran daerah yang tepat seharusnya bisa menjadi multiplic yang dapat menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi lebih posit Gorontalo cukup terbatas, terutama untuk membiaya sektor publik. Is langsung (belanja pegawai) dalam APBD Kota Gorontalo mencapai 65%. Tingginya belanja pegawai mengakibatkan ruang fiska-

terwujud. kerjasama itu dapat terwujud bergantung kedua belah pihak, semoga ini d Gorontalo yang sudah lebih maju dari sistem layanan berbasis ICT. tetapi butuh bantuan dari perguruan tinggi, terutama Universitas Ne SDM-nya tidak mungkin akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo Pengembangan Cyber City, terutama untuk membangun sistem, jaringan berbasis ICT akan menciptakan efisiensi dan memudahkan sistem ko dengan mengembangan Cyber City cukup mendesak. Sistem pelayanan penyalahgunaan wewenang bagi aparatur, sehingga akan mengurangi b manajemen pengeluaran. Pengelolaan kenangan daerah dan sistem pelayan Kota Gorontalo penggunaan Information, Communication and Technology demikian ada yang salah, perlu dilakukan pembenahan dengan serius lima Gorontalo menghadapi masalah yang krusial menyangkut anggaran, d kedepan, dengan mengoptimalkan penerimaan daerah Kendati termasuk kategori kapasitas fiskalnya tinggi, namun

Mengapa Ribut Mengenai Pengalihan Subsidi BBM?

*Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

ong oleh pemerintah dalam rangka menggerakkan roda perekonomian. iliuaran, penjelasan sederhanya banyak program kegiatan pembangunan yang anggaran berubah menjadi performace budgeting, pilihannya ada dua surplus # iiu anggaran defisit by design, tentu saja ada batas toleransi dan rasionya ikan tiskal ekspansif. Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan defisit. Umumnya negara yang masih belum steady state desain kebijakan dhuaran (anggaran berimbang), mulai tahun anggaran 1999 Janut traditional budgeting dimana penerimaan sama besarnya dengan what defisit? Secara teoritik deretan pertanyaan ini Jawabannya cukup setinggi-tingginya dengan menganut anggaran defisit, ini yang disebut pemerintah memberikan stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi anggaran yang dijalankan pemerintah saat ini setelah krisis tidak lagi ing. namun saya akan mencoba menjawab secara sederhana. Rezim hunpa APBN defisit, berapa defisitnya. dan apa betul subsidi BBM

eluar rumah mencari natkah tinggal menunggu hasil panen. iyu kepala keluarga yang memiliki lahan yang digarap orang lain, jurkan kegiatan ekonomi berjalan apa adanya, tidak perlu berbuat apa-apa delisit menurun sebesar 2,32% dari PDB ekuivalen dengan Rp. nilai PDB atau setara dengan Rp. 251,7 triliun. Sedangkan tahun anggaran litetupkan pemerintah sebesar 2 %. Tahun anggaran 2014 defisit sebesar 2,4 ır 3 % dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Selama ini rata-rata defisit ldealnya memang anggaran "zero deficit", akan tetapi itu sama halnya

jah, dan kuota BBM bersubsidi pasti akan jebol. lentu permintaan BBM meningkat pula, itu artinya impor BBM akan juga ten otomotif bersifat komplementer, penjualan otomotif meningkat sudah an berjalan karena industri otomotif tumbuh sekitar 7 %. Impor BBM dan perdagangan (impor lebih besar daripada ekspor), dan kemungkinannya il dan barang elektronik merupakan penyumbang dominan menciptakan lahun, subsidi BBM hanya salah satu faktor pendorong defisit dari sekian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjadi faktor. Akan tetapi beberapa tahun terakhir impor BBM, komponen

in BBM dalam negeri mencapai 1,25 juta barrel per hari, ini berarti an minyak. Jawabannya Indonesia bukan lagi net ekspor akan tetapi mupu Indonesia mengimpor BBM? Bukankah selama ini kita punya plisit 608.000 barel per hari. Berapa Subsidi BBM 2015 dan Mengapa kilang dalam negeri hanya sekitar 649.000 barrel per hari. Sementara enjadi net impor, lifting minyak (produksi minyak) Indonesia yang dapat

PHN 2015, anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji pada hesar Rp. 276 triliun, atau meningkat dibandingkan dengan APBN-

> yang bisa dihemat Rp. 138 triliun untuk dialokasikan ke sektor produktif. Dana per liter, dengan kuota BBM tahun depan 46 juta kiloliter (KL), maka anggaran Kalkulasi sederhana saja, jika harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar Rp. 3.000 luas dapat memicu terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. riset yang dilakukan oleh Nugraheni dan Priyarsono (2012), infrastruktur secara Belanja energi ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan belanja infrastruktur hanya sebesar Rp. 169 trihun. Padahal infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing ekonomi Indonesia rendah Perubahan 2014 yang sebesar Rp. 246,5 triliun. Anggaran subsidi meliputi BBM sebesar Rp. 194,2 triliun dengan kuota 46 juta kilo liter (KL). Di dalamnya ada karena dipengaruhi laktor ketersediaan infrastruktur yang belum memadai. Hasil Premium 29.5 juta KL. solar 15.6 juta KI., dan minyak tanah 850 ribu KI.

sedahsyat manakala harga minyak dunia sudah terlanjut naik, lalu harga BBM dunia. Dampak kenaikan harga BBM (pengalihan subsidi BBM) relatif tidak ini, karena momentumnya cukup bagus seiring dengan turunnya harga minyak setiap tahun. Sembari saya tentunya mendukung pengalihan subbsidi BBM saat ganti belum ada yang berani melakukan koreksi yang tidak menyehatkan APBN besar, saya seluju. Ini perlu dikoreksi semua pihak, karena rezim sudah bergantikarena memang APBN juga dibebani oleh pembayaran dana obligasi yang cukup Ada anggapan dengan mengurangi subsidi BBM (energi), pemerintah tidak adil dan pro pasar dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Tergantung melihatnya, dapat dimanfaatkan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. sebanyak itu seperempamya nilai APBD sebagian besar kabupaten/kota, yang kabupaten kota se-Indonesia, masing-masing akan kebagian Rp. 275 miliar. Uang sebesar itu, pemerintah bisa di daerahkan (transfer) dengan dibagi rata kesuluruh

pernah terjadi, harga akan selalu fluktuatif, bahkan cenderung naik terus sifatnya long run, tapi secara empiris peristiwa yang demikian jarang atau tidak ekonomi dunia. Harga BBM bersubsidi bisa turun jika harga minyak dunia turun sekitar 70 dollar per barel, dan dipastikan akan naik seiring kondisi makro maka penurunan harga BBM bersubsidi sulit terjadi, saat ini harga minyak dunia BBM lebih bergantung pada ICP (Indonesian Crude Price), kalau harga fluktuatif mengkompensasi besarnya subsidi yang didanai oleh APBN. Disamping itu harga atau harga keekonomian dengan harga jual BBM bersubsidi masih besat, sekitar Saat ini harga minyak dunia turun sekitar 5 %, namun selisih harga minyak dunia Penurunannya kurang elastis, tidak terlalu signifikan untuk

pemerintah kemudian diolah jadi BBM lalu dijual sesuai dengan harga yang BBM. Hasil penjualan BBM Kilang dan pertamina membeli crude milik dan masuk ke APBN, selanjutnya akan dikeluarkan termasuk membiayai subsidi dicatat sebagai penerimaan. Hasil penjualan crude menjadi penerimaan negara market price maka negara menerima sesuai harga pasar crude yang berlaku dan dan metode kedua adalah uplift cost. Jika metode pertama yang digunakan, yakni mengenai subsidi BBM. Metode pertama pendekatan market price (harga pasar) kita menggunakan metode perhitungan yang mana?. Ada dua metode perhitungan Ada yang mengatakan subsidi BBM itu bohong, hanya akal-akalan. Tergantung

> Metode perhitungan milah yang digunakan beberapa r menganggap subsidi itu bohong dan akal-akalan. crude yang diolah oleh kilang dan Pertamina langsung diji marjin. Jika metode kedua yang digunakan tentu saja tidak p dimana harga BBM - biaya tambang + kilang + transporta akan ikut melonjak. Sementara metode perhitungan uplift ; ditelapkan. Karena itu manakala harga minyak dunia melonja

BBM murah, namun di luar negeri lebih mahal sehingga negeri dan huar negeri, jika menggunakan uplift cost kem mentah (minyak mentah). Sekaligus untuk menjaga disparit yang dimiliki Pertamiana, bahkan akan jauh lebih menguntur ke rakyat. Hanya saja tidak semua crude di dalam negeri dapa secara prinsip penerimaan negara tadak ada karena langsung barel per han. Manakala menggunakan metode perhitun yang dihasilkan dalam negeri yang saat ini jumlahnya hanya price), karena metode uplift cost hanya dapat dilakukan untuk Mungkin kita akan bertanya kenapa menggunakan metode

Subsidi BBM Bukan Persoalan Defisit Semata.

Bahwa ada unsur korupsi (moral hazard, iya), maka itu bagianny pendidikan dan seterusnya tidak dapat dimanfaatkan secara bebas oleh berhak akan terbatasi mengakses, seperti biaya perlindungan akalnya ketimbang yang menghalangi. Kalau subsidi ke orang, maka dan menghalangi sulit dilakukan, karena yang dihalangi lebi karena semua pihak (orang) bisa mendapatkan dengan leluasa. bukan pada barang akan tetapi pada orang, kenapa kalau baran unit kendaraan sangat tidak adil diberikan bantuan. Subsidi yang Bahasa sederhananya orang yang berkelebihan, apalagi kalau pendapatannya bukan lagi diprioritaskan untuk burang normal karena yang punya mobil berarti memiliki pendapatan yang me dengan bantuan, maka sewajarnya yang disubsidi bukan yang p (mobil), apalagi kalau mobilnya sampai tiga unit. Teorinya, subyang paling banyak menikmati subsidi justru yang memilik pada rezim yang berkuasa). Kenapa subsidi BBM perlu dikura bagi mereka, karena itu perlunya diberikan kompensasi (carany pengurangan subsidi BBM akan memberikan efek ekonomi (berdampak terhadap kenaikan angka kemiskinan. Dampak yang Megawati, SBY semna pernah mengurangi subsidi BBM, n kepikiran mengurangi subsidi BBM, itu hopotesa saya. Soeha akan mendukung. Siapa pun presidennya, apapun partainy di luar barisan kekuasaan akan menolak, sebaliknya jika dal-BBM, itu bergantung pada kesempatan berkuasa. Kecenderungan Ada partai yang menolak dan tidak konsisten mengenai pengu

Ontalo Post, Selasa 14 November 2014

Output Ekonomi Gorontalo Tinggi, Kemiskinan Juga Tinggi

Muh. Amir Arham* Penulis, Ekonom Kementerian Keuangan, Dosen FEB UNG

persen, bahkan diprediksi tahun fiskal 2015 pertumbuhannya wii 8 persen. Itu artinya pertumbuhan ekonomi Gorontalo di atas ional. Hanya saja pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum perbaikan kinerja perekonomian laimya, terutama mengatasi wii perbaikan kinerja perekonomian laimya, terutama mengatasi wii, tetapi penurunannya sangat melambat. Pada tingkat regional ka kemiskinan Gorontalo paling besar, yakni 17 % dan secara juga perlu dicermati secara serius, sekaligus dapat dijadikan perbaikan perekonomian Gorontalo terhadap wiih sangat kecil.

🛮 leradi namun perluasan tidak berjalan beriringan. Pada tingkat baru ekonomi diluar koridor Pulau Jawa, tapi realisasinya, Musterplan Percepatan dan Perhuasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) Program ini diharapkan mendorong pusat-pusat remerintah untuk mengoreksi ketimpangan tersebut, contohnya liip pembentukan PDB. Meskipun cukup beragam kebijakan yang liil kontribusi perekonomian wilayah Jawa masih tetap dominan npu pada komoditas pertaman (jagung). 2) Masalah disparitas. ш игиз neraca perdagangan. Sementara kinerja ekspor Gorontalo llinipaknya terhadap kinerja ekspor akan melambat. Pada saat yang hyper Indonesia, selain ditopang sektor manufaktur, juga ditopang umbah tujuan pasar ekspor komoditas juga masih mengandalkan permintaan barang/produk luar negeri meningkat, akhirnya permintaan domestik terhadap komoditas andalan melemah, wonal", bilamana tujuan pasar komoditas mengalami goncangan шрш regional Gorontalo belum mampu menjawab dua persoalan lvugan denukian pertumbuhan ekonomi yang tinggi baik secara Sumatera sekitar 22 % dan wilayah timur Indonesia di bawah komoditas pertanian, namun sektor ini nilai tambalunya sangat dihadapi perekonomiaan saat ini, yakni 1) Masalah struktural

regional Gorontalo, ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dari gini ratio sebesar 0,43 lebih tinggi dari gini ratio nasional 0,41. Ini indikasi bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi.

Fika dilihat struktur perekonomian Gorontalo, kontribusi sektor sekitar 30 %, sektor industri masih kecil sebanyak 5 %. Padahal selama bahwa jika perekonomian hendak lebih maju, maka diperlukan perubahan struktur ekonomi, sebab produk pertanian pada umumnya belum Oleh karenanya, pangsa relatif sektor primer (pertanian) diharapkan makin dan tersier. Namun sektor pertanian tidak boleh ditinggalkan sama sekali, sektor sekunder:

Rendalmya nilai tambah produk pertanian, tetapi berkontribusi atau elastisitasnya terhadap kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja sangat kecil. Selama tahun fiskal 2014 penduduk miskin perkotaan mengalami Penurunan dari 6,60 pada awal tahun menurun menjadi 6,24 % diakhir tahun Namun jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami kenaikan dari 23,10 % menjadi 23,21 %. Ini artinya bersifat kontradiktif, sektor pertanian berkontribusi besar terhadap perekonomian Gorontalo tetapi penduduk miskin di pedesaan meningkat.

Dilihat dari sisi permintaan, sektor swasta (investasi) terbatas, sebaliknya konsumsi rumah tangga porsinya paling besar. Penyaluran (porsi) sekitar Rp. 550 miliar (7 %) untuk investasi selebihnya belanja modal (25 %) sekitar Rp. 550 miliar (7 %) untuk investasi selebihnya belanja modal (25 %) dan konsumsi (68 %). Menurut Lampert (1994) untuk mencapai top performers pembangunan ekonomi dibutuhkan investasi yang diperankan oleh swasta dan didukung oleh public expenditure dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mereduksi angka kemiskinan.

Perlunya Perbaikan Struktur Anggaran di Daerah

Di tengah minimnya investasi swasta, pengeluaran pemerintah (government spending) akan dapat memperbaiki persoalan ekonomi secara struktural, sekaligus dapat mengoreksi ketimpangan. Perbaikan struktur alokasi anggaran pemerintah daerah mutlak dilakukan, dengan memperbesar alokasi belanja langsung (pembangunan). Jika mengacu pada postur

anggaran seperti itu, sesungguhnya Gorontalo telah melaku porsi belanja langsung (pembangunan) di atas 50 %. Tapi konc jauh berbeda dengan postur anggaran di tingkat kabupu umunnya porsi anggaran belanja tidak langsung (rutin) masih Perbaikan struktur anggaran pemerintah daerah menjadi kehu tidak dilakukan sama halnya membiarkan kegjatan perekonc dalam kondisi biasa-biasa saja, bahkan sekedarnya sebab Gorontalo masih sangat minim untuk menggerakkan roda ekon

Ada empat program unggulan yang dicanangka pembangunan ulirastruktur dan pengerahangan UMKM dugaan program unggulan yang dicanangka pembangunan ulirastruktur dan pengembangan UMKM dugaan program pendidikan dan kesehatan gratis Provinsi Go menjadi free rider dengan program serupa yang dijalankan pem terus naik. Pertanyaannya, sejauh mana signifikansi pembilakukan berkaitan dengan government spending untuk semenunjukkan kesehatan dan infrastruktur yang kami (LP2EB (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) justru tidak dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan sektor infrastruktur efi remiskinan, sebaliknya pembiayaan sektor infrastruktur efi remiskinan memurunkan angka kemiskinan di Gorontalo.

ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dibutuhkan untuk mendesain program untuk menciptakan per segera dikoreksi imtuk tahun anggaran 2016. Kata kuncinya adah memberdayakan masyarakat Gorontalo secara optimal dalam per proyek yang kurang memiliki efek terhadap perbaikan angka k kegiatan produksi, bukan proyek infrastruktur bersifat mercusua infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur diprioritaskan yang dapat t sektor infrastruktur sangat diperlukan pembenahan dan selek imbasnya terhadap dana bagi hasil. Oleh karenanya, kedepan p NPWP luar Gorontalo, tentu berimplikasi terhadap penerimaan luar Gorontalo. Pada umumnya kontraktor dan pekerja itu me dikerjakan oleh kontraktor dari luar, sebagian tenaga kerjanyapu terbilang besar di Gorontalo baik yang dibiayai oleh APBD mau anggaran dan faktualnya di lapangan Beberapa proyek i menggunakan alat analisis ekonometrika sekaligus juga mempela bukan menggunakan alur pikir common sense, sebab k Temuan ini terbuka untuk diperdebatkan secara akade

Anggaran Dana Desa untuk Pembiayaan Sektor Produktif

M. Amir Arham* Pendis, Ekonom Kementerian Keuangan, Dosen FEB UNG

m desa. Selama puluhan tahun ujung tombak pelayanan juling dapatkan porsi perhatian masalah pembiayaan, pengelolaan dasa sangat bergantung dari dana swadaya masyarakat, mpakan bantuan dari pemerintah daerah baik untuk kegiatan maupun pembangunan. Potensi dan sumber daya desa yang inderung belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa. Mengakibatkan in perdesaan sangat lamban, efeknya lebih lanjut sumber di desa sangat terbatas, sebagian masyarakat desa melakukan perkotaan, namun ada diantara mereka tidak memiliki yang dibutuhkan di daerah perkotaan, akhirnya bekerja di mal, dan yang lainnya bekerja di luar negeri menjadi Tenaga

merintah menyadari bahwa pelayan publik desa selama k diberdayakan secara maksimal, maka muncul kesadaran memaksimalkan pemerintahan desa dalam pelayanan dengan dana untuk menggerakkan pembangunan. Secara normatif pemerintahan desa selama ini dipayungi oleh Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, namun wa tidak terlalu spesifik. Lahirnya UU No.16 Tahun 2014 desa sebagai basis pembangunan. Semangat UU tersebut mai sebagai basis pembangunan. Semangat UU tersebut nai sebagai basis penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam roda pemerintahan, termasuk di dalamnya tata kelola merintah pusat, daerah dan desa. Ketiga level pemerintahan kelangan membutuhkan tata kelola yang baik, dan dipastikan dan menopang satu sama lain, sehingga dari sisi keuangan membutuhkan tata kelola yang baik, dan dipastikan dan pemerintahan tata kelola yang baik, dan dipastikan dan menopang satu sama Desa tersebut.

unsekuensi lahirnya UU Desa dibarengi dengan pembiayaan uk Anggaran Dana Desa (ADD), pemberian ADD mulai uksikan tahun 2014 setiap desa mendapatkan jatah sebesar Rp. ukan meningkat secara bertahap, hingga mencapai sebesar Rp. ubagaimana dijanjikan oleh pemerintahan saat ini. Pemberian ukedar dimaksudkan sebagai pelipur lara, bagi desa yang

tertinggal dan berada di daerah yang tidak memiliki SDA yang melimpah, sebab ADD sebetulnya sudah lama diberikan di beberapa kabupaten yang kaya SDA, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan dana desa Rp. 1 Miliar per desa. ADD diharapkan efektif mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sebab kebanyakan kelompok masyarakat miskin berada di perdesaan.

ADD atau keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara secara keseluruhan, karena itu penggunaannya akan diawasi (diperiksa) oleh lembaga pengawas pemerintah (BPK). Sekalipun nekanisme pertanggungjawabannya berjenjang, dimana penggunaan ADD diakhir tahun disampaikan kepada bupati lewat camat setempat. Setiap rupiah penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, jangan sampai ADD dianggap sebagai bantuan yang tidak memiliki pertanggungjawaban maupun target dan output. ADD menganut prinsip value for money yaitu prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Itu artinya, sebagai bagian dari keuangan negara maka ADD harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, atau untuk memenuhi azas manfaat untuk masyarakat. Jika dilihat jenis transfer, nampak sekilas bahwa ADD berbentuk specific gramt hanya saja pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan desa, sehingga lebih cocok dikategorikan sebagai block gramt.

Prinsip dari block grant adalah pemanfaatannya digunakan untuk kegiatan operasional dan pembangunan (pemberdayaan). Hanya saja pemanfaatan ADD telah diatur sedemikian rupa dimana biaya operasional sebesar 30 % dan biaya untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70 %. Pengaturan ini diperlukan agar ADD tidak dihabiskan untuk belanja operasional pemerintahan desa, sebab terbukti selama ini pada level pemerintahan kabupaten/kota alokasi atau postur anggaran tidak didesain dengan bagus, dan tidak ada pengaturan bahwa belanja pembangunan harus lebih besar daripada belanja rutin. Sehingga kebanyakan postur anggaran kabupaten/kota lebih banyak untuk biaya operasional pemerintahan yang efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat sangat minim.

Adanya ADD menimbulkan konsekuensi bagi aparatur desa itu sendiri, jika selama ini perencanaan, manajemen pengelolaan dana desa serta target pembangunan tidak tersusun secara baik. ADD menuntut adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes strukturnya tidak berbeda jauh dengan APBD, karena itu APBDes merupakan gambaran makro pembangunan selama setahun, di dalamnya tergambar target penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah desa diberikan

kewenangan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD melakukan pungutan sebagai sumber pendapatan. Dik kedeparmya kewenangan ini justru akan membebani masyarak maka penyusunan APBDes harus dirancang secara professio proporsional.

dalamnya, antara lain 1) pembangunan sarana dan prasarana e mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menyang setiap desa. Tapi lebih elok dan efisien bilamana aparatur desa r menggunakan pendamping yang berfungsi sebagai tenaga konsu pengarusutamaan gender, 3) pemberdayaan ekonomi masyarak perdesaan, 2) mengoptimalkan kegiatan pendidikan, kesehat kemampuan sumber daya yang memadai, maka dibutuhkan aparatur desa yang memiliki kemampuar daerah. Dengan melihat berbagai perubahan pengelolaan keuang diperlukan agar terjadi sinergi dan kesinambungan program pemb bermuara pada pengentasan kemiskinan. merancang program. Walau pemanfaatan ADD didesair sendiri mengacu pada RPJP dan RPJMD kabupaten bersangkutar perencanaan dengan menyusun RPJMDes terlebih dahulu, R Penyusunan APBDes tentu saja mengacu pada d terutama

dana sebesar Rp. 280 Juta. Ini sangat menggiurkan bagi pemburu r dipelopori oleh calon kepala desa yang kalah pada pemilihan kepa pengusulan pemekaran sangat erat kaitannya dengan ADD, m 74,094 desa seluruh Indonesia, setiap desa akan mendapatkan I dalam APBN-P 2015 sebesar Rp. 20,76 Triliun yang diperuntukka didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilay ekonomis, karena pembagian ADD yang bersumber dari tidak menutup kemungkinan pengusulan pemekaran desa menurut catatan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kem mainan" baru bagi sebagian politisi petualang yang tergiur masyarakat desa dengan adanya ADD. Saat ini ADD sudah menji % dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Aloka ada sekitar seribuan usulan pemekaran desa. Sudah dapat gelontoran ADD. Pasca dicabutnya moratorium pemekaran di diperhadapkan dengan masalah hukum, atau menjadi sumber koni desa. Bahkan saya memiliki kekuatiran banyak aparatur des faktor geografis. Besaran alokasi anggaran desa dari APBN ditenti kelurahan Januari 2015 lalu, usulan pemekaran desa bermu yang diguyurkan setiap tahun hanya akan menjadi bancakan bagi Usulan pemekaran desa normatifnya tidak terlalu menguntungkar Bila APBDes tidak dirancang dengan baik, boleh jac

undamental Makro Ekonomi (Masih) Kuat, Struktural dan Ketimpangan Bermasala

Muh. Amir Arham* wulis, Ekonom Kementerian Keuangan, Dosen FEB UNG

mil dasar listrik, kenaikan harga gas elpip, pengenaan pajak [[vijak jalan to], n perekonomian AS yang tercermin pada meningkatnya nya tingkat intfasi. Sementara pelemahan rupiah saat ini liya jumlah lapangan pekerjaan baru dan menurunnya jumlah ntase nilai belanja tertentu (ad valorem), serta wacana nu inflasi, harga beras meningkat, penyesuaian harga BBM lunjangan pengangguran. Kendatipun demikian tetap perlu inventories dan membaiknya pasar tenaga kerja dengan mul, pengelolaan sektor finansial serta lembaga keuangan porandakan perekonomian, butuh waktu yang panjang lilonesia punya pengalaman buruk berkaitan dengan un kecemasan banyak pihak, secara psikologis sangat wajar blemahan nilai tukar rupiah dua bulan terakhir 🍿 pelemahan rupiah, merembet pada krisis keuangan yang mlar tukar ruptah terhadap dolar USA. Krisis ekonomi 1997 penyebab dan fundamental ekonomi makro itu sendiri. Jika wiy economy. Hanya saja pelemahan rupiah perlu dilihat dari kaidah prinsip tata kelola yang baik, diikuti dengan laktor eksternal makro ekonomi masih stabil, inflasi masih terjaga tukar menyentuh level ambang batas psikologis tapi 1997 pelemahan rupiah terjadi lebih disebabkan karena dipicu beberapa faktor yang berpotensi juga turut berkontribusi, karena

welmahan rupiah (depresiasi) sesungguhnya dapat positif untuk merangsang ekspor, tapi kinerja ekspor relatif ungembirakan karena kekuatan ekspor bertumpu pada sektor ungembirakan karena kekuatan ekspor bertumpu pada sektor ungembarak mengandung parts yang berasal dari impor, unda saat yang bersamaan menambah biaya impor dan beban muupun pemerintah, menghadapi kewajiban pembayaran negeri. Kecenderungan lundamental makro ekonomi yang dengan pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir yang dengan pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir yang dengan pertumbuhan surplus disatu sisi masih memberikan positif bagi pemerintah, sehingga tidak terlalu menimbulkan

kepanikan. Namun kondisi itu justru tetap akan mendorong permintaan impor, sebab struktur produksi ekonomi serta dilihat sisi permintaan, output ekonomi banyak didorong oleh sektor konsumsi.

kedua sebagai negara tujuan investasi utama di Asia. Commerce dan Survey The Economist: Indonesia berada pada posisi berinvestasi di ASEAN berdasarkan hasil Survey US Chamber of peers emerging markets, bahkan Indonesia merupakan tujuan utama Ditambah tingkat investasi Indonesia relatif lebih tinggi dibanding Rusia. India dan China), pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat stabil Bila dibandingkan dengan negam peers emerging markets (Brazil terbaik, hanya berada di bawah Tiongkok (7,3 %) dan India (5,3 %) menimbulkan optimisme tentang kinerja ekonomi makro. Apalagi jika 5,60 % dan tahun 2014 sebesar 5,02 %). Namun itu sifatnya by design ada trend penurunan (tahun 2012 sebesar 6,00 %, tahun 2013 sebesar pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu negara yang disandingkan karena dianggap overheating, bagi pemerintah itu sendiri cukup Tiga tahun terakhir tingkat output ekonomi tumbuh stabil, tapi diantara negara yang bergabung kedalam

Jika mengacu pada data-data tersebut cukup membuat kita optimistik, tetapi dibalik itu perlu ada catatan yang ditebalkan karena sebagian pandangan melihat kondisi makro ekonomi kontradiktif dengan kenyataan yang ada Fiscal policy paling terang mendapatkan banyak sorotan, seperti rencana ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, meski telah dikeluarkan enam paket kebijakan ekonomi (stimulasi fiskal). Hanya saja paket stimulan dampaknya jangka panjang (long run), sementara problem ekonomi (pelemahan rupiah) saat ini sifatnya short run. Dibalik fundamental ekonomi makro yang stabil juga menyisakan berbagai persoalan yang belum terselesaikan, setiap saat cukup serius mengganggu kinerja perekonomian, terutama dampaknya terhadap pelemahan rupiah, yakni masalah struktural dan disparitas.

Masalah struktural ekonomi sangat dibutuhkan perbaikan, bukan lagi eranya ekspor komoditas yang tujuan pasarnya selalu tertekan dengan goncangan ekonomi negara tujuan pasar. Apalagi harga komoditas strategas Indonesia ditentukan di luar negeri, serta berbagai upaya perlakuan proteksi negara-negara tertentu terhadap komoditas andalan dari Indonesia. Perubahan struktur ekonomi dengan mendorong hilirisasi komoditas maupun hasil SDA segera diimplementasikan sebagai basis penguatan daya saing. Bukan hanya persoalan hilirasasinya, pengolahan hasil tambang dengan membangun smelter sangat penting mempertimbangkan lokasi. Jika proses hilirisasi tetap dikembangkan di wilayah yang telah mengalami "industrialisasi".

justru tidak akan menolong wilayah lain untuk tumbuh. Per smeller di Gresik pengolahan hasil tumbung yang dilakuka menjadi contoh nyatu yang tidak mendukung pengembanga sebab sejatinya keberadaan smeller memberikan dampal yang luas. Pola pengembangan industri semacam ini jus memperbesar disparitas, padahal jika berbicara spasial um panjang berdasarkan skenario perkembangan ekonor kedepan wilayah timur menjadi outlet ekonomi di kaw Pasifik. Dengan sendirinya hasil pengolahan tambang sumber bahan bakunya dari timur selayaknya juga dike disana. Bukan hanya sekedar memikirkan efisiensi semata a membutuhkan komitmen menyeimbangkan pembangun wilayah.

wilayah KTI untuk memberikan ruang fiskal yang lebih b perbaikan struktur anggaran bagi pemerintah daerah yan berusaha. Selain memperbesar anggaran pemerintah dan kegialan sektor produktif. produksi dan logistik sedapat mungkin ditekan agar lebih k KTI perlu diberikan insentif khusus untuk menarik invest masih berpusar di sektor mining, bersifat capital intensive investasi yang deras?. Investasi yang besar masuk ke wil dari tahun sebelumnya, tetapi apakah ke KTI mendapat utang negara dan SBI tahun 2014 peningkatannya cukup menggembirakan tidak serta memperbaiki kondisi perekor kuat di Jawa dan sekitarnya. Arus modal dalam bentuk sah wilayah timur, sebab arus modal masuk ke Indonesia bias Sekahpun myestası perkembangannya

Secara konsepsional dalam RPJMN peluang medisparitas wilayah terbuka lebar karena sudah menjadi hagiar pemerintahan yang tercakup didalam tiga dimensi pembangun dimensi pemerataan dan kewilayahan. Waktulah yar membuktikan komitmen itu apakah akan berjalan efektif at tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya? ketimpangan distribusi pendapatan terbilang masih ting ditunjukkan dengan indeks gini sebesar 0,41 yang dit menurun sampai 0,36 tahun 2019. Secara spasial ke perekonomian wilayah Jawa dan Sumatera mencapai 80 % hanya sekitar 20 %. Merubah prosentase itu tidak mungkin d secara gradual tapi diperlukan lompatan dengan investasi yar terutama untuk membangun infrastruktur dasar agar wilayah Kompetitif memasuki pereaturan ekonomi global.

ntalo Post, Rabu, 1 April 2015

BAGAIMANA DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUSAHA MUDA DI KTI?

Oleh: M. Amier Arham*

*Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo



Kemajuan sutau bangsa sedikitnya amat ditentukan oleh faktor demografi, meski Kuntjoro-Jakti (2012) menyebutkan bahwa ada tiga unsur besar penentu nasib bangsa-bangsa kedepan, yakni geografi, demografi dan sejarah bangsa. Namun pada hemat saya faktor demografi (penduduk) relatif sangat penting mendorong kemajuan, dengan catatan penduduk dimaksudkan memiliki produktifitas yang tinggi. Struktur demografi dengan usia produktif yang besar memberikan keleluasaan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) sebagai modal. Modal manusia (human capital) merupakan variabel penentu kemajuan ekonomi. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa human capital melalui koefisien teknologi berkontribusi besar mendorong pertumbuhan ekonomi (Romer, 2006).

Struktur piramida penduduk Indonesia nampak usia produktif cenderung besar, karena itu merupakan potensi bagi bangsa Indonesia, namun pada saat yang bersamaan menjadi ancaman sebab akan dijadikan tujuan pasar negara lain. Pada perspektif itu dibutuhkan kemampuan produksi nasional untuk menghasilkan berbagai komoditi yang dibutuhkan oleh penduduk Indonesia secara umum. Maka dari itu keberadaan pelaku ekonomi (entrepreneur) menjadi penting dan strategis, yang dapat mengisi peluang tersebut tentu saja penduduk usia produktif dalam hal ini generasi muda (pengusaha muda) sebagai pionir. Hanya saja rasio pengusaha muda terhadap total jumlah penduduk masih terlalu timpang, diperkirakan hanya 0,18 % jumlah pengusaha muda di Indonesia. Itupun sebagian eksis karena merupakan pelaku usaha generasi kedua dan ketiga penerus kerajaan bisnis keluarga.

Minat wirausaha masih minim dikalangan generasi muda, ditambah lagi kultur masyarakat cenderung terkooptasi dengan frame menjadi pekerja di sektor pemerintahan dianggap lebih safety. Namun patut diakui perkembangan pengusaha muda tetap tumbuh, meski rasio terhadap jumlah penduduk masih kecil, serta belum merata di daerah. Pengusaha muda yang menonjol masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara di daerah terutama di wilayah timur Indonesia masifikasi kemunculan pengusaha muda masih terbatas. Walaupun demikian beberapa diantaranya cukup menonjol secara nasional.

Dalam amatan saya, kemunculan pengusaha muda Indonesia Timur polanya cenderung sama secara nasional, terkonsentrasi di wilayah tertentu saja, seperti Makassar dan beberapa kota-kota di Kalimantan. Makassar sebagai pintu gerbang KTI perekonomiannya cukup menonjol serta jumlah penduduknya relatif lebih besar

dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia Timur menjadi daya tarik. Sektor jasa dan industri tumbuh memadai, demand begitu besar sehingga mendorong munculnya pelaku-pelaku usaha baru (pengusaha muda). Sementara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, pengusaha muda banyak lahir terutama yang bergerak di sektor industri pertambangan. Karakteristik usaha yang dijalani para pengusaha muda di KTI kebijakan pendukungnya cenderung berada dilevel nasional. Oleh sebab itu masih sulit kita mengukurnya bahwa mereka eksis dan muncul sebagai implikasi kebijakan pemerintah daerah. Hal itu juga tercermin dari masih minimnya investasi swasta ke KTI, investasi untuk sektor industri manufaktur lebih banyak untuk pertambangan, sedangkan sektor-sektor tradeable lainnya masih minim.

Menurut hemat saya sebagian pengusaha muda yang muncul di KTI nampak merupakan patron dari elit politik daerah. Pengusaha muda yang muncul dipastikan tidak jauh dari pusaran kekuasaan elit daerah, pengusaha muda dalam arti yang memiliki faktor produksi terbilang kecil dihampir semua provinsi di KTI. Padahal sejatinya, pengusaha muda merupakan pemain penting mengisi ruang kelas menengah, dimana kelompok ini memiliki kemampuan berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian dan memiliki daya tawar dengan pemerintah, artinya pemerintah sangat berkepentingan bahkan bergantung untuk menggerakkan roda

perekonomian, terutama penyerapan tenaga kerja.

Kelas menengah yang tumbuh, jika dipersempit perspektif pemaknaannya, yaitu pengusaha muda tiap tahunnya makin bertambah seiring dengan makin banyaknya pemekaran wilayah di KTI. Namun sebagian dari mereka adalah kelas menengah "parasit" bagi pemerintahan, tidak punya kekuatan melakukan perubahan, apalagi posisi tawar bagi pemerintah daerah, karena ketergantungan secara ekonomi begitu tinggi terhadap pemerintah. Sebagian dari mereka mencari aman, meleburkan diri kedalam partai politik penguasa daerah. Kelas menengah seperti ini tidak dapat diharapkan akan melakukan transformasi sosial.

Istilahnya kelompok yang mengisi kelas menengah tergolong tidak berkualitas, secara ekonomi mereka lemah karena tidak terdorong untuk berwiraswasta secara mandiri. Pengusaha muda "parasit" dalam kiprah politiknya tidak memberikan pengaruh yang terlalu signifikan, apalagi pemikiran baru. Meminjam istilah Revrisond Baswir bahwa ada fenomena yang ganjil dalam kaitan kenaikan kelas menengah di Indonesia. Bersamaan dengan reformasi, yaitu sistem multipartai, kita memiliki banyak kelompok yang berkemampuan ekonomi yang masuk partai politik. Akan tetapi, sayang sekali mereka sebagai kelas menengah tak menawarkan perubahan. Di kelompok itu juga cenderung tidak muncul wirausaha yang baru dan tangguh.

Jika merujuk perdefinisi kelas menengah sebagaimana yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, kelas menengah adalah mereka yang karena pendidikan dan kualifikasi teknisnya dapat menjual tenaga serta pikirannya untuk mencari penghidupan yang hasilnya secara materi dan budaya jauh di atas dari masyarakat biasa. Sementara dalam perspektif ekonomi, kelas menengah acuannya adalah penghasilan dan pengeluaran yang relatif tinggi. Dengan bertambahnya kelas menengah yang diharapkan meningkatkan konsumsinya untuk menggerakkan perekonomian karena pendapatannya lebih tinggi dari masyarakat biasa. Tidak itu saja mereka juga diharapkan memiliki peran sebagai agen perubahan.

Dukungan Pemda Terhadap Pengusaha Muda

Secara umum dukungan pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota di KTI agak sulit kita menilainya secara komprehensif. Tapi secara parsial beberapa daerah yang dapat saya amati pola hubungan kausalitas antara pengusaha muda dan pemerintah daerahnya, hubungan mereka bukan antara pengusaha dan pemerintah daerah yang saling menopang secara kelembagaan, justru tampak bersimbiosis mutualisme untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Wilayah-wilayah yang menjadi tujuan investasi, dimana sektor industri dan sektor jasa tumbuh, dukungan pemerintah daerah normatif saja. Tata kelola pemerintahan dan daya tarik investasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah masih sangat rendah, sebagian masih sebatas *lips service* semata tentang pelayanan publik yang efisien dan efektif. Terlebih selama pelaksanaan otonomi daerah pelaku usaha cenderung dijadikan sapi perah, masih sangat sedikit pemerintah daerah membuat kebijakan yang pro bisnis, atau menciptakan kondisi lahirnya pelaku-pelaku usaha baru (pengusaha muda).

Di tengah minimnya dukungan pemerintah daerah untuk melahirkan usahawan muda di KTI, mengakibatkan jumlah pengusaha muda terbatas. Walau demikian beberapa pengusaha muda yang menonjol di level nasional, seperti Sandiaga Uno, Erwin Aksa dan Okto Raja Sapta ketiganya pernah (sedang) menjadi Ketua Umum HIPMI secara periodik berurutan. Para pionir pengusaha muda ini sangat agresif mengembangkan usahanya, mereka berpendidikan barat dan ditempa dengan pengetahuan praktis di luar negeri. Eksistensi mereka cukup berpengaruh, memiliki resonansi yang kuat dalam kegiatan dunia usaha di Indonesia. Mereka memberikan warna tersendiri, terbangun citra positif ditingkat nasional, sehingga memberikan

gambaran bahwa pengusaha muda Indonesia Timur cukup menggeliat.

Akan tetapi perlu dicatat bahwa pionir pengusaha muda yang eksis ditingkat nasional merupakan pelanjut, atau pemegang estafet bisnis keluarga, terkecuali Sandiaga Uno. Pengalaman dan tempaan yang diberikan dari keluarga disertai sokongan pendidikan yang cukup memadai, perkembangan bisnis keluarga yang dikelola makin meluas ke beberapa sektor setelah berada dikendali mereka. Mungkin contoh yang paling tepat dikemukakan disini generasi penerus kerajaan bisnis keluarga Kalla Group, Bosowa Corporation, OSO Group maupun kelompok-kelompok usaha di daerah yang belum nampak eksis di level nasional. Kalla Group kini dikendalikan generasi ketiga, menguasai berbagai sektor usaha kontraktor, property, hotel, mall, finance dan otomotif yang menyebar di KTI.

Sementara Bosowa Corporation semenjak dikendalikan oleh Erwin Aksa generasi kedua perusahaan keluarga Aksa Machmud terus berekspansi, berbagai sektor dirambahnya. Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja perusahaan Bosowa makin kinclong, head office perusahaan keluarga yang masih bersaudara dengan Kalla Group pindah ke Jakarta, tadinya berbasis di Makassar ibukota Sulawesi Selatan. Bosowa Corporation merupakan dialer utama Mitsubishi di KTI, kini bermetamorfosis menjadi perusahaan konglomerasi diberbagai bidang, seperti semen, taksi, energy, kontraktor, finance, media massa, jalan tol. Boleh jadi Semen Bosowa kedepannya akan menjadi raja semen di Indonesia, karena Semen Bosowa terus meningkatkan kapasitas produksinya dengan membangun pabrik baru di Batam, Cilegon, Banyuwangi dan Sorong.

Tidak jauh berbeda dengan OSO Group, perusahaan ini berbasis di Pontianak bidang usahanya property dan hotel hingga ke Bali. OSO Group sudah beralih generasi ke Okto Raja Sapta (Ketua Umum HIPMI saat ini) yang memulai usaha terbilang sedikit, diantaranya Sandiaga Uno melalui kelompok usaha yang dikembangkan, Saratoga Capital. Itupun bukan dimulai di wilayah timur, tapi berkembang di Jakarta. Sandiaga Uno turunan Gorontalo dianggap piawai melakukan restrukturisasi perusahaan yang tidak sehat. Kepiawainnya membawa mantan Ketua Umum HIPMI ini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia.

Ketiga profile pengusaha muda tersebut kebetulan berasal dari Indonesia Timur merepresentasikan pengusaha muda yang sukses. Meski saya dapat memastikan bahwa pengusaha muda di beberapa kota di wilayah KTI ada beberapa yang sukses, tapi belum terekspose kepermukaan. Mereka sesungguhnya terbilang tidak terlalu bergantung terhadap pemerintah, justru sebaliknya karena secara politik dan ekonomi mereka memiliki kekuatan. Proyek-proyek yang digarap sebagian besar bukan menggunakan dana APBN/APBD, dukungan pemerintah sebatas menciptakan iklim usaha yang kondusif, seperti keamanan, kepastian hukum dan ketenagakerjaan.

Namun tidak dapat dinafikkan ada kecenderungan pengusaha muda dibeberapa provinsi lainnya di KTI lebih bergantung pada proyek pemerintah (kontraktor), dukungan pemerintah daerah biasanya lebih bersifat personal. Pembinaan dan dukungannya lebih bersifat imbal jasa karena biasanya pengusaha muda (kontraktor) menopang pada saat Pilkada. Pola pembinaan yang demikian, serta ketergantungan proyek terhadap pemerintah daerah justru tidak melahirkan pengusaha muda yang

kreatif dan tangguh.

Maka dalam perspektif demikian sangat jelas perbedaan antara kontraktor dan pengusaha. Jika kontraktor amat bergantung dari program (proyek) pemerintah, artinya dia akan melakukan proses produksi musiman, bekerja sekali dalam setahun bahkan faktor produksi yang dimiliki relatif terbatas, seperti capital, land, technology dan entrepreneurship. Sementara pengusaha, ketergantungan terhadap pemerintah relatif kecil, kemampuan melakukan produksi kontinyu yang didukung dengan faktor produksi yang memadai. Baumol dkk (2010) mendefinisikan entrepreneurship yaitu setiap badan usaha, baru atau yang sudah lama berdiri, yang menyediakan produk atau jasa baru atau yang mengembangkan dan menggunakan metode baru untuk memproduksi atau menyebarkan barang dan jasa yang sudah ada dengan biaya yang lebih murah.

Merujuk pada definisi itu maka diyakini pengusaha (entrepeneur) muda secara nasional, apalagi di wilayah Indonesia Timur masih sangat kecil. Dibandingkan dengan Malaysia rasionya sudah di atas 5 %. Padahal pewirausaha ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional maupun secara spasial. Maka dari itu, menurut hemat saya selain dibutuhkan talenta juga diperlukan perubahan pola pikir merombak kultur orientasi, dari pekerja disektor pemerintah menjadi entrepreneur. Disitulah tugas pemerintah memberikan peluang, mengkondisikan lahirnya pengusaha-pengusaha muda. Selama ini pemerintah telah memediasi pelatihan kewirausahaan, tapi yang nampak masih lebih berorientasi program (proyek). Kontinuitas pelatihan dan kelangsungan usaha biasanya tidak berjalan lancar sebab monitoring, serta pembinaan tidak lagi berlanjut karena target proyek (output) telah tercapai, meski outcome yang diharapkan pencapaiannya sangat minim.

Selasa, 15 November 2014

Mengapa Ribut Mengenai Pengalihan Subsidi BBM?

MENGAPA APBN defisit, berapa defisitnya, dan apa betul subsidi BBM penyebah defisit?. Secara teoritik deretan pertanyaan ini Jawabannya cukup panjang, namun saya akan mencoba menjawah secara sederhana. Rezim penganggaran yang dijalankan pemerintah saat ini setelah krisis tidak lagi menganut traditional budgeting dimana penerimaan sama besarnya dengan pengeluaran (anggaran berimbang), mulai tahun anggaran 1999 rezim penganggaran berubah menjadl performace budgeting, pilihannya ada dua mau surplus atau defisit. Umumnya negara yang masih belum steady state desain kebijakan fiskalnya, yaitu berupaya memberikan stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya dengan menganut anggaran defisit. Ini yang disebut kebijakan fiskal ekspansif dengan memperbesar pengeluaran, penjelasan sederhanya banyak program/kegiatan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka menggerakkan roda perekonomian dalam setahun.

Karena itu anggaran defisit by design, tentu saja ada batas toleransi dan rasionya sebesar 3 % dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Selama ini rata-rata defisit yang ditetapkan pemerintah berkisar 2 %. Tahun anggaran 2014 defisit sebesar 2,4 % dari nilai PDB atau setara dengan Rp. 251,7 triliun. Sedangkan tahun anggaran 2015 defisit menurun sebesar 2,32% dari PDB ekulvalen dengan Rp. 257,6 triliun. Idealnya memang anggaran "zero deficit", akan tetapi itu sama halnya membiarkan kegiatan ekonomi berjalan apa adanya, tidak perlu berbuat apa-apa. Ibaratnya kepala keluarga yang memiliki lahan yang digarap orang lain, tidak perlu keluar rumah mencari nafkah tambahan, tinggal menunggu hasil panen. Defisit dalam APBN yang terjadi setiap tahun, dimana subsidi BBM hanya salah satu faktor pendorong terjadinya defisit dari sekian banyak faktor. Hanya saja beberapa tahun terakhir impor BBM, komponen otomotif dan barang elektronik merupakan penyumbang dominan menciptakan defisit perdagangan (impor lebih besar daripada ekspor), dan kemungkinannya terap akan berjalan karena industri otomotif terus tumbuh sekitar 7 %.

Impor BBM dankomponen otomotif bersifat komplementer, penjualan otomotif menlugkat sudah barang tentu permintaan BBM meningkat pula, itu artinya impor BBM akan juga bertambah, dan kuota BBM bersubsidi pasti akan jebol. Lalu kenapa Indonesia mengimpor BBM? Bukankah selama ini kita punya Bukankah selama ini kita punya

Indonesia bukan lagi net ekspor akan tetapi sudah menjadi net impor lifting minyak

Ifting minyak (ptoduksi minyak) Indonesia yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649.000 barrel per hari. Sementara kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,25 juta barrel per hari, ini berarti terjadi defisit 608.000 barel per hari.

Berapa Subsidi BBM 2015 dan Mengapa Ada Subsidi?

Dalam APBN 2015, anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji pada dipatok sebesar Rp. 276 triliun, atau meningkat dibandingkan dengan APBN-Perubahan 2014 yang sebesar Rp. 246,5 triliun. Anggaran subsidi meliputi BBM sebesar Rp. 194,2 triliun dengan kuota 46 juta kilo liter (KL). Di dalamnya ada Premium 29,5 juta KL, solar 15,6 Juta KL, dan minyak tanah 850 ribu KL. Jika dikomparasikan belanja subsidi energi dengan belanja infrastruktur, ternyata subsidi energi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja infrastruktur hanya sebesar Rp. 169 triliun. Padahal infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing ekonomi Indonesia rendah juga karena dipengaruhi faktor ketersediaan infrastruktur yang belum memadai. Hasil riset yang dilakukan oleh Nugraheni dan Priyarsono (2012), infrastruktur secara luas dapat memicu terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektorsektor lain.

Kalkulasi saderhana saja, jika harga BBM bersubsidi dinalkkan sebesar Rp. 3,000 per liter, dengan kuota BBM tahun depan 46 juta kiloliter (KL), maka anggaran yang bisa dihemat Rp. 138 triliun untuk dialokasikan ke sektor produktif. Dana sebesar itu pemerintah bisa mendaerahkan (transfer) dengan membagi rata kesuluruh kabupaten/kota se-Indonesia, masing-masing akan kebagian Rp. 275 miliar. Uang sebanyak itu seperempatnya nilai APBD sebagian besar kabupaten/kota diindonesia, yang depat dimanfeatkan pemba ngunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Ada anggapan dengan mengurangi subsidi BBM (enetgi), pemerintah tidak adii dan pro pasar dan tidak berpihak pada rakyut kecil. Tergantang nielihatnya, karena memang APBN juga dibebani oleh pembayaran utang dan dana rekapitalisasi perbankan yang cukup besar, saya setuju, ini perlu dikoreksi semua pihak, karena rezim sudah berganti-ganti belum ada yang berani melakukan koreksi yang tidak menyebarkan APBN setiap tahun. Sembari saya tentunya

Oleh : M. Amier Arham BBM saat ini, karena momentumnya cukup bagus seiring dengan turunnya harga minyak

dunia. Dampak kenaikan harga BEM (pengalihan subsidi BBM) relatif tidak sedah syat manakala harga minyak dunia sudah terlanjut naik, lalu harga BBM juga dinaikkan.

Saat ini harga minyak dunia turun sekitar 5 %, namun selisih harga minyak dunia atau harga keekonomian dengan harga jual BBM bersubsidi masih besar, sekitar 40 %. Penurunannya kurang elastis, tidak terlalu signifikan untuk mengkompensasi besarnya subsidi yang didanai oleh APBN, Disamping itu harga BBM lebih bergantung pada ICP (Indonesian Crude Price), kalau harga fluktuatif maka penurunan harga BBM bersubsidi sulit terjadi, saat ini harga minyak dunia sekitar 70 dollar per barel, dan dipastikan akan naik seiring kondisi makro ekonomi dunia. Harga BBM bersubsidi bisa turun jika harga minyak dunia turun sifatnya long run, tapi secara empiris peristiwa yang demikian jareng atau tidak pernah terjadi, harga akan selalu fluktuatif, bahkan cenderung naik terus (turunnya kecil, naiknya besar).

Ada yang mengatakan subsidi BBM itu bohong, hanya akai-akalan. Tergantung kita menggunakan metode perhitungan yang mana?. Ada dua metode perhitungan mengenai subsidi BBM. Metode pertama pendekatan market price (harga pasar) dan metode kedua adalah uplift cost. Jika metode pertama yang digunakan, yakni market price maka negara menerima sesuai harga pasar crude yang berlaku dan dicatat sebagai penerimaan. Hasil penjualan crude menjadi penerimaan negara, selanjutnya akan dikeluarkan termasuk membiayai subsidi BBM. Hasil penjualan BBM Kilang dan Pertamina membeli crude milik pemerintah kemudian diolah jadi BBM lalu dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan.

Sementara metode perhitungan uplift cost sederhananya, dimana harga BBM = blaya tambang + kilang + transportasi + penyusutan + marjin. Jika metode kedua yang digunakan tentu saja tidak ada subsidi, karena crude yang diolah oleh kilang dan Pertamina langsung dijuat ke konsumen. Metode perhitungan inilah yang digunakan beberapa ekonom sehingga menganggap subsidi itu bohong dan akal-akalan. Pertanyaamya, kenapa menggunakan metode pertama (market price), karena metode uplift cost hanya dapat dilakukan untuk pengolahan crude yang dihasilkan dalam negeri

549,000 barel per hari. Manakala menggunakan metode perhitungan uplificost, secara prinsip penerimaan negara tadak ada kurena langsung diolah dan dijual kerakyat. Hanya saja tidak semua crude di daiam negeri dapat diolah dikilang yang dimiliki Pertamiana, bahkan akan jauh lebih menguntungkan bila dijual mentah (minyak mentah). Sekaligus untuk menjaga disparitas harga dalam negeri dan luar negeri, jika menggunakan uplift cost kemungkinan lebih BBM murah, namun di luar negeri lebih mahal sehingga akan memicu penyelundupan.

Subsidi BBM Bukan Persoalan Delisit Semata.

Ada partai yang menolak dan tidak konsisten mengenai pengurangan subsidi BBM, itu bergantung pada kesempatan berkuasa. Kecenderungannya jika berada di luar barisan kekuasaan akan menolak, sebaliknya jika dalam kekuasaan akan mendukung. Siapa pun presidennya, apapun partainya pasti akan kepikiran mengurangi (mengalihkan) subsidi BBM, itu hopotesa sava. Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY semua pernah mengurangi subsidi BBM, meski disadari pengurangan subsidi BBM akan memberikan efek ekonomi (inflasi naik), berdampak terhadap kenaikan angka kemiskinan. Damnak yang paling besar bagi mereka, karena itu perlunya diberikan kompensasi (caranya bergantung pada rezim yang berkuasa). Kenapa subsidi BBM perlu dikurangi?, karena yang paling banyak menikmati subsidi justru yang memiliki kendaraan (mobil), apalagi kalau mobilnya sampai tiga unit. Teorinya, subsidi itu sama dengan bannsan, maka sewajarnya yang disubsidi bukan yang punya mobil, karena yang punya mobil berarti memiliki pendapatan yang memadal, dan pendapatannya bukan lagi diprioritaskan untuk barang normal (makanan). Bahasa sederhananya orang yang berkelebihan, apalagi kalau sampai tiga unit kendaraan sangat tidak adil diberikan bantuan. Subsidi yang paling tepat bukan pada barang akan tetapi pada orang, jika barang yang disubsidi semua pihak (orang) bisa mendapatkan dengan leluasa, Membatasi dan menghalangi sulit dilakukan, karena yang dihalangi lebih panjang akalnya ketimbang yang menghalangi. Kalau subsidi ke orang, maka yang tidak berhak akan terbatasi mengakses, seperti biaya perlindungan sosial, biaya pendidikan, kesehatan dan barang-barang publik yang tidak dapat dimanfaatkan secara bebas oleh orang lain. Fada dasarnya bukan mencabut subsidi akan tetap! mengalihkan ke sektor produktif, lalu kenapa harus rebut?.

> Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Selasa, 17 Maret 2015

Output Ekonomi Gorontalo Tinggi, Kemiskinan Juga Tinggi

Lima tahun terakhir ekonomi Provinsi Gorontale tumbuh rata-rata di atas 7 persen, bahkan diprediksi tahun fiskal 2015 pertumbuhannya hisa mencapai 8 persen. Itu artinya pertumbuhan ekonomi Gorontalo di atas rata-rata nasional. Hanya saja pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diikuti dengan perbaikan kinerja perekonomian lainnya, terutama mengatasi masalah kemiskinan. Sekalipun angka kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi penurunannya sangat melambat. Pada tingkat regional Sulawesi, angka kemiskinan Gorontalo paling besar, yakni 17 % dan secara nasional rangking keempat dari bawah. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang tinggi juga perlu dicermati secara serius, sekaligus dapat dijadikan ajang koreksi. Saat ini kontribusi perekonomian Gorontalo terhadap perekonomian nasional hanya sebesat 0,2 %, itu artinya kapasitas ekonomi Gorontalo masih sangat kecil.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi baik secara nasional maupun regional Gorontalo belum mampu menjawah dua persoalan besar yang dihadapi perekonomiaan saat ini, yakni 1) Masalah struktural. Kekuatan ekspor Indonesia, selain ditopang sektor manufaktur, juga ditopang oleh sektor komoditas pertanian. namun sektor ini nilai tambahnya sangat rendah. Ditambah tujuan pasar ekspor komoditas juga masih mengandalkan "pasar tradisonal", bilamana tujuan pasar komoditas mengalami goncangan ekonomi, dampaknya terhadap kinerja ekspor akan melambat. Pada saat yang bersamaan permintaan domestik terhadap komoditas andalan melemah, sebaliknya permintaan barang/produk/uar negeri meningkat, akhirnya mengganggu arus neraca perdagangan. Sementara kinerja ekspor Gorontalo juga bertumpu pada komoditas pertanian (jagung). Masalah disparitas. Secara spasial kontribusi perekonomian wilayah Jawa masih tetap dominan di atas 50 %, Sumatera sekitar 22 % dan wilayah timur Indonesia di bawah 30 % terhadap pembentukan PDB. Meskipun cukup beragam kebhakan

yang ditelukan pemerintah untuk menjoreksi ketimpangan ersebut.

Oleh Muh. Amir Arham

contohnya pogram Masterplan Percepatai dan Perluasan Pembanguna Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pr@ram ini diharapkan mendorong puat-pusat pertumbuhan baru ekonom diluar koridor Pulau Jawa, tapi redsasinya, percepatan terjadi namunerluasan tidak berjalan beriringan. Ada tingkat regional Gorontalo, kempangan distribusi pendapatan ang dlukur dari gini ratio sebesar 03 lebih tinggi dari gini ratio nasional 41. Inl Indikasi bahwa ketimpangan istribusi pendapatan masyarakat (Provinsi Gorontalo masih cukup tggi.

Jika dilihat ruktur perekonomian Gorontalo, koribusi sektor pertanian masih menja kontributur utan pembentukar DRB, yaitu sekitar 30 %, sektor induri masih kecil sebanyak 5 %. Padah selama beberapa puluhan tahuyang lampau Chenery (1975) sudahnengingatkan bahwa jika perekormian hendak lebih maju, maka (perlukan perubahan struktur ekdomi, sebab produk pertanian pda umumnya belum memberikarnilai tambah, serta dampak ekopmi yang ditimbulkan terbatas. Ola karenanya, pangsa relatif sekto primer (pertanian) diharapkan rakin menurun seiring dengan makil meningkatnya pangsa relatif sektorsekunder dan tersier. Namun sekto pertanian tidak boleh diringgalkan ama sekali, justru sektor pertanian daat menjadi penopang bahan bakuuntuk kegiatan sektor sekunder.

Rendahny, nilai tambah produk pertanian, teapi berkontribusi besar dalam pembentukan perekonomian justru kurang memberikan efek, atau elastisitasnya erhadap kemiskinan dan penyerapan unaga kerja sangat kecil. Selama tahun fiskal 2014 penduduk miskin perkotaan mengalami penurunan dari 6,60 pada awal tahun menurun menjadi 6,24 % diakhir tahun. Namun jumlah penduduk miskin di pedésaan mengalami kenaikan dari 23,10 % menjadi 23,21 %. Int artinya barsifat kontradiktif. sektor pertanian berkontribusi besar terhadap perekonomian Gorontalo

tetapi penduduk miskin di pedesaan meningkat. Dilihat dari sisi permintaan, sektor

swasta (Investasi) terbatas, sebaliknya konsumsi tumah tangga porsinya paling besar. Penyaluran (porsi). kredit perbankan di Gorontalo yang mencapai hampir Rp. 7 triliun, hanya sekitar Rp. 550 miliar (7 %) untuk investasi selebihnya belanja modal (25 %) dan konsumsi (68 %). Menurut Lampert (1994) untuk mencapai top performers pembangunan ekonomi dibutuhkan investasi yang diperankan oleh swasta dan didukung oleh public expenditure dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mereduksi angka kemiskinan.

Perlunya Perbaikan Struktur Anggaran, di Daerah Di tengah pengeluaran pemerintah (government spending) akan dapat memperbaiki persoalan ekonomi secara struktural, sekaligus dapat mengoreksi ketimpangan. Perbaikan struktur alokasi anggaran pemerintah daerah mutlak dilakukan, dengan memperbesar alokasi belanja langsung (pembangunan). Jika mengacu pada postur anggaran seperti itu, sesungguhnya Gorontalo telah melakukan perbaikan, porsi belanja langsung (pembangunan) di atas 60 %. Tapl kondisinya masih jauh berbeda dengan postur anggaran di tingkat kabupaten/kota, pada umumnya porsi anggaran belanja tidak langsung (rutin) masih sangat besar. Perbaikan struktur anggaran pemerintah daerah menjadi keharusan, jika itu tidak dilakukan sama halnya membiarkan kegiatan perekonomian berjalan dalam kondisi biasa-biasa saja, bahkan sekedarnya sebab investasi di Gorontalo masih sangat minim untuk menggerakkan roda ekonomi.

Ada empat program unggulan yang dicanangkan pemerintah Provinsi Gorontalo, diantaranya pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur dan pengembangan UMKM. Akan tetapi program ungguian ini perlu dicermati, jangan sampai sekedar slogan. Ada dugaan program pendidikan dan kesebatan gratis Provinsi Gorentalo lustru menjadi free rider dengan

program serupa yang dijalankan pemerintah pusat, Demikian halnya pembiayaan pembangunan infrastruktur kecenderungannya terus naik. Pertanyaannya, sejauh mana signifikansi pembiayaan sektor publik terhadap kemiskinan? Hasil studi yang kami (LP2EB FEB UNG) lakukan berkaitan dengan government spending untuk sektor publik (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) justru tidak seluruhnya menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, sebaliknya pembiayaan sektor infrastruktur efeknya tidak signifikan menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo.

Temuan ini terbuka untuk pikir common sense, sedan kami selain menggunakan alat analisis ekonometrika sekaligus juga mempelajari struktur anggaran dan faktualnya di lapangan. Beberapa proyek infrastruktur terbilang besar di Gorontalo baik yang dibiayai oleh APBD maupun APBN dikerjakan oleh kontraktor dari luar, sebagian tenaga kerjanyapun juga dari luar Gorontaio. Pada umumnya kontraktor dan pekerja itu menggunakan NPWP luar Gorontalo, tentu berimplikasi terhadap penerimaan pajak dan imbasnya terhadap dana bagi hasil. Oleh karenanya, kedepan pembiayaan sektor infrastruktur sangat diperlukan pembenahan dan selektif dengan memberdayakan masyarakat Gorontalo secara optimal dalam pembangunan infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur diprioritaskan yang dapat menunjang kegiatan produksi, bukan proyek infrastruktur bersifat mercusuar. Provek-provek yang kurang memiliki efek terhadap perbaikan angka kemiskinan segera dikoreksi untuk tahun anggaran 2016. Kata kuncinya adalah inovasi dibutuhkan untuk mendesain program uniuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

> Ekanom Kementerian Kevangan, Dosen FEB UNG

Selasa 24 Maret 2015

Anggaran Dana Desa untuk Pembiayaan Sektor Produktif

Hierarki pemerintahan paling ujung (desk front) pelayanan publik adalah pemerintahan desa. Selama puluhan tahun ujung tombak pelayanan ini kurang mendapatkan porsi perhatian masalah pembiayaan, pengelolaan pemerintahan desa sangat bergantung dari dana swadaya masyarakat, sebagian merupakan bantuan dari pemerintah daerah balk untuk kegiatan pelayanan maupun pembangunan. Potensi dan sumber daya desa yang dimiliki cenderung belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meniberikan kesejahteraan masyarakat desa. Mengakibatkan pembangunan perdesaan sangat lamban, efeknya lebih lanjut sumber penghasilan di desa sangat terbatas, sebagian masyarakat desa melakukan migrasi ke perkotaan, namun ada diantara mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di daerah perkotaan. akhirnya bekerja di sektor informal, dan yang lainnya bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia

Pemerintah menyadari bahwa pelayan publik desa selama puluhan tidak diberdayakan secara maksimal, maka muncul kesadaran baru untuk memaksimalkan pemerintahan desa dalam pelayanan dengan memberikan dana untuk menggerakkan pembangunan. Secara normatif pengaturan pemerintahan desa selama ini dipayungi oleh Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, namun pengaturannya tidak terlalu spesifik. Lahimya UU No.16 Tahun 2014 Tentang Desa pertanda pemerintah memiliki perhatian serius untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Semangat UU tersebut harus dimakna: sebagai bentuk penerapan kaldahkaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya tata kelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa. Ketiga level pemerintahan tersebut bertalian dan menopang satu sama lain, sehingga dari sisi pengelolaan kcuangan membutuhkan tata kelola yang baik, dan dipasukan memberikan dampak ekonomi atas pemberian Dana Desa tersebut.

Konsekuensi lahirnya UU Desa dibarengi dengan pembisyaan yang disebut Anggaran Dana Desu (ADD), pemberian ADD mulai diimplementasikan tahun

2014 setiap desa mendapatkan jatah sebesar Rp. 70 juta dan akan meningkat secara bertahap, hingga mencapai sebesar Rp. 1,4 Miliar sebagaimana dijaniikan oleh pemerintahan saat ini. Pemberian ADD tidak sekedar dimaksudkan sebagai peliput lara, bagi desa yang tertinggal dan berada daerah yang tidak memiliki SDA yang melimpah, sebab ADD sebetulnya sudah lama diberikan di beberapa kabupaten yang kaya SDA, seperti Kabupaten Kutal Kartanegara memberikan dana desa Rp. 1 Miliar per desa. ADD diharapkan efektif menderong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sebab kebanyakan kelompok masyarakat miskin berada di perdesaan.

ADD atau keuangan desa pada dasamya merupakan sub sistem dari keuangan negara secara keseluruhan, karena itu penggunaannya akan diawasi (diperiksa) oleh lembaga pengawas pemerintah (BPK). Sekalipun mekanisme pertanggungjawabannya berjenjang, dimana penggunaan ADD diakhir tahun disampaikan kepada bupati lewat camat setempat. Setiap rupiah penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, jangan sampai ADD dianggap sebagai bantuan yang tidak memiliki pertanggungjawaban maupun target dan output. ADD menganut prinsip value for money yaitu prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Itu artinya, sebagai bagian dari keuangan negara maka ADD harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, atau untuk memenuhi azas manfaat untuk masvarakat . Jika dilihat jenis transfer, nampak sekilas bahwa ADD berbentuk specific grant hanya saja pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan dasa, sehingga lebih cocok dikategorikan sebagai biock

Prinsip dari block grant adalah pemanfaatannya digunaken untuk kegiatan operasional dan pembangunan (pemberdayaan). Hanya

Oleh Muh. Amir Arham saja pemanfautan ADD telah diatur sedemiklan rupa dimana biaya operasionalsebesar

30 % dan biaya untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70 %. Pengaturan ini diperlukan agar ADD tidak dihabiskan untuk belanja operasional pemerintahan desa, sebah terbukti selama ini pada level pemerintahan kabupaten/kota alokasi atau postur anggaran tidak didesain dengan bagus, dan tidak ada pengaturan bahwa belanja pembangunan harus lebih besar daripada belanja rutin. Sehingga kebanyakan postur anggaran kabupaten/kota lebih banyak untuk biaya operasional pemerintahan yang efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat sangat minim.

Adanya ADD menimbulkan konsekuensi bagi aparatur desa itu sendiri, jika selama ini perencanaan, manajemen pengelolaan dana desa serta target pembangunan tidak tersusun secara baik, ADD menuntut adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes strukturnya tidak berbeda jauh dengan APBD, karena itu APBDes merupakan gambaran makro pembangunan selama setahun, di dalamnya tergambar target penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah desa diberikan kewenangan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan pungutan sebagai sumber pendapatan. Dikuatirkan kedepannya kewenangan ini justru akan membebani masyarakat desa, maka penyusunan APBDes harus dirancang secara professional dan

Penyusunan APBDes tentu saja mengacu pada dokumen perencanaan dengan menyusun RPJMDes terlebih dahulu. RPJMDes sendiri mengacu pada RPJP dan RPJMD kabupaten bersangkutan, hal ini diperlukan agar terjadi sinergi dan kesinambungan program pembangunan daerah.

Dengan inclihat berbagai perubahan pengelolaan keuangan desa maka dibutuhkan aparatur desa yang memiliki kemampuan untuk merancang program. Walau pemanfaatan ADD didesain akan menggunakan pendamping yang berlungsi sebagsi renaga konsultatif di setiap desa. Tapi lebih elok dan efisien bilamana aparatur desa memiliki kemampuan sumber daya yang memadai, terutama untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menyangkut di dalamnya, antara lain 1) pembangunan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan, 2) mengoptimalkan kegiatan pendidikan kesehatan dan pengarusutamaan gender, 3) pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bermuara pada pengentasan kemiskinan.

Bila APBDes tidak dirancang dengan baik, boleh jadi ADD yang diguyurkan setiap tahun hanya akan menjadi bancakan bagi aparatur desa. Bahkan saya memiliki kekuatiran banyak aparatur desa akan diperhadapkan dengan masalah hukum, atau menjadi sumber konflik bagi masyarakat desa dengan adanya ADD. Saat ini ADD sudah menjadi "alat mainan" baru bagi sebagian politisi petualang yang tergiur dengan gelontoran ADD.

Pasca dicabutnya moratorium pemekaran desa dan kelurahan lanuari 2015 lalu, usulan pemekaran desa bermunculan, menurut catatan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri ada sekitar seribuan usulan pemekaran desa. Sudah dapat diduga pengusulan pemekaran sangat erat kaitannya dengan ADD, meskipun tidak menutup kemungkinan pengusulan pemekaran desa karena dipelopori oleh calon kepala desa yang kalah pada pemilihan kepala desa.

Usulan pemekaran dasa normatifnya tidak terlalu menguntungkan secara ekonomis, karena pembagian ADD yang bersumber dari APBN didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan faktor geografis. Besaran alokasi anggaran desa dari APBN ditentukan 10 % dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap, Alokasi ADD dalam APBN-P 2015 sebesar Rp. 20,76 Trilliun yang diperuntukkan untuk 74,094 desa selurun Indonesia, setiap desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar kp. 280 Juta. Ini sangat menggiurkan bagi pemburu rente.

Ekonom Kementerian Keuangan dan Dosen FEB UNG

Rabu, 1 April 2015

Fundamental Makro Ekonomi (Masih) Kuat, Struktural dan Ketimpangan Bermasalah

PELEMAHAN nilai tukar rupiah dua bulan terakhir menimbulkan kecemasan banyak pihak, secara psikologis sangat wajar karena Indonesia punya pengalaman buruk berkaitan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar USA. Krisis ekonomi 1997 paralel dengan pelemahan rupiah, merembet pada krisis keuangan yang memporakporandakan perekonomian, butuh waktu yang panjang untuk recovery economy. Hanya saja pelemahan rupiah perlu dilihat dari faktor penyebab dan fundamental ekonomi makro itu sendiri. Jika pada tahun 1997 pelemahan rupiah terjadi lebih disebabkan karena faktor internal, pengelolaan sektor finansial serta lembaga keuangan sangat jauh dari kaidah prinsip tata keloia yang baik, diikuti dengan meningkatnya tingkat inflasi. Sementara pelemahan rupiah saat ini meski nilai tukar menyentuh level ambang batas psikologis tapi fundamental makro ėkonomi masih stabil, inflasi masih terjaga. Disamping faktor eksternal juga turut berkontribusi, karena membaiknya perekonomian AS yang tercermin pada meningkatnya wholesales inventories dan membaiknya pasar tenaga kerja dengan meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan baru dan menurunnya jumlah pengajuan tunjangan pengangguran. Kendatipun demikian tetap perlu diwaspadai karena dipicu beberapa faktor yang berpotensi menyumbang inflasi, harga beras meningkat, penyesuaian harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga gas elpiji, pengenaan pajak pada prosentase nilai belanja tertentu (ad valorem), serta wacana pengenaan pajak jalan tol.

Pelemahan rupiah (depresiasi) sesungguhnya dapat berdampak positif untuk merangsang ekspor, tapi kinerja ekspor relatif kurang menggembirakan karena kekuatan ekspor bertumpu pada sektor manufaktur yang banyak mengandung parts yang bersaal dari inpor. Sehingga pada saat yang bersamaan menanthah biaya impor dan oeban korporasi maupun pemerintah, menghadapi kewajiban pembayaran utang

luar negeri. Kecenderungan fundamental makro ekonomi yang masih kuat dengan

masii ktati dengan pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir yang masih stabil, inflasi yang terkendali, neraca perdagangan mulai membaik, dan BOP mengelami surplus disatu sisi masih memberikan ekspektasi positif bagi pemerintah, sehingga tidak terlulu menimbulkan kepanikan. Namun kondisi itu justru tetap akan mendorong permintaan impor, sebab struktur produksi ekonomi serta dilihat sisi permintaan, output ekonomi banyak didorong oleh sektor konsumsi.

Tiga tahun terakhir tingkat output ekonomi tu:nbuh stabil, tapi ada trend perturunan (tahun 2012 sebesar 6,00 %, tahun 2013 sebesar 5,60 % dan tahun 2014 sebesar 5,02 %). Namun itu sifatnya by design karena dianggap overheating, bagi pemerintah itu sendiri cukup menimbulkan optimisme tentang kinerja ekonomi makro. Apalagi jika disandingkan diantara negara yang bergabung kedalam G-20 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu negara yang terbaik, hanya berada di bawah Tiongkok (7,3 %) dan India (5,3 %). Bila dibandingkan dengan negara peers emerging markets (Brazil, Rusia, India dan China), pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat stabil. Ditambah tingkat investasi Indonesia relatif lebih tinggi dibanding peers emerging markets, bahkan Indonesia merupakan tujuan utama berinvestasi di ASEAN berdasarkan hasil Survey US Chamber of Commerce dan Survey The Economist: Indonesia berada pada posisi kedua sebagai negara tujuan investasi utama di Asia.

Jika mengacu pada data-data tersebut cukup membuat kita optimistic, tetapi dibalik itu perlu ada catatan yang ditebalikan karena sebagian pandangan melihat kondisi makro ekonomi kontradiktif dengan kenyatean yangada. Fiscal policy paling terang mendapatkan banyak sorotan, seperti sencana ekstepsifikasi dan intensifikasi perpajakan, meski telah dikeluarkan enam paket

Oleh M. Amier Arham kebijakan ekonomi (stimulasi fiskal). Hanya saja paket stimulan dampaknya jangka panjang (long

run), sementara problem ekonomi (pelemahan rupiah) saatini sifatnya short run. Dibalik fundamental ekonomi makro yang stabil juga menyisakan berbagai persoalan yang belum terselesaikan, setiap saat cukup serius mengganggu kinerja perekonomian, terutama dampaknya terhadap pelemahan rupiah, yakni masalah struktural

dan disparitas.

Masalah struktural ekonomi sangat dibutuhkan perbaikan, bukan lagi eranya ekspor komoditas yangtujuan pasarnya selalu tertekan dengan goncangan ekonomi negara tujuan pasar. Apalagi harga komoditas strategis Indonesia ditentukan di luar negeri, serta berbagai upaya perlakuan proteksi negara-negara tertentu terhadap komoditas andalan dari Indonesia. Perubahan struktur ekonomi dengan mendorong hilirisasi komoditas maupun hasil SDA segera diimplementasikan sebagai basis penguatan daya saing, Bukan hanya persoalan hilirasasinya, pengolahan hasil tambang dengan membangun smelter sangat penting mempertimbangkan lokasi. Jika proses hilirisasi tetap dikembangkan di wilayah yang telah mengalami "industrialisasi", justru tidak akan menolong wilayah lain untuk tumbuh. Pembangunan smelter di Gresik pengolahan hasil tambang yang dilakukan Freeportmenjadi contoli nyata yang tidak mendukung pengembangan wilayah, sebab sejatinya keberadaan smelter memberikan dampak ekonomi yang luas. Pola pengembangan industri semacan, ini justru makin memperbesar disparitas, padahal jike berbicara spasial untuk jangka panjang berdasarkan skenario perkembangan ekonomi global kedepan wilayah timur menjadi outlet ekonomi di kawasan Asia Pasifik, Dengan sendirinya hasil pengolahan tambang dan SDA sumber bahan bakunya dari timur setayaknya juga dikembangkan disana. Bukan hanya sekedar memikirkan efisiensi semara akan tetani membutuhkan komitmen

menyelmbangkan pembangan antar wilayah.

Sekalipun investavi perkembangannya caku-menggembirakan tidak serra memperbaiki kondisi perekonomian di wilayah timur. sebab arus modal masuk ke Indonesia biasnya lebih kuat di Jawa dan sekitarnya. Arus modal dalam bentuk saham, surat utang negara dan SBI tahun 2014 peningkacunnya cukup signifikan dari tahun sebelumnya, tetapi apakah ke KTI mendapatkan aliran investasi yang deras?. Investasi yang besar masuk ke wilayah KTI masih berpusar di sektor mining, bersifat capital intensive, Wilayah KTI perlu diberikan insentif khusus untuk menarik investasi, biaya produksi dan logistik sedapat mungkin ditekan agar lebih kompetitif berusaha. Selain memperbesar anggaran pemerintah dan perlunya perbaikan struktur anggaran bagi pemerintah daerah yang ada di wilayah KTI untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar pada kegiatan sektor produktif.

Secara konsepsional dalam RPJMN peluang mengurangi disparitas wilayah terbuka lebar karena sudah menjadi bagian dari visi pemerintahan yang tercakup didalam tiga dimensi pembangunan, yakni dimensi pemerataan dan kewilayahan. Waktulah yang akan membuktikan komitmen itu apakah akan berjalan efektif atau justru tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya?. Saatini ketimpangan distribusi pendapatan terbilang masih tinggi yang ditunjukkan dengan indeks gini sebesar 0,41 yang ditargetkan menurun sampai 0,36 tahun 2019. Secara spasial kontribusi perekonomian wilayah Jawa dan Sumatera mencapai 80 % dan KTI hanya sekitar 20 %. Merubah prosentase itu tidak mungkin dilakukan secara gradual tapi diperlukan lompatan dengan investasi yang besar, terutama untuk membangun infrastruktur dasar agar wilayah ETI lebih kompetitif memasuki percaturan ekonomi global.

> Ekonom Kementerian Kenangan, Dasen FEB UPC

Rabu, 24 Juni 2015

Dana Aspirasi DPR, Prinsip Keuangan Publik Dilangkahi

SULAN Dana Aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakvat (DPR) bukan sesuatu yang baru, tapi gagasan lama yang terpendam. Usulan serupa pernah dilakukan pada tahun 2010 lalu, hanya saja kala itu Dana Aspirasi urung dilanjutkan karena menual kritik dan resistensi publik yang kuat. Di USA Dana Aspirasi disebut -- Dana Kentong Babi--(Pork Barrel), ketika Obama terpilih jadi presiden USA tahun 2008, Pork Barrel dibapus. Pork Barrel dianggap sebagai "dana siluman", penggunaannya tidak efektif, bahkan menjadi "tunggangan grafis" para politisi. Jiks mencermati argumentasi yang disampaikan para pengusung Dana Aspirasi tidak seragam pernyataannya. Pertanda bahwa enis penggaran seperti ini secara konsepsional tidak matang, terkesan dicarikan pembenaran. Bahkan dengan sekuat tenaga pengusung Dana Aspirasi menganggap perintah konstitusi, jika tidak dijalankan maka melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Munculnya "perintah konstitusi" berkaitan dengan Dana Aspirasi sangat multitafsir, bahkan diinterpretasikan yang cenderung manipulatif.

Dugaan saya, Dana Aspirasi bersaling upa sebagai bentuk "kompensasi" bagi anggota DPR, karena sebelumnya mereka memiliki keleluasaan dalam pembahasan anggaran hingga satuan tiga (nilai dan jenis proyek). Setelah kewenangannya dipangkas oleh Mahkamah Konstitusi (MK), hasrat yang terpendam kembali bergelora memunculkan Dana Aspirasi yang lebih "konstitusional". UU MD3 sebagai landasan "konstitusiona!" Dana Aspirasi ditengarai banyak pihak merupakan tipu muslihat bagi publik. UU ini nyaris tidak ada sosialisasi dibandingkan dengan UU lainnya, mungkin karena UU MD3 tidak berkaitan langsung dengan kepentingan orang banyak, ia lebih bersifat internal sebagai payung hukum dalam pelaksanaan fungsi dan kedudukan wakil rakyat.

Dana Aspirasi juga cukup membingungkan jika dilandaskan pada fungsi kedewanan (legislasi, kontrol dan penganggaran), Sekalipun mereka memiliki fungsi anggaran tapi bukan ranahnya legislatif memiliki anggaran scudiri yang dimenfaatkan untuk kegiatan pembangunan (proyek) di daerah secara langsung, posisinya

hanya sebatas menyetujui dan menolak anggaran. Dalam konteks ini. nampak para pengusung Dana Aspirasi sangat

scrius serta berusaha meyakinkan publik bahwa nantinya dana tersebut tidak dikelola oleh Anggota DPR, la menjadi bagian dari pengelolaan pemerintah daerah (eksekutif). Manakata model pengelolaannya menjadi bagian daripada APBD, mengapa dana itu mengatasnamakan anggota DPR? Mungkin akan jauh lebih jernih dan menghilangkan syak wasangka bagi anggota DPR yang makin kehilangan --trust--, dengan mengupayakan peningkatan transfer khusus ke daerah, bukan Dana Aspirasi yang menjadi "jatah" wakil rakyat. Ini salah satu cara mengurangi lobi-lobi pemerintah daerah ke anggota DPR dan Kementerian.

Tidak ada jaminan anggota DPR untuk tidak melakukan intervensi dan terlibat dalam menentukan siapa yang akan mengerjakan proyek di daerah yang bersumber dari Dana Aspirasi, Jangankan Dana Aspirasi yang menjadi "jatah" anggota DPR, penambahan dana (transfer) ke daerah yang bukan "jatahnya" tidak sedikit yang ikut "bermain" atau menitipkan orangnya untuk mengerjakan proyek. Pemanfaatan Dana Aspirasi, sekalipun pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secata ketat oleh BPK dan BPKP tetap tidak ada jaminan akan steril dari praktek perburuan zente.

Prinsip-Prinsip Pemanfaatan Keuangan Publik Pemanfastan dana publik (keuangan negara) tidak boleh sekedar melandaskan semata pada prinsip common sense, ada berbagai macam prinsip yang membingkal. Prinsip-prinsip keuangan publik, diantaranya menyangkut a) Hubungan keuangan pusat dan daerah (tentu saja eksekutif). Pengeluaran bagi pemerintah pusat dan bagi pemerintah daerah adalah penerimaan, ini yang disebut sebagai intergovernmental transfer. Menurut Syah (2007), ada dua jenis transfer yaitu transfer tujuan umum atau kategori block grant (Dana Alokasi Umum) dan tujuan khusus kategori specific grant (Dana Alokasi Khusus). Transfer tujuan uraum disediakan oleh pemerintah pusat sebagai dukungan unggaran pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk kegiatan umum tanpa

Oleh: Muh. Amir Arham ada syarat khusus. Lain halnya transfer tujuan khusus yang sifatnya bersyarat dimaksudkan untuk memberikan

insentif bagi pemerintah daerah untuk melakukan program-program tertentu atau kegiatan khusus. Transfer bersyarat biasanya sudah ditentukan jenis pengeluaran yang akan dibiayai (input-based). Bila mengacu pada dua model transfer dikaitkan dengan Dana Aspirasi, saya cukup kesulitan mengkategorikan masuk dimana? Sebab Dana Aspirasi sumbernya dari APBN yang akan dilimpahkan ke APBD, dengan sendirinya menjadi bagian dari transfer, pertanyaannya Dana Aspirasi kategorinya apakah transfer tujuan umum atau khusus? Menjadi penting dipahami bahwa masing-masing kategori transfer memiliki efek yang berbeda, menurut Prud'homme (1995) menyebutkan bahwa block grant hanya menghasilkan income effect, sedangkan specific grant juga menghasilkan subtitution effect dan price effect. b) Sekalipun belum terjawab dengan jelas bahwa Dana Aspirasi merupakan bagian dari transfer, tapi prakteknya bilamana ada dana yang bersumber dari APBN dan dilimpahkan ke daerah maka pasti dikategorikan sebagai dana transfer, entah block grant atau spesific grant. Menurut Boadway dan Wildasin (1988), transfer fiskal dilakukan karena alasan adanya fiscal gap, fiscal inequity, fiscal inefficiency, interjurisdiction spillover effect dan untuk fiscal harmonization. Dana Aspirasi jelas bukan solusl untuk meminimalisir fiscal gap dan fical inequity, justru makin mencipatakan disparitas bukan hanya fiskal tetapi juga disparitas wilayah. Hitungan sederhananya, jika berpatokan pada jumlah anggota DPR, pasti Dapil di Jawa paling diuntungkan dengan penjatahan Dana Aspirasi, misalnya Dapii Jawa Barat diwakili 91 anggota DPR, jika dijatah per anggota sebesar Pp. 20 miliar ekuivalen dalam setahun mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1,820 triliun, dalam lima tahun sebesar Rp. 9,100 triliun plus AFBD Jawa Barat sebesar Rp. 24 miliar/tahun (sebagai catatan, Dapil-Dapil Jawa Barat rata-rata hanya dua kabupaten/kota). Dibandingkan dengan Dapi! Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Sulbar, Babel, Kepri diwakiii masing-masing 3 anggota DPR, berarti daerah ini hanya mendapatkan

Rp. 60 M satu provinsi. Untuk Gorontalo selama lima tahun mendapatkan Rp. 300 Miliar plus APBD Rp. 1.4 triliun. c) Dalam praktek desentralisasi fiskal prinsip yang dianut adalah money follow function (uang mengikuti fungsi), artinya fungsi (keglatan) yang menjadi wewenang pemerintah sudah diprogramkan dengan jelas yang nantinya membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Jika mempelajari karakteristik dari Dana Aspirasi justru berkebalikan menjadi function follow money, anggaran terlebih dahulu ditetankan kegiatan akan disesuaikan kemudian berdasarkan usulan dari masyarakat

(pemerintah daerah). Dana Aspirasi nampaknya akan tetap berjalan, sekalipun terjadi pro kontra di tengah masyarakat tidak kurang Menteri Keuangan telah memberikan sinyal akan menyetujui. Bagi saya jika prinsip-prinsip pemanfaatan keuangan pubik tidak dijadikan rujukan, salah kiranya jika itu dibiarkan terlaksana. Sama halnya melakukan pembiaran terjadinya distorsi ekonomi, padahal UU APBN tahun 2015 mengamanatkan pembiayaan APBN harus dapat memberikan solusi untuk mengurangi disparitas. Dana Aspirasi harus memiliki formula yang jelas, bukan sekedar membagi rata per anggota DPR sebanyak Rp. 20 miliar. Kriteria daerah penerima Juga perlu dibuat, misalnya dengan mempertimbangkan indeks kapasitas fiskal, atau indeks kebutuhan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang berbeda, nyaris seluruh daerah di luar Jawa terutama Indonesia Timur kapasitas ekonomi dan fiskalnya sangat rendah. Model penyamarataan pemberian Dana Aspirasi justru mencederai rasa keadilan, melangkahi prinsip-prinsip penggunaan keuangan publik. Hanya karena atas nama Aspirasi ketimpangan distribusi pendapatan dan wilayah sepertinya ingin dipelihara. Apakah ini dipahami oleh pengusung Dana Aspirasi? Sayang rasanya kelau wakil rakyat minim pemahaman dengan persoalan ini, padahal merekalah yang menentukan nasib ratusan juta rakyat

> Ekonom Kementerian Keuangan, Dosen Ilmu Ekonomi FEB ŬNG

Selasa, 18 Agustus 2015

Dampak Devaluasi Yuan (Mata Uang China) Terhadap Rupiah

HINA adalah salah satu negara yang tumbuh 🌶 selama tiga dekade, dikelompokkan menjadi negara yang disebut emerging market selain Brasil, Rusia, India (biasa disingkat BRIC). Negara ini memiliki cadangan devisa sebesar US\$ 3,84 trillun, setara dengan 32,98% dari total cadangan devisa dunia, terbesar di dunia. Dengan sendirinya Chinaselalu berupaya melakukan ekspansi ekonomi keluar, termasuk menawarkan pinjaman secara bilateral untuk memutar roda ekonominya. Diantara nagara emerging market, dua diantaranya pertumbuhan ekonominya minus pada kuartal II-2015, yaitu Brazil dan Rusia, sementara India dan China tetap tumbuh positif sekalipun mengalami perlambatan. China sendiri selama bertahun-tahun pertumbuhannya double digit, tetapi semeniak tahun 2012 terus merosot hingga kuartal II-2015

meniadi 7 %.

Atas situasi itu People Bank of China (PBoC) melakukan devaluasi (atau bahasa sederhanya sengaja melemahkan) yang ketiga kalinya, dengan alasan a) Memperkuat peran pasar dalam memperbaiki dan memperkecil gap antara central parity rate dan market rate, b) Membuat Yuan stabil pada tingkat wajar. c) Meningkatkan competitiveness ekspor Tiongkok di pasar global. Kebijakan devaluasi Yuan akan berpotensi berpengaruh kepada pasar keuangan dan perdagangan, seperti; 1) Dalam jangka pendek, sentimen negatif dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap potensi pertumbuhan China yang kemudian dapat menekan pasar keuangan regional, 2) Pelemahan Yuan dapat menyebabkan tekanan pada pasar komoditas global (yang menggunakan US\$) karena konsumen Tiongkok akan menghadapi harga komoditas yang relatif menjadi lebih mahal. 3) Dalam jangka panjang, pelemahan Yuan akan mempengaruhi capital inflow ke kawasan China yang pada akhirnya dapat memberi pengaruh kepada aliran modal di kawasan Asia, termasuk Indonesia dan Malaysia yang paling kena imbas. 4) Devaluasi Yuan akan membuat produk China menjadi lebih kompetitif hal ini akan mempengaruhi kondisi ekspor pada negara di kawasan karena produk-produk negara lainnya bersifat subtitutif.

ladi pertanyaan. kenapa Yuan relatifkuatbahkan cenderung head to head dengan

dollar?, sebabnya China menganut sistem fix exchange rate (sistem nilai tukar tetap) Lain halnya dengan Indonesia menganut sistem floating exchange rate (sistem nila) tukar mengambang), makanya ruplah cenderung fluktuatif. Lalu kenapa Indonesia tidak menganut sistem fix exchange rate seperti China?, oleh karena size ekonomi Indonesia masih kecil, dalam sistem perdagangan internasional Indonesia akan mengalami kerugian besar pada saat harga komoditi hasil ekspor lagi booming.

Faktorlain yang mengakibatkan rupiah mengalami depresiasi (menurun) karena ekonomi USA secara perlahan mengalami perbalkan (recovery) semenjak krisis tahun 2008, walau belum kembali pada posisi sebelum krisis. Apalagi Indonesia belum memiliki perangkat peraturan tentang arus devisa dan transaksi keuangan, padahal investasi yang tumbuh pesat beberapa tahun terakhir adalah sektor keuangan. Uang (dollar) begitu mudah masuk, pasa saat yang bersamaan dengan mudahnya keluar (capital flight), permainan pasar uang dan pasar saham sangat dipengaruhi oleh faktor psikologi (behavior). Isu-isu dan persepsi sangat berpengaruh bagi pemain di sektor ini, lain halnya investasi sektor riil lebih rasional. Karena itu, pertentangan idiologi ekonomi saat ini tidak lagi didominasi antara kapitalisme dan sosialisme tapi "pertentangan" antara mazhab (behavior vs rasionalist).

Mengapa perangkat peraturan arus devisa diperlukan? karena sistem arus devisa Indonesia terlalu liberal sehingga sangat mudah terjadi capital flight. Dibeberapa negara seperti Filipina dan Malaysia mereka punya aturan, bahwa uang yang masuk ke negaranya minimal enam (6) bulan ditanamkan baru boleh diambil, lain halnya Indonesia, jain ini masuk beberapa jam kemudia jika kurang menguntungkan dengan mudahnya dapat diambil atau dipindahkan kenegara lain yang lebih menguntungkan.

Sekarang rupiah mak!n terpuruk, atau terperosok 1 US3 setara dengan Rp/ 13,800, nilai rupiah ini terburuk semenjak krisis tahun 1998. Apakah ini

Oleh: Muh. Amir Arham

> besar orang akan memberikan persepsi seperti itu, tapi para ekonom termasuk saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kalau disebut krisis, tentu saja tidak (belum) sebab inflasi saat ini sebesar 0.8 % (month to month) dan 7,26 % (year on year) masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1998 yaitu 35 %. Dari segi pertumbuhan ekonomi sekalipun melemah pada kuartal II-2015 tetap! masih tumbuh moderat sebesar 4,6 persen. Lain halnya pada tahun 1998 ekonomi tumbuh minus 13 persen, pada tahun 1998 cadangan devisa hanya sebesar US\$ 14,4 miliar dan saat ini cadangan devisa sebesar US\$ 107,553 miliar. Angka kemiskinan tahun 1996 sebesar 17,72 % dan meningkat sebesar 24,2 % tahun 1998. Sedangkan angka kemiskinan saat ini sebesar 10,3 %. Tahun 1998 Investasi seret sementara kuartal II-2015 investasi tetap tumbuh, total FDI naik 16.3 % (yoy), PMA naik 68,2 % (yoy) dan

pertanda krisis

atau akan sama

dengan tahun

1998? Sebagian

PMDN 31,8 % (yov). Selain itu nilai tukar rupiah ukurannya bukan hanya dilihat dari nilai nominal semata, tetapi juga diperhitungkan nilai riil. Teori keuangan internasional menyebut Real Efectivity Exchange Rate (REER), artinya nilai tukar adalah tingkat efektif nilai tukar nominal (ukuran nilai suatu mata uang terhadap ratarata tertimbang dari beberapa mata uang asing) dibagi dengan deflator barga atau indeks biaya, dengan kata lain riil efektivitas nilal tukar yang diukur dari perbedaan inflasi di luar dan dalam negeri dapat kita lihat apakah rupiah berada pada nilai fundamentalnya. Hitungan ini berdasarkan seberapa jauh kesesuaian pergerakan inflasi dengan nilai tukar ke depannya. REER rupiah di bawah 100 itu berarti undervalued dan masih kompetitif, rupiah masih cukup sesuai dengan nilai fundamentalnya saat ini. Jika nilainya di bawah 100 maka disebut sebagai undervalued, atau dibawah nilai riil rupiah. Jadi sekalipun nilai rupiah makin terperosok, bahkan mendekati Rp. 15,000 per 1 US\$ nilai riil efektif tldak sama seperti tahun 1998, ia masih di bawah undervalued, dengan kata lain penurunan nilai riil efektifnya tidak terlalu lemah

dibandingkan dengan tahun 1998. Sebagai catatan tambahan, nilai rupiah saat ini tidak akan pernah bisa kembali lagi di bawah Rp. 10,000 seperti pada masa lalu, jika kurang dari itu berarti overvalued atau di atas nilai riil efektifnya.

Mersotonya nilai rupiah terhadap dollar juga tidak terlalu signifikan mengganggu pembiayaan APBN, penyebabnya tidak ada lagi subsidi premium. Selama ini jika dollar menguat, nilai rupiah jatuh pilihan pemerintah pasti melakukan penyesuaian harga BBM (mengurangi subsidi). Jika cara seperti ini ditempuh di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi, beriringan dengan menurunnya daya beli masyarakat tentu inflasi melonjak, keyakinan saya akan terjadi gejolak sosial. Maka disinilah konteksnya pemerintah menyebut pengurangan subsidi mulai dirasakan manfaatnya terhadap pembiayaan APBN.

Meskipun sesungguhnya pelemahan rupiah bukan hanya karena faktor eksternal, termasuk karena adanya devaluasi Yuan, faktor kelemahan pemerintah juga ada. Selama bertahuntahun lebih berorientasi kepada ekspor komoditi, pada saat harga komoditi di luar negeri anjlok nilal perdagangan turun, produksi dalam negeri berkurang tentu dampaknya terhadap pengurangan pekerja. Perbaikan struktur ekonomi dengan menciptakan hilirisasi produk komoditi menjadi agenda penting untuk segera dibuat, sayangnya ini belum dilakukan percepatan.

Selain itu kordinasi antara otoritas moneter dan fiskal perlu terus dijaga harmonisasinya, sebab perlu diingat bahwa pengendalian inflasi dan nilal tukar rupiah merupakan ranahnya otoritas moneter yang berada di dalam kendali Bank Indonesia (BI). Pada kondisi rupiah terdepresiasi, penanganan jangka pendek (short run) dilakukan oleh BI dengan melepas dollar, tetapi saat ini BI sangat hati-hati dan membatasi intervensi pasar uang dollar karena akan menggerus cadangan devisa. Untuk otoritas fiskal dalam rangka menstabilkan rupiah kebijakannya bersifat long run, beberapa kebijakan yang disiapkan diantaranya insentif pajak, hagi perusahaan vang berorientasi minimal 30 % produknya untuk ekspor akan diberikan tax allowence.***

> Ekonom Kementerian Keuangan, Dosen FEB UNG

25 Agustus 2015

Penyebab dan Resiko Perlambatan Ekonomi

FENOMENA perlambatan ekonomi merupakan gejala global. tidak saja dialami oleh negara berkembang seperti Indonesia. Negara majupun mengalami kondisi serupa, bahkan negara yang dikategorikan sebagai negara emerging market seperti Brazil dan Rusia pertumbuhan ekonominya malahan minus. Sedangkan China. era pertumbuhan ekonomi double digit sudah berakhir, kini rata-rata pertumbuhan ekonomi China turun dikisaran 7 persen per tahun. Kondisi ini memaksa People Bank of China (PBoC) melakukan devaluasi Yuan. Sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi dunia, devaluasi Yuan berdampak terhadap perekonomian negara lain, khususnya Indonesia karena China merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Gejala perlambatan ekonomi dunia sebetuinya sudah mulai terasa sejak tahun 2013 lalu, apalagi krisis kawasan Eropa, Jepang dan USA belum pulih. Di tambah krisis Yunani, sekalipun efek krisis Yunani ke Indonesia resonansinya tidak terlalu kuat. USA yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian global mengalami perlambatan di triwulan II-2015, Jepang pun kontraksi ekonominya cukup ekstrim karena masih tumbuh minus.

Darl rilis BPS memperlihatkan Ekonomi Indonesia triwulan II-2015 terhadap triwulan II-2014 (y-on-y) hanya tumbuh 4,67 persen, melambat dibanding capaian triwulan II-2014 yang tunibuh 5,03 persen dan triwulan I-2015 yang tumbuh 4,72 persen. Sumber pertumbuhannyapun kurang "greget", sebab dari sisi produksi dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Jasa Pendidikan yang tumbuh 12,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh 4,97 persen. Untung saja tingkat inflasi masih terjaga diambang batas psikologi sehingga PK-RT masih dapat menopang pertumbuhan ekonomi, sedangkan komponen ekspor dan impor kontribusinya minus sejak triwulan I-2015.

Perlambatan ekonomi, Indonesia saat ini tidak bisa dibaca secara sempit sebagai kelemahan rezim pemerintahan sekarang, penyebabnya merupakan "penyakit kronis" puluhan tahua yang lampau. Setidaknya ada empat resiko ekonomi global yang turut menahan laju pertumbuhan ekonomi domestik, diantaranya 1) harga komoditas global sangat volatile dan cenderung melemah. sementara Indonesia termasuk

bertabus. tanun sanga menganda kan ekspot

komoditi non elaban 1 Ameria perekonomian emerging manar terutama China masia dalam fase perlambatan, sementara Brazil dan Rusia rumbuh minus kinerja perekonomian negata maju, USA menunjukkan gelala pemulihan, terapi Jepang dan Eropa belum pulih, negaranegara tersebut merupakan mitra dagang utama Indonesia, dan 4) ketidakpastian kebijakan moneter negara maju, seperti normalisasi The Fed. Di tengah situasi seperti itu China memanfaatkan momentum melakukan devaluasi Yuan turut menambah pelemahan

mata uang rupiah.

Menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat karena konsumsi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, sesungguhnya bukan pertanda ekonomi Indonesia akan kiamat, justru situasi ini dapat mendatangkan berkah. Dengan asumsi ekspor harus terus didorong karena hasil imbal kegiatan ekspor akan menghasilkan nilai tukar yang lebih besar. Dukungan kebijakan fiskal juga tentu dibutuhkan, pemberian tax holiday dan tax allowance sudah tepat akan tetapi belum cukup, hambatanhambatan kegiatan ekspor dan lemak-lemak ekonomi perlu segera dihilangkan, termasuk perbaikan sistem transportasi angkutan barang. Disamping aspek kelembagaan dan perilaku birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah dibutuhkan kordînasi dan pelayanan yang efisien.

Sementara itu, secara spasial struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa disusul Sumatera, jika diakumulasi kedua pulau tersebut kontribusinya terhadap pembentukan perekonomian nasional sebesar 80,66 persen. Sedangkan provinsi di KTÎ kurang dari 15 persen, namun uniknya pertumbuhan ekonomi provinsi yang ada di KTI cukup tinggi, misalnya Pulau Sulawesi tumbuh 8,6 persen dari 7,3 persen, Maluku dan Papua tumbuh sebesar 10,2 dari 3,7 persen triwulan I-2015. Provinsi di Pulan Jawa sekalipun tetap tumbuh tetapi gejala penurunan terlihat dari sebelumnya di triwulan I-2015 tumbuh sebesar 5,2 persen menurun menjadi 5,1 persen. Sementara Sumatera dari 3,5 persen di triwulan 1-2015 menjadi

 9 persentriwulan II-2015. demikian halnya kawasan Kalimantan

hanya tumbuh sektur 1 persen. Descri selas terlihat bahwa provinsi yang mengandalkan ekspor komoditi yakni Sumatera dan Kalimantan paling merasakan denspak dari perlambaran ekonomi global terutama tujuaz ekspor hufu bara, sawit dan karet.

Gejala ini sesungguhnya menampilkan figura bahwa percepatan perubahan struktur ekonomi sangat diperlukan Ekspor komoditas eranya sudah lewat, komoditi andalan membutuhkan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga fluktuasi harga. Pulau Jawa mendominasi perekonomian nasional tidak terlepas dari hasil transformasi ekonomi, industri manufaktur telah berkembang. Sembari sektor-sektor produktif lainnya perlu dipacu, termasuk sektor jasa yang menjadi penopang ekonomi Nusa Tenggara dan Bali hingga tumbuh sebesar 8,9 persen. Di luar itu perbaikan struktur ketimpangan wilayah tidak bisa diabaikan, hilirisasi sektor komoditas yang dihasilkan di luar Pulau Jawa harus dibangun dimana komoditi diproduksi, seperti pengolahan hasil tambang (smelter), pengolahan sawit dan karet serta komoditikomoditi lainnya. Tentu saja ada konsekuensinya, pembangunan infastruktur di luar Pulau Jawa perlu digenjot.

Melemahnya kinerja ekspor yang berdampak terhadap kontraksi ekonomi juga memerlukan kebijakan lain, diantaranya perubahan struktur anggaran pemerintah, terutama kabupaten/kota dan provinsi. Secara umum kabupaten/kota alokasi anggaran belanja publik masih lebih kecil dibandingkan dengan belanja pegawai, struktur anggaran yang seperti itu jelas tidak akan menjadi pendorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain serapan belanja K/L dan APBD diperlukan percepatan, sebab realisasi investasi, kegiatan ekspor-impor yang melambat, belanja pemerintah tentu menjadi tumpuan harapan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapsi 5 persen sesuai target

dalam APBN.

Rendahnya serapan belanja pemerintah jelas sangar berdampakterhadap melemahnya pertumbuhan ekonomi. Hingga kini baru lima K/L yang optimal realisasi anggarannya. sehingga secara keseluruhan

belanja K/L capaiannya kurang dari 50 persen. Malahan dana transfer dan Dana Desa yang diberikan kepada pemerintah daerah serapannya lebih kecil lagi. Sekitar Rp. 271 triliun dana milik Pemda mengendap di bank belum dimanfaatkan, padahal realisasi penyaluran sudah tepat waktu. Pela ini selalu berulang setiap tahun membutuhkan perbaikan sistem, sekalipun sesungguhnya ini bukan beban vang musti dipikul sendiri oleh pemerintah daerah. Selain itu, lambatnya penggunaan dana transfer karena menyangkut kehati-hatian yang senantiasa berpotensi melanggar hukum, maka kemudian pemerintah daerah seringkali lebih memilih mencari jalan aman menyimpan uang di bank. Meskipun dapat dibaca dalam perspektif lain, uang sengaja disimpan di bank selama berbulan-bulan agar mendaparkan penghasilan tambahan melalui bunga. Tapi resikonya beban bunga menjadi tanggungan bank dalam hal ini pemerintah juga yang ikut memanggul beban. Kondisi serupa yang dihadapi pemanfaatan Dana Desa, penyalurannya sudah dilakukan tepat waktu tetapi belum berjalan efektif pemanfaatannya. Padahal Dana Desa memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap visi dan misi pemerintahan saat ini membangun Indonesia dari pinggir (desa).

Ada beberapa isu yang membelit penyaluran Dana Desa, diantaranya perangkat pendukung seperti peraturan bupati dan penyusunan PerDes yang terlambat, akibatnya pencairan Dana Desa tahap pertama juga terlambat. Selain itu. keterbatasan kompetensi aparatur desa yang rendah, dan ditambah sebagian besar kabupaten/kota belum mengalokasikan Dana Desa dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10 persen sebagaimana disyaratkan

oleh UU Desa.

Dibalik itu semua, perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor, serta resiko yang ditimbulkan akan menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi-JK, dan akan terus menjadi sorotan negatif. Meskipun kita semua semestinya arif memandang bahwa perekonomian yang melambat faktor eksternal yang dominan, tentu faktor internal tidak dapat dinafikkan keberadaannya sebagai

> Dosen Ilmu Ekonomi FEB UNG, Ekonom Kementerian

Apa Urgensinya Sunset Policy dan Tax Amnesty?

PAJAK merupakan sumber utama penerimaan negara, dengan sendirinya pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Bila penerimaan pajak tidak tercapai sesuai target, sudah barang tentu berdampak terhadap kelangsungan ekonomi bangsa. Di tengah melemahnya ekonomi seperti saat ini, pengeluaran pemerintah menjadi tumpuan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena konsumsi domestik serta kegiatan ekspor mengalami pelambatan. Hanya saja pengeluaran pemerintah tidak akan optimal bilamana sisi penerimaan juga tidak sesuai yang diharapkan. Untuk menjaga sustainability ekonomi bangsa, sekalipun penerimaan rendah, ekonomi tetap akan diupayakan tumbuh dengan berbagai bauran kebijakan untuk mencapai target dan cita-cita bernegara (menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran).

Sayang tidak banyak pilihan yang dihadapi pemerintah untuk membiayai APBN jika penerimaan pajak masih rendah, pilihan terbatas itu adalah hutang. Hingga memasuki bulan ketujuh tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 531,114 triliun dari target penerimaan pajakyang ditetapkan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294, dengan demikian realisasi penerimaan pajak baru mencapai 41,04 persen. Masih belum optimalnya penerimaan pajak cukup banyak faktor yang menghambat, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pertumbuhan ekonomi secara nasional pada kuartal kedua (TWII) tercatat 4,67 persen menurun dari kuartal pertama (4,72 persen) atau lebih rendah dari periode yang sama tahun fiskal 2014. Penerimaan pajak, tingkat konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi merupakan mata rantai yang terkait satu sama lain, salah satunya yang terhambat perputarannya maka akan memiliki efek berantai. Berdasarkan hasil rilis BPS, kuarta! kedua 2015 terjadi penurunan konsumsi domestik, sehingga berkontribusi pada penurunan penerimaan PPN Dalam Negeri sebesar 0,46 persen atau sebesar Rp. 120,534 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 121,040

Realisasi penerimaan pajak yang minim juga tidak dapat dipungkiri karena masih rendahnya kesadaran para wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya,

ditambah faktor terbatasnya pemahaman wajib pajak terkait ketentuan pajak. Jika dirasiokan jumlah wajib pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan Jumlah penduduk yang sudah masuk kategori wajib pajak. Jika mengacu data pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang di antaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Kondisi serupa juga terjadi dengan Wajib Pajak Badan, ada 1,2 juta perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, baru sekitar 45.8 persen atau 550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPT (Kemenkeu RI, 2015). Berdasarkan data-data tersebut tahun 2015 dijadikan momentum tahun pembinaan pajak karena dilatarbelakangi oleh adanya peluang peningkatan penerimaan pajak, masih rendahnya tax ratio, masih adanya Wajib Pajak Orang Pribadi vang belum tersentuh.

Cukup beragam alasan masyarakat belum membayar pajak, seperti merasa penghasilannya masih kecil dan kondisi perekonomian yang lagi lesu. Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak selain dilakukan kebijakan insentifikasi juga dibarengi dengan eksentifikasi pajak, sembari pemerintah baik pada level nasional terlebih pemerintah daerah untuk menyegerakan melakukan pembenahan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi. Percuma saja mengejar para wajib pajak jika pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik mengelola ekonomi. Perekonomian yang stabil dan tumbuh berdampak terhadap peningkatan pendapatan perkapita, dalam kalanjutannya bila penghasilan masyarakat makin membaik jelas akan menciptakan income effect terhadap meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Melemahnya kinerja makroekonomi, pemerintah berupaya membuar regulasi dan paket kebijakan fiskal berbarengan dengan tahun pembinaan pajak

OLEH: M. Amir Arham Paket kebijakan fiskal diluncurkan pemerimah, adalah sunser policy, serta wacana pemberian pengampunan pajak (tax

amnesty). Sunset policy merupakan pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajakyang dilakukan para wajib pajak. Pemberian penghapusan sanksi bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar berlaku bagi: a) Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, b) Wajib Pajak orang pribadi yang belum mempunyai NPWP tetapi secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Sunset policy 2015 ini akan berakhir dipenghujung tahun ini, karena itu pentingnya memanfaatkan waktu yang tersisa lima bulan bagi penunggakpajak. Sunset policy pernah diberlakukan pada tahun 2008 ketika Darmin Nasution menjabat Dirjen-Pajak, hasilnya sangat positif, target penerimaan pajak terlampaui. Atas kebijakan sunset policy, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak sebesar Rp. 7,64 trillian. Untuk memperkuat pelaksanaan sunset policy kedepannya sebaiknya dasar pelaksanaannya harus memiliki payung hukum yang lebih kuat, setara dengan undang-undang sehingga tidak berpotensi "menabrak" aturan

yang lebih tinggi.

Bagaimana dengan wacana tax amnesty? Memang tidak semudah dengan sunset policy karena kebijakan ini terbilang sensitif, nuansa politiknya cukup kental. Tetapi menghadapi situasi perekonomian yang lesu, realisasi penerimaan pajak rendah, diperlukan terobosan baru. Pemberian fasilitas ini diharapkan para wajib pajak yang memarkir dananya di luar negeri dapat mengembalikan ke dalam negeri dengan diberikan ampunan. Ditengarai beberapa kelompok konglomerasi bermasalah secara hukum mengendapkan uangnya di luar negeri, diperkitakan sekitar Rp. 3,000 trillun. Meski tidak semua "uang haram", tentu saja sebagian usaha "halal", mereka menyimpan di luar

negeri karena beragam alasan seperti pemberian fasilitas dan keuntungan finansial.

Kebijakan taxmanesty bukan bentuk kebijakan baru bagi beberapa negara, seperti Afrika Selatan yang sukses melakukan tax manesty. Tidak hanya Afrika Selatan, Argentina, Belgium, Kolombia, India, Irlandia dan Perancis termasuk negara yang pernah sukses melakukan *tax amnest*y. Kebijakan ini juga harus dimaknal sebagai bagian dari proses rekonsialisasi politik, jika berkaca pada pengalaman Afrika Selatan selama puluhan tahun sistem politik apartheid dipraktekkan, ketika Nelson Mandela jadi presiden rekonsiliasi politik dibangun termasuk memberikan pengampunan kepada para kulit putih yang melakukan kejahatan perpajakan pada masa lalu. Meskipun kondisinya relatif berbeda dengan Afrika Selatan, Indonesia dapat belajar dari pengalaman ltu. Tax'amnesty harus dijadikan salah satu jalan keluar melakukan rekonsiliasi bangsa, sebab diduga sebagian "uang haram" yang diparkir di luar negeri merupakan akumulasi yang dihimpun oleh para pengusaha bermasalah yang dekat dengan kekuasaan pada masa lalu. Juga tidak terlepas dari sistem pelayanan perpajakan pada masa lalu yang masih jauh dari prinsip-prinsip good

Meskipun demikian, kebijakan tax amnesty termasuk kebijakan yang kurang popular, unsur ketidakadilan nyata dilangkahi oleh karena kebijakan ini lebih berpihak kepada kalangan pemodal yang tidak jujur mengenai urusan pajak. Hanya saja kebijakan tax amnesty salah satu solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja. Payung hukum juga sangat diperlukan agar ada kepastian dan jaminan bagi wajib pajak yang diberikan ampunan, serta dikemudian hari dijamin tidak akan dipermasalahkan secara hukum. Disampingitupenegakan hukum yang adil dan tegas kedepannya bagi wajib pajak yang telah diberikan ampunan, agar tidak melakukan perbuatan serupa. Disitulah urgensinya sunset policy dan tax amnesty.

> Ekonom Kementerian Kenangan, Dasen Ilmu Ekonomi FEB UNG

Selasa, 8 September 2015

Ekonomi Melambat, Percepat Belanja Pemerintah Daerah

ERTUMBUHAN ekonomi Indonesia mengalami perlambatan, pada triwulan II-2015 hanya tumbuh 4,67 persen lebih rendah dibanding triwulan I-2015 yang tumbuh 4,72 persen. Dari sisi produksi, Jasa Pendidikan tumbuh paling tinggi 12,16 persen dan dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh 4,97 persan. Dua sumber pertumbuhan yang tertinggi tersebut terbilang kurang berkualitas, efeknya terhadap pencipta lapangan kerja kecil. Pada triwulan I-2015 hampir semua daerah mengalami kondisi serupa pertumbuhannya melambat, tidak terkecuali Gorontalo hanya tumbuh 4,69 persen dari 7,3 persen pada periode yang sama I-2014. Memasuki triwulan II-2015 secara

Memasuki triwulan II-2015 secara nasional pertumbuhan ekonomi makin melambat, Gorontalo justru mulai terjadi pembalikan, ekonominya tumbuh signifikan naik menjadi 6,37 persen. Walaupun demikian nanpak pertumbuhan meningkat, jika disasar sumber pertumbuhan secara sektoral kurang baik karena pertumbuhan tertinggi dicapai dari Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 13,68 persen. Sektor ini dampak gandanya relatif terbatas, sementara sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 14,09 persen.

Lesunya perekonomian global berdampak terhadap kinerja ekspor komoditi menurun drastis, sudah barang tentu mempengaruhi perlambatan ekonomi Indonesia. Dilain pihak selama bertahun-tahun pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran diperkuat oleh PK-RT. sektor ini juga terjadi perlambatan meski masih berkontribusi besar. Melambatnya pertumbuhan ekonomi merupakan sinyal kuat bagi pemerintah untuk berpikir keras menjaga kestabilan ekonomi, membutuhkan bauran kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan. Jika mengacu pada kinerja investasi terbuka peluang ekonomi tetap tumbuh di atas ! persen sesuai target pemerintah, sekalipun kinerja ekspor melemah. Selain dibutuhkan investasi dalam jumlah yang besar, belanja pemerintah juga cukup signifikan mengatrol ekonomi untuk lebih

Pada perspektif lain, perlambatan ekonomi juga dapat dibaca sebagai cerminan kondisi ekonomi global yang

ekonomi global yang mengalami krisis. Dengan demildan konjuntur (grafik turun) dalam siklus ekonomi mengalami percepatan, jika sebelunnya siklus krisis relatif panjang baru terjadi konjuntur dari pertengahan 1930-an kemudian kembali terjadi pertengahan 1990an, disusul tahun 2008 dan menjadi lebih pendek tahun ini. Dugaan saya salah satu faktor cepatnya terjadi konjuntur sebagai refleksi timpangnya perekonomian global, hanya berapa negara yang menguasai perekonomian dunia. Bila negaranegara tersebut mengalami krisis, dipastikan efeknya cepat menjalar ke negara lain, terutama negara mitra utama dalam perdagangan. Indonesia salah satu negara yang rentang terhadap gejolak ekonomi bila negara seperti China, USA dan Jepang mengalami perlambatan ekonomi sebab nagara-negara tersebut merupakan tujuan ekspor komoditi.

Maka persoalan pokok ekonomi ang harus dibenahi, baik pada nasional maupun di daerah adalah mendorong perubahan struktur ekonomi dengan cepat. Ekspor komoditi tidak lagi menjadi primadona, dibutuhkan komoditi olahan, Melemahnya ekspor komoditi sangat memukul daerah penghasil komoditas, seperti Sumatera dan Kalimantan. Pada triwulan II-2015 Pulau ini pertumbuhannya dibawah 3 persen, lain hainya Sulawesi, Maluku-Papua dan Nusa Tenggara tumbuh di atas 7 persen. Sayangnta kontribusi pulau yang ada di Kawasan Timur Indonesia terhadap perekonomian nasional sangat kecil. jika diakumulasi hanya 19,34 persen. Ini persoalan kedua membutuhkan pembenahan kedepannya agar kegiatan perekonomian tidak terus bertumpuk di Pulau Jawa dan Sumatera, Bila tidak dilakukan koreksi secara mendasar dalam desain perencanaan pembangunan, bebaa Pidau Jawa semakin berat, Konsep pembangunan Nawacita seberulnya sudah baik karena aspek pemerataan wilayah menjadi salah satu pilar penting untuk segera dibenahi. Tentu saja konsep tidaklah cukup, dinerlukan komitman yang lebih

OLEH: Muh. Amir Arham kuatuntuk mengurangi ketim pangan antar wilayah bagi semua pemangku kepentingan. Belanja Pemerintah

Menjadi Tumpuan Pertumbuhan Daya beli masyarakat yang cenderung menurun, realisasi investasi belum sesuai dengan komitmen investasi, kinerja ekspor melemah dan tingginya impor, maka belanja pemerintah menjadi tumpuan besar mendorong pertumbuhan ekonomi, Bercermin tahun-tahun sebelumnya percepatan realisasi belanja pemerintah lewat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah mulai mengalir deras nanti pada triwulan III. Khusus untuk serapan belanja pemerintah daerah sangat kecil dan dana idle (dana pemda yang menganggur di perbankan) justru sangat besar karena dana transfer ke daerah dan danz desa cukup tinggi dan dilakukan tepat waktu. Dalam benak saya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bukan hanya tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah punya andil besar. Apalagi tahun 2016 dana transfer meningkat menjadi Rp. 782 triliun lebih besar dibandingkan dengan belanja K/L Rp. 780 triliun.

Jika kinerja pemerintah daerah masih tetap polanya sama dengan sekarang dalam hal penyerapan anggaran dan dana idle makin membesar Berharap banyak kepada daerah menjadi pilar penopang pertumbuhan ekonomi nasional terlalu berlebihan rasanya, tidak salah kiranya jika pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan memberikan punishment bagi daerah yang lelet merealisasikan anggarannya. Dalam RAPBN 2016 pada kenyataannya sudah disiapkan jangkarnya, artinya kedepan penggunaan dana transfer diantaranya DAK berbasis kinerja dan daerah yang memiliki dana idle yang relatif besar akan dikonversi kedalam Surat Berharga Negara (SBN). Lima tahun terakhir dana idle mengalami peningkatan, per bulan Juni 2015 terdapat lonjakan yang cukup signifikan yaitu mencapai Rp. 273,5 triliun. Dana idle mitik Gurontalo sendiri baik provinsi maupun kabupaten/kota sekitar Rp. 2 triliam

Masalah lain yang patut jadi concern pemerintah, yaitu Dana diperbesarbagi daerah berkinerjahaik dalam hal pengelolaan keuangan dan perekonomian, paling penting dana transfer memiliki efek yang besar terhadap perbaikan kesejahteraan, Jangan sampai DID lebih banyak berpatukan pada pengeluhaan keuangan dengan mengacu pada penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK, sementara alokasi anggarannya lebih besar ke belanja tidak langsung

(belanja pegawai). Melihat kinerja ekonomi daerah selama ini, khususnya daerah dimana investasi swasta terbatas, belanja pemerintah menjadi kekuatan. Persoaalannya kebanyakan kabupaten/kota belanjanya didominasi belanja pegawai sehingga efek ganda terhadap perekonomian daerah masih sangat kecil. Percepatan belanja pemerintah daerah sesuatu yang urgen, tapi struktur anggaran daerah tidak dapat diabaikan untuk segera dilakukan perubahan secara fundamental. Di Gorontalo sendiri dari enam kabupaten/kota struktur anggarannya untuk belanja publik lebih besar hanya ada dua, yakni Kabupaten Boalemo dan Kabupaten

Gorontalo Utara. Selain perubahan struktur anggaran dalam APBD dilakukan, penting pula bagi pemerintah daerah memperbesar pembiayaan sektor-sektor produktif di perdesaan. Sedapat mungkin menghindari proyek-proyek infrastruktur mercusuar yang kurang menunjang kekuatan ekonomi desa. Bagi Gorontalo sendiri gejala itu mengarah kesana, pembangunan infrastruktur merupakan program unggulan tetapi kemiskinan perdesaan mengalami peningkatan. Jika mengacu pada pertumbuhan ekonomi tahun 2014, ekonomi Gorontalo tumbuh sebesar 7,4 persen tetapi dampaknya terhadap kemiskinan sangat kecil. Menghadapi situasi yang demikian, RAPBD 2016 Proviusi Gorontelo serta RAPBD 2016 kabupaten/ kota akan mendapatkan tambahan limpahan transfer, sejak sekarang sajarinya memperkuat program yang berdampak besat terhadan perkembangan ekonomi daerah, sebab investasi swasta masih sangat terbatas masuk ke Gorontalo.

> Ekonom Kementerian Kenangan, Kotun Lembasa Penekahan dari

Kemiskinan Perdesaan di Gorontalo Meningkat, Alokasi Dana Desa Solusinya

IMA tahun terakhir pertumbuhan ekonomi. Provinsi Gorontalo di atas Arata-rata 7 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan secara nasional. Sekalipun angkaangka pertumbuhannya tinggi, namun membutuhkan pencermatan dengan memperhatikan sumbersumber persumbuhan ekonomi wilayah. Ekonomi bisa jadi tumbuh tinggi tapi kurang memiliki efek terhadap penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan. Akibatnya akan menjadi buble economy, seperti busa kelihatan besar tapi hanya berisi rongga udara. Karena itu pentingnya memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerintah sedapat mungkin menggeser sumber-sumber pertumbuhan ke sektor produktif. Di tengah terbatasnya investasi swasta untuk sektor industri dan sektor riil, belanja modal pemerintah menjadi

Hanya saja ruang fiskal bagi kabupaten/kota di Gorontalo begitu sempit, sebab belanja aparatur lebih besar, tak banyak pilihan yang ada di hadapan pemerintah, terkecuali harus secara sungguh-sungguh melakukan budget reform, dengan melakukan efisiensi di tubuh birokrasi. Frame berpikir bagi sebagian pemerintah daerah, APBD dimanfaatkan sebesarsebesarnya untuk belanja aparatur, sedangkan belanja pembangunan akan diupayakan dari pemerintah pusat lewat mekanisme transfer tambahan perlu diminimalisir. Melemahnya pertumbuhan ekonomi secara nasional akan memiliki efek terhadap penerimaan pajak, tentu saja akan mengganggu belanja pemerintah, termasuk menambah transfer ke daerah, apalogi saat ini pemerintah pusat Jor-Joran membangun proyek infrastruktur. Rendahnya penerimaan pajak, seiring dengan kehendak terus menggenjot pembangunan infrastruktur akan berdampak terhadap meningkatnya defisit APBN. Untuk membiayai defisir, Jalan plimas yang paling mudah dilabil adalah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), serra pinjaman bilateral

Idealnya, penierintah daerah herus memiliki inovasi dan mencari jalan alternatif menderong peningkatan ekonomi yang nancinya akan memberikan efek terhadap peningkatan p e n d a p a t a n

masyarakat, dengan sendirinya memiliki korelasi terhadap pendapatan daerah. Setiap tahun upaya memperkuat desentralisasi fiskal dan semangat membangun daerah sudah malda terasa dengan meningkatnya dana trasnfer serta tambahan Dana Desa. RAPBN 2016 tercermin belanja Kementerian/ Lembaga secara proporsi makin menurun dan transfer ke daerah makin meningkat, terutama transfer spesifik (DAK), dimana DAK tidak lagi dikompliasi dalam satu paket, akan tetapi dibelah menjadi DAK fisik dan DAK non fisik.

Keingin baik ini sejatinya oleh pemerintah daerah memanfaatkan anggaran secara bijak, terutama Dana Desa, Amanat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat desa, tentu ini memiliki keterkaitan kuat untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa sekaligus menggiring mereka keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Hal ini tercermin, sekalipun angka pertumbuhan ekonomi Gorontalo meningkat di semua kabupaten/kota akan tetapi dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan Justru kecil. Jika dilihat trendnya, angka kemiskinan menurun tapi belakangan makin melambat. Tahun 2014 angka kemiskinan Gorontalo mencapai 17,41 persen per bulan maret 2015 angka kemiskinan meningkat menjadi 18,32 persen. Kenaikan angka kemiskinan di Gorontalo justru lebih besar di daerah perdesaan, indeks kedalam kemiskinan mencapai 4 basis poin dan perkotaan 1,09 poin. Data ini menunjukkan sekaligus dapat dijadikan instrumentasi untuk memanfaatkan Dana Desa secara

kemiskinan perdesaan meningkat karena dipicu berbagai faktor, mayoritas masyarakat perdesaan bekerja di sektor pertanian. Fada umumnya pekerja di sektor pertanian sudah overioadi sementara luas lahan cenderung makin menurun karena adanya alihfungsi lahan-

Oleh : M, Amier Arham

Akibamya produktifitas pekerja di sektor pertanian menurun, selain itu pekerja di

sektor pertanian merupakan petani penggarap. Belum lagi sektor pertanian sangat sensitif terhadap perubahan iklim dan cuaca yang setiap tahun pasti akan dihadapi. Pekerja di sektor ertanian umumnya mereka termasuk kategori setengah pengangguran, pada musim tanaman mereka akan bekerja penuh, pada saat musim kering akan menganggur. Pada masa musim paceklik pekerja di sektor pertanian tidak memiliki penghasilan, penjualan hasil panen habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya stok makanan makin menipis, akhirnya mereka kembali membeli bahan makanan, hal ini bisa dilihat dari sumber inflasi perdesaan, sumber inflasi terbesar justru dari bahan

Pemanfaatan Dana Desa sekalipun sudah diatur mekanisme pembagian peruntukannya, dimana 30 persen untuk belanja kegiatan administrasi dan 70 persen untuk pemberdayaan. Tetapi dalam implementasinya bisa saia melenceng dengan porsiyang tidak lagi sesuai mekanisme pengaturan dalam pengalokasian. Pemanfaatan Dana Desa lebih dari separuh untuk pemberdayaan, lewat kegiatan pemberdayaan menjadi jalan lain untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Maka dari itu, kegiatan pemberdayaan sejatinya dimanfaatkan pada saat musim tanam sudah lewat, yakni pada musim pakceklik dengan tujuan agar para petani tidak menganggur. Alokasi Dana Desa dipastikan setiap tahunnya akan bertambah, baik yang bersumber dari APBN, maupun yang berasal dari APBD provinsi dan kabupaten, ditambah dengan Pendapatan Asli Desa. Dalam konteks itu diperlukan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan identifikasi potensi setiap desa. Hasil identifikasi potensi desa dijadikan acuan dasar untuk menyusun perencanaan program, sebab ada indikasi lemahnya sistem perencansan dan rancangan program karena dokumen perencanaan pembangunan desa dibuat sekedar emenuhan syarat pencairan Dana Desa, Sehingga pada tuhap

implementasi program pemantaaran Dana Desa akan menemsi banyak kedala.

Realisasi pemanfaatan Dana Desa secara umum belum berjalan optima) untuk tahap kedua, oleh karenanya tahun anggaran 2016 selayaknya perencanaan penggunaan Dana Desa sudah didesain secara optimal. Selain itu Dana Desa dimungkinkan untuk membuka kegiatan usaha produktif, pada hemat saya usaha produktif sebalknya di tujukan kepada ibu-ibu rumah tangga. Karena sebagian besar kaum perempuan perdesaan tidak memiliki pekerjaan tetap. Dengan demikian kaum perempuan perdesaan memiliki pendapatan tambahan, selain dari penghasilan suaminya.

Tahun anggaran 2015, Alokasi Dana Desayang diterima oleh lima kabupaten yang ada di Gorontalo mencapai Rp. 51,574 miliar dan pada tahun 2016 diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat, belum lagi anggaran tambahan yang akan didapatkan 10 persen yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jika Dana Desa ini dimanfaatkan secara optimal, serta dapat dibelanjakan tepat pada waktunya dipastikan akan menggerakkan perekonomian desa. Tetapi terpenting dari itu semua, pemanfaatan Dana Desa harus dimonitoring dengan ketat, dengan mempersempit ruang negosiasi antara aparat desa dengan pendamping. Juga perlu diwaspadai agar pengelolaan Dana Desa bukan hanya yang berada di episentrum penguasa desa,

Pengalaman menunjukkan, selama bertahun-tahun bantuan beras miskin (raskin) dan penyaluran kompensasi lainnya seringkali lebih diprioritaskan keluarga aparatur desa, sekalipun ada diantara mereka berkemampuan secara fisik dan ekonomi. Oleh karenanya, seluruh masyarakat desa wajib digerakkan untuk diberdayakan dalam memanfaatkan Dana Desa, dengan langkah itu Dana Desa akan menjadi solusi untuk mengatasi komiskinan di perdesaan Provinsi Gorontalo (****)

Keau Lembaga Pengkojiun, Penelitian Ekonomi dan Bisais FEB UNG, Ekonom Kemewerian Kewangan EU

Kapasitas Fiskal Rendah dan Kemiskinan Tinggi; Titik Lemah Ekonomi Kabupaten Gorontalo

ERHELATAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gorontalo merupakan momentum yang baik untuk membedah kondisi riil dan kebutuhan daerah ini unnak lima tahun kedepan Membedahkondisi riil dan kebutuhan dasar tidak dimaksudkan untuk melihat kekurangan dan kelemahan pemerintahan sebelumnya, tetapi ia dijadikan pijakan untuk misi bagi para kontestan Pilkada. Sehingga visl dan misi yang dibuat memiliki pijakan yang kokoh, tidak mengawan, karena seringkali visi seorang calon kepala daerah sekedar mengadopsi dan terkesan copas-dari daerah lainnya yang belum tentu sesuai kebutuhan dan kondisi daerah (Kabupaten Gorontalo).

Dari lima pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo saya sudah membaca secara umum visi. misi dan program mereka, memiliki semangat dan keyakinan yang kuat untuk memajukan Kabupaten Gorontalo, Namun dari lima pasangan calon itu ada yang membuat visi dan misi sekedarnya" dan adapula yang menyusun visi dan misi landasannya sangat filosofis, jika tidak ingin dikesankan "utopis" (sangat ideal tapi sulit diwujudkan). Pijakan visi dan misi kelima pasangan calon kepala daerah sangat general, belum ada yang membedah secara kedalam problem utama yang dihadapi oleh Kabupaten Gorontalo saat ini, terutama dari sisi pembangunan ekonomi.

Menurut hemat sava saat ini titik lemah yang dihadap! Gorontalo adalah isu kemiskinan dan kemampuan fiskal yang rendah. Kabupaten Gorontalo jumlah penduduknya terbesar di Provinsi Gorontalo, karena itu angka kemiskinan juga tinggi. Jika mengacu pada data BPS, pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Gorontalo rumbuh di atas rata-rata 7 %, nkuran ini bisa dikategorikan tingkat pertumbuhan yang tinggi, hanya saja efeknya terhadap pengurangan angka kemiskinan relatif kecil, bahkan ta bersifat paradoksal. Secara teoritis pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dengan kemiskinan, hal ini berarti setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi akan mereduksi kemiskinan, namun kondisinya di Kabupaten Gorontalo ekonominya tumbuh signifikan, angka kemiskinanpun dua tahun terakhir mengalami kenaikan. Saat ini angka kemiskinan Kabupaten Gorontalo berada dikisaran 21 %, dan yang terbanyak orang miskin berada di wilayah perdesaan.

Sementara pada saat yang bersamaan sektor pertanian merupakan kontributor utama pembentukan PDRB Kabupaten Goronialo sekitar 23 % setelah sektor jasa-jasa, namun sektor jasa-jasa penggabungan dari berbtagai sektor jasa swasta dan pemerintah. Menurut hemat saya kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan perbaikan, bukan tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang dikejar, sebab pertumbuhan ekonomi bisa saja tinggi tetapi kurang berkualitas. Hal ini terjadi saat sekarang, karéna sumber pertumbuhan yang kuat berasal dari sektor non produktif, kalaupun sektor pertanian tetap diandalkan, polanya perlu dirubah. Misalnya komoditi jagung yang menjadi "brand Gorontalo selama ini hanya dijual daiam bentuk pipilan, mata rantai kegiaran di komoditi jagung cukup pendek (petani, pedagang dan eksportir).

Pada unumnya produk pertanian yang menjadi price setter (pengatur harga) adalah pedagang/ eksportir, sementara petani

Oleh Amir Arham

(produsen) berposisi sebagai price acker (menerima harga pasac). Dengan sendirinya petani (produsen) memiliki daya tawar yang rendah, apalagi tidak ada alternatif pilihan penjualan jagung. Lain halnya produk industri olahan, dimana produsen menjadi price setter, dan pembeli menjadi price taker, karena itu produk pertanian yang menjadi penopang ekonomi masyarakat perlu dilakukan hilirisasi (pengolahan), meskipun sifatnya sederhana. Salah satu peluang itu yang dapat dikembangkan adalah pakan ternak yang kebutuhannya masih sangat tinggi dalam

Meskipun ini bukan perkara gampang, sebab industri pakan ternak saat ini cenderung monopolis yang dilakukan oleh Charoen Pokpan. Industri yang berposisi sebagai monopolis akan mematikan industriindustri kecil, terapi tidak ada salahnya dicoba. Namun perusahaan monopolis dalam jangka panjang tentu saja tidak selamanya akan dominan, karena itu dibutuhkan aliansi strategis antara pelaku industri kecil dan besar. Terpenting darl itu produk pertanian perlu dilakukan pengolahan untuk mencipatakan nilai tambah, serta memberikan dampak kegiatan ekonomi lainnya.

Upaya lain yang perlu dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian dan memberikan rembesan terhadap pengentasan kemiskinan di perdesaan adalah memberdayakan para petani, serta adanya diversifikasi kegiatan bagi para petani selain percocok tanam. Secara umum petani termasuk kategori setengah pengangguran, pada mushn hujan (musim tanam) mereka bekerja, dan tiba pada musim pakceklik

sebagian diantara mereka

menganggur. Waktu musim pakceklik itulah yang harus diintervensi pemerintah memberdayakan mereka diluar kegiatan bertani, schingga mereka tetap berproduksi, ada penghasilan tambahan sebelum masa bercocok tanam tiba. Upaya ini salah satu cara untuk mengoptimalkan kegiatan produksi petani sehingga tidak menjadi setengah pengangguran, dengan sendirinya minimal mereka yang tadinya berada di atas garis kemiskinan tidak jatuh menjadi miskin.

Sementara itu, idealnya pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan disokong oleh variabel investasi swasta. Pada galibnya investasi swasta ke wilayah timur, termasukke Gorontalo sangat rendah, bukan karena ketidakmampuan pemerintah daerah menggaet investor akan tetapi tidak terlepas dari faktor efisiensi, dimana pasar potensial masih tetap didominasi Pulau Jawa. Sebabnya, penduduk Indonesia lebih dari separuh berada di Pulau Jawa, dengan sendirinya pelaku usaha tetap akan memilih Jawa sebagai lokasi produksi untuk mendekatkan ke tujuan pasar. Dalam kondisi seperti itu, satu-satunya yang bisa diharap pembentukan modal dan belanja pemerintah (investasi pemerintah). Namun ini uga menjadi problem besar bagi Kabupaten Gozontalo, postur anggaran yang nilainya di atas Rp. 1 triliun kurang menyisakan ruang fiskal yang luas untuk membuat program inovasi bagi pemerintah daerah, terutama menderong sektor-sektor produktif untuk menurunkan angka kendskinan. Lebih dari 63 % anggaran yang tersedia untuk kebutahan belanja pegawai, sementara belanja publik kecil. Sumber pendapatannya pun relatif kecil, sehingga rasio penerimaan sendiri

dengan Dana Perimbangan

begitu timpang. Dari enam kabupaten/kota daerah otonom di Provinsi Gorontalo, kabupaten ini paling rendah hadels kapasitas fiskalnya religir 0,3 hampir mendekatlangin 0 (nol).

Bacaan saya dari visi dan misi para pasangan calon Kepala Daerah belum ada yang konsentrasi untuk melakukan budget reform. yang ada adalah upaya memaksimalkan APBD untuk lebih berpihak kepada rakyat. Pernyataan ini terkesan klise, kurang konkrit, bahkan yang saya tangkap ada keragu-raguan untuk melakukan budget reform karena pasti akan terkait dengan reformasi birokrasi yang identik dengan restrukturisasi kelembagaan. Dengan sendirinya akan ada perampingan postur birokrasi, konsekuensinya ada banyak kotak jabatan terhapus, berarti ada yang kehilangan posisi. Bagi calon kepala daerah cara ini akan memberikan konsekuensi politik, bisa Jadi para pasangan calon kepala daerah tidak berani memilih langkah ini karena ada banyak orang kehilangan posisi. Mungkin itulah dalam benak mereka para calon kepala daerah, ini dugaan saya. Orang lain tentu saja memiliki persepsi yang berbeda dengan saya, tetapi itu menjadi agenda penting yang harus dilakukan oleh Bupati/ Wakil Bupati Gorontalo kedepan melakukan budget reform meningkatkan pembiayaan untuk belanja publik, dengan konsisten mengurangi belanja pegawai. Paling tidak itulah salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo kedepan untuk mereduksi angka kemiskinan sekaligus memperkuat fiskal daerah.

> Pengajur Fakaltas Ekonomi UNG, Ekonom Kementerian Kenangan

Selasa, 2 Februari 2016

Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo Turun, Angka Kemiskinan Stagnan

IKA melihat grafik pertumbuhan ekonomi Gorontalo empat tahun terakhir terlihat makin melandal. entah kebetuian atau tidak start point grafik landainya mulai tahun 2012 terus menurun hingga tahun 2015. Range waktu tersebut merupakan masa kepemimpinan Rusli Habibie - Idris Rahim (dengan menggunakan tagline NKRI), bila membaca secara sekilas wajar banyak pihak memiliki konkiusi NKRI "gagal" memajukan perekonomian Gorontalo. Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai ukuran tunggal menilai kemajuan ekonoroi suatu wilayah, ada banyak variabel lain yang dapat menjadi instrumen penilaian. Sebab pada kenyataannya seringkali dijumpai pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi masalah-masalah penyakit ekonomi makro lainnya tidak kunjung membaik, seperti kemiskinan tetap tinggi, pengangguran meningkat, ketimpangan makin melebar.

Kondisi perekonomian Gorontalo cenderung terjadi paradoks sehingga pertumbuhan agak sulit dijadikan ukuran perkembangan ekonomi, korelasi antara pertumbuhan dengan kemiskinan serta pengangguran berbeda sama sekali dengan teori ekonomi. Bila dicermati data historis pertumbuhan ekonomi, sekalipun tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Gorontalo hampir mencapai 8 % angka kemiskinan masih berada pada level 17,22 % sementara tahun 2014 pertumbuhan ekonomi turun 7,29 % angka kemiskinan meningkat tipis saja sebesar 17.41 %, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi melemah cukup tajam sebesar 5,5 % kemiskinan mengalami peningkatan, tetapi perubahan presentasenva tidak terlalu besar (18,16 %). Dengan demikian dapat diasumsikan unggi rendahnya pertumbuhan ekonomi angka kemiskinan cenderung tetap stagnan, pada saat yang bersamaan angka pengangguran rendah hanya sebesar 4,65 %, Jika angke pengangguran rendah semestinya angka kemiskinan pun rendah, yang terjadi di Gorontalo kebalikannya. Gejala ini terdapat indikasi banyaknya kelompok setengah pengangguran, meskipun statusnya bekerja tetapi hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Gorontalo terutama sepanjang tahun 2015 dianggap sebagai kelemahan "Femerintahan NKRI" tapi tentu saja "Pemerintahan NKRI" memiliki alibi bahwa pelemaban pertumbuhan ekonomi merupakan gejala umum secara nasional. Hanya saja tidak sepenahnya tepat jika itu menjadi alasan, sebab provinsi tetangga kita (Sulawesi Tengah) pertengahan tahun 2015 tumbuh signitikan 15,7 %, Sulawesi

Barat tumbuh sebesar 8,4 %, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara masing tumbuh di atas 7 %. Dibandingkan secaranasional pertumbuhan

ekonomi Gorontalo lebih baik, tetapi sama sekali tidak dapat dijadikan rujukan pembanding, sebab sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara sektoral masih di dominasi sektor primer (pertanian) sekitar 37 %, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional secara sektoral penopang utamanya adalah sektor industri pengolahan. Kinerja ekspor nasional turun drastis menjadi salah satu kendala serius untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sementara Gorontalo kinerja ekspornya membaik.

Teori "konvensional" ekonomi terbilang tidak dapat menjawab paradoks ekonomi Gorontalo, dimana semestinya kinerja ekspor membaik, pertumbuhan ekonomi tinggi, pengangguran rendah angka kemiskinan akan menurun signifikan. Yang terjadi di Gerontalo tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak ada signifikansinya terhadap perubahan angka kemiskinan. Jika membandingkan kemiskinan perdesaan dan perkotaan, kemiskinan perdesaan cukup tinggi mencapai 86,92 % dan kemiskinan perkotaan jauh lebih rendah 13,08 %. Sementara jika dilihat dari sektor utama lapangan pekerjaan di Gorontalo sekitar 35 % penduduk berusia di atas 15 tahun bekerja di sektor pertanian, dan masyarakat pedesaan hampir seluruhnya bekerja di sektor pertanian.

Melihat kenyataan itu, tidak dapat dikesampingkan perlunya mendorong percepatan pergeseran struktur ekonomi. Chenery dan Syrquin pada tahun 1975 sudah mengingatkan, teori ini memiliki relevansi yang sangat kuat untuk menjawab tantangan perekonomian Gorontalo kedepan. Kedua ilmuan ini memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di suatu negara wilayah) yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan, Dalam proses pembangunan ekonomi yang berlangsung, transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Secara umum proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: 1) merosomya pangsa sektor primer (perianiau), 2) meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan pangsa sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan

Oleh: M. Amier Arham meningkat sejalah dengan pertumbuhan ekonomi. Urgensi Perbaikan Kualitas Belanja Pemerintah Upaya lain yang perlu dilakukan

oleh pemerintah daerah Gorontalo, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sustaniable dengan memperbaiki struktur anggaran. Perbaikan kualitas belanja pemerintah menjadi pilihan di tengah masih terbatasnya investasi swasta, dimana investasi merupakan 'engine of growth" sekaligus pencipta lapangan kerja yang akan menekan angka kemiskinan Sekalipun terlihat angka pengangguran di Gorontalo cukup rendah tetapi sebagian diantara pekerja itu merupakan setengah pengangguran. Mereka ini sangat sensitif terhadap perubahan garis kemiskinan, sedikit saja inflasi naik yang disebabkan kelompok makanan maka akan terjerumus ke hawah garis kemiskinan. Kualitas belanja pemerintah pada tingkat provinsi porsi anggaran belanja publik sudah cukup tinggi tetapi kabupaten/kota belanja pegawal masih terlalu mendominasi sehingga ruang fiskal sangat terbatas untuk membiayai program strategis yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain sekalipun kelihatan porsi belanja publik dalam APBD provinsi makin besar, penting diperhatikan jangan sampal pembiayaan sektor publik kurang memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Spending review menjadi penting guna memastikan memperbesar belanja pada sektor-sektor potensial dan memiliki dampak ekonomi yang luas, seperti sektor pariwisata. Sektor ini termasuk pada kelompok sektor tersier, pada umumnya daerah yang mengandalkan sektor tersier daya tahan ekonominya cukup kuat, Sepanjang tahun 2015, Pulau Sumatera dan Kalimantan pertumbuhan ekonomi kedua pulau tersebut hanya tumbuh di bawah 5 %, bahkan di penghujung tahun 2015 Pulau Kalimantan pertumbuhan ekonominya mengalami konjuntur (minus). Kedua pulau tersebut selama puluhan tahun bergantung pada sektor komoditi (primer), lain halnya daerah destinasi utama pariwisata, seperti Pulau Bali dan Nusa Tenggaran pertumbuhan ekonomi kedua pulau tersebut mengalami peak (tumbuh di atas 10 %).

Sektor pariwisata di Gorontale masih terbilang sangat minim perhatian dari segi pembiayaan, sektor pariwisata menurut urusan pembiayaannya dalam APBD provinsi termasuk rendah hanya sekitar Rp. 4 miliar, sedangkan kabupaten/kabupaten yang memiliki potensi pariwisata Olele (Bone Bolange menganggarkan sekirar Rp. 3

miliur) dun Saronde (Gorontalo Utara) dari data kecangan daerah yang tersedia tidak dianggarlan. Hanya Boalemo memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sektor pariwisata di atas Rp. 15 miliar. Potensi objek wisata seperti Olele dan Saronde tidak dapat dimungkiri sarana dan infastruktur masih jauh dari memadai sebagai tujuan wisata dunia. Padahal objek wisata ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan wisata laut Wakatobi, Togean, Takaboneraka dan Bunaken darī segi aksesībilitas, sementara Olele dan Saronde cukup dekat. Sektor tersier (pariwisata) merupakan industri labor Intensive, membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, sebab penerimaan pajak yang bersumber dari industri pariwisata tidak dibagihasilkan. Selama bertahuntahun pemerintah terlalu memperkuat pembiayaan di sektor primer (pertanian) bahkan biaya subsidi tanaman jagung sudah mencapai Rp. 41 miliar. Pada kenyataannya memang jagung menjadi komoditi ekspor utama Gorontalo mencapai 89 %, terutama ekspor ke Filipina. Namun sektor ini nilai tambahnya minim, dampak efek ekonominya pun terbilang kecil, pada akhirnya petani jagung pada posisi yang lemah menerima harga (price taker) dari harga yang ditentukan oleh pedagang dan eksportir. Jadi sekalipun menjadi komoditi ekspor utama, produsen (petani) kehidupannya tidak menjadi lebih baik dan itu tergambar angka kemiskinan perdesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemiskinan perkotaan. Lemahnya posizi petani sebagai price taker karena mereka tidak memiliki pilihan alternatif tujuan pasar dan penjualan, akan lain halnya jika sekiranya industri pengolahan jagung sudah terbangun, petani memiliki kekuatan untuk ikut menentukan harga (price setter). Tulisan ini merupakan hasil refleksi penulis yang telah disampaikan daiam forum evaluasi empat tuhun kepemimpinan "Pemerintahan NKRI" tidak dimaksudkan menjadikan resep tunggal untuk memperbaiki struktur ekonomi Gorontalo sekaligus menurunkan angka kemiskinan, tentu saja ada banyak pilihan resep yang dapat diracik oleh pemerintah. Untuk memperoleh ramuan yang manjur "Pamerintahan NKRI" sebaiknya seringsering mengajak "ahli peracik" di bidangnya berdiskusi seperti yang kerap dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, bukan hanya dikelilingi oleh para politisi yang menjelma menjadi ahli segalanya.**

Pengajar Fakultus Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

Selasa 16 Februari 2016

Tantangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Fiskal 2016

EPANJANG rahun 2015 perekonomian nasional menghadapi banyak tantangan dampaknya output metemah. Fenomena pelemahan ekonomi bukan hanya dirasakan oleh Indonesia. Secara global ekonomi dunia pun kondisinya serupa, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,4 % diakhir tahun 2015 turun menjadi 3,1 %. China sebagai salah satu motor ekonomi dunia vang masuk pada kelompok emerging market turut merasakan pelemahan dari 7.3 tahun 2014 turun menjadi 6.8 % di tahun 2015. Melemahnya perekonomian China berdampak luas ke berbagai negara termasuk Indonesia, sebab China salah satu negara mitra utama Indonesia dalam perdagangan internasional. Menghadapi pelemahan ekonomi, China mengambil langkah ekstrem dengan melakukan devaluasi mata Yuan yang mendorong terjadinya depreslasi mata uang regional ter-

masuk rupiah. Tabun 2015 diprediksi perekonomian Indonesia akan lebih baik, sekalipun tantangan global yang dihadapi masih berat. Selain pemulihan ekonomi dunia masih berjalan lambat yang diakibatkan oleh lima faktor. 1) Negara maju belum mencapai full employment. 2) Harga komoditas yang rendah berdampak pada negaranegara yang menggantungkan pasar ekspornya pada komoditas. 3) Apresiasi mata uang Dolar AS berdampak neraca debitur dalam mata uang dolar, 4) Perekonomian Tiongkok yang terus melambat, dan 5) Pertumbuhan yang stagnan di Eropa dan Jepang. Lima faktor ini tentu akan menjadi penghambat kinerja ekspor Indonesia, dengan sendirinya pertumbuhan ekspor cenderung berlanjut pelemahannya seperti pada quartai ketiga 2015 kinerja ekspor -6,2 %. Tidak ada jalan lain, konsumsi domestik mesti diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, sebab ekspor masih cultup lemah karena permintaan negare mitra dagang masih relatif lemah, khususnya ontuk produk-

Cara lain yang harus ditempuh pemerintah, balk pusat maupun daerah dengan mempercepat penyerapan anggaran. Efektifitas penyerapan anggaran diperiukan ditengah lesunya kinerja ekspor

produk komediti primer.

dan investasi disektor rill rendah, secara nasional tergambar dengan Jelas di quartal pertama dan quartai

selanjutnya ada trend peningkatan pertumbuhan, demikian juga di daerah. Bagi daerah yang size ekonominya masih kecil, serta investasi swasta masih terbatas, realisasi belanja APBD maupun APBN pada quartal pertama digenjet dengan cepat. Bagi Gorontalo sendiri, realisasi APBD provinsi penyerapannya termasuk tinggi di quartal kedua hingga akhir tahun 2015, tapi problemnya ada di kabupaten/kota yang masih rendah. Sementara penyerapan APBN di Gorontalo cenderung melambat dan realisasinya hingga akhir tahun di bawah 75 % karena diperhadapkan berbagai hambatan teknis yang menjadi bagian tanggungjawab pemerintah daerah, seperti pembebasan lahan.

Belajar dari pengalaman tantangan perekonomian 2015, pemerintah bertekad untuk mempercepat realisasi penyerapan APBN dan APBD di tahun 2015 untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata dan berkesinambungan. Sekalipun di tahun ini diperhadapkan pada kendala fiskal, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Kendala penerimaan anggaran setidaknya ada tiga yang dihadapi, 1) sengat bergantung pada sektor komodfti. 2) rasio pajak yang rendah, 3) kepatuhan pajak yang rendah. Sementara kendala pengeluaran diperhadapkan pada kenyataan dimana 1) belanja konsumtif masih terlalu tinggi sedangkan belanja produktif kecil. 2) belanja subsidi lebih besar dibandingkan belanja infrastruktur, 3) subsidi banyak yang kurang tepat sasaran. Kendala lni merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra serta dukungan politik anggaran yang memadai dari berhagai pihak, terutama legislatif. Secara kelembagaan dukungan politik dari legislatif sangat diperlukan, riak-riak politik yang tidak produktif sedapat mungkin diredam di kalangan internal legslatif sendiri untuk menderong perbaikan kualitas anggaran dan agenda pembangunan ekonomi.

Arah Kebijakan Fiskal 2016 Setiap tahun pemerintah memiliki "tema sentral" kebijakan fiskal

Oleh: Muh. Amier Arham yang mengacu pada RPJMNas, untuk tabun ini tema fiskal adalah --- Penguatan Pengelolaan Fiskal

dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas---. Ada tiga strategi yang ditempuh untuk mencapai arah kebijakan fiskal, diantaranya: Stimulasi, Daya Tahan dan Sustanibilitas, Selain itu langkahlangkah strategis untuk mendukung penyehatan fiskal disiapkan melalui a) Optimalisasi pendapatan, melalui peningkatan tax ratio, perluasan basis pajak dan penindakan. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, setiap tahun realisasi penerimaan dari pos ini masih sulit mencapai target. Apalagi tax ratio juga terbilang masih rendah di bandingkan dengan negara-negara lain, padahal potensi pajak masih sangat besar yang belum tergali serta wajib pajak yang terdaftar masih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sudah memiliki kewajiban membayar pajak. Pemerintah tidak saja memikirkan perlunya peningkatan penerimaan dari pajak, juga tentu penting mempertimbangkan insentif fiskal sebagai upaya mendorong peningkatan investasi. Perluasan basis pajak dibarengi dengan penegakan hukum di bidang perpajakan di satu sisi namun di lain sisi pemberian insentif fiskal menjadi stimulan bagi dunia usaha untuk menggerakkan perekonomian. b) Penguatan kualitas belanja pemerintah, ini penting dilakukan bukan hanya pemerintah pusat juga bagi pemerintah daerah sebab mandatory spending makin menguat, dalam APBN 2016 tidak lagi dikenal ada dana dekonsentrasi tapi semua sudah mengarah ke dana desentralisasi dimana kewenangan spending menjadi kewenangan daerah. Pendanaan kegiatan produktif dikedepankan, dengan prinsip setian repiah yang dikeluarkan memiliki efek terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bersamaan dengan itu tentu dibutuhkan performa anggaran yang lebih berpihak pada publik dengan memperbaiki sasaran alokasi subsidi. Pengalihan alokasi anggaran subsidi terutama energi yang kemudian diperkuat pada pembiayaan infrasturuktur di luar Pulau lawa guna menciptakan

pusat-pusat pertumbuhan haru sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kesenjangan wilayah. Target lain yang menjadi tokus perhatian pemerintah adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan mempertahankan anggaran pendidikan sebesar 20 % dan menaikkan anggaran kesehatan sebesar 5 % (Rp. 104,8 triliun). Tentu saja target alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan bukan sekedar memenuhi prosentase, terpenting alokasi anggaran tersebut dapat mencapai target peningkatan IPM menjadi 70,1 sebagalmana amanah UU APBN 2016. c) Efisiensi pembiayaan, konsekuensi dari rezim anggaran defisit ditambah target penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai dipastikan defisit anggaran selalu terjadi setiap tahun. Sekalipun sesungguhnya anggaran defisit merupakan by design pemerintah, namun diperlukan pengendalian karena ambang batas dari defisit anggaran adalah 3 % dari PDB. Dalam APBN 2016 target defisit anggaran sebesar 2,5 % (Rp. 273 triliun) ada kenaikan dibandingkan defisit tahun 2015 sebesar Rp. 222 triliun. Konsekuensi anggaran defisit dimana menutupinya cara praktis yang ditempuh pemerintah bersumber dari utang (debt). Hal ini pasti akan terjadi polemik dan sorotan bagi pemerintah karena utang terus bertambah.

Walaupun sesungguhnya utang tidak boleh dihitung dari nilai nominal semata, apalagi membandingkan utang masa lalu dengan rezim sekarang. Nilai nominal utang sekarang memang cenderung besar dibandingkan pada masa lalu karena perbedaan nilai tukar rupiah pada zaman orde baru 1 US\$ ekuivalen dengan Rp. 2,500 sementara sast ini nilai tukar rupian terhadap dolar sebesar Rp. 13,500, selain itu perlu dilihat debt ratio masih dalam ambang batas aman di bawah 30 %, batas ditoleransi debt ratio sebesar 60 % dari PDB. Terpenting dari itu, utang pemanfaataanya untuk kegiatan produktif bukan untuk pembiayaan bantuan sosial dan kegiatan rutin sebagaimana yang dialami oleh Yunani, akibatnya negeri dewa ini

Pengajar Fakultas Ekonomi UNG, Ekonom Kementerian Keuangan

Pajak Untuk Kesejahteraan

Teks Muh. Amier Arham, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo



ajak merupakan salah satu instrumen pokok kebijakan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk mengadakan barang publik yang akan dimanfaatkan oleh rakyat. Devereux (1996) mengemukakan bahwa pajak merupakan instrumen untuk memberikan kepastian berjalannya mekanisme fungsi dasar pemerintah (alokatif, distributif, dan stabilitatif). Di samping itu. secara politik pajak dapat dijadikan gambaran demokratis atau tidaknya suatu negara. Melalui mekanisme pengelolaan pajak, maka akan terlihat hubungan pemerintah pusat dan daerah yang diikuti dengan pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam hal penerimaan.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara juga dapat dijadikan instrumen dalam memberikan insentif dan disinsentif untuk kegiatan ekonomi. penerapannya sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Jika perekonomian dalam kondisi melemah pemberian insentif menjadi jalan yang terbaik, sebaliknya jika mekanisme pasar tidak jalan, terjadi gangguan ekonomi disinsentif adalah pilihannya. Indonesia sendiri, pajak menjadi sumber penerimaan utama rata-rata mencapai 75 persen dari total penerimaan negara. Kendalanya, hampir setiap tahun realisasi target penerimaan pajak tidak terlalu optimal, tentu akan berimplikasi terhadap pengadaan barang publik. Sebelum dilakukan reformasi birokrasi lembaga perpajakan, faktor internal menjadi masalah yang cukup pelit. Perilaku moral hazard pengelola pajak begitu tinggi, penerapan good governance masih sangat rendah, karena itu banyak ditemui penyimpangan

penerimaan pajak.

Setelah dilakukan tax reform dan modernisasi sistem perpajakan serta diikuti perbaikan remunerasi pegawai pajak, setidaknya tiga indikator penting yang terbangun. Pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan. Kedua, tingginya kepercayaan pada administrasi pelayanan pajak. Ketiga, intergritas tinggi dan produktivitas aparatur pajak makin membaik. Sekalipun tidak dapat disangkal masih ada yang "bermain" namun jumlahnya makin sedikit. Dengan demikian pajak harus menciptakan kesejahteraan umum, mendorong terjadinya pemerataan ekonomi, serta membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas. Pajak tidak bisa dipahami sebagai sebuah kewajiban yang memberatkan, sebab teori mengemukakan pajak menciptakan efek kenaikan harga dan menurunkan pendapatan riil.

Dengan mengalokasikan pajak secara optimal untuk pengadaan barang publik, diharapkan kepatuhan wajib pajak makin terbangun. Hanya saja jika dilihat dalam realitasnya, kontribusi pajak terhadap total penerimaan negara terus meningkat. Namun Wajib Pajak (WP) masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk. Tahun fiskal 2014 tercatat WP hanya sebesar 30,5 juta, belum setengahnya dari jumlah penduduk saat ini (230 juta jiwa). Ada tiga penyebab terjadinya tax gap. Pertama, tax gap yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar dan wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Kedua, pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya. Ketiga, potensi pajak yang hilang akibat Wajib Pajak menyampaikan SPT, tetapi tidak

membayar pajak yang seharusnya terutang (Warta Ekonomi, No. 6, 2015).

Selain itu, penggalian potensi pajak secara sektoral juga penting dilakukan. Hal ini dikarenakan beberapa sektor seperti underground economy belum tersentuh pajak. Sejalan dengan penyempurnaan aturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance), diperkirakan sekitar 70 juta orang pribadi memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi jumlah yang mendaftarkan diri hanya sekitar 25 juta dan melaporkan SPT hanya sekitar 9 juta orang. Tidak jauh berbeda dengan pajak badan, terdaftar sekitar 5 juta lebih badan usaha tetapi yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hanya sekitar 2 juta dan yang membayar pajaknya tidak sampai setengahnya. Tidak mengherankan tax ratio Indonesia cukup rendah. Belum lagi masih banyak penyimpangan yang ditengarai dilakukan oleh pelaku usaha sektor pertambangan. Kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar Rp 2000 triliun potensi pajak hilang di sektor pertambangan.

Dibutuhkan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, serta menciptakan kesadaran bagi WP untuk memenuhi kewajibannya. Salah satu kebijakan yang berjalan saat ini, yakni sunset policy. Jika peluang ini tidak dimanfaatkan oleh WP, diperlukan cara lain selain menerapkan law enforcement bagi penunggak pajak. Terutama bagi WP perusahaan dengan menawarkan membangun infrastruktur dalam rangka memenuhi kewajiban pajak mereka. Toh tujuan akhir dari penggunaan pajak tidak lain untuk membangun infrastruktur (pengadaan barang publik).

MEDIAKEUANGAN

Jadikan Desa Sebagai Pusat Pembangunan Ekonomi Gorontalo Kedepan

IKA mengukur indikatorindikator makro ekonomi Gorontalo secara runtun waktu sejak berdiri menadi provinsi terlihat cukup mengalami kemajuan. Ratarata pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 7 persen setiap tahunnya, sekalipun di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 6,23 persen, angka kemiskinan menurun drastis sejak tahun 2001. Demikian halnya angka pengangguran terbilang rendah dibandingkan provinsi yang sudah lebih dulu berdiri. Tapi dibalik keberhasilan itu membutuhkan kecermatan dari pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/ kota) untuk membacanya. Jika tidak dicermati dengan baik seolah daerah ini makin maju tapi dibalik itu berbagai --paradoks ekonomi-bermunculan.

Keberhasilan yang dicapai memendam persoalan kronis, tentu saja memerlukan pembenahan secara fundamental. Pembenahannya tidak bisa lewat skenario bussines as usual semata, tetapi dibutuhkan percepatan dan lompatan lewat big push pembangunan. Penurunan angka kemiskinan tidak lagi memiliki korelasi yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, jika diagnostik lebih lanjut melalui data statistik, angka kemiskinan stagnan di angka 17 sampai dengan 18 persen. Regional Sulawesi angka kemiskinan Gorontalo yang tertinggi, dan posisi kelima tertinggi secara nasional (18,16 %), dibawah Papua (28,4 %), Papua Barat (25,75 %), Maluku (22,58) dan NTT (19,36 %). Namun demikian angka pengangguran termasuk rendah di bawah 5 persen. Nalarnya, jika angka kemiskinan tinggi harusnya angka pengangguran tinggi, tapi yang terjadi di Gorontalo kebalikannya.

--Paradoks-- itu muncul karena sebagian angkatan kerja di
Gorontalo termasuk kelompok
setengah pengangguran, artinya sudah bekerja tapi masih
mencari pekerjaan yang lebih
baik. Kelompok ini sangat sensitif berubah posisinya bergeser ke bawah garis kemiskinan
bilamana terjadi kenaikan inflasi lika dipetakan lebih lanjut

umbang sebesar 37,09 persen terhadap pembentukan PDRB Gorontalo. Pekerjaan utama

masyarakat perdesaan bekerja di sektor pertanian. Selain itu, bantuan pemerintah terhadap sektor pertanian setiap tahunnya terus meningkat, bantuan pemberdayaan di perdesaan pun bertambah, baik yang disalurkan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Tetapi kenyataannya orang miskin di desa tidak mengalami penurunan secara signifikan. Ironisnya lagi persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha 34,66 persen bekerja di sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Selain itu jika diukur dari gini rasio, ketimpangan perkotaan di Gorontalo sebesar 0,42 lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan perdesaan (0,37). Asumsinya ketimpangan yang relatif rendah diperdesaan pertanda baik, karena pembagian "kue ekonomi" lebih merata dibandingkan masyarakat perkotaan. Tapi itu juga tidak menjawab persoalan kemiskinan, sebab meningkatnya gini rasio perkotaan Gorontalo diindikasikan karena proses urbanisasi terus berjalan, dan sebagian usia angkatan kerja yang telah menyelesaikan pendidikannya di perkotaan tidak kembali ke daerahnya. Ini diperkuat makin besarnya angka pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan, angka pengangguran terbuka berpendidikan SD cukup rendah, sementara angka pengangguran terbuka berpendidikan sekolah menengah dan tamatan universitas termasuk tinggi. Besarnya angka pengangguran terbuka yang berasal dari tamatan sekolah menengah dan perguruan tinggi dibandingkan dengan lulusan SD karena penyediaan lapangan kerja di Gorontalo sangat friksional sifatnya. Kebutuhan tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan keterampilan dan pendidikan angkatan kerja, apalagi jika dikaitkan sumber pertumbuhan utama kegiatan ekonomi

Oleh: Muh. Amier Arham terutama disumbang dari ekspor komoditi jagung. Total ekspor Gorontalo, jagung mendomina-

si kegiatan ekspor sebesar 85,25 persen tahun 2015. Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap kegiatan perekonomian Gorontalo merupakan berkah tersendiri, namun sekaligus menjadi sumber "kutukan" bagi masyarakat Gorontalo. Saatnya pemerintah tidak lagi hanya berpikir menggarap dengan terus menambah subsidi dan bantuan di sektor hulu (on farm), tetapi hilirisasi tidak dapat dielakkan bagaimana pun caranya. Pemberian subsidi dan bantuan untuk meningkatkan produksi pertanian merupakan solusi yang bersifat "short run" yang memang dibutuhkan saat ini dan masa lalu. Kedepan tentu membutuhkan pergeseran, tugas pemerintah mendrive produk pertanian ke pasar dan pengolahan, disamping mengembangkan sektor-sektor potensi lainnya yang dapat menjadi "engine of growth" bagi perekonomian Gorontalo.

Jadikan Desa Sebagai "Growth Pole"

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan akumulasi dampak dari desain kebijakan pembangunan, penyebab kedua persoalan tersebut sudah teridentifikasi dengan jelas. Karenanya menurut hemat saya desain rencana pembangunan jangka menengah kedepan yang sementara dalam proses pembahasan, pemerintah lebih fokus pembangunan pedesaan. Desa tidak hanya menjadi pusat produksi pertanian, tapi desa dapat menjadi basis produksi industri olahan (agribisnis), dengan kata lain pemerintah provinsi dan kabupaten secara serius mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi komoditi yang dapat menjadi sektor basis, seperti jagung dan kelapa. Kedua komoditi ini merupakan komoditi champion bagi Gorontalo yang berbasis di pedesaan. Jika keduanya di kreasi akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat perdesaan.

Jika mencermati tantangan

san kesamping dan ke bawah, atau spread effect-nya tidak tercipta, justru yang terjadi backwash effect (menarik dan mencuci daerah pinggiran. Growth pole pada prinsipnya tidak terbangun dengan sendirinya, tapi ia harus diciptakan sekalipun tidak semua tempat dan serentak. Dengan menciptakan desa sebagai growth pole tarikan ekonomi ke perkotaan akan berkurang, sekaligus mengurangi beban Kota Gorontalo, sebab luas wilayah Kota Gorontalo sangat terbatas baik yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan industri maupun permukiman.

Desain pembangunan yang bertumpu di desa akan selaras dengan konsep pembangunan secara nasional, membangun dari desa bagian dari -- Nawa Cita--. Memperkuat pembangunan pedesaan dan mengembangkan ekonomi desa berdasarkan desain kebijakan dalam RPJMD kedepan berarti akan menyelesaikan lebih dari separuh masalah ekonomi di Gorontalo. Berkembangnya ekonomi pedesaan akan menahan laju urbanisasi, produktifitas masyarakat meningkat mengakibatkan pendapatan bertambah dengan sendirinya akan mengurangi angka kemiskinan yang memang paling banyak bermukim di pedesaan. Apalagi desa saat ini ketambahan dana, setiap tahunnya akan bertambah. Jika diproporsikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan jumlah penduduk desa Gorontalo akan terjadi kelebihan dana di desa. Merujuk pada road map dana desa tahun 2016 rata-rata setiap desa di Indonesia akan mendapatkan ADD sebesar Rp. 1,115 miliar, tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 1,703 miliar, tahun 2018 sebesar Rp. 2,197 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp. 2,368 miliar. Jika ekonomi perdesaan tumbuh cepat karena fokus pembangunan berada di wilayah itu, serta memanfaatkan dana desa secara efektif untuk pemberdayaan masyarakat desa, maka kedepannya desa akan menjadi daya tarik bagi lulusan sekolah menengah dan universitas. Kota hanya akan menjadi tempat persinggahan, bukan lagi menjadi tumpuan dan